

## **BUPATI KLATEN**

### **PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KLATEN KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020**

*Bismillaahirrohmaanirrohiim.*

*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.*

Yang terhormat,

Saudara Ketua DPRD Kabupaten Klaten;

Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Klaten;

Saudara Kapolres Klaten;

Saudara Komandan Kodim 0723 Klaten;

Saudara Komandan Dodiklatpur;

Saudari Ketua Pengadilan Negeri Klaten;

Saudara Ketua Pengadilan Agama Klaten;

Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten dan Anggota  
DPRD Kabupaten Klaten;

Saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris  
Daerah, Staf Ahli dan Para Pimpinan Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, serta Hadirin  
yang berbahagia.

Pada kesempatan yang baik ini dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati tahun 2020, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala nikmat yang diberikan berupa rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga kita semua masih diberikan kekuatan, ketabahan, keteguhan iman, kesabaran, keikhlasan serta kemampuan untuk menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa, negara serta masyarakat dengan penuh tanggungjawab.

Menyertai rasa syukur tadi, kami memohon semoga Allah Subhanahu Wata'ala agar senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan serta kekuatan pada kita semua sehingga mampu melewati berbagai masalah yang ada dalam menjalankan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya.

Perkenankan pula dalam forum yang terhormat ini, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Klaten yang telah menjalankan peran dan fungsinya, terutama sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Demikian pula kepada segenap Ulama, Rekan-rekan Muspida, para tokoh masyarakat serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten.

**Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan laporan yang harus disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020. Sedangkan RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, yang memuat Visi Pemerintah Kabupaten Klaten yaitu : **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**.

Sedangkan **Misi** yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mencapai Visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

***Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,***

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Klaten mencapai 1.327.577 jiwa. Inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 sebesar 1,38%. Kondisi inflasi sebesar 1,38% ini disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat yang terpengaruh oleh dampak Covid 19. Berdasarkan penggolongannya, inflasi di Kabupaten



Klaten masih terkendali. Hal ini disebabkan oleh terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan berfungsinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020 tingkat inflasi Kabupaten Klaten diambil dari tingkat inflasi Kota Surakarta yaitu sebesar 1,38%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 penghitungan inflasi di Jawa Tengah Tengah hanya dilakukan di 6 (enam) Kabupaten/Kota dengan SBH (Standar Biaya Hidup) yaitu Cilacap, Purwokerto, Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten, Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2016-2019 menunjukkan kinerja positif. Pada tahun 2016 sebesar 5,17%, tahun 2017 sebesar 5,34%, Tahun 2018 sebesar 5,47% dan pada tahun 2019 sebesar 5,5%. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yaitu sebesar -1,18%. Hal ini disebabkan adanya dampak dari wabah pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten yang sebesar -1,18% masih lebih baik jika dibandingkan Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mengalami kontraksi sebesar -2,65% dan Pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi sebesar -2,07%.

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten pada rentang waktu tahun

2016-2019 menunjukkan penurunan angka. Pada tahun 2020 dikarenakan dampak dari wabah Covid-19, persentase kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,61% yaitu dari tahun 2019 sebesar 12,28% naik menjadi 12,89 % pada tahun 2020. Demikian pula dengan jumlah penduduk mengalami kenaikan dari sebesar 144.140 jiwa di tahun 2019 menjadi 151.830 jiwa pada tahun 2020. Namun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan guna menanggulangi peningkatan angka kemiskinan pasca Wabah Covid-19 melalui kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Jaring Pengaman Sosial Stimulus Covid-19 antara lain Kartu Pra-Kerja, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Listrik, Program Keluarga Harapan, dan Program Bantuan Sembako.

Pembangunan manusia di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah, IPM Klaten pada tahun 2020 mencapai 75,56, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yang besarnya 75,29.

Selama periode 2019 - 2020, beberapa komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki harapan untuk hidup hingga 76,78 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2019. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang bersekolah selama 13,25 tahun, atau meningkat

0,01 tahun. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,58 tahun, atau meningkat 0,27 tahun. Sedangkan Pengeluaran per kapita masyarakat mengalami penurunan dari Rp12.074.000,- pada tahun 2019, turun Rp153.000,- menjadi Rp11.921.000,- di Tahun 2020.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 5,46% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2020 sebesar 68,33%.

***Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,***

Sejak awal tahun 2020 hingga kini, seluruh dunia termasuk Indonesia terjadi penyebaran pandemi Covid-19. Dalam menghadapi perkembangan terkait pandemi virus corona atau Covid-19 Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menangani Covid-19 pada tanggal 16 Maret 2020. Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Tanggal 2 April 2020 Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan

Pemerintah Daerah, dimana semua Pemerintah Daerah untuk ikut berperan dalam penanganan wabah virus Covid-19 dengan melakukan *refocusing* alokasi penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Pada tanggal 1 April 2020 Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah adanya kejadian salah satu warganya positif terjangkit Virus Covid-19 dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/115 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Disebabkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Klaten. Adapun tugas Gugus Tugas tersebut adalah menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/115 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Disebabkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Klaten, Gugus Tugas ini dipimpin oleh Bupati Klaten. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2020 Pemerintah Kabupaten Klaten

mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/156 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/115 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Disebabkan *Corona Virus Disease 2019*(Covid-19) di Kabupaten Klaten.

Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5120/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*(Covid-19) di Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjadi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/298 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Virus Corona Disease* (Covid-19) di Kabupaten Klaten pada tanggal 8 Oktober 2020. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/298 Tahun 2020 maka Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/115 Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/156 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

***Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,***

Selain menghadapi penyebaran pandemi Covid-19, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Klaten juga menghadapi kondisi Gunung Merapi yang mengalami

peningkatan aktivitas dari waspada (level 2) menjadi siaga (level 3). Dalam Antisipasi terhadap Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menerbitkan SK Bupati Klaten Nomor 360/331 Tahun 2020 tentang Komando Penanganan Darurat Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Klaten.
2. Menerbitkan SK Bupati Klaten Nomor 360/703/2020 tentang Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Merapi di Kabupaten Klaten.
3. Menerbitkan SK Bupati Klaten Nomor 360/337 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten.
4. Pembentukan Posko Terpadu Siaga Merapi Kabupaten Klaten dan Posko Lapangan di Kecamatan Kemalang.
5. Penyiapan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) di shelter Kebondalem Lor Prambanan, Demak Ijo Karangnongko dan Menden Kebonarum. Penyiapan Tempat Evakuasi Sementara (TES) di Desa Balerante dan Tegalmulyo Kecamatan Kemalang serta pembuatan sekat-sekat di lokasi tersebut.
6. Menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kesiapsiagaan erupsi Gunung Merapi yang saat ini berada dalam di level Siaga antara lain berupa Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp. 1 Milyar, masker kain sebanyak 200.000 buah, rapid test antigen sebanyak 2500 unit dan hand sanitizer sebanyak 250 jerigen masing-masing 4 liter.

Bantuan diserahkan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo di Desa Balerante Kecamatan Kemalang.

7. Menerbitkan Surat Bupati Klaten selaku Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Klaten kepada Camat se-Kabupaten Klaten Nomor 19/St.Tgs/Cov19/2020 tentang pembuatan isolasi terpusat/tempat karantina Covid-19 di tingkat Desa dan Kecamatan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Klaten.

***Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,***

Dalam penyampaian Bagian Keuangan Daerah, kami sampaikan Realisasi **Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah** Tahun Anggaran 2020. Data Keuangan yang kami sampaikan merupakan data keuangan per tanggal 23 Februari tahun 2021.

Pada tahun 2020 Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.465.572.071.354 dari target pendapatan sebesar Rp.2.509.533.202.687 Sehingga dari pendapatan tersebut terealisasi sebesar 98,25% dari target yang telah ditentukan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 sebesar Rp. 329.963.261.898 atau mencapai 133,83% dari target yang diharapkan sebesar Rp.246.558.797.299. Bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp.18.314.860.242,56 atau meningkat sebesar 6%. Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp.1.516.494.102.076

atau mencapai 98,92% dari target yang direncanakan sebesar Rp.1.533.062.670.188. realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.619.114.707.380 dari target Rp. 729.911.735.200 atau sebesar 84,82%

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.2.917.442.203.797,28 dan dapat direalisasikan Rp.2.432.600.729.577 atau mencapai 83,38%. Anggaran Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 sebesar Rp.2.093.641.067.774 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.737.312.107.695 atau 82,98%. Belanja Langsung pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.823.801.136.023,28 dan dengan realisasi sebesar Rp.695.288.621.882 atau 84,4%.

Secara keseluruhan realisasi Total pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp.2.465.572.071.354 sedangkan realisasi belanja pada tahun 2020 sebesar Rp.2.432.600.729.577 sehingga surplus sebesar Rp.32.971.341.777. Realisasi penerimaan pembiayaan Daerah sebesar Rp.408.687.702.548,28 dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.1.000.000.000 Sehingga realisasi pembiayaan netto sebesar Rp.407.687.702.548,28 Berdasarkan realisasi Pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, maka terdapat SILPA sebesar Rp. 440.659.044.325,28



**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya akan kami sampaikan tentang **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah** selama tahun 2020. Adapun Hasil Pelaksanaan **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah** adalah sebagai berikut :

#### **A. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **1. Urusan Pendidikan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang pendidikan pada tahun 2020 antara lain :

- 1) Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan mencapai 98,37% dari target 98,30%.
- 2) Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan mencapai realisasi 90,57% dari target 90%.
- 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A mencapai 96,02% dari target sebesar 98,05%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B mencapai 100,48% dari target sebesar 91,53%.
- 4) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A mencapai 88,54% dari target sebesar 87,44%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B mencapai 71,14% dari target sebesar 68,82%.

- 5) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai 92,60% dari target 88,88%.
- 6) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,01% dari target 0,01%. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs mencapai 0,08% dari target 0,08%.
- 7) Angka Kelulusan (AL) SD/MI sebesar 100% dari target 98,87%. Pada jenjang SMP/MTS angka kelulusan sebesar 100% dari target 98,17%.

## **2. Urusan Kesehatan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang kesehatan antara lain :

- 1) Usia Harapan Hidup mencapai 76,78 tahun dari target 76,68 tahun
- 2) Prevelensi gizi buruk sebesar 0,94% dari target 0,83%.
- 3) Kasus kematian ibu sebesar 17 kasus dari target 15 kasus. Angka kematian bayi sebesar 9,34 dari target 10,09. Angka kematian balita sebesar 1,52 dari target 1,63.
- 4) Cakupan Pelayanan Ibu hamil (K4) mencapai 93,44% dari target 99%. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3) mencapai 96,92% dari target 100%. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir (KN3) mencapai 96,70% dari target 100%. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita mencapai 92,71% dari target 98%

- 5) Cakupan desa *open defecation free* (ODF) mencapai 100% dari target 100%. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sebesar 100% dari target 100%.

### **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

- 1) Indeks layanan infrastruktur mencapai 41,56 dari target 38,96
- 2) Ketaatan terhadap RTRW sebesar 88% dari target 79,60%
- 3) Persentase Jalan dalam kondisi baik mencapai 66,47% dari target 69,33%. Persentase Irigasi dalam kondisi baik mencapai 36,17% dari target 30%. Prosentase layanan Drainase mencapai 73,05% dari target 71,5%

### **4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain :

- 1) Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman mencapai 74,05 dari target 74,05
- 2) Prosentase Rumah Layak Huni mencapai 96,12% dari target 98,76%

## **5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

- 1) Indeks demokrasi mencapai 77,72 dari target 75.
- 2) Indeks ketertiban masyarakat mencapai 98,99 dari target 99
- 3) Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten mencapai 92% dari target 92%. Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan mencapai 98% dari target 98%
- 4) Prosentase peningkatan kepesertaan pemilih dalam pemilu mencapai 13% dari target 6%. Prosentase ormas aktif yang terbina mencapai 85% dari target 85%.

## **6. Urusan Sosial**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Sosial antara lain :

- 1) Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial mencapai 90,32% dari target 87%
- 2) Persentase penguatan kapasitas PSKS mencapai 96% dari target 99%
- 3) Persentase (%) anak terlantar dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 27,15% dari target 30%

- 4) Kelas Indeks kapasitas bencana mencapai indeks sedang dari target indeks sedang.

## **B. Penyelenggaraan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar**

### **1. Urusan Tenaga Kerja**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Tenaga Kerja antara lain :

- 1) Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 43,12% dari target 75%
- 2) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan mencapai 50% dari target 60%
- 3) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan mencapai 21,11% dari target 25,40%

### **2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak**

Capaian kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

- 1) Indeks pemberdayaan gender (IDG) sebesar 72,35 dari target 60,3
- 2) Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) mencapai tingkat madya dari target tingkat nindya
- 3) Persentase OPD yang menerapkan PPRG sebesar 70% dari target 70%
- 4) Rasio perempuan korban kekerasan sebesar 3,52 dari target 1,35. Rasio anak yang memerlukan

perlindungan khusus mencapai 5,68 dari target 4,80

### **3. Urusan Pangan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pangan adalah skor pola pangan harapan sebesar 84,80 dari target 93

### **4. Urusan Lingkungan Hidup**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Lingkungan Hidup antara lain Indeks kualitas air sebesar 36,15 dari target 38,02. Indeks kualitas udara sebesar 76,82 dari target 82,02, indeks tutupan vegetasi sebesar 42,54 dari target 53,71

### **5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Indeks kepuasan layanan masyarakat sebesar 81,6 dari target 92,7. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk sebesar 0,98 dari target 0,91. Cakupan penerbitan akte kelahiran Penduduk usia 1-18 tahun sebesar 91,87 dari target 92,18.

## **6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Capaian Kinerja pada pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Masyarakat desa antara lain :

- 1) Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif ( mendapat pembinaan dan pelatihan) mencapai 61% dari target 66%
- 2) Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek sebesar 42% dari target 42%
- 3) Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel sebesar 88% dari target 87%
- 4) Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes sebesar 91% dari target 64%

## **7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

- 1) Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)/TFR sebesar 2,1 dari target 2,12
- 2) Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR) sebesar 70,9% dari target 66,03%
- 3) Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi/ Drop Out KB sebesar 9,7% dari target 4,98%

## **8. Urusan Perhubungan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Perhubungan antara lain Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan mencapai 64,83% dari target sebesar 52,52%, Indeks kepuasan layanan perhubungan mencapai 81,351 dari target 80,917, Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik mencapai 98,42% dari target 98,42%, Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 78,06% dari target 87,86%

## **9. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Capaian Kinerja pada pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Komunikasi dan Informatika antara lain Cakupan layanan telekomunikasi sebesar 56,5% dari target 55,08%. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik mencapai skor 95 dari target 65.

## **10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain Persentase UMK yang memiliki daya saing mencapai 11,8% dari target 13%. Persentase Koperasi Aktif sebesar 77,94% dari target 80,59%.



## **11. Urusan Penanaman Modal**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Penanaman Modal antara lain:

- 1) Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMDN mencapai -64% dari target 2,5%. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMA mencapai -59% dari target 2,55%.
- 2) Rasio daya serap tenaga kerja PMDN sebesar 3 dari target 460. Rasio daya serap tenaga kerja PMA sebesar 12 dari target 294.
- 3) Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan mencapai 81,86 dari target 80.

## **12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kepemudaan dan Olahraga antara lain Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda mencapai 55,71% dari target 1%, Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga mencapai 8,26% dari target 2%. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif sebesar 76% dari target 69%. Persentase cabang olahraga yang rutin mengikuti kompetisi sebesar 61% dari target 83%.

## **13. Urusan Statistik**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Statistik adalah Persentase

dokumen data statistik yang tersedia sebesar 100% dari target 100%.

#### **14. Urusan Kebudayaan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kebudayaan adalah Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya sebesar -75% dari target 4%. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan sebesar 100% dari target 10%.

#### **15. Urusan Perpustakaan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Perpustakaan adalah Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat sebesar -15,1% dari target 5%.

#### **16. Urusan Kearsipan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kearsipan adalah Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku sebesar 8,72% dari target 5%.

#### **17. Urusan Persandian**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Persandian adalah Persentase pengamanan informasi persandian yang terimplementasi sebesar 55% dari target 25%.

## **C. Urusan Pilihan yang dilaksanakan**

### **1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan pilihan di bidang kelautan dan perikanan adalah Konsumsi Ikan mencapai 20,28 Kg/kapita/tahun dari target 20,41 kg/kapita/tahun. Produksi Perikanan budidaya mencapai 27.604 Ton dari target 31.467 Ton. Produksi Perikanan tangkap sebesar 184 ton dari target 537 ton.

### **2. Urusan Pariwisata**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan pilihan di bidang Pariwisata adalah Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata sebesar -55,8% dari target 25%. Persentasi kenaikan kunjungan wisatawan sebesar - 65,05% dari target 10%. Persentase destinasi wisata andalan sebesar 28% dari target 28%

### **3. Urusan Pertanian**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pilihan di bidang Pertanian antara lain :

- 1) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 10,94% dari target 12,4%.
- 2) Produktifitas padi mencapai 63,33 kwintal/ha dari target 64,01 kwintal /ha.
- 3) Produktifitas Jagung mencapai 89,38 kwintal/ha dari target 76,67 kwintal/ha.
- 4) Produktifitas kedelai mencapai 19,12 kwintal/ha dari target 12,8 kwintal/ha

#### **4. Urusan Perdagangan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan pilihan Perdagangan adalah :

- 1) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar 19,98% dari target 15,38%.
- 2) Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan halal sebesar 0,29% dari target 0,584%.
- 3) Persentase cakupan pelayanan UTTP sebesar 5% dari target 50%

#### **5. Urusan Perindustrian**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan pilihan perindustrian antara lain Kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 37,39% dari target 35,6%. Persentase IKM yang memiliki daya saing sebesar 3,54% dari target 8,123%. Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI sebesar 6,79% dari target 7%. Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur sebesar 4,75% dari target 4%

#### **6. Urusan Transmigrasi**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan pilihan Transmigrasi adalah Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi sebesar 5,2% dari target 5,2%.

## **D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

### **1. Administrasi Pemerintahan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang administrasi pemerintahan antara lain:

- 1) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) mencapai 3,21 dari target 3
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah mencapai “B” dari target nilai ‘B’.
- 3) Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara mencapai 90% dari target 90%
- 4) Indeks kabupaten peduli HAM sebesar 95,7 dari target 88
- 5) Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi mencapai 100% dari target 100%
- 6) Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra sebesar 95% dari target 95%
- 7) Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah sebesar 98,61% dari target 98%
- 8) Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah sebesar 98,89% dari target 98%

### **2. Pengawasan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang pengawasan antara lain:

- 1) Level Maturitas SPIP mencapai level 3 dari target 3.
- 2) Level Kapabilitas APIP mencapai level 3 dari target 3.
- 3) persentase pemeriksaan program tahunan mencapai 100% dari target 100%

### **3. Perencanaan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang perencanaan adalah Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan mencapai 100% dari target 100%. Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya sebesar 92% dari target 92%, Prosentase konsistensi kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan bidang ekonomi sebesar 75% dari target 75%, Kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW sebesar 100% dari target 100%

### **4. Keuangan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang keuangan adalah Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari target WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Prosentase kenaikan PAD sebesar 6% dari target 7,44%, Persentase tanah pemkab yang bersertifikat mencapai 56,1% dari target 53,5%.

## **5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan antara lain:

- 1) Indeks Profesionalitas ASN mencapai 78,06 dari target 83.
- 2) Prosentase ASN yang mengikuti diklat sebesar 42,93% dari target 100%
- 3) Prosentase Pengembangan Aparatur sebesar 77,74% orang dari target 100%

## **6. Penelitian dan Pengembangan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan adalah Prosentase inovasi yang diterapkan mencapai 85% dari target 86,36%.

### ***Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat***

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020, terdapat beberapa prestasi dan penghargaan tingkat Nasional yang diberikan kepada Bupati Klaten maupun Pemerintah Kabupaten Klaten. Penghargaan dan prestasi tersebut antara lain :

1. Penghargaan “Manggala Karya Kencana (MKK)” diberikan kepada Bupati Klaten atas dedikasi dan komitmen sebagai kepala daerah dalam pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana.

- Penghargaan diberikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Pusat.
2. Penghargaan “Natamukti Award 2020” diberikan kepada Bupati Klaten dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Natamukti Award 2020 merupakan apresiasi bagi kepala daerah yang sukses dalam membangun tata kelola dan kemandirian UMKM di daerahnya, berhasil dalam mempromosikan UMKM lokal, mendorong peningkatan kualitas produk UMKM lokal, serta membangun ekosistem UMKM di daerahnya.
  3. Penghargaan “Top pembina BUMD” tahun 2020 diberikan kepada Bupati Klaten dari Majalah Top Business pada ajang Top BUMD Award 2020. Penghargaan diberikan atas prestasi dan kinerja PT BPR Bank Klaten (Perseroda) dan perumda Air minum PDAM Tirta Merapi.
  4. Penghargaan sebagai kabupaten dengan predikat sangat inovatif diberikan kepada Pemerinah Kabupaten Klaten dalam ajang Innovative Goverment Award (IGA) 2020. Penghargaan diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
  5. Penghargaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Nasional 2019. Penghargaan diberikan pada Rapat Kordinasi Nasional Kearsipan tahun 2020 atas prestasi Pemerintah kabupaten Klaten dalam pengelolaan kearsipan. Penghargaan tersebut diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Kementrian



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

6. Penghargaan sebagai kabupaten peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2020 diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Klaten.
7. Prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan keuangan tahun 2019.
8. Penghargaan atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan status kinerja “sangat tinggi” diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2020 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2018.
9. Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) predikat B dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Selain penghargaan dan prestasi tingkat nasional tersebut, prestasi dan penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah termuat dalam Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2020.

***Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat***

Pemerintah Kabupaten Klaten juga melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dengan Kegiatan Wirausaha melalui Tenaga Kerja Mandiri, Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Kegiatan Administrasi Kegiatan Tugas Pembantuan. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp.645.890.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 616.532.000,- sehingga realisasi anggaran tercapai sebesar 95,45% dan realisasi fisik sebesar 100%.
2. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program yang dilaksanakan terdiri dari 2 (dua) program dan meliputi 9 (sembilan) kegiatan sebagai berikut :
  - a) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida serta Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian. Adapun alokasi anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp1.708.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.648.535.000,- sehingga persentase capaian anggaran sebesar 96,48 % dan capaian serapan fisik sebesar 100%

- b) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan, Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Adapun alokasi anggaran Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp4.136.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp4.070.682.845,- sehingga persentase capaian anggaran sebesar 98,42 % dan capaian serapan fisik sebesar 100%

***Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat***

Demikian Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Klaten tahun 2020 telah kami sampaikan, dan pada kesempatan ini kami serahkan 3 (tiga) Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2020 yang terdiri dari :

1. Buku Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun 2020;
2. Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun 2020;
3. Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun 2020.

***Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat***

Seperti yang sudah diketahui Bersama bahwa sejak awal tahun 2020 hingga kini, seluruh dunia termasuk Indonesia terjadi penyebaran pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Dampak yang paling dirasakan yaitu perlambatan kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri, perdagangan dan pariwisata serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Mendasarkan pada hal tersebut, pengalokasian anggaran pada belanja pada masing-masing urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan masing-masing Perangkat Daerah cenderung mengalami penurunan karena dampak wabah pandemi Covid-19 yang kemudian juga berakibat terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kebutuhan belanja daerah yang meningkat dalam mengatasi penanganan pandemi Covid-19, penggunaan belanja daerah diarahkan secara efektif

sebagai upaya akselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten termasuk jajaran pemerintahan Desa dan masyarakat Kabupaten Klaten secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan program pembangunan daerah terutama dalam penanganan Pandemi covid-19. Penghargaan setinggi-tingginya kami ucapkan kepada segenap tenaga kesehatan, relawan dan setiap pihak yang berjuang di garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. Kita semua berharap bahwa Pandemi ini segera berakhir sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten dapat berjalan lancar sehingga Tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dapat tercapai.

***Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat***

Akhirnya, dengan segala daya upaya dan dukungan kemitra sejawatan Eksekutif – Legislatif yang terbangun selama ini, kami telah berusaha semaksimal dan semampu kami untuk mengemban amanah yang amat mulia ini. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan masukan dan pemikiran dari seluruh anggota DPRD dan semua pelaku

pembangunan serta berbagai pihak untuk mewujudkan Kabupaten Klaten yang **Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.**

Selanjutnya kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan serta hadirin yang telah mengikuti dengan seksama Laporan Pertanggungjawaban ini, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya atas perjuangan kita bersama dalam melaksanakan tugas-tugas untuk kepentingan bangsa dan Negara, khususnya bagi masyarakat Klaten yang kita cintai.

**Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.**

**Klaten, Februari 2021**  
**BUPATI KLATEN**

**Hj. Sri Mulyani**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klaten Tahun 2020 ini diselesaikan dengan tepat waktu, yang dituangkan dalam tiga buku yang terdiri dari : Buku Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2020, Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2020 dan Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2020.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan ini merupakan ringkasan dari Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2020 yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dapat dievaluasi, sekaligus mohon saran dan masukan guna perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan mendatang.

Akhir kata, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten Tahun 2020, dan tidak lupa kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Klaten yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Klaten dan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Klaten.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Klaten, Februari 2021

**BUPATI KLATEN**

**Hj. SRI MULYANI**

## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Daftar Gambar .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Dasar Hukum .....	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	2
1.3 Data Umum Daerah .....	10
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>25</b>
2.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah dan Realisasi Pendapatan Daerah .....	29
2.2 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Daerah .....	32
2.3 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah dan Realisasi Pembiayaan Daerah .....	38
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....</b>	<b>41</b>
3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	41
1 Urusan Pendidikan .....	41
2 Urusan Kesehatan .....	49
3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	63
4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	72
5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	78
6 Urusan Sosial .....	88
3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	98
1 Urusan Tenaga Kerja .....	98
2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	104
3 Urusan Pangan .....	110
4 Urusan Lingkungan Hidup .....	112
5 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .....	119
6 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	124
7 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	128
8 Urusan Perhubungan .....	135
9 Urusan Komunikasi dan Informatika.....	139
10 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	145
11 Urusan Penanaman Modal .....	153
12 Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....	160
13 Urusan Statistik.....	165



14	Urusan Persandian .....	168
15	Urusan Kebudayaan .....	170
16	Urusan Perpustakaan .....	174
17	Urusan Kearsipan .....	179
3.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan .....	184
1	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	184
2	Urusan Pariwisata.....	188
3	Urusan Pertanian.....	194
4	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .....	200
5	Urusan Perdagangan .....	203
6	Urusan Perindustrian .....	210
7	Urusan Transmigrasi .....	215
3.4	Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	220
1	Administrasi Pemerintahan .....	220
2	Pengawasan .....	234
3	Perencanaan .....	237
4	Keuangan .....	245
5	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.....	253
6	Penelitian dan Pengembangan .....	258

#### **BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

	<b>DAN PENUGASAN .....</b>	<b>262</b>
4.1	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	262
4.2	Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian. ....	275

#### **BAB V PENUTUP .....**

**.276**

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Hal
Gambar 1.1 Perkembangan antar waktu Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten tahun 2016 – 2020.....	15
Gambar 1.2 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020 .....	15
Gambar 1.3 Pertumbuhan ekonomi  di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2016 – 2020 .....	17
Gambar 1.4 Inflasi di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2016 – 2020.....	17
Tabel 1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Klaten.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan tahun 2020 .....	12
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kab.Klaten menurut kelompok umur Tahun 2020.....	13
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Tahun 2018-2020 dan Pertumbuhan Penduduk (%) di Kabupaten Klaten.....	14
Tabel 1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	16
Tabel 1.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % di Kabupaten Klaten tahun 2017 – 2020.....	18
Tabel 1.7 Data PNS Pemerintah Kabupaten Klaten menurut Unit Kerja Tahun 2020 .....	19
Tabel 1.8 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 .....	20
Tabel 1.9 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020.....	21
Tabel 1.10 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020.....	22
Tabel 2.1 Perkembangan perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2020 .....	25
Tabel 2.2 Perubahan dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020.....	30
Tabel 2.3 Perubahan dan Realisasi Belanja Daerah tahun 2020 .....	37
Tabel 2.4 Perubahan dan Realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2020 .....	39

Tabel 3.1	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020.....	42
Tabel 3.2	Inovasi Pelaksanaan Urusan Pendidikan Tahun 2020 .....	45
Tabel 3.3	Kebijakan Strategis Urusan Pendidikan Tahun 2020 .....	46
Tabel 3.4	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan pendidikan .....	46
Tabel 3.5	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pendidikan tahun 2020 .....	48
Tabel 3.6	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2020.....	49
Tabel 3.7	Inovasi Pelaksanaan program urusan Kesehatan Tahun 2020.....	55
Tabel 3.8	Prestasi Pelaksanaan program urusan Kesehatan Tahun 2020 .....	56
Tabel 3.9	Kebijakan Strategis Urusan Kesehatan Tahun 2020 .....	56
Tabel 3.10	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan kesehatan.....	59
Tabel 3.11	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kesehatan tahun 2020.....	61
Tabel 3.12	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 .....	64
Tabel 3.13	Kebijakan Strategis Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 .....	66
Tabel 3.14	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	68
Tabel 3.15	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020.....	70
Tabel 3.16	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Tahun 2020.....	72
Tabel 3.17	Kebijakan Strategis Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Tahun 2020 .....	74
Tabel 3.18	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman .....	75
Tabel 3.19	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman tahun 2020.....	77

Tabel 3.20	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 .....	79
Tabel 3.21	Inovasi pelaksanaan program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 .....	82
Tabel 3.22	Kebijakan Strategis Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 .....	83
Tabel 3.23	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	85
Tabel 3.24	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2020.....	86
Tabel 3.25	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Sosial tahun 2020.....	89
Tabel 3.26	Inovasi pelaksanaan program Urusan Sosial Tahun 2020.....	91
Tabel 3.27	Kebijakan Strategis Urusan Sosial Tahun 2020 .....	92
Tabel 3.28	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Sosial .....	95
Tabel 3.29	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Sosial tahun 2020 .....	97
Tabel 3.30	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja tahun 2020 .....	99
Tabel 3.31	Kebijakan Strategis Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020 .....	101
Tabel 3.32	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Tenaga kerja.....	101
Tabel 3.33	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Tenaga kerja tahun 2020.....	103
Tabel 3.34	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2020.....	105
Tabel 3.35	Kebijakan Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2020 .....	107
Tabel 3.36	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak .....	108
Tabel 3.37	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2020 .....	109

Tabel 3.38	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pangan tahun 2020 .....	110
Tabel 3.39	
Kebijakan Strategis Urusan Pangan Tahun 2020 .....	111
Tabel 3.40	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pangan tahun 2020 .....	112
Tabel 3.41	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup tahun 2020.....	113
Tabel 3.42	
Prestasi/Penghargaan dalam pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020.....	115
Tabel 3.43	
Kebijakan Strategis Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020 .....	116
Tabel 3.44	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup .....	117
Tabel 3.45	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup tahun 2020.....	119
Tabel 3.46	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2020.....	120
Tabel 3.47	
Inovasi pelaksanaan program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020.....	121
Tabel 3.48	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .....	122
Tabel 3.49	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2020 .....	123
Tabel 3.50	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2020 .....	124
Tabel 3.51	
Prestasi pelaksanaan program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020.....	126
Tabel 3.52	
Kebijakan Strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020.....	127
Tabel 3.53	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	126
Tabel 3.54	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2020.....	128
Tabel 3.55	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana tahun 2020 .....	129

Tabel 3.56	Prestasi / Penghargaan pelaksanaan Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Tahun 2020.....	131
Tabel 3.57	Kebijakan Strategis Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Tahun 2020.....	132
Tabel 3.58	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana.....	132
Tabel 3.59	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana tahun 2020 .....	134
Tabel 3.60	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perhubungan tahun 2020.....	135
Tabel 3.61	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Perhubungan .....	137
Tabel 3.62	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perhubungan tahun 2020.....	138
Tabel 3.63	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2020 .....	140
Tabel 3.64	Kebijakan Strategis Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2020 .....	142
Tabel 3.65	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika .....	142
Tabel 3.66	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2020.....	144
Tabel 3.67	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020.....	146
Tabel 3.68	Kebijakan Strategis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020.....	148
Tabel 3.69	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	149
Tabel 3.70	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020.....	151
Tabel 3.71	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal tahun 2020.....	153
Tabel 3.72	Inovasi Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal tahun 2020.....	156

Tabel 3.73	Prestasi/Penghargaan Pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal tahun 2020.....	157
Tabel 3.74	Kebijakan Strategis Urusan Penanaman Modal tahun 2020 .....	158
Tabel 3.75	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Penanaman Modal .....	158
Tabel 3.76	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Penanaman Modal tahun 2020.....	159
Tabel 3.77	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2020.....	161
Tabel 3.78	Kebijakan Strategis Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2020 .....	163
Tabel 3.79	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....	163
Tabel 3.80	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2020.....	164
Tabel 3.81	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Statistik tahun 2020.....	165
Tabel 3.82	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Statistik .....	166
Tabel 3.83	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Statistik tahun 2020.....	168
Tabel 3.84	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Persandian tahun 2020 .....	168
Tabel 3.85	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Persandian tahun 2020 .....	170
Tabel 3.86	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan kebudayaan tahun 2020.....	170
Tabel 3.87	Kebijakan Strategis Urusan Kebudayaan tahun 2020.....	172
Tabel 3.88	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Kebudayaan.....	173
Tabel 3.89	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kebudayaan tahun 2020 .....	174
Tabel 3.90	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan tahun 2020 .....	175

Tabel 3.91 Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan tahun 2020 .....	176
Tabel 3.92 Kebijakan Strategis Urusan Kebudayaan tahun 2020 .....	176
Tabel 3.93 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Perpustakaan .....	177
Tabel 3.94 Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perpustakaan tahun 2020 .....	178
Tabel 3.95 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan tahun 2020 .....	179
Tabel 3.96 Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan tahun 2020 .....	180
Tabel 3.97 Prestasi/Penghargaan Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan tahun 2020 .....	181
Tabel 3.98 Kebijakan Strategis Urusan Kearsipan tahun 2020 .....	181
Tabel 3.99 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Kearsipan .....	182
Tabel 3.100 Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kearsipan tahun 2020 .....	183
Tabel 3.101 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2020 .....	184
Tabel 3.102 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan .....	186
Tabel 3.103 Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2020 .....	188
Tabel 3.104 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata tahun 2020 .....	188
Tabel 3.105 Kebijakan Strategis Urusan Pariwisata tahun 2020 .....	190
Tabel 3.106 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pariwisata .....	192
Tabel 3.107 Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pariwisata tahun 2020 .....	194
Tabel 3.108 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian tahun 2020 .....	195



Tabel 3.109	
Kebijakan Strategis Urusan Pertanian tahun 2020 .....	197
Tabel 3.110	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pertanian .....	198
Tabel 3.111	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pertanian tahun 2020.....	199
Tabel 3.112	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020 .....	201
Tabel 3.113	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	202
Tabel 3.114	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan tahun 2020 .....	204
Tabel 3.115	
Kebijakan Strategis Urusan Perdagangan tahun 2020 .....	206
Tabel 3.116	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Perdagangan .....	207
Tabel 3.117	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perdagangan tahun 2020.....	209
Tabel 3.118	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perindustrian tahun 2020 .....	211
Tabel 3.119	
Kebijakan Strategis Urusan Perindustrian tahun 2020.....	213
Tabel 3.120	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Perindustrian .....	214
Tabel 3.121	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perindustrian tahun 2020 .....	215
Tabel 3.122	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi tahun 2020 .....	216
Tabel 3.123	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Transmigrasi.....	218
Tabel 3.124	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Transmigrasi tahun 2020 .....	219
Tabel 3.125	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi pemerintahan tahun 2020.....	220

Tabel 3.126	
Kebijakan Strategis urusan penunjang	
Administrasi Pemerintahan tahun 2020.....	229
Tabel 3.127	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan	
Urusan penunjang Administrasi Pemerintahan.....	231
Tabel 3.128	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan	
urusan penunjang Administrasi Pemerintahan tahun 2020.....	232
Tabel 3.129	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
Pengawasan tahun 2020 .....	234
Tabel 3.130	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan.....	236
Tabel 3.131	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan	
urusan penunjang Pengawasan tahun 2020 .....	236
Tabel 3.132	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan tahun 2020 .....	238
Tabel 3.133	
Inovasi pelaksanaan program	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan tahun 2020 .....	241
Tabel 3.134	
Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan	
Fungsi Penunjang Perencanaan tahun 2020.....	242
Tabel 3.135	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan.....	243
Tabel 3.136	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan tahun 2020 .....	245
Tabel 3.137	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan tahun 2020.....	246
Tabel 3.138	
Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan	
Fungsi Penunjang Keuangan tahun 2020 .....	248
Tabel 3.139	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan .....	251
Tabel 3.140	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan tahun 2020.....	249
Tabel 3.141	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian,	
Pendidikan dan pelatihan tahun 2020 .....	253

Tabel 3.142	Inovasi pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan tahun 2020.....	255
Tabel 3.143	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan .....	256
Tabel 3.144	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan tahun 2020 .....	257
Tabel 3.145	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan tahun 2020 .....	258
Tabel 3.146	Prestasi/Penghargaan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan tahun 2020 .....	259
Tabel 3.147	Inovasi pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan tahun 2020 .....	261
Tabel 3.148	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan tahun 2020 .....	257
Tabel 4.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020.....	267
Tabel 4.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020.....	264

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 DASAR HUKUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagai wilayah Daerah Otonom dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam bidang pemerintahan, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, dimana jabatan Kepala Daerah dipangku oleh Fungsionalis, sehingga Bupati tidak lagi merangkap sebagai Kepala Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1957 Nomor : Pem.10/2/18, yang membentuk jabatan baru di lingkungan pamong praja, yaitu Pejabat Bupati atau disingkat Pd. Bupati yang dipangku oleh Patih setempat. Patih inilah sebagai Kepala Corps Pamong Praja yang sehari-harinya disertai tugas-tugas Pemerintahan Pusat, sedangkan Bupati diberikan kedudukan sebagai Bupati dp (diperbantukan) Residen (Surakarta) yang bertempat tinggal di Daerah Swatantra Tingkat II (Kabupaten) Klaten, sejak tanggal 1 Agustus 1958. Disamping itu juga masih ada pejabat yang disebut Kepala Daerah, yang dalam prakteknya bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Swatantra yang bersangkutan yang menjalankan tugas-tugas otonomi dan medebewind, sehingga ada dualisme jabatan.

Pada Tahun 1959 terbitlah Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, yang menetapkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh sebuah badan yang bernama Badan Pemerintahan Harian. Disamping itu, Penetapan Presiden ini juga memuat tentang penyerahan tugas-tugas Pemerintahan Umum kepada Pemerintahan Daerah. Namun demikian peraturan tersebut baru direalisasikan pada Tahun 1963 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 jo. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963. Sehingga dengan diterbitkannya peraturan tersebut berdampak dihapusnya dualisme dalam Pemerintahan Daerah, dimana telah disatukan kembali Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan bekas Pamong Praja ke dalam corps Pemerintahan Daerah. Bersamaan dengan itu, maka hapuslah pula Pemerintahan Kawedanan dengan Wedananya dan beralih sebagai fungsionaris pembantu/penghubung Bupati Kepala Daerah. Dengan demikian, maka Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Pamong Praja juga disatukan lagi

pada satu tempat. Kemudian untuk menyempurnakan struktur Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 1965 diterbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Melihat sejarah-sejarah yang terjadi di Kabupaten Klaten seperti di atas, maka tim penggali Hari Jadi Kabupaten Klaten memilih tanggal pendirian benteng Klaten sebagai hari dan tanggal kelahiran Kabupaten Klaten. Hal ini didasarkan pada peristiwa awal munculnya nama Klaten dalam sumber sejarah (dasar nomenklatur) dan asas kontinuitas peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Klaten. Di samping itu dukungan sumber sejarah tertulis tentang pendirian Benteng Klaten juga menjadi dasar dipilihnya tanggal 28 Juli 1804 sebagai hari lahirnya Kabupaten Klaten dan telah ditetapkan dengan Perda Nomor 12 tahun 2007, tanggal 18 Juni 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Klaten.

## 1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah: **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. **Berdaya saing**, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

Untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah dicanangkan Kepala Daerah, diuraikan di dalam tujuan, sasaran dan strategi kebijakan pelaksanaannya. Masing-masing misi ketercapaiannya diterjemahkan kedalam berbagai tujuan yang dirinci kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai ditetapkan strategi pencapaiannya. Secara keseluruhan tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian misi tertuang didalam tabel 1.1

**TABEL 1.1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI  
KABUPATEN KLATEN**

**VISI : Maju Mandiri dan Berdaya Saing**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
<b>I.</b>	<b>Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya</b>		
	1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	a. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat wajib belajar sembilan tahun dengan memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai kualitas pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) sesuai Standar Nasional Pendidikan
	2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan b. Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitannya oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit	Memberikan pelayanan kesehatan sesuai syarat Standar Pelayanan Minimal untuk menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita yang akan meningkatkan usia harapan hidup masyarakat
	3. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS	a. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan fakir miskin, penanganan anak terlantar dan lanjut usia tidak potensial, melakukan pembinaan difabel dan memberdayakan kelembagaan sosial
	4. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk	a. Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate)	Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE sehingga memperkecil angka kelahiran dan peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB)
	5. Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya	a. Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Memberikan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana olahraga bagi pemuda untuk peningkatan prestasi pemuda

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		b. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	Melibatkan masyarakat didalam penyelenggaraan event-event seni dan budaya di daerah serta pelestarian benda, situs dan cagar budaya
	6. Meningkatkan minat baca masyarakat	a. Meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Mengembangkan budaya baca bagi masyarakat melalui pembinaan pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan
<b>II</b>	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b>		
	1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	a. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Melakukan pembinaan kompetensi ASN, menegakan kedisiplinan, dan pemberian kompensasi
		b. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta mengoptimalkan inventarisasi aset daerah.
		c. Meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Menjamin fasilitasi lembaga legislasi daerah agar bisa menjalankan fungsinya secara optimal
		d. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penyediaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.
	2. Meningkatkan pengelolaan dan penataan arsip daerah	a. Meningkatkan tata kelola arsip Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan penataan dan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan.
	3. Meningkatkan tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa	a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Melakukan pembinaan sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan mendorong pelaksanaan tata kelola administrasi desa yang sesuai ketentuan
	4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Mengoptimalkan fungsi lembaga pengawasan untuk menjamin terlaksananya reformasi birokrasi di pemerintahan kabupaten Klaten



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel, memperluas kerjasama, memastikan batas wilayah, pelaksanaan pemerintah kecamatan yang berkualitas, dan memperluas cakupan layanan telekomunikasi, serta penyediaan data statistik daerah
		c. Meningkatkan koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Melakukan penataan pengelolaan pembentukan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan yang direncanakan
		d. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi atau kesenjangan antara target dan relaisasi pembangunan
		e. Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Melakukan pelaksanaan penyediaan barang dan jasa secara elektronik
		f. Meningkatkan fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Memberikan pesan dan informasi kepala daerah yang akurat ke masyarakat melalui media dan fasilitasi keprotokolan kepala daerah
		g. Meningkatkan fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	Melakukan koordinasi pelaksanaan bidang sumberdaya alam, pengembangan ekonomi dan usaha daerah
		h. Meningkatkan koordinasi kesejahteraan rakyat	Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama
<b>III.</b>	<b>Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal</b>		
	1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat	a. Meningkatkan ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Menjamin ketersediaan bahan pangan dan perbaikan mutu konsumsi pangan
			Melakukan pembinaan dan fasilitasi didalam proses produksi komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan
			Meningkatkan pemantauan bidang pertanian

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	2. Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa	a. Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat pedesaan didalam menerapkan teknologi tepat guna dan fasilitasi terbentuknya BUMDes
	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	a. Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Melakukan pengembangan kemitraan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pemasaran destinasi wisata serta meningkatkan daya tarik obyek wisata
		b. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pengembangan keunggulan kompetitif dan satuan pendukung sektor usaha kecil menengah (UKM), pembinaan kelembagaan UKM dan pedagang kaki lima, serta memberikan perlindungan konsumen
		c. Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Mendorong tumbuhnya inovator-inovator di masyarakat dan penerapan hasil litbang/inovasi yang mendukung pengembangan ekonomi daerah
		d. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Peningkatan promosi potensi usaha di kabupaten Klaten untuk meningkatkan jumlah investor dan nilai investasi
	4. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan	Fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja serta fasilitasi dan informasi kebutuhan tenaga kerja
		b. Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Penyelesaian terhadap sengketa dan permasalahan antara tenaga kerja dan pengusaha
	5. Meningkatkan daya saing produk industri daerah	a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Mengembangkan kemampuan teknologi industri bagi industri kecil menengah untuk mendapatkan ISO dan SNI serta standar produk manufaktur dan SVLK untuk IKM meubel
IV.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat		

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan, jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah serta peningkatan pengelolaan persampahan
		b. Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Penyediaan Sarana dan Prasarana perhubungan yang memadai dan kelengkapan keselamatan jalan di ruas jalan kabupaten Klaten
		c. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Penyediaan layanan kebutuhan air bersih, sanitasi, penerangan jalan bagi perumahan dan permukiman serta meningkatkan pembangunan rumah tidak layak huni
<b>V.</b>	<b>Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah</b>		
	1. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam	a. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Melakukan perencanaan dan pengendalian penggunaan lahan sesuai konsep tata ruang serta memperbaiki pengelolaan ruang terbuka hijau
		b. Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Memperluas cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL oleh investor dengan melibatkan masyarakat terdampak dan memperluas cakupan pemantauan kualitas udara dan air
	2. Mewujudkan pengurangan resiko bencana	a. Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Melakukan fasilitasi dan pembinaan untuk menjadi desa tangguh bencana serta meningkatkan kualitas dan kuantitas relawan yang terlatih tanggap bencana
<b>VI.</b>	<b>Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian</b>		
	1. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan	a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Memberikan wawasan kebangsaan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan sosial

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	2. Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan	a. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Memberikan fasilitasi kedesa-desa dibidang sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan agar lebih aktif menjaga pelestarian adat dan budaya
	3. Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Memberikan rasa ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan memperluas cakupan perlindungan, pelayanan bencana kebakaran, dan mempersingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran, serta penegakan perda dan perkara konsistn
<b>VII.</b>	<b>Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak</b>		
	1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak	a. Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Memberikan pembinaan Kelembagaan Pengarusatamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) agar lebih kuat, mendorong peran serta perempuan didalam pembangunan dan memberikan perlindungan dan hak terhadap perempuan dan anak
<b>VIII.</b>	<b>Meningkatkan kapasitas pelayanan publik</b>		
	1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat	a. Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Memberikan pelayanan yang selalu ditingkatkan kualitasnya untuk memenuhi standar pelayanan minimal di bidang layanan perhubungan, perijinan investasi, dan administrasi kependudukan
		b. Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	
		c. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	
	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi	a. Pengembangan ketransmigrasian	Memberikan pemahaman dan pengertian tentang ketransmigrasian serta melakukan pengembangan lokasi atau wilayah penempatan transmigrasi

### 1.3 DATA UMUM DAERAH

#### 1. Data Geografis Wilayah

##### a. Letak Wilayah

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kabupaten Klaten terletak antara 7°32`19" Lintang Selatan sampai 7°48`33" Lintang Selatan dan antara 110°26`14" Bujur Timur sampai 110°47`51" Bujur Timur. Dengan batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali,
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY), dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY)

##### b. Luas Wilayah

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan seluas 65.556 ha (655,56 km<sup>2</sup>) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya seluas 3.254.412 ha.

##### c. Topografi Kabupaten Klaten

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu, dengan ketinggian antara 76 – 1.60 m dpl (di atas permukaan laut). Secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

1. Wilayah lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
2. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah kecamatan-kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, Polanharjo.
3. Wilayah berbukit / gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

Dari sisi topografi wilayah Kabupaten Klaten, dirinci sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m di atas permukaan laut (dpl) meliputi sebagian dari kecamatan : Juwiring, Karangdowo dan Cawas
2. Wilayah dengan ketinggian antara 100 – 200 m dpl meliputi Kecamatan: Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karangnom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).
3. Wilayah dengan ketinggian antara 200 – 400 m dpl meliputi Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karangnom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).
4. Wilayah dengan ketinggian antara 400 – 1000 m dpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
5. Wilayah dengan ketinggian 1.000 – 2000 m dpl berada di Kecamatan Kemalang.

#### **d. Iklim di Kabupaten Klaten**

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur antara 28–30 derajat Celcius, dan kecepatan angin rata-rata berkisar 20–25 km/jam.

#### **e. Kondisi Hidrologi**

Kabupaten Klaten dilalui 80 sungai dengan berbagai klasifikasi (ordo), yaitu: (i) 1 sungai berklasifikasi induk yaitu Bengawan Solo, (ii) 1 sungai berklasifikasi Ordo I yaitu sungai Dengkeng, (iii) 24 sungai dengan klasifikasi ordo II, dan (iv) 54 sungai dengan Ordo III. Potensi air lainnya adalah sumber mata air. Terdapat 174 titik sumber mata air yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan. Dimana sumber air terbanyak terdapat di Kecamatan Tulung (24 lokasi) dan Manisrenggo (24 lokasi).

#### **f. Jenis Tanah di Kabupaten Klaten**

Jenis tanah di Kabupaten Klaten terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu:

##### 1. Litosol :

Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat.

##### 2. Regosol Kelabu:

Bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.

3. Grumusol Kelabu Tua :

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.

4. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua :

Bahan induk berupa batu apurnapal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.

5. Regosol Coklat Kekelabuan:

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

**2. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2020 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang berdasarkan Data Semester I sebanyak 1.327.577 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 660.456 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 667.121 jiwa. Jumlah penduduk dimasing-masing kecamatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan**  
**Tahun 2020**

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PRAMBANAN	26.181	26.776	52.957
2	GANTIWARNO	20.605	20.838	41.443
3	WEDI	27.139	27.533	54.672
4	BAYAT	33.002	32.769	65.771
5	CAWAS	30.052	30.652	60.704
6	TRUCUK	41.337	40.889	82.226
7	KEBONARUM	10.375	10.765	21.140
8	JOGONALAN	30.933	30.994	61.927
9	MANISRENGGO	21.908	22.428	44.336
10	KARANGNONGKO	19.011	19.356	38.367
11	CEPER	34.078	34.110	68.188
12	PEDAN	24.450	24.550	49.000
13	KARANGDOWO	22.575	22.982	45.557
14	JUWIRING	30.588	30.737	61.325
15	WONOSARI	32.047	32.308	64.355
16	DELANGGU	21.638	21.867	43.505
17	POLANHARJO	21.300	21.879	43.179
18	KARANGANOM	23.525	23.881	47.406

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
19	TULUNG	27.808	27.997	55.805
20	JATINOM	31.105	31.078	62.183
21	KEMALANG	20.128	20.215	40.343
22	NGAWEN	23.678	23.626	47.304
23	KALIKOTES	19.087	19.130	38.217
24	KLATEN UTARA	24.366	24.890	49.256
25	KLATEN TENGAH	21.008	21.857	42.865
26	KLATEN SELATAN	22.532	23.014	45.546
<b>TOTAL</b>		<b>660.456</b>	<b>667.121</b>	<b>1.327.577</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2020 (Data Semester I)

Berdasarkan kelompok umur penduduk di Kabupaten Klaten, 68,73% didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara umur 15 - 64 tahun yang mencapai 912.459 jiwa. Sedangkan 31,27% lainnya yaitu 415.118 jiwa merupakan penduduk usia non produktif dari usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten**  
**Menurut Kelompok Umur Tahun 2020**

No	Usia	Jumlah (jiwa)
1	0 - 4 tahun	80.567
2	5 - 9 tahun	92.845
3	10 - 14 tahun	95.917
4	15 - 19 tahun	93.806
5	20 - 24 tahun	92.918
6	25 - 29 tahun	91.066
7	30 - 34 tahun	90.076
8	35 - 39 tahun	105.717
9	40 - 44 tahun	101.588
10	45 - 49 tahun	94.533
11	50 - 54 tahun	93.544
12	55 - 59 tahun	81.393
13	60 - 64 tahun	67.818
14	65 - 69 tahun	50.598
15	70 - 74 tahun	34.335
16	75 tahun ke atas	60.856
<b>Jumlah</b>		<b>1.327.577</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2020 (Data Semester I)

### 3. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 sebanyak 1.323.609 jiwa dan jumlah penduduk Kabupaten Klaten tahun 2020 (data semester I) sebanyak 1.327.577 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka persentase pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 0,3%. Jumlah Penduduk



3(tiga) tahun terakhir dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klaten selama 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.4  
Jumlah Penduduk Tahun 2018-2020  
dan Pertumbuhan Penduduk (%) di Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	
		(Jiwa)			2018 - 2019	2019 - 2020
		2018	2019	2020		
1	Prambanan	52.662	52.824	52.957	0,31	0,25
2	Gantiwarno	40.609	40.696	41.443	0,21	1,84
3	Wedi	54.681	54.507	54.672	-0,32	0,30
4	Bayat	65.148	65.649	65.771	0,77	0,19
5	Cawas	61.359	60.690	60.704	-1,09	0,02
6	Trucuk	80.740	81.715	82.226	1,21	0,63
7	Kalikotes	20.910	20.935	38.217	0,12	82,55
8	Kebonarum	61.117	61.237	21.140	0,2	-65,48
9	Jogonalan	44.181	44.373	61.927	0,43	39,56
10	Manisrenggo	38.247	38.096	44.336	-0,39	16,38
11	Karangnongko	66.963	67.619	38.367	0,98	-43,26
12	Ngawen	48.831	48.990	47.304	0,33	-3,44
13	Ceper	45.176	45.256	68.188	0,18	50,67
14	Pedan	60.686	61.155	49.000	0,77	-19,88
15	Karangdowo	64.760	64.770	45.557	0,02	-29,66
16	Juwiring	43.248	43.661	61.325	0,95	40,46
17	Wonosari	42.783	42.969	64.355	0,43	49,77
18	Delanggu	47.585	47.602	43.505	0,04	-8,61
19	Polanharjo	55.283	55.419	43.179	0,25	-22,09
20	Karanganom	61.905	62.312	47.406	0,66	-23,92
21	Tulung	39.721	40.064	55.805	0,86	39,29
22	Jatinom	46.697	47.368	62.183	1,44	31,28
23	Kemalang	37.943	38.116	40.343	0,46	5,84
24	Klaten Selatan	48.416	49.265	45.546	1,75	-7,55
25	Klaten Tengah	42.264	42.634	42.865	0,88	0,54
26	Klaten Utara	44.965	45.687	49.256	1,61	7,81
<b>Jumlah</b>		<b>1.316.880</b>	<b>1.323.609</b>	<b>1.327.577</b>	<b>0,51</b>	<b>0,30</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2020 (Data Semester I)

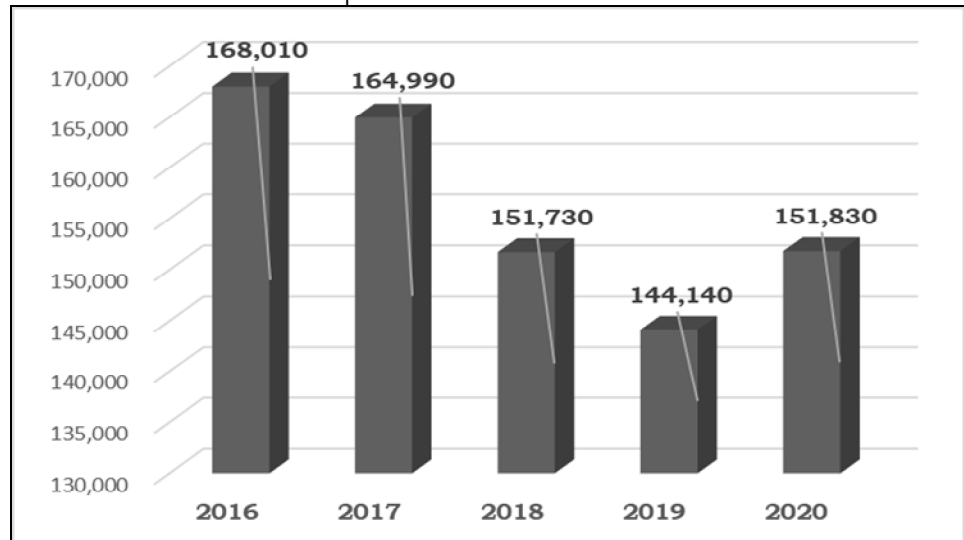
#### 4. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil survey dari BPS, pengukuran garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar Rp.419.510,00,

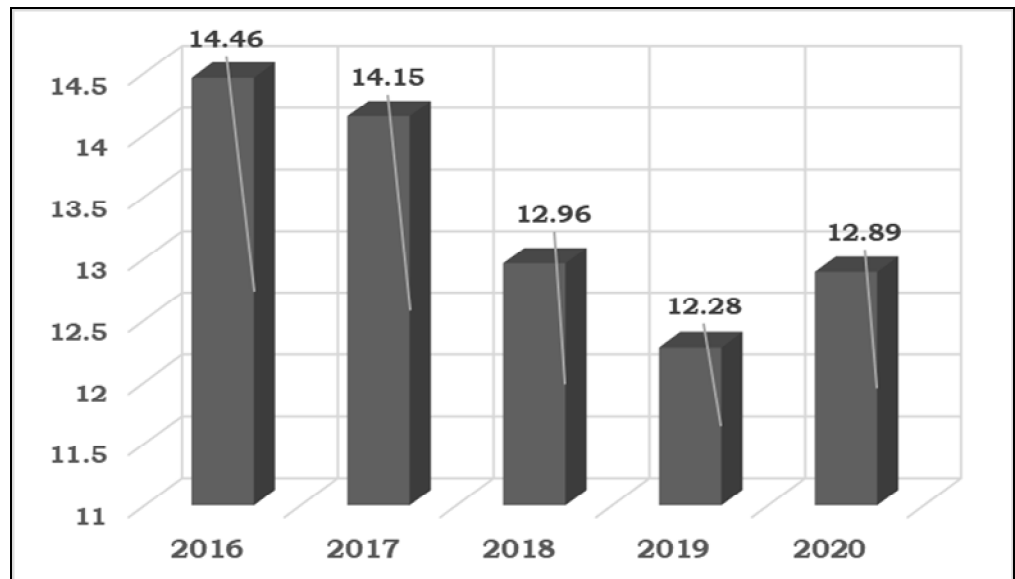
sedangkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada Tahun 2020 sebanyak 151.830 jiwa dengan persentase 12,89%. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada rentang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2.

Gambar 1.1  
Perkembangan antar waktu Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kab. Klaten Tahun 2021

Gambar 1.2  
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, Tahun 2021

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten pada rentang waktu tahun 2016-2019 menunjukkan penurunan angka. Pada tahun 2020 dikarenakan dampak dari wabah Covid-19, persentase kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,61% yaitu dari tahun 2019 sebesar 12,28% naik menjadi 12,89 % pada tahun 2020. Demikian pula dengan jumlah penduduk mengalami kenaikan dari sebesar 144.140 jiwa di tahun 2019 menjadi 151.830

jiwa pada tahun 2020. Namun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan guna menanggulangi peningkatan angka kemiskinan pasca Wabah Covid-19 melalui kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Jaring Pengaman Sosial Stimulus Covid-19 antara lain Kartu Pra-Kerja, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Listrik, Program Keluarga Harapan, dan Program Sembako.

## 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Klaten sudah berada pada tingkat “menengah atas” di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten sudah mencapai 75,29 pada Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 sudah mencapai 75,56. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia. yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per kapita. Adapun Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator IPM	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Usia Harapan Hidup (UHH)	76,59	76,62	76,67	76,68	76,78
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,85	12,97	13,13	13,24	13,25
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,22	8,23	8,24	8,31	8,58
Pengeluaran Riil Per kapita (dlm Ribuan Rp)	11.227	11.369	11.738	12.074	11.921
<b>IPM</b>	<b>73.97</b>	<b>74,25</b>	<b>74,79</b>	<b>75,29</b>	<b>75,56</b>

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2021

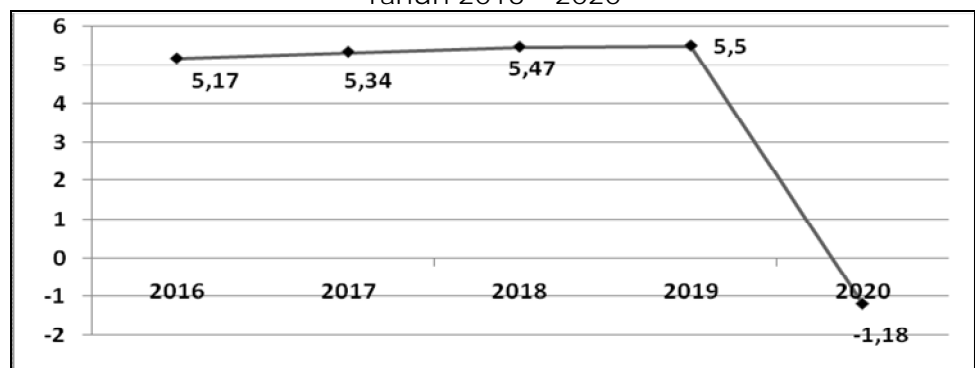
Selama periode 2019 - 2020, beberapa komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki harapan untuk hidup hingga 76,78 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2019. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang bersekolah selama 13,25 tahun, atau meningkat 0,01 tahun. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,58 tahun, atau meningkat 0,27 tahun. Sedangkan Pengeluaran per kapita masyarakat mengalami penurunan dari Rp12.074.000,- pada

tahun 2019, turun Rp153.000,- menjadi Rp11.921.000,- di Tahun 2020.

## 6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2019 menunjukkan kinerja positif. Pada Tahun 2016 sebesar 5,17%, Tahun 2017 sebesar 5,34%, Tahun 2018 sebesar 5,47%, dan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,5%. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -1,18 %. Hal ini disebabkan adanya dampak wabah pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten yang sebesar -1,18% masih lebih baik jika dibandingkan Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mengalami kontraksi sebesar -2,65% dan Pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam gambar 1.3

Gambar 1.3  
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten (%)  
Tahun 2016 – 2020

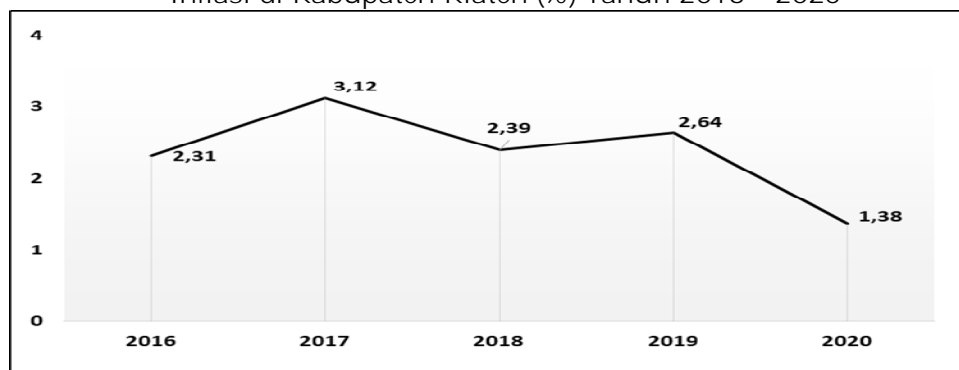


Sumber : BPS Kabupaten Klaten per 26 Februari 2021

## 7. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 sangat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 sebesar 1,38%. Kondisi inflasi sebesar 1,38% ini disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat yang terpengaruh oleh dampak Covid 19. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Gambar 1.4

Gambar 1.4  
Inflasi di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Klaten dan Bagian Perekonomian Setda Klaten tahun 2021

Berdasarkan gambar di atas, laju inflasi selama Tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya, inflasi di Kabupaten Klaten masih terkendali. Hal ini disebabkan oleh terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan berfungsinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020 tingkat inflasi Kabupaten Klaten sebesar 1,38%, dimana data ini diambil dari tingkat inflasi Kota Surakarta yaitu sebesar 1,38%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 penghitungan inflasi di Jawa Tengah Tengah hanya dilakukan di 6 (enam) Kabupaten/Kota dengan SBH (Standar Biaya Hidup) yaitu Cilacap, Purwokerto, Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal.

#### 8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 5,46% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2020 sebesar 68,33%. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 – 2020 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2017-2020 dapat dilihat dalam Tabel 1.6

Tabel 1.6  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %  
dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %  
di Kabupaten Klaten tahun 2017 – 2020

NO	URAIAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66,93	66,81	68,79	68,33
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,35	3,11	3,55	5,46

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2021

#### 9. Jumlah PNS

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2020, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Klaten sebanyak 8.990 PNS. Dengan rincian jumlah PNS laki-laki sebanyak 3.544 PNS dan jumlah PNS perempuan sebanyak 5.446 PNS. Rincian data PNS di Pemerintah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.7  
Data PNS Pemerintah Kabupaten Klaten  
menurut Unit Kerja Tahun 2020

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	Sekretariat Daerah	149	89	60
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39	32	7
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	96	59	37
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	38	28	10
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	34	20	14
6	Inspektorat	50	29	21
7	Satuan Polisi Pamong Praja	52	47	5
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29	21	8
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	21	11	10
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	291	267	24
11	Dinas Komunikasi Informatika	25	18	7
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	30	18	12
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20	14	6
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	43	21	22
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	43	25	18
16	Dinas Arsip dan Perpustakaan	24	10	14
17	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	226	136	90
18	Dinas Perhubungan	52	39	13
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	40	31	9
20	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	149	115	34
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33	19	14
22	Dinas Kesehatan	1483	308	1175
23	Dinas Pendidikan	5463	1851	3612
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31	14	17
25	Kecamatan Wedi	22	13	9
26	Kecamatan Kebonarum	15	7	8
27	Kecamatan Ngawen	14	5	9
28	Kecamatan Kalikotes	17	9	8
29	Kecamatan Jogonalan	15	8	7
30	Kecamatan Gantiwarno	15	8	7
31	Kecamatan Prambanan	20	10	10
32	Kecamatan Manisrenggo	21	15	6
33	Kecamatan Kemalang	21	17	4
34	Kecamatan Karangnongko	22	16	6
35	Kecamatan Jatinom	18	10	8
36	Kecamatan Tulung	23	17	6
37	Kecamatan Karanganyam	17	9	8

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
38	Kecamatan Polanharjo	17	14	3
39	Kecamatan Delanggu	16	9	7
40	Kecamatan Wonosari	22	16	6
41	Kecamatan Ceper	18	12	6
42	Kecamatan Juwiring	18	11	7
43	Kecamatan Pedan	17	13	4
44	Kecamatan Karangdowo	19	13	6
45	Kecamatan Cawas	21	11	10
46	Kecamatan Bayat	16	11	5
47	Kecamatan Trucuk	15	10	5
48	Kecamatan Klaten Tengah	45	25	20
49	Kecamatan Klaten Selatan	18	7	11
50	Kecamatan Klaten Utara	31	15	16
51	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	16	11	5
<b>TOTAL</b>		<b>8.990</b>	<b>3.544</b>	<b>5.446</b>

Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten tahun 2021

## 10. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pada tahun 2020 Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten ditargetkan sebesar Rp.2.509.533.202.687 dan realisasi pendapatan sebesar Rp.2.465.572.071.354 Sehingga dari pendapatan tersebut terealisasi sebesar 98,25% dari target yang telah ditentukan. Adapun rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.8  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	304.546.856.100	246.558.797.299	329.963.261.898	133,83
1	Pendapatan Pajak Daerah	132.050.000.000	85.584.000.000	116.132.536.269	135,69
2	Hasil Retribusi Daerah	14.123.603.600	10.707.170.000	14.760.621.483	137,86
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.285.884.000	14.145.547.096	17.577.664.499	124,26
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.087.368.500	136.122.080.203	181.492.439.647	133,33
<b>II</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.707.736.367.000	1.533.062.670.188	1.516.494.102.076	98,92
1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.379.096.000	41.137.404.000	41.978.389.803	102,04
2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.297.168.894.000	1.175.695.180.000	1.167.212.792.000	99,28
3	Dana Transfer Khusus	371.188.377.000	316.230.086.188	307.302.920.273	97,18

<b>III</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	709.524.263.000	729.911.735.200	619.114.707.380	84,82
	1 Pendapatan Hibah	102.717.000.000	116.145.580.000	115.170.740.000	99,16
	2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	169.982.257.000	158.455.399.200	163.789.663.880	103,37
	3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51.752.868.000	57.067.155.000	57.067.155.000	100
	4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	17.397.000.000	14.804.313.000	85,1
	5 Dana Desa	385.072.138.000	380.846.601.000	268.282.835.500	70,44
	<b>PENDAPATAN</b>	2.721.807.486.100	2.509.533.202.687	2.465.572.071.354	98,25

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2021 (data per tanggal 23 Februari 2021)

### 11. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 2.917.442.203.797,28 dan dapat direalisasikan Rp. 2.432.600.729.577 atau mencapai 83,38%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.9  
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.989.682.907.100	2.093.641.067.774	1.737.312.107.695	82,98
1 Belanja Pegawai	1.225.991.040.200	1.035.679.423.323	931.415.680.664	89,93
2 Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	1.988.515.348	99,43
3 Belanja Hibah	96.824.937.000	99.744.075.000	97.547.602.309	97,8
4 Belanja Bantuan Sosial	6.118.500.000	6.118.500.000	3.511.725.000	57,4
5 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	14.617.360.400	15.780.271.281	13.255.263.593	84
6 Belanja Bantuan Keuangan	641.131.069.500	713.551.893.700	599.002.566.700	83,95
7 Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	220.766.904.470	90.590.754.081	41,03
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	916.644.391.000,00	823.801.136.023,28	695.288.621.882	84,40
1 Belanja Pegawai	104.295.604.303,56	123.971.422.711,56	114.604.642.135	92,44
2 Belanja Barang dan Jasa	514.300.530.379,44	503.703.597.334,72	423.557.260.173	84,09
3 Belanja Modal	298.048.256.317	196.126.115.977	157.126.719.574	80,12
<b>TOTAL BELANJA</b>	2.906.327.298.100	2.917.442.203.797,28	2.432.600.729.577	83,38

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2021 (data per tanggal 23 Februari 2021)



## 12. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Untuk total pendapatan, total belanja, total pembiayaan dan SILPA tahun 2020 serta SILPA tahun sebelumnya di Kabupaten Klaten secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.10  
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah  
Tahun 2020

URAIAN		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)
I	<b>PENDAPATAN</b>	2.721.807.486.100	2.509.533.202.687	2.465.572.071.354
II	<b>BELANJA</b>	2.906.327.298.100	2.917.442.203.797,28	2.432.600.729.577
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	- 184.519.812.000	- 407.909.001.110,28	32.971.341.777
III	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
A	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	185.519.812.000	408.909.001.110,28	408.687.702.548,28
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	159.519.812.000	382.909.001.110,28	382.687.702.548,28
	2. Pencairan dana cadangan.	26.000.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000
B	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	184.519.812.000	407.909.001.110,28	407.687.702.548,28
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	-	<b>0</b>	440.659.044.325,28

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2021 (data per tanggal 23 Februari 2021)

## 13. Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan Bencana

### a. Bencana Non Alam

Dalam menghadapi perkembangan terkait pandemi virus corona atau Covid-19 Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menangani Covid-19 pada tanggal 16 Maret 2020. Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Tanggal 2 April 2020 Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah, dimana semua Pemerintah Daerah untuk ikut berperan dalam penanganan wabah virus Covid-19 dengan melakukan *refocusing* alokasi penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Pada tanggal 1 April 2020 Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah adanya kejadian salah satu warganya positif terjangkit Virus Covid-19 dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/115 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Disebabkan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten. Adapun tugas Gugus Tugas tersebut adalah menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/115 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Disebabkan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten, Gugus Tugas ini dipimpin oleh Bupati Klaten. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2020 Pemerintah Kabupaten Klaten mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/156 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/115 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Disebabkan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten.

Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5120/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjadi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/298 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Virus Corona Disease* (Covid-19) di Kabupaten Klaten pada tanggal 8 Oktober 2020. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/298 Tahun 2020 maka Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/115 Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/156 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **b. Bencana Alam**

Dalam menghadapi kondisi Gunung Merapi yang mengalami peningkatan aktivitas dari waspada (level 2) menjadi siaga (level 3) maka antisipasi terhadap Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menerbitkan SK Bupati Klaten Nomor 360/331 Tahun 2020 tentang Komando Penanganan Darurat Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Klaten.
2. Menerbitkan SK Bupati Klaten Nomor 360/703/2020 tentang Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Merapi di Kabupaten Klaten.
3. Menerbitkan SK Bupati Klaten Nomor 360/337 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten.
4. Pembentukan Posko Terpadu Siaga Merapi Kabupaten Klaten dan Posko Lapangan di Kecamatan Kemalang.
5. Penyiapan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) di shelter Kebondalem Lor Prambanan, Demak Ijo Karangnongko dan Menden Kebonarum. Penyiapan Tempat Evakuasi Sementara (TES) di Desa Balerante dan Tegalmulyo Kecamatan Kemalang serta pembuatan sekat-sekat di lokasi tersebut.
6. Menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kesiapsiagaan erupsi Gunung Merapi yang saat ini berada dalam di level Siaga antara lain berupa Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp. 1 Milyar, masker kain sebanyak 200.000 buah, rapid test antigen sebanyak 2500 unit dan hand sanitizer sebanyak 250 jerigen masing-masing 4 liter. Bantuan diserahkan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo di Desa Balerante Kecamatan Kemalang.
7. Menerbitkan Surat Bupati Klaten selaku Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Klaten kepada Camat se-Kabupaten Klaten Nomor 19/St.Tgs/Cov19/2020 tentang pembuatan isolasi terpusat/tempat karantina Covid-19 di tingkat Desa dan Kecamatan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Klaten.

## BAB II

### PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama Tahun 2020 terjadi dikarenakan adanya dinamika yang terjadi selama tahun 2020. Perubahan keuangan daerah dipengaruhi dari kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun realisasi keuangan tahun sebelumnya (2019). Dalam rangka menangani masalah pandemi covid-19, sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah, baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Langkah utama yang sudah dilakukan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi covid-19. Perppu tersebut secara garis besar membahas kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi landasan pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pemerintah.

Penyesuaian anggaran pemerintah, yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan salah satu kunci awal respon yang harus dilakukan instansi pemerintah dalam menghadapi perkembangan masalah ini. Dampak dari pandemi Covid-19 pada perekonomian dan keuangan diperkirakan bukan hanya berdampak pada tahun ini saja, tetapi juga dapat berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat, khususnya bagi instansi pemerintah untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan daerah. Penyesuaian anggaran Pemerintah Kabupaten Klaten, yang meliputi anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada tahun 2020 dilakukan sebanyak sebelas (11) kali dengan mempedomani aturan dari pemerintah Pusat maupun Provinsi. Perkembangan perubahan anggaran selama tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Perkembangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**selama Tahun 2020**

Uraian	Perda/Perkada	Dasar Hukum Perubahan
Perubahan 1	Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 Tgl 19 Maret 2020	a Surat Gub Jawa Tengah 24 Desember 2019 No 900/0001344 Perihal Penyampaian alokasi Belanja Bankeu APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020
		b Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Reguler Tahap 1 Gelombang 1 Tahun 2020

Uraian	Perda/Perkada	Dasar Hukum Perubahan
Perubahan 2	Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 Tgl 2 April 2020	a Permendagri No 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
		b Intruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
		c PMK No 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, DAU, DID, TA 2020 dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Perubahan 3	Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 Tgl 9 April 2020	a Permendagri No 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
		b Intruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
		c Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
Perubahan 4	Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketempat Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 Tgl 22 April 2020	a Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2020 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
		b Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Belanja Negara TA 2020
		c Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional (Keputusan Bersama Mendagri 119 dan Menkeu 177)
Perubahan 5	Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 Tgl 14 Mei 2020	a Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2020 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Uraian	Perda/Perkada	Dasar Hukum Perubahan
		<p>b Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Belanja Negara TA 2020</p> <p>c Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional (Keputusan Bersama Mendagri 119 dan Menkeu 177)</p>
		d KMK RI Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/ Atau DBH terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD TA 2020
Perubahan 6	Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 Tgl 30 Juni 2020	a Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020
Perubahan 7	Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 Tgl 17 Juli 2020	<p>a KMK RI No. HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</p> <p>b KMK RI No 15/KM.07/2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang III TA 2020</p>
Perubahan 8 (Perubahan APBD)	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten Tahun Anggaran 2020; Tgl 21 September 2020	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
	Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten TA 2020; Tgl 21 September 2020	

Uraian	Perda/Perkada	Dasar Hukum Perubahan
Perubahan 9	Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Perbup Klaten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten TA 2020; Tanggal 12 November 2020	a Permendagri No. 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020
		b PMK RI No. 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID Tambahan Periode Ke tiga Tahun Anggaran 2020
Perubahan 10	Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perbup Klaten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten TA 2020; Tanggal 11 Desember 2020	a Permendagri No. 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020
		b Permendagri No. 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD
		c KMK RI No 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang IV TA 2020
		d Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4462/B/PR/2020 tanggal 08 Oktober 2020 perihal Permintaan Penambahan Dana Tunjangan Guru PNSD melalui DAK Non Fisik 2020
Perubahan 11	Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Perbup Klaten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten TA 2020; Tanggal 28 Desember 2020	a Permendagri No. 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020
		b Surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PR.04.01/I/2158/2020 Hal : Rekomendasi Penambahan Anggaran Insentif untuk Tenaga Kesehatan Daerah s.d. Bulan Desember 2020 Gelombang VI, tanggal 17 Desember 2020
		c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten tahun 2020

## 2.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah maupun nasional dan dinamika kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, dan serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019, dari sisi pendapatan perlu penyesuaian baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini dipengaruhi dengan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Klaten serta perubahan kebijakan dengan penganggaran lain yang harus disesuaikan, terutama sebagai dampak adanya wabah Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020. Beberapa perubahan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Pada sektor pemerintahan, akibat pandemi Covid-19, terjadi penurunan aktivitas ekonomi masyarakat yang menyebabkan penurunan pendapatan daerah, sementara belanja pemerintah mengalami peningkatan terutama khususnya pada bidang kesehatan dan sosial. Perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer dari pusat berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang III TA 2020.
2. Perubahan pendapatan daerah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain :
  - a) Penyesuaian Pendapatan Hibah yang bersumber dari Dana BOS mempedomani Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Republik Indonesia Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler tahap I Gelombang I Tahun 2020, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 350/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler tahap I Gelombang II Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 419/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler tahap I Gelombang III Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.

- b) Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta menampung Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

Gambaran ringkas perubahan pendapatan dan realisasi pendapatan disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.2  
Perubahan dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	304.546.856.100	246.558.797.299	329.963.261.898	133,83
1	Pendapatan Pajak Daerah	132.050.000.000	85.584.000.000	116.132.536.269	135,69
2	Hasil Retribusi Daerah	14.123.603.600	10.707.170.000	14.760.621.483	137,86
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.285.884.000	14.145.547.096	17.577.664.499	124,26
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.087.368.500	136.122.080.203	181.492.439.647	133,33
<b>II</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.707.736.367.000	1.533.062.670.188	1.516.494.102.076	98,92
1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.379.096.000	41.137.404.000	41.978.389.803	102,04
2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.297.168.894.000	1.175.695.180.000	1.167.212.792.000	99,28
3	Dana Transfer Khusus	371.188.377.000	316.230.086.188	307.302.920.273	97,18

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
III	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	709.524.263.000	729.911.735.200	619.114.707.380	84,82
1	Pendapatan Hibah	102.717.000.000	116.145.580.000	115.170.740.000	99,16
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	169.982.257.000	158.455.399.200	163.789.663.880	103,37
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51.752.868.000	57.067.155.000	57.067.155.000	100
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	17.397.000.000	14.804.313.000	85,1
5	Dana Desa	385.072.138.000	380.846.601.000	268.282.835.500	70,44
	<b>PENDAPATAN</b>	2.721.807.486.100	2.509.533.202.687	2.465.572.071.354	98,25

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2021 (data per tanggal 23 Februari 2021)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; dan (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah telah melampaui target yang diharapkan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 sebesar Rp.329.963.261.898 atau mencapai 133,83% dari target yang diharapkan sebesar Rp. 246.558.797.299. Bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp. 18.314.860.242,56 atau meningkat sebesar 6%.

Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Berdasarkan tabel diatas untuk Dana Perimbangan realisasinya pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.516.494.102.076 atau mencapai 98,92% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 1.533.062.670.188

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Klaten yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan Dana Desa. Sedang untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 619.114.707.380 dari target Rp. 729.911.735.200 atau sebesar 84,82%

Permasalahan secara umum dalam pengelolaan pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Situasi pandemi covid -19 yang mengakibatkan sensitifitas dalam upaya pemungutan maupun penagihan pajak;
- b. Kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak masih belum sesuai yang diharapkan;
- c. Kemampuan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah;
- d. Identifikasi potensi sumber pendapatan belum optimal;
- e. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pendapatan terutama pendapatan asli daerah belum sesuai kebutuhan baik jumlah personel maupun kemampuan mengelola.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan selama tahun 2020 untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berharap kebijakan pemerintah pusat dalam menanggulangi bencana pandemic covid 19 dapat berjalan sesuai harapan dan masyarakat dapat berperan aktif menaati dan mengikuti kebijakan tersebut sehingga pandemi dapat segera diatasi;
- b. Inovasi dalam hal sosialisasi tentang kewajiban masyarakat dalam hal perpajakan sehingga kesadaran diharapkan dapat lebih meningkat;
- c. Studi potensi dengan melibatkan akademisi sehingga potensi sumber pendapatan dapat teridentifikasi dengan baik sekaligus upaya meningkatkan optimalisasi pengelolaan potensi tersebut;
- d. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak terutama dari segi kualitas melalui pen didikan ataupun pelatihan terkait pengelolaan pajak;
- e. Memberikan fasilitas kemudahan kepada wajib pungut dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak.

## **2.2 KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH DAN REALISASI BELANJA DAERAH**

Dari sisi belanja daerah, memperhatikan perkembangan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berdampak pada Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Klaten, maka dilakukan peninjauan ulang dan perubahan belanja daerah, dengan beberapa kebijakan antara lain :

1. Perubahan fokus belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Intruksi Presiden

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19), Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangann Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

2. Perubahan Belanja Tidak Langsung, mencakup belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dengan pertimbangan :
  - a. Belanja Pegawai, memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD, tunjangan guru, insentif pajak dan retribusi daerah (meliputi insentif pajak dan retribusi daerah tahun 2019 serta kurang bayar insentif pajak dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya), juga kebijakan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK/P3K);
  - b. Belanja Hibah, belanja bantuan sosial serta belanja bantuan keuangan dengan mempertimbangkan aspek manfaat dari pemberian bantuan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dengan mempedomani ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Perubahan pada pos belanja ini didasarkan pada perhitungan perubahan pendapatan pajak dan retribusi daerah serta kurang salur tahun 2019 (baik kurang salur belanja bagi hasil pajak atau pun retribusi kepada pemerintah desa pada tahun anggaran sebelumnya)
  - d. Belanja Bantuan Keuangan, fokus pada belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa diarahkan pada kebijakan antara lain :

- 1) Bantuan keuangan khusus kepada Desa merupakan bentuk bantuan stimulan kepada Pemerintah Desa yang bersifat tidak terus menerus, dengan tetap memperhatikan keswadayaan dan semangat gotong-royong masyarakat desa dan peruntukannya ditentukan oleh pemberi bantuan (dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui APBD). Bantuan keuangan khusus diprioritaskan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya yang disinergikan dengan arah kebijakan tujuan pembangunan daerah.
- 2) Bantuan keuangan khusus kepada Desa diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan dan akselerasi pemerataan pembangunan desa dalam upaya mengatasi kesenjangan antar wilayah serta mampu mengatasi permasalahan strategis desa yang membawa daya ungkit terhadap pencapaian pembangunan daerah.
- 3) Bantuan keuangan khusus kepada Desa pada perubahan APBD Tahun 2020 ditekankan pada penanganan kedaruratan maupun penanganan pasca dampak Covid-19 sebagai implementasi jangka pendek pada tahun berjalan, yang diarahkan pada pemulihan 3 sektor utama yaitu kesehatan, sosial dan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan serta penerapan tatanan normal baru (*new normal*), dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan desa;
- 4) Peruntukkan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Desa, digunakan untuk kegiatan super prioritas pembangunan desa yang terkena dampak reformulasi kegiatan dalam APBDes dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan desa serta disinergikan dengan pembangunan daerah;
- 5) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa dilaksanakan dengan pola padat karya atau swakelola dengan melibatkan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) Bantuan keuangan khusus kepada Desa difokuskan pada 3 (tiga) pembidangan utama, yaitu :
  1. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, yaitu pembangunan sarana prasarana infrastruktur desa yang mengarah pada pemenuhan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar masyarakat yang mampu meningkatkan kualitas hidup

masyarakat desa serta dapat memacu pertumbuhan ekonomi, yang meliputi :

- a. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Jalan Poros Desa;
  - b. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan permukiman;
  - c. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa;
  - d. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman;
  - e. Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jembatan Desa;
  - f. Pengadaan Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman;
  - g. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau Tingkat Desa;
  - h. Penyediaan sarana prasarana kesehatan pada ruang terbuka/ ruang publik tingkat Desa;
  - i. Pembangunan/ rehabilitasi/ pengadaan sarana prasarana Pengelolaan Sampah Tingkat Desa.
2. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, difokuskan pada pemenuhan sarana prasarana kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dalam arti luas, yang meliputi:
- a. Pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana kesehatan tingkat Desa;
  - b. Pemenuhan Alat Kesehatan pada Pos Kesehatan Desa;
  - c. Pembangunan/ rehabilitasi Pos Keamanan Desa beserta kelengkapannya;
  - d. Pembangunan/ rehabilitasi Pos Kesiapsiagaan Bencana Sala Lokal Desa;
  - e. Pembangunan/ peningkatan rehabilitasi Tempat Ibadah Keagamaan beserta sarana pendukungnya;
  - f. Pengadaan sarana prasaran Kesenian/Kebudayaan Milik Desa;
  - g. Pengadaan sarana prasarana sosial kemasyarakatan lainnya.
3. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, diarahkan pada pemenuhan sarana prasarana masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang meliputi :

- a. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Balai Pelatihan Tingkat Desa;
  - b. Pengadaan sarana prasarana pendukung Balai Pelatihan Tingkat Desa;
  - c. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa;
  - d. Pengadaan sarana prasarana Pertanian (Alat Produksi dan Pengolahan Hasil) Milik Desa;
  - e. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Pasar Desa beserta kelengkapannya.
3. Perubahan Belanja Langsung program kegiatan dengan mempedomani kebijakan pembangunan daerah (prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah), antara lain :
- a. Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penyesuaian program kegiatan dimaksud mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan/regulasi dan/atau petunjuk teknis yang terbit setelah APBD ditetapkan.
  - b. Penyesuaian sasaran dan target indikator kinerja capaian program kegiatan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaannya dan/atau proyeksi capaian sampai dengan triwulan II serta perkembangan dinamika permasalahan dan isu strategis yang berkembang.
  - c. Penyesuaian standarisasi/satuan harga barang pada rincian belanja program kegiatan.
  - d. Penambahan, pengurangan dan pergeseran program/kegiatan dan anggarannya dilaksanakan dengan memperhatikan :
    - 1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang harus dilaksanakan;
    - 2) Program dan kegiatan yang pencapaian target kinerjanya harus dikurangi/ditingkatkan/disesuaikan dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah;
    - 3) Program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas serta penting untuk dilaksanakan dalam rangka menangani permasalahan dan isu-isu strategis yang ada.

Gambaran ringkas perubahan belanja daerah dan realisasi belanja daerah disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Perubahan dan Realisasi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Klaten Tahun 2020**

URAIAN		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		1.989.682.907.100	2.093.641.067.774	1.737.312.107.695	82,98
1	Belanja Pegawai	1.225.991.040.200	1.035.679.423.323	931.415.680.664	89,93
2	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	1.988.515.348	99,43
3	Belanja Hibah	96.824.937.000	99.744.075.000	97.547.602.309	97,8
4	Belanja Bantuan Sosial	6.118.500.000	6.118.500.000	3.511.725.000	57,4
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	14.617.360.400	15.780.271.281	13.255.263.593	84
6	Belanja Bantuan Keuangan	641.131.069.500	713.551.893.700	599.002.566.700	83,95
7	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	220.766.904.470	90.590.754.081	41,03
<b>BELANJA LANGSUNG</b>		916.644.391.000,00	823.801.136.023,28	695.288.621.882	84,40
1	Belanja Pegawai	104.295.604.303,56	123.971.422.711,56	114.604.642.135	92,44
2	Belanja Barang dan Jasa	514.300.530.379,44	503.703.597.334,72	423.557.260.173	84,09
3	Belanja Modal	298.048.256.317	196.126.115.977	157.126.719.574	80,12
<b>TOTAL BELANJA</b>		2.906.327.298.100	2.917.442.203.797,28	2.432.600.729.577	83,38

*Sumber : BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2021 (data per tanggal 23 Februari 2021)*

Belanja tidak langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten pada tahun 2020 sebesar Rp.2.093.641.067.774 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.737.312.107.695 atau sebesar 82,98%.

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja Langsung pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.823.801.136.023,28 dengan realisasi sebesar Rp. 695.288.621.882 atau 84,40%.

Permasalahan secara umum dalam pengelolaan belanja daerah yang ada di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Honor di ajukan secara LS terkendala untuk kode pajak PNS (402) dan Non PNS (100).



- b. Kurang memperhatikan ketersediaan dana di Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD terkait pembayaran listrik secara Autodebet.
- c. Masih ada kesalahan pembayaran dan penginputan pembayaran secara tunai dan non tunai.
- d. Kesalahan input Kode Pajak pada SIMDA.
- e. Kurangnya pemahaman terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana TU (Tambah Uang).

Sedangkan upaya yang telah dilakukan selama tahun 2020 untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai konsultasi dengan KPP Pratama kode disamakan (100).
- b. Menginformasikan kepada SKPD terkait penggunaan Autodebet untuk memperhatikan ketersediaan dana di Rekening Bendahara Pengeluaran.
- c. Menghimbau kepada Bendahara Pengeluaran untuk memedomi Perbup 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dan lebih cermat dalam penginputan di SIMDA.
- d. Menghimbau kepada seluruh Bendahara Pengeluaran untuk lebih cermat dalam menginput Kode Pajak pada SIMDA.
- e. Menghimbau kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran SKPD untuk memedomi Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten terkait pengajuan/ pelaksanaan kegiatan yang melalui dana TU.

### **2.3 KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH**

Kebijakan Pembiayaan Daerah ditempuh sebagai langkah upaya menutup defisit anggaran dan/atau penggunaan surplus anggaran. Dalam hal ini, pada perubahan kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 tidak terlepas dari realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Jabaran ringkas perubahan kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pembiayaan dari semula sebesar Rp.185.519.812.000,00 menjadi Rp.408.909.001.110,28 yang berasal dari Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk mendanai defisit dari belanja daerah sertai membiayai pengeluaran pembiayaan.

2. Pengeluaran pembiayaan dari semula sebesar Rp.1.000.000.000,00 tetap atau tidak mengalami perubahan.

Adapun perubahan pembiayaan daerah dan Realisasi pembiayaan daerah tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4  
Perubahan dan Realisasi Pembiayaan Daerah  
Tahun 2020

URAIAN		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	2.721.807.486.100	2.509.533.202.687	2.465.572.071.354
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	2.906.327.298.100	2.917.442.203.797,28	2.432.600.729.577
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	- 184.519.812.000	- 407.909.001.110,28	32.971.341.777
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>A</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	185.519.812.000	408.909.001.110,28	408.687.702.548,28
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	159.519.812.000	382.909.001.110,28	382.687.702.548,28
	2. Pencairan dana cadangan.	26.000.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	184.519.812.000	407.909.001.110,28	407.687.702.548,28
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	-	<b>0</b>	440.659.044.325,28

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2021 (data per tanggal 23 Februari 2021)

Permasalahan secara umum dalam pengelolaan pembiayaan daerah yang ada di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Sebagian besar SiLPA digunakan untuk menutup defisit belanja daerah dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah.
- b. SiLPA Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari SiLPA bebas dan SiLPA terikat. SiLPA terikat ini harus dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020 pada belanja yang sama dengan Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan selama tahun 2020 untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak dan retribusi melalui penyesuaian aturan/kebijakan dan melakukan inovasi khususnya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- b. Melakukan penghematan terhadap belanja daerah yang sumber dananya tidak terikat, sehingga SiLPA yang diperoleh dalam penerimaan pembiayaan betul-betul SiLPA murni/bebas.



## BAB III

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat *konkuren* atau urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yaitu semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

#### 3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Urusan Sosial.

##### 1. Urusan Pendidikan

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan pendidikan adalah Dinas Pendidikan, TK Negeri Kabupaten, SD Negeri, SMP/SLTP Negeri se-Kabupaten dan SKB Cawas.

##### A. Capaian Kinerja Program

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Pendidikan Pada tahun 2020 yaitu Dinas Pendidikan, TK Negeri Kabupaten, SD Negeri se-Kabupaten, SMP Negeri se-Kabupaten dan SKB Cawas. Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.186.227.728.876 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.171.471.706.594 atau sebesar 92,08%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 698.106.915.713 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.633.425.316.288 atau sebesar 90,73%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Indikator Kinerja Sasaran dan Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pendidikan Tahun 2020**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	98,30	98,37	100,07
	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	90	90,57	100,6
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD	anak	43.937	43.954	100,04
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	92,99	80,60	86,68
Pendidikan Non Formal	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,74	99,59	99,85
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,74	99,59	99,85

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A	%	98,05	96,02	97,93
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B	%	91,53	100,48	109,78
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	%	87,44	88,54	101,26
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	%	68,82	71,14	103,37
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/ MA	%	88,88	92,60	104,19
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01	100,00
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,08	0,08	100,00
	Angka Kelulusan SD/MI	%	98,87	100	101,14
	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	98,17	100	101,86
	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/ MA	%	89,78	92,60
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP	Penyediaan pendanaan biaya operasi sekolah	siswa	146.656	136.090	92,80

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	86	87,97	102,29
	Prosentase Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	98,87	99,60	100,74
	Prosentase Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	94,15	98,52	104,64
	Rasio Guru terhadap murid jenjang SD/ MI	Rasio	1 : 15	1 : 14	98,67
	Rasio Guru terhadap murid jenjang SMP/ MTs	Rasio	1 : 15	1 : 15	100,00

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01$ %	Sangat Tinggi
2	$75,01$ % $\leq 90$ %	Tinggi
3	$65,01$ % $\leq 75$ %	Sedang
4	$50,01$ % $\leq 65$ %	Rendah
5	$\leq 50$ %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja sasaran kategori "sangat tinggi" sebanyak 2 Indikator kinerja atau semua Capaian indikator kinerja sasaran urusan Pendidikan masuk kategori "sangat tinggi".



- Terdapat 20 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 19 Indikator dan Capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator.

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan pada tahun 2020, terdapat inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai berikut.

Tabel 3.2  
Inovasi Pelaksanaan Urusan Pendidikan Tahun 2020

NO.	INOVASI TAHUN 2020	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	Backbone Data Pendidikan	informasi Data Pokok Pendidikan di Kabupaten/Kota meliputi Data Pokok Satuan Pendidikan (NPSN), Data Pokok Peserta Didik (NISN), dan Data Pokok Pendidik & Tenaga Kependidikan (PTK). Masing-masing data pokok tersebut terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/SMP/SMA/SMK), Pendidikan Non Formal (PNF), maupun Pendidikan Khusus. Data Pokok Pendidikan yang ditampilkan pada website ini bersumber dari Data Referensi ( <a href="http://referensi.data.kemdikbud.go.id/">http://referensi.data.kemdikbud.go.id/</a> ) yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2.	Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP)	Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan
3.	Sistem Pendataan Akreditasi Sekolah (Sispena)	Sispena adalah sistem informasi penilaian akreditasi sekolah berbasis web
4.	BOS Online	Sistem Informasi Bantuan Operasional Sekolah

### B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pendidikan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Kebijakan Strategis urusan Pendidikan Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Memberikan peningkatan Kesejahteraan bagi GTT/PTT	Keputusan Bupati nomor 420/142 tahun 2020 tentang Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Honorer Kategori II dan Non Kategori II di Kabupaten Klaten Tahun 2020	Peningkatan kesejahteraan GTT/PTT
2.	Penutupan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Klaten	Keputusan Bupati nomor 421.2/272 Tahun 2020 tentang Penutupan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Klaten	Menggabungkan SD Negeri yang jumlah siswanya kurang dari 60 ke sekolah yang terdekat untuk efisiensi
3.	Zonasi Sekolah Dalam Rangka Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Kabupaten Klaten	Keputusan Bupati nomor 420/165 tahun 2020 tentang Zona Sekolah Dalam Rangka Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Tingkat Kabupaten Klaten	Menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga dan menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pendidikan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 80,34% dengan Belanja Langsung sebesar 87% membuktikan realisasi Belanja masih belum optimal dan masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Apalagi Belanja Tidak Langsung dalam urusan pendidikan lebih banyak berisi belanja pegawai seharusnya	Pada tahun anggaran 2020 Pelaksana urusan pendidikan berupaya memperbaiki kinerja keuangan baik pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Realisasi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 92,08% dan realisasi	Peningkatan realisasi anggaran

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>lebih mudah untuk direncanakan sehingga semestinya realisasi atas anggaran tersebut dapat sesuai dengan targetnya. sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Pendidikan sebaiknya memperbaiki penyusunan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran sesuai dengan kebutuhannya</p>	<p>belanja tidak langsung sebesar 90,73%. Realisasi keuangan Belanja langsung maupun tidak langsung meningkat pada tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi target maupun yang tidak terlaksana, Dinas Pendidikan sudah memberikan laporan secara tertulis kepada Tim Pengendali Kegiatan Kabupaten Klaten.</p>	
2.	<p>Beberapa pengukuran target indikator sepertinya tidak direncanakan dengan baik dan belum memperhatikan informasi baseline indicator dan/atau capaian indikator dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terlihat ada beberapa indikator kinerja baik sasaran maupun program yang memiliki realisasi diatas angka100%. Beberapa pengukuran perlu direvisi atau ditinjau dari aspek menggunakan indikator kinerja sehingga dapat diukur dengan baik. Di beberapa indikator kineerja, masih terdapat capaian yang belum mencapai nilai 100%, akan tetapi capaian tersebut masih dalam kategori sangat tinggi. Beberapa permasalahan yang perlu disoroti adalah keterkaitan guru kelas PNS untuk SD Negeri yang saat ini diisi dengan Guru Wiyata Bakti sambil menunggu usulan CPNS ke Instansi terkait. Akan tetapi belum diperlihatkan dan direview berdasarkan data riil, seberapa sebenarnya rasio Guru PNS per rombel, sehingga dapat dipastikan. apakah masalah tersebut adalah kekurangan guru PNS untuk tiap kelas, atau masalah pemerataan guru PNS.</p>	<p>Rekomendasi/catatan DPRD Kabupaten Klaten terkait pengukuran target indikator program dan kegiatan. Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra. Sehingga sangat dimungkinkan capaian kinerja dapat melebihi target yang telah ditetapkan dan juga kurang dari target dengan berbagai permasalahan dan faktor penyebab. Terkait permasalahan kebutuhan guru PNS di SD Negeri, maka setelah dilakukan perhitungan, di Kabupaten Klaten terjadi kekurangan guru kelas untuk SD Negeri sebanyak 1951, guru agama sebanyak 507 dan guru penjaskes sebanyak 294 sehingga total kekurangan guru sebanyak 2752. Perhitungan kekurangan guru tersebut</p>	<p>Peningkatan capaian kinerja</p>

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pendidikan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 3.5  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan pendidikan tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Masih ada anak usia sekolah tidak sekolah	Melakukan pendataan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kantor Kementerian Agama di bawah koordinasi Bappeda melakukan pendataan dan tracking terhadap anak usia sekolah yang tidak sekolah. Hasil tracking anak tidak sekolah, maka anak untuk melanjutkan pendidikan melalui Pendidikan Kesetaraan sesuai jenjangnya atau kembali ke sekolah formal
2.	Terjadinya kekosongan kepala sekolah jenjang pendidikan SD Negeri	Dilaksanakan seleksi calon kepala sekolah dengan beberapa tahapan dimulai dengan seleksi administrasi, seleksi substansi dan diklat calon kepala sekolah
3	Rasionalisasi anggaran	Dengan adanya pandemi covid-19, ada beberapa kegiatan dilakukan rasionalisasi sehingga Program dan Kegiatan Tahun 2020 tidak dilaksanakan. Untuk melanjutkan kegiatan tersebut, maka diusulkan kembali beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan
4	Masih rendahnya lembaga PAUD yang terakreditasi minimal B	Fasilitasi dan pendampingan kepada lembaga PAUD dengan tujuan lembaga PAUD menjadi lembaga yang memiliki manajemen pengelolaan yang baik dan mendorong lembaga PAUD untuk ikut akreditasi dengan mendaftar secara online di aplikasi Sispena
5.	Belum terpenuhinya aksesibilitas sarana layanan pendidikan dasar dalam kondisi layak, termasuk sarana IT	Belum semua sekolah memiliki sarana IT untuk menunjang pembelajaran secara daring/online terutama pada masa pandemi covid-19. Upaya yang dilakukan adalah mengusulkan dan menganggarkan pengadaan sarana TIK di tahun 2021 khususnya yang bersumber dari DAK Fisik

## 2. Urusan Kesehatan

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar Kesehatan adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Bagian Kesra.

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.249.025.401.906,28 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 211.469.696.830 atau sebesar 84,91%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.112.124.215.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.102.802.879.362 atau sebesar 91,68%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan secara rinci beserta Permasalahan dan Solusi dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Urusan Kesehatan Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. menurunkan angka kesakitan. kematian dan kecacatan	Menurunnya kasus kematian Ibu	kasus	15	17	86,6 *)
	Menurunnya Angka Kematian Bayi	angka	10,09	9,34	107,4 *)
	Menurunnya angka kematian Balita	angka	1,63	1,52	106,7 *)
	Menurunnya prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,83	0,94	86,74 *)
*) rumus = $(2 \times \text{target} - \text{realisasi}) / \text{target} \times 100\%$ untuk menghitung indikator kinerja dengan kondisi semakin rendah realisasi semakin baik					
Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumah sakitan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit	Usia Harapan Hidup	tahun	76,68	76,78	100

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Ibu hamil (K4)	%	99	93,44	94,38
	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3)	%	100	96,92	96,92
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir (KN3)	%	100	96,70	96,70
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	98	92,71	94,60
	Cakupan skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)	%	100	0	0
	Cakupan Kunjungan Bayi	%	99,6	96,03	96,41
	Cakupan BBLR	%	5,02	5,91	117,73
	Cakupan Anemia Wanita Usia Subur	%	30	16,3	145,67*)
Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan obat generik berlogo dalam persediaan obat	%	100	98	98,00
Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan	%	100	89,85	89,85
	Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	%	100	0	0
Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa <i>open defecation free</i> (ODF)	%	100	100	100,00
	Cakupan Tablet Tambah Darah Bagi Remaja	%	40	52,31	130,78
	Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis	%	100	100	100,00
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100,00
	Kebijakan Yang Dibuat	Jumlah/ Buah	9	13	144,44
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	80	96,26	120,33
	Persentase Desa Yang Memanfaatkan CSR Untuk Kesehatan	%	24	24	100,00
	Proporsi Posyandu Mandiri	%	51	57,3	112,35
	Persentase Desa Didampingi SMD MMD	%	100	100	100,00

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada usia produktif (15-59) thn	%	90	72,54	80,60
	Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia (>= 60 th)	%	100	73,14	73,14
	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TBC	%	100	47,86	47,86
	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	%	100	26,51	26,51
	Cakupan Pelayanan Kesehatan openderit Diabetis mellitus	%	100	74,35	74,35
	Cakupan Pelayanan Kesehatan openderit Gangguan jiwa berat	%	100	85,86	85,86
	Cakupan Pelayanan skrining Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	90	80,8	89,78
	Non Polio AFP Rate 2/100.000 Anak Usia <15 Tahun	%	100	83,33	83,33
	Verifikasi Sinyal KLB > 75 Alert	%	100	100	100,00
	Discharded Campak > 2/100.000 Penduduk	%	100	133,80	133,80
	Proporsi KLB PD3I Ditanggulangi < 24 Jam	%	100	100	100,00
	Respon PIE (Penyakit Infeksi Emerging) < 24 Jam	%	100	100	100,00
	Persentase Kabupaten Yang Mencapai 80% IDL Pada Bayi	%	100	100	100,00
	Persentase Anak Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	95	87,4	92,00
	Cakupan Bias C/DT/TD	%	98	98,05 / 94,36 / 99,15	100,05 / 96,28 / 101,17

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100,00
	Cakupan bayi yang dapat ASI Eksklusif	%	81	85	104,94
	Cakupan Balita Stunting	%	26,8	24,11	110,04
	Cakupan Balita Wasting	%	10,02	10,42	96,01
	Cakupan Balita Underweight	%	18	16,6	107,78
	Cakupan Balita Gizi Lebih (Obes)	%	22,3	7,37	166,95
	Partisipasi Posyandu (D/S)	%	85	122,13	143,68
Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Puskesmas & RSUD	%	47,06	100	212,49
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase peserta sarasehan dan senam lansia	%	98	0	0
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	5	9,09	181,8
Pengadaan. Peningkatan dan Perbaikan sarana prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	/30.000 pend	0,29	0,22	100,00
	Rasio Pustu per satuan penduduk	/10.000 pend	0,22	0,22	100,00
Pengadaan. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata	Ratio tempat tidur Rumah sakit per satuan penduduk	/1.000 pend	1,38	1,78	128,9
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	BOR (Bed Occupancy Ratio) Angka Penggunaan tempat tidur	%	70	56	80
Manajemen. Informasi. dan Regulasi Kesehatan	Persentase pengelolaan SIMRS (sistem informasi manajemen rumah sakit)	%	100	100	100



NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan Derajat Kesehatan	NDR (Net Dealt Rate) angka kematian . 48 jam setelah dirawat untuk tiap tiap 1000 penderita keluar rumah sakit	%	< 25	12,5	150 *)
	GDR (Gross Death Rate) angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	%	< 45	32,1	129 *)
Pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru paru/Rumah Sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	97,2	97
*) rumus = $(2 \times target - realisasi) / target \times 100\%$ untuk menghitung indikator kinerja dengan kondisi semakin rendah realisasi semakin baik					

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Kesehatan Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 5 indikator Kinerja sasaran urusan kesehatan, dengan capaian kinerja kategori "sangat tinggi" sebanyak 3 indikator dan kategori "tinggi" sebanyak 2 indikator
- Terdapat 53 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 40 Indikator, kategori

“tinggi” sebanyak 6 Indikator, Kategori Sedang sebanyak 2 indikator dan kategori “sangat rendah” sebanyak 5 indikator.

- Capaian Kinerja sasaran dan program yang tergolong “sedang”, “rendah” dan “sangat rendah” adalah sebagai berikut :

1. Cakupan skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan), hal tersebut dikarenakan selama masa pandemic covid-19 tidak ada pemeriksaan kesehatan pada anak sekolah karena tidak ada pembelajaran tatap muka di sekolah.
2. Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah, hal tersebut dikarenakan selama masa pandemic covid-19 tidak ada pemeriksaan jajanan anak sekolah karena tidak ada pembelajaran tatap muka di sekolah sehingga tidak ada penjual jajanan di sekolah yang bisa dilakukan pemeriksaan.
3. Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia ( $\geq 60$  th), hal tersebut dikarenakan selama masa pandemic, pelayanan kesehatan pada lansia agak berkurang dan terbatasnya sarana prasarana yang diperlukan.
4. Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TBC hal tersebut dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang TBC masih rendah dan selama masa pandemi ini kegiatan banyak dialihkan untuk penanganan covid sehingga penanganan penyakit lain kurang optimal.
5. Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi hal tersebut dikarenakan selama masa pandemi, banyak penderita takut ke rumah sakit, kegiatan pelayanan kesehatan di puskesmas lebih banyak ke penanganan covid, kegiatan pos pembinaan terpadu juga terhenti selama pandemik, data belum melibatkan pihak swasta seperti rumah sakit, klinik, dan lain-lain
6. Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetis mellitus, hal ini dikarenakan selama masa pandemi, banyak penderita takut ke rumah sakit, kegiatan pelayanan kesehatan di puskesmas lebih banyak ke penanganan covid, kegiatan pos pembinaan terpadu juga terhenti selama pandemi, data belum melibatkan pihak swasta seperti rumah sakit, klinik, dan lain-lain.
7. Persentase peserta sarasehan dan senam lansia tidak tercapai dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan sarasehan dan senam lansia tidak dapat dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan program urusan kesehatan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2020. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7  
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kesehatan tahun 2020

NO	INOVASI TAHUN 2020	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	Merak Ati Tan Tinalar	Sebuah program untuk menggerakkan ibu hamil membaca satu lembar buku KIA setiap hari
2.	PSC 119 Matur Dokter	<p>Merupakan Inovasi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klaten di bidang Kesehatan Untuk kemudahan akses masyarakat dalam kesehatan, mendapat layanan respon cepat terutama masalah gawat darurat kesehatan melalui aplikasi di android secara gratis. Matur Dokter merupakan kegiatan pengembangan dari PSC 119, Program Ini telah di launching oleh Bupati Katen pada Desember 2018 dan direlaunching pada November 2019</p> <p>Jenis-jenis layanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gawat Darurat Kesehatan 24 jam</li> <li>2. Konsultasi kesehatan</li> <li>3. Tips Kesehatan</li> <li>4. Berita Sehat</li> <li>5. Forum Sehat</li> <li>6. Informasi Kamar Tidur Kosong di RS</li> <li>7. Pelayanan Ambulance</li> </ol> <p>Pelaksana Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Matur Dokter Dinas Kesehatan Kab. Klaten</li> <li>2. Tim Matur Dokter 34 Puskesmas Kabupaten Klaten</li> </ol> <p>Sarana dan Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 15 Ambulance Matur Dokter ( 2 di Dinkes, 13 di Puskesmas )</li> <li>2. 3 Motor Matur Dokter</li> <li>3. Aplikasi Matur Dokter</li> <li>4. Perangkat HT di Dinas Kesehatan dan 34 Puskesmas</li> </ol> <p>1. Aplikasi Matur Dokter : Diunduh dari Play Store Handphone Android</p> <p>2. whatsapp : 0822 60000 910</p> <p>3. Telepon : 0822 60000 910 (0272 3391 330)</p> <p>email : maturdokter@gmail.com</p> <p>instagram : maturdokterkabklaten</p> <p>facebook : maturdokterkabklaten</p> <p>Twitter : maturdokterkabklaten</p> <p>Kegiatan Matur Dokter 2020</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Call center Covid-19 Kabupaten Klaten</li> <li>2. On the Job Training (OJT) Swab Covid-19 bagi tenaga kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas</li> <li>3. Pelatihan pemulasaran dan pemakaman jenazah infeksius 401 desa</li> <li>4. Pelatihan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dalam menghadapi bencana di masa pandemi</li> <li>5. Pelatihan optimalisasi peran kader matur dokter dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Klaten</li> </ol>

Selain inovasi di atas, pada tahun 2020 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Kesehatan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.8  
Prestasi Pelaksanaan program urusan Kesehatan tahun 2020

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award (Kategori Kepala Desa)	Catur Joko Nugroho, SE (Kepala Desa Bolopleret Juwiring)	Kementerian Kesehatan
2.	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award (Kategori Natural Leader)	Hastin Nuryani, Amd (Pelopor di bidang kesehatan)	Kementerian Kesehatan
3.	Terbaik 1 Rumah Sakit Tipe C	RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten	BKKBN Provinsi Jawa Tengah

#### B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020.

#### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Kesehatan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9  
Kebijakan Strategis urusan kesehatan Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menetapkan Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (Covid 19) di Kabupaten Klaten	Surat Keputusan Bupati Klaten No.443.4/116 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (COVID 19) Di Kabupaten Klaten	Melakukan upaya penanggulangan kejadian luar biasa yang ditujukan untuk mencegah, mendeteksi, merespon serta menangani corona virus disease 2019 (COVID-19)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
2.	Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Atas Corona Virus Disease (COVID 19) di Wilayah Kabupaten Klaten	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/114 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Atas Corona Virus Disease (COVID 19) di Wilayah Kabupaten Klaten	Melakukan tanggap darurat bencana non alam corona virus disease 19 (COVID 19)
3.	Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/115 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten	antisipasi dan penanggulangan pencegahan penyebaran COVID-19
4.	Menunjuk 6 RS swasta di Kabupaten Klaten sebagai rumah sakit rujukan covid-19 lini ke tiga	Surat Keputusan Bupati Klaten No 445/125 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ketiga di Kabupaten Klaten	Jumlah pasien covid semakin banyak tetapi RS yang ditentukan sebagai RS rujukan covid-19 masih terbatas sehingga perlu penambahan RS rujukan covid-19
5.	Mengeluarkan instruksi penggunaan masker untuk mencegah penularan COVID-19	Instruksi Bupati Klaten Nomor 256 Tahun 2020 tanggal 16 April 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker untuk Mencegah Penularan Infeksi Corona Virus Disease 19 (Covid-19)	Mencegah penyebaran COVID-19
6.	Mengeluarkan pedoman tata cara pelaksanaan dan pengurusan jenazah terindikasi covid-19	Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 443.5/260/08 Tanggal 17 April 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengurusan Jenazah Terindikasi Terkena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	Adanya pedoman tata laksana pengurusan jenazah terindikasi covid-19 untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
7.	menyiapkan tempat isolasi bagi penderita covid-19 selain rumah sakit rujukan covid-19	Surat Keputusan Bupati Klaten No. 443.4/215 Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Hotel Edotel sebagai Rumah Isolasi Sehat Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Klaten	menyediakan hotel Edotel sebagai tempat isolasi bagi penderita covid-19 yang tanpa gejala atau gejala ringan, tanpa penyakit penyerta dan bukan kelompok rentan, serta tidak memerlukan rawat inap rumah sakit karena daya tampung rumah sakit yang terbatas
8.	Menetapkan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan	Peraturan Bupati Klaten No 40 tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat untuk pencegahan COVID 19
9.	Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten	Surat Keputusan Bupati Klaten No.360/298 Tahun 2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten	Percepatan penanganan covid
10.	Menetapkan Petunjuk Teknis Pendataan Dan Penentuan Kategori Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat	Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pendataan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan ketepatan sasaran penerima Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Daerah</li> <li>- Memberikan petunjuk dalam menentukan penduduk yang akan di didaftarkan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah; dan</li> <li>- Meningkatkan transparansi data penerima Jaminan Kesehatan yang didaftarkan Pemerintah Daerah.</li> </ul>

## E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kesehatan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD  
terhadap pelaksanaan urusan Kesehatan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh OPD Dinas Kesehatan dan RSUD Bagas Waras. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 83,73% dengan Belanja Langsung sebesar 82,81% membuktikan realisasi Belanja masih belum optimal dan masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Apalagi Belanja Tidak Langsung dalam urusan Kesehatan lebih banyak berisi belanja pegawai seharusnya lebih mudah untuk direncanakan sehingga semestinya realisasi atas anggaran tersebut dapat sesuai dengan targetnya Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Kesehatan sebaiknya memperbaiki penyusunan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>- Penyusunan perencanaan, program, dan penganggaran lebih teliti dan lebih memperhatikan prioritas kebutuhan serta situasi yang sedang terjadi</p> <p>- Realisasi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 84,91% dan realisasi Belanja tidak langsung sebesar 91,68%. Realisasi Belanja Langsung dan Tidak langsung meningkat jika dibandingkan tahun 2019.</p>	<p>Realisasi anggaran lebih optimal</p>
2.	<p>Beberapa pengukuran target indikator sepertinya tidak direncanakan dengan baik dan belum memperhatikan informasi baseline indicator dan/atau capaian indikator dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terlihat ada beberapa indikator kinerja baik sasaran maupun program yang memiliki realisasi diatas angka 100%. Beberapa pengukuran perlu direvisi atau ditinjau dari aspek menggunakan indikator kinerja sehingga dapat diukur dengan baik. Di beberapa indikator kinerja, masih terdapat capaian yang belum mencapai nilai 100%, bahkan ada 3 indikator program yang memiliki kategori sedang, 1 kategori rendah dan 1 kategori sangat rendah yang menjadi perhatian khusus. beberapa permasalahan yang</p>	<p>Memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target yang sudah ditetapkan. Untuk mengatasi masalah AKI, AKB, dan stunting, dilakukan pemantauan ibu hamil terutama ibu hamil resti (resiko tinggi) oleh bidan desa dan kader kesehatan desa lewat kegiatan jika jimid (siji kader siji ibu hamil) serta pendampingan oleh dokter ahli kandungan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan,</p>	<p>Capaian kinerja lebih bagus dan sesuai target yang sudah ditetapkan dan masalah-masalah di bidang kesehatan bisa diatasi bersama-sama tidak hanya oleh OPD pelaksana urusan kesehatan tetapi melibatkan lintas sector terkait sehingga angka kematian bisa dikurangi.</p>

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	perlu disoroti adalah permasalahan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Stunting. sehingga perlu di desain sinergi pelayanan kesehatan dan informasi kepada masyarakat (khususnya Ibu hamil) antara bidan desa, kader-kader kesehatan desa serta pemerintah desa dalam menyiapkan desa siaga kesehatan dengan integrasi anggaran dari APBDesa dan APBD. Beberapa solusi atas permasalahan lainnya yang ditemukan perlu dilaksanakan dan disinergikan dengan seluruh Stakeholder yang ada.	optimalisasi pelayanan pemeriksaan kehamilan terpadu, pemantauan bayi baru lahir, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di posyandu, pemberdayaan masyarakat untuk kawal 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran), advokasi kepala desa untuk memihaki jaminan kesehatan bagi ibu hamil yang tidak mampu.	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Kesehatan serta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.11  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan Kesehatan tahun 2020

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Masih ada kasus kematian ibu dan bayi.	Selama pandemi tetap dilakukan pemantauan ibu hamil terutama ibu hamil resti (resiko tinggi) oleh bidan desa melalui telepon atau kunjungan rumah, pendampingan bumil resti oleh dokter ahli kandungan dan kader melalui kegiatan jika Jimil (siji kader siji ibu hamil), pelaksanaan kelas ibu hamil secara online, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader, fasilitator dan konselor laktasi, optimalisasi pelayanan pemeriksaan kehamilan terpadu, optimalisasi pemantauan bayi baru lahir oleh bidan desa, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu dengan protokol kesehatan, Pemberdayaan masyarakat untuk kawal 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran), Advokasi Kepala Desa untuk memihaki jaminan kesehatan bagi ibu hamil yang tidak mampu, Meningkatkan edukasi melalui Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), 1 hari membaca 1 lembar Buku KIA.



NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
2	Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemik flu burung, serta penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya: demam berdarah dengue, malaria, filiarisis	Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang Penyakit Menular, Meningkatkan Kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan di Faskes, Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan di faskes, Meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas maupun RS, melakukan validitas data yang ada dari Faskes. Pendampingan SMD MMD (Survey Mawas Diri dan Musyawarah Masyarakat Desa) di tingkat RT/RW untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit tersebut serta menggali potensi wilayah untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada, Meningkatkan edukasi melalui leaflet, flyer baik diberikan langsung kepada masyarakat terdampak maupun melalui media sosial (FB dan IG),
3	Untuk jenis penyakit menular/ infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya: penyakit menular tuberculosis paru, kusta penderita PB, diare, infeksi saluran pernafasan atas, HIV, kejadian luar biasa KIPI	Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Hewan baik secara langsung maupun tidak langsung, Meningkatkan Kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan di Faskes, Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan di faskes, Meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas maupun RS, melakukan validitas data yang ada dari Faskes. Meningkatkan penerapan Germas di setiap tatanan, baik pada tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Pemberdayaan kelompok masyarakat untuk mengedukasi dan memantau pelaksanaan Germas pada anggota kelompoknya, Meningkatkan edukasi melalui leaflet, flyer baik diberikan langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial (FB dan IG)
4	Keadaan gizi : Berat Badan (BB) naik, BB di bawah garis merah dan gizi buruk	pemantauan balita yang bermasalah dengan gizi oleh bidan desa dan posyandu, pemberian makanan tambahan yang bergizi
5	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan dan masih rendahnya capaian desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Pemicuan STBM, Pelatihan Pengelolaan Sampah, pengawasan Kualitas air minum, peningkatan sarana sanitasi 5 pilar STBM, monitoring perilaku 5 Pilar STBM

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
6	Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi,	Advokasi Peraturan Bupati Klaten Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kepada sektor terkait dan sosialisasi kepada masyarakat dan mengadakan pemantauan dan evaluasi PHBS secara rutin di 5 tatanan.
7	Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.	1. Perbaiki data peserta Jaminan Kesehatan baik segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN atau PBI APBD sehingga data yang telah di daftarkan Pemerintah valid dan tepat sasaran. 2. Optimalisasi alokasi anggaran dari Pajak Rokok dan peran OPD terkait untuk memperluas kepesertaan untuk mencapai UHC ( <i>Universal Health Coverage</i> ) dikarenakan sampai saat ini capaian kepesertaan di Kabupaten Klaten mencapai 90,06 % dari target UHC 95%.
8	Pemulihan kesehatan akibat pandemi covid 19	Pelacakan dan penanganan kasus covid 19, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
9	Upaya pembinaan dan pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah tidak tercapai selama pandemi	Peningkatan pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah setelah pandemi berakhir/ setelah kegiatan belajar mengajar normal kembali
10	Masih rendahnya komitmen sarana pelayanan kefarmasian dan tempat pengolahan makanan dalam menerapkan standar persyaratan yang berlaku, pasca diterbitkannya ijin	Penyelenggaraan bimbingan teknis secara berkala pasca diterbitkannya ijin
11	Penerapan SISRUITE (Sistem Rujukan Terintegrasi) masih belum optimal	Evaluasi dan Pelatihan Penanggungjawab SISRUITE RS dan Puskesmas untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi serta meningkatkan komitmen faskes dalam penerapan SISRUITE
12	Penggunaan aplikasi Matur Dokter oleh masyarakat masih belum optimal	Pengembangan aplikasi Matur Dokter bekerjasama dengan pengembang dan KOMINFO
13.	Ruang antrian poli yang terbatas di RSD Bagas Waras	Melakukan penataan ulang tata ruang poli
14	Adanya penambahan pasien Covid-19 yang banyak sehingga RSD membutuhkan tambahan ruang isolasi	Melakukan pengurangan jumlah kamar yang ada dan dimodifikasi menjadi ruang isolasi Covid-19. Contoh Ruang Sumbadra (Kelas 3 umum) dirubah dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk ruang isolasi.

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
15.	Adanya kenaikan harga pengadaan barang jasa khususnya obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan APD dikarenakan pandemi Covid-19.	Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan setelah berkoordinasi dengan BLP Kabupaten Klaten dan Inspektorat maka RSD Bagas Waras meminta penyedia mengeluarkan Surat Keterangan Kewajaran Harga
16.	Adanya kebutuhan khususnya obat, Bahan Medis Habis Pakai, APD yang sulit diprediksi dikarenakan pandemi Covid-19.	Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta setelah berkoordinasi dengan BLP Kabupaten Klaten dan Inspektorat maka RSD Bagas Waras mengambil Kebijakan-Kebijakan yang Tanggap Darurat

### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program Urusan Wajib pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.124.191.707.230 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.88.641.927.830 atau sebesar 71,37%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.21.076.369.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.367.314.286 atau sebesar 87,15%. Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.12**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Indeks layanan infrastruktur	indeks	38,96	41,56	106,67
Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	79,60	88	110,5
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Pembangunan jalan dan jembatan	Prosentase jembatan dalam kondisi baik	%	81,9	63,58	77,6
	Prosentase jalan dalam kondisi baik	%	69,33	66,47	95,87
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Prosentase volume jalan yang dipelihara	%	83,17	83,17	100
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan yang tersedia	%	100	100	100
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Prosentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	30	36,17	120,57
Perencanaan Tata Ruang	Prosentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	%	81,25	69	85
Pemanfaatan Ruang	Prosentase Peningkatan Pelayanan Ketataruangan	%	60	60	100
Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	%	78	78	100
	persentase Kenaikan Bangunan Ber-ijin (IMB)	%	82,56	24,14	29,43
Program Pembangunan Drainase / gorong-gorong	Prosentase layanan Drainase	%	71,5	73,05	102
Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Prosentase layanan Air Minum / Air Bersih	%	94,25	80,16	85,05
	Prosentase layanan Air Limbah	%	96,25	100	103

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	persentase gedung kantor dan non kantor yang terbangun	%	91,80	98,34	107
Program pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan	Prosentase Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	%	0	0,14	Tidak tercapai (tidak dapat dipersentas ekan)

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator kinerja sasaran dengan Capaian kinerja kedua indikator tersebut masuk kategori "sangat tinggi"
- Terdapat 14 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 9 Indikator, Kategori Tinggi sebanyak 3 indikator dan kategori sangat rendah sebanyak 1 indikator dan 1 indikator yang capainnya tidak dapat dipersentasekan dikarenakan targetnya 0% dengan realisasi 0,14% (ataupun realisasi tidak tercapai)
- Terdapat 1 Indikator Program dengan capaian Kategori Sangat Rendah. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah Kenaikan Bangunan ber ijin (IMB) dan faktor penghambat pencapaian indikator tersebut karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengajukan IMB dan kegiatan sosialisasi IMB tidak berjalan optimal dikarenakan Pandemi Covid-19 dan refocussing anggaran. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan meningkatkan

sosialisasi kepada masyarakat dan melaksanakan layanan jemput bola.

- Terdapat 1 indikator yang capaian kinerja yang tidak tercapai dan capaian kinerjanya tidak dapat dipersentasekan dikarenakan memiliki target 0% dan realisasinya sebesar 0,14%. Indikator tersebut adalah Prosentase Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan. Sampai tahun 2020 masih terdapat kawasan kumuh seluas 41,65 ha atau sebesar 0,14% dari luasan permukiman yang ada di Kabupaten Klaten. Kawasan kumuh tersebut berada di 2 (dua) lokasi yaitu Desa Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan seluas 24,18 ha dan Desa Bugisan Kecamatan Prambanan seluas 17,47 ha. Pada tahun 2020 masih terdapat kawasan kumuh tersebut dikarenakan kedua lokasi tersebut tidak mendapat intervensi program KOTAKU dari Pusat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan Fasilitator Program KOTAKU dan mengusulkan kepada KOTAKU untuk melakukan penanganan terhadap permukiman kumuh yang masih ada di Kabupaten Klaten.

#### **B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### **D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13  
Kebijakan Strategis urusan Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Kebijakan Pembuatan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan	Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air	Pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Penyehatan Lingkungan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	dan usaha untuk mencapai akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua;
2.	Menetapkan Tata cara Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi	Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata cara Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi	Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
3.	Menetapkan Status Ruas - Ruas Jalan Di Kabupaten Klaten Sebagai Jalan Kabupaten	Keputusan Bupati Klaten No. 611.51 / 208 tahun 2020 Tentang Status Ruas - Ruas Jalan Di Kabupaten Klaten Sebagai Jalan Kabupaten	Bahwa tanah jalan sebagai salah satu prasarana yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai fungsi sosial yang sangat penting termasuk penetapan status ruas - ruas jalan merupakan salah satu petunjuk dalam penyelenggaraan jalan agar berjalan secara konsepsional dan menyeluruh.
4.	Menetapkan Tanah Jalan Kabupaten Di Kabupaten Klaten	Keputusan Bupati Klaten No. 611.51 / 207 tahun 2020 Tentang Tanah Jalan Kabupaten Di Kabupaten Klaten	Bahwa tanah jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak mempunyai fungsi sosial yang sangat penting dan merupakan salah satu asset Pemerintah Daerah yang perlu dijaga.
5.	Menetapkan petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pola Tanam Serta Rencana Tata Tanam Untuk Masa Tanam Tahun 2020 - 2021	Peraturan Bupati Klaten No. 46 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pola Tanam Serta Rencana Tata Tanam Untuk Masa Tanam Tahun 2020 - 2021	Bahwa untuk memudahkan Pengelolaan Air Irigasi, diperlukan adanya pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Klaten untuk masa tanam tahun 2020-2021 di Kabupaten Klaten;
6.	Membentuk Unit Pengelola Proyek Daerah (District Project)	Keputusan Bupati Klaten No. 640 / 204 tahun 2020 tentang Pembentukan Unit	- Untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Management Unit) Pada Kegiatan Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Pengelola Proyek Daerah (Distric Project Management Unit) Pada Kegiatan Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020	Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat - Untuk meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD  
terhadap pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 78,34% dengan Belanja Langsung sebesar 80,44% membuktikan realisasi Belanja masih belum optimal dan masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. apalagi khusus untuk belanja tidak langsung dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang lebih banyak berisi belanja pegawai yang seharusnya lebih mudah untuk direncanakan sehingga semestinya realisasi atas anggaran tersebut dapat sesuai dengan targetnya. realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebaiknya memperbaiki	- Realisasi Belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 71,37% dan Belanja Tidak langsung sebesar 87,15%. - Penyerapan anggaran kurang, dikarenakan: 1. Terdampak refocusing anggaran 2. Sisa lelang, Penyedia jasa melakukan penawaran harga Rata-rata turun dari pagu lelang lebih dari 20%, sehingga sisa lelang nya tinggi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadi sisa anggaran yang tinggi, bukan karena progres fisiknya yang tidak memenuhi target, tetapi sisa anggaran dikarenakan tingginya sisa lelang, yang menjadikan prosentase penyerapan tidak mencapai 100% 3. Terdapat kegiatan dari DAK Fisik Sub	Peningkatan capaian realisasi keuangan



No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>Bidang Air Minum dengan alokasi anggaran Rp.2.586.005.000 yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kepastian alokasi DAK tersebut baru turun di Bulan Juli. Berdasarkan time schedule yang telah disusun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, pelaksanaan kegiatan tersebut yang berlokasi di 6 (enam) lokasi harus dilakukan melalui mekanisme lelang. Hal tersebut tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada akhir tahun anggaran 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas</li> </ul>	
2.	<p>Beberapa pengukuran target indikator sepertinya tidak direncanakan dengan baik dan belum memperhatikan informasi baseline indikator dan/atau capaian indikator dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terlihat ada beberapa indikator kinerja baik sasaran maupun program yang memiliki realisasi jauh diatas angka 100%. Disamping itu, beberapa indikator pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang juga perlu memperhatikan indikator-indikator capaian SPM yang baru berdasarkan PP nomor 2 tahun 2018 tentang SPM. Beberapa pengukuran yang ada saat ini perlu direvisi atau ditinjau dari aspek penggunaan indikator kinerja sehingga dapat diukur dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkoordinasi dengan OPD lain dan instansi lain yang memiliki data sejenis</li> <li>- Indikator-indikator capaian SPM yang baru berdasarkan PP nomor 2 tahun 2018 akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan dokumen perencanaan strategis OPD</li> </ul>	<p>Perbaikan indikator kinerja dan peningkatan capaian kinerja</p>

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>baik. Di beberapa indikator kinerja, masih terdapat capaian yang belum 100%, bahkan ada 2 indikator program yang memiliki kategori tinggi (76% &lt;= 90%), 1 kategori sedang, 1 kategori rendah, dan kategori tidak dapat dicapai yang perlu perhatian khusus. Beberapa indikator tidak dapat dicapai karena faktor anggaran, akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan fakta bahwa capaian belanja tidak mencapai target (dibawah 90%), sehingga dalam hal ini perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja harus menjadi perhatian sehingga ketika suatu target sudah bagus, maka anggarannya dapat dialihkan untuk pemenuhan indikator kinerja yang masih kurang baik. Beberapa permasalahan yang muncul disebabkan oleh ketersediaan database. Oleh karena itu untuk tahun anggaran selanjutnya harus melakukan perbaikan database yang dimiliki oleh OPD, di samping itu masalah koordinasi dan integrasi pola pembangunan antar pemerintahan khususnya Pemkab dengan Pemdesa di Klaten harus menjadi perhatian.</p>		

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut

Tabel 3.15  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Adanya refocusing anggaran yang berdampak pada tidak terlaksananya beberapa kegiatan, khususnya pembangunan infrastruktur	Perencanaan untuk lebih matang lagi.

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.	Adanya kegiatan yang bersumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi yang munculnya di akhir tahun anggaran 2020 yang mengakibatkan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan di tahun anggaran 2020 karena keterbatasan waktu.	Perencanaan untuk lebih matang lagi.
3.	Data titik genangan air yang belum ada, kewenangan saluran drainase yang terpisah-pisah karena asset	Dilaksanakan pendataan titik-titik genangan dan berkoordinasi dengan para pihak untuk langkah penanganannya (permasalahan asset)
4.	Ketidak akuratan, keterbatasan serta kekurangterpaduan database potensi permasalahan drainase di Kabupaten Klaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya dilaksanakan studi, pendataan dan penyusunan masterplan drainase di Kabupaten Klaten</li> <li>- Perlunya koordinasi rutin antar stakeholder untuk keterpaduan, update dan penyempurnaan data base</li> <li>- Perlunya ditunjuk petugas yang khusus menangani dan mengelola update terhadap database yang dimaksud</li> </ul>
5.	Dana yang ada dari DAK terjadi rasionalisasi untuk penanganan covid-19, untuk dana DAK air minum kembali ke APBD tapi waktu sudah tidak mencukupi untuk pelaksanaan.	Kegiatan tidak dilaksanakan dan diusulkan tahun berikutnya
6.	Kegiatan Pembangunan Gedung Milik Daerah, Belum maksimalnya peran konsultan di lapangan dan masih terbatasnya SDM dari dinas	Mengusahakan memasukkan dokumen tender lebih awal, mengusulkan proyek besar untuk multiyears, dan memaksimalkan pengawasan intern melalui tenaga ahli serta penambahan SDM
7.	Belum adanya database bangunan gedung pemerintah di Kabupaten Klaten	Perlu dilakukan studi, pendataan dan penyusunan database/leger bangunan gedung pemerintah di Kabupaten Klaten dan penyiapan SDM petugas yang khusus menangani dan mengelola update terhadap database yang dimaksud
8.	Masterdata/Database Sanitasi dan Air minum yang belum tersedia	Merencanakan pembuatan database Sanitasi dan Air Minum

#### 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

##### A. Capaian Kinerja program

Urusan Wajib pelayanan Dasar Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.5.551.364.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.273.229.631 atau sebesar 76,98%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.3.328.755.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.042.957.736 atau sebesar 91,41%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib pelayanan Dasar Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.16**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks	74,05	74,05	100
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	Prosentase Rumah Layak Huni	%	98,76	96,12	97,32
Pengembangan Perumahan	Jumlah pengembangan PSU (perumahan)	unit/blok	10	1	10

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagai berikut :

- Terdapat 1 indikator kinerja sasaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan capaian kinerja “sangat tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 2 Indikator Kinerja Program Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Pada tahun 2020 dengan capaian Kinerja kategori “sangat tinggi” sebanyak 1 indikator dan kategori “sangat rendah” sebanyak 1 indikator.
- Capaian kinerja yang rendah adalah indikator Jumlah pengembangan PSU (perumahan). Hal tersebut dikarenakan hanya terdapat 1 (satu) pengembang yang menyerahkan PSU ke Dinas, kesiapan Tim Verifikasi belum terlalu matang dan terdapat keterbatasan anggaran. Dengan adanya faktor penghambat tersebut dilakukan beberapa upaya yakni menyediakan anggaran yang cukup dan mengoptimalkan tim verifikasi.

#### **B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17  
Kebijakan Strategis urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Membentuk Tim Teknis Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial Sumber Dana APBD Kab.Klaten Rumah Tidak Layak Huni Kab.Klaten	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 912/258 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Akibat Bencana Sosial yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten TA 2020	Untuk kelancaran pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Klaten
2.	Menetapkan Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemugaran Rumah Keluarga Miskin Guna Mendukung Program Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar dan Tentara Manunggal Membangun Desa Sengkuyung di Kabupaten Klaten TA 2020	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/77 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemugaran Rumah Keluarga Miskin Guna Mendukung Program Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar dan Tentara Manunggal Membangun Desa Sengkuyung di Kabupaten Klaten TA 2020	Mendukung pelaksanaan Program Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar dan Tentara Manunggal Membangun Desa Sengkuyung untuk Pemugaran Rumah Keluarga Miskin
3.	Membentuk Tim Teknis pada Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Klaten TA 2020	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 030/151 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis pada Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Klaten TA 2020	Untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Klaten
4.	Membentuk Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperwaskim	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 912/257 Tahun 2020 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana	Untuk kelancaran Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Kabupaten Klaten TA 2020	dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperwaskim Kabupaten Klaten TA 2020	
5.	Menetapkan Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Perumahan Swadaya yang Berasal dari DAK Bidang Perumahan dan Permukiman TA 2020	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 902/255 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Perumahan Swadaya yang Berasal dari DAK Bidang Perumahan dan Permukiman TA 2020	Agar dana bantuan sosial perumahan swadaya yang Berasal dari DAK Bidang Perumahan dan Permukiman tepat sasaran
6.	Menetapkan Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemugaran Rumah Keluarga Miskin di Kabupaten Klaten TA 2020	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 903/256 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemugaran Rumah Keluarga Miskin di Kabupaten Klaten TA 2020	Untuk meningkatkan kualitas rumah keluarga miskin di Kabupaten Klaten

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD  
terhadap pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 87,32% dengan Belanja Langsung sebesar 77,81% membuktikan realisasi belanja masih belum optimal dan masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. apalagi terkait dengan belanja tidak langsung dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman lebih	- Realisasi Belanja Langsung pada tahun 2020 sebesar 76,98% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 91,41%. Realisasi belanja langsung turun dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 banyak kegiatan operasional di	Peningkatan capaian serapan anggaran

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>banyak berisi belanja pegawai yang seharusnya lebih mudah untuk direncanakan sehingga semestinya realisasi atas anggaran tersebut dapat sesuai dengan targetnya. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>lapangan yang tidak dapat dilaksanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</li> </ul>	
2.	<p>Beberapa pengukuran target indikator sepertinya tidak direncanakan dengan baik dan belum memperhatikan informasi baseline indikator dan/atau capaian indikator dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terlihat ada beberapa indikator kinerja baik sasaran maupun program yang memiliki realisasi yang bervariasi. Ada baiknya beberapa indikator pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pekerjaan perlu memperhatikan indikator-indikator capaian SPM yang baru berdasarkan PP nomor 2 tahun 2018 tentang SPM. Beberapa pengukuran perlu direvisi atau ditinjau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target indikator capaian SPM akan diintegrasikan pada penyusunan RPJMD dan Renstra pada penyusunan RPJMD dan Renstra selanjutnya.</li> <li>- Memperbaiki database terkait urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman</li> </ul>	Meningkatkan capaian kinerja



No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	dari aspek penggunaan indikator kinerja sehingga dapat diukur dengan baik. Di beberapa indikator kinerja, masih terdapat capaian yang belum 100%, disebabkan keterlambatan peraturan bupati. Mengingat Capaian indikator-indikator kinerja yang ada pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sudah cukup bagus akan tetapi memiliki capaian realisasi anggaran yang cukup rendah, perlu menjadi perhatian untuk periode anggaran berikutnya, anggaran urusan ini dapat dialihkan pada urusan-urusan yang membutuhkan tambahan anggaran. termasuk dapat dialihkan untuk pemenuhan indikator kinerja pada urusan lain yang masih kurang baik.		

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut

Tabel 3.19  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	<b>Umum</b>	
1	Kekurangan Pegawai ASN dan Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas serta kapasitas dari SDM yang belum sepenuhnya mengerti akan tupoksinya masing-masing	Pengusulan ASN Ke BKPPD Kabupaten Klaten dan Mengusulkan penambahan SDM serta mengikut sertakan SDM dalam diklat-diklat
2	Kekurangan Sarana dan prasarana Kantor	Merencanakan kebutuhan dan pengusulan Pengadaan Sarana dan prasarana kantor
3	Belum adanya kendaraan Operasional untuk IMB dan RTLH	Pengusulan Pengadaan Kendaraan Operasional

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	<b>Perumahan dan Kawasan permukiman</b>	
4	Tidak terdapat kegiatan khusus dalam pengelolaan Rusunawa pada tahun 2020	Mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan pengelolaan Rusunawa pada tahun berikutnya sesuai nomenklatur kegiatan dalam permendagri 90 tahun 2019
5	Database Perumahan tentang RTLH yang belum akurat	Dilaksanakan pendataan dan pembuatan database yang detail dan akurat
6	Belum optimalnya penyerahan PSU (Pra Sarana Umum) perumahan yang dibangun pengembang kepada Pemerintah Kabupaten	Meningkatkan sosialisasi kepada pengembang terkait penyerahan PSU kepada Pemerintah Daerah
7	Tingkat hunian RUSUNAWA yang belum optimal dan permasalahan pembayaran sewa hunian	Sosialisasi yang lebih intens untuk mempromosikan RUSUNAWA dan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penghuni rusunawa
8	Pengelolaan Rusunawa yang belum optimal memerlukan Unit Pengelola Teknis tersendiri	Pengusulan ke Bagian Organisasi adanya UPT Pengelola Rusunawa
9	Berdasarkan Analisis Beban kerja dengan tugas terkait Cipta Karya perlu dilakukan evaluasi struktur organisasi Dinas Perwaskim untuk menjadikan Cipta Karya sebagai Bidang tersendiri.	Pengusulan Evaluasi Struktur Organisasi ke Bagian Organisasi

## 5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Perangkat daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2020 adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Satpol PP.

### A. Capaian Kinerja Program

Program urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol dan Satpol PP. Urusan Wajib pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.6.743.978.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.364.852.426,- atau 94,38%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.284.667.000,- Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.528.099.237,- atau sebesar 87,96%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Indikator Kinerja Sasaran dan Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.20**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum**  
**dan perlindungan Masyarakat Tahun 2020**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	99	98,99	99,98
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks demokrasi	Indeks	75	77,72	103,6
<b>Nama Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	%	98	98	100
	Prosentase penyelesaian konflik sosial	%	100	100	100
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	prosentase keamanan, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal yang terpelihara	%	49	49	100
	Prosentase penurunan kasus penyalahgunaan Narkoba	%	4	2	50
	Prosentase koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang terlaksana	%	100	100	100
Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Anggota korsik yang terlatih	%	100	100	100
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	%	98	98	100

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten	%	92	92	100
Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	Prosentase anggota pemadam kebakaran yang terlatih	%	12	3	25
Penanganan Darurat Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	98	63	64
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase konsumen yang terlindungi	%	100	100	100
Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase tokoh agama .tokoh masyarakat. tokoh pemuda dan tokoh wanita yang tersosialisasi wawasan kebangsaan	%	10	0	0
Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	Prosentase peningkatan kepesertaan pemilih dalam pemilu	%	6	13	216
	Prosentase ormas aktif yang terbina	%	85	85	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01$ %	Sangat Tinggi
2	$75,01$ % $\leq$ 90%	Tinggi
3	$65,01$ % $\leq$ 75 %	Sedang
4	$50,01$ % $\leq$ 65 %	Rendah
5	$\leq 50$ %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja kategori “sangat tinggi” sebanyak 2 indikator.
- Terdapat 14 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 10 Indikator, Capaian Kinerja “Rendah” sebanyak 2 indikator dan Capaian Kinerja Sangat rendah sebanyak 2 Indikator.
- Capaian Kinerja Program yang masuk mendapat kategori “rendah” dan “sangat rendah” adalah sebagai berikut :
  1. Prosentase penurunan kasus penyalahgunaan Narkoba.  
Munculnya kesenjangan dan kemajemukan masyarakat serta perubahan sosial berpotensi menurunkan ketahanan sosial, ekonomi, agama dan kemasyarakatan. Kerawanan sosial dimana salah satunya kasus penyalahgunaan narkoba terjadi di Kabupaten Klaten di Tahun 2020. Upaya pemerintah daerah dalam pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di tahun 2020 terkendala adanya refocussing anggaran dan kegiatan sosialisasi belum optimal dikarenakan pandemi Covid-19. Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di 5 (lima) lokasi hanya dapat dilakukannya di 1 (satu) Lokasi yaitu di Kecamatan Wonosari dikarenakan adanya refocussing anggaran. Upaya kedepan yang dilakukan dalam masa pandemi Covid-19 adalah dengan membuat konsep sosialisasi secara virtual berupa pemasangan spanduk dan iklan layanan masyarakat yang akan dilaksanakan pada awal dan pertengahan tahun 2021.
  2. Prosentase anggota pemadam kebakaran yang terlatih.  
Capaian kinerja tidak sesuai target dikarenakan dalam masa pandemi selama tahun 2020, kegiatan Bintel dan pelatihan terhadap anggota pemadam kebakaran ditiadakan. Alokasi anggaran diprioritaskan untuk kegiatan lain dalam penanganan Covid-19.
  3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten.  
Capaian kinerja tidak sesuai target dikarenakan dengan luas wilayah Kabupaten Klaten seluas 655 Km<sup>2</sup> hanya terdapat 1 Pos Pemadam Kebakaran. Adapun standar WMK adalah 7 Km /15 menit. Idealnya untuk Kabupaten Klaten seharusnya terdapat 7 Pos yaitu Pos bantu Delanggu, Pedan, Jogonalan, Jatinom, wedi dan di wilayah Kota terdapat 2 Pos. Pos di wilayah kota yaitu di selatan rel dan utara rel. Adapun pemetaan kebutuhan Pos tersebut

berdasarkan Dokumen Rencana Indek Sistem Proteksi Kebakaran Tahun 2011.

4. Prosentase tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita yang tersosialisasi wawasan kebangsaan. Target yang ditetapkan diawal tahun adalah jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan sebesar 10 % dari penduduk di wilayah Kabupaten Klaten. Namun terkendala kondisi maka anggaran di refocusing sebesar 98 %, sehingga pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan tidak terlaksana. Adapun 2% anggaran digunakan untuk kegiatan tahap persiapan pelaksanaan.

Pada tahun 2020 terdapat inovasi yang dikembangkan dalam pelaksanaan program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.21  
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman,  
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2020

<b>Inovasi Tahun 2020</b>	<b>Deskripsi Tentang Inovasi</b>
Satpol PP Goes TO School	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di seluruh wilayah Kab. Klaten. Maka dapatlah dilihat betapa luasnya cakupan tugas yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Permasalahan-permasalahan pelanggaran perda terjadi merata di seluruh wilayah Kabupaten Klaten yang semuanya harus segera ditangani dan diatasi. Salah satu upaya untuk mencegah terjadi pelanggaran perda adalah memberikan pendidikan kesadaran hukum secara dini kepada masyarakat. Sasaran konkret upaya tersebut adalah personil Satpol PP terjun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan hukum. Target jangka pendeknya supaya pelajar tertib dalam bersekolah dengan tidak membolos dan mematuhi aturan sekolah.
Damkar Go To School	Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran atau melakukan pemadaman, juga dilatih untuk menyelamatkan korban-korban bencana lainnya, pengevakasian sarang tawon, menanggulangi pohon tumbang, dan sebagainya. Pemadam kebakaran juga ditugaskan untuk memberi sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebakaran dan cara menanggapinya. Dalam rangka sosialisasi dan pendidikan kebakaran, Damkar Kab. Klaten terjun ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi dan simulasi kepada warga sekolah terhadap pencegahan, penyelamatan, dan layanan response time penanggulangan kebakaran.

## B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

## C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

## D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22  
Kebijakan Strategis urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,  
dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Pembentukan Tim Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Perlawanan dan Kemanana Kabupaten Klaten	SK Bupati Klaten Nomor : 300/57/2020 ,tentang Pembentukan Tim Cipta Kondisi Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020	Menciptakan situasi yang kondusif untuk mengantisipasi Gangguan dan Ancaman terhadap ideologi Politik, Sosial Budaya Pertahanan Keamanan Daerah
2	Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Klaten	SK Bupati Klaten Nomor : 300/53/2020, tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Klaten tahun Anggaran 2020	Mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap konflik sosial masyarakat
3	Pembentukan Tim Desk Pemilukada 2020	SK Bupati Klaten Nomor : 200/56/2020 ,tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020	Mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 secara demokratis, tertib, aman dan terkendali

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
4	Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat/FKDM	SK Bupati Klaten Nomor : 220/127/2020 ,tentang Perubahan atas keputusan Bupati Klaten Nomor : 220/704/2019 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Klaten 2019 - 2024	Mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya antisipasi hambatan tantangan ancaman dan gangguan.
5	Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	SK Bupati Klaten Nomor : 220/128/2020 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan di Kabupaten Klaten 2020 - 2025	Mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya antisipasi hambatan tantangan ancaman dan gangguan di wilayah kecamatan
6	Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina FPBI Kabupaten Klaten 2020 -2025	SK Bupati Klaten Nomor : 330/291/2020 tentang Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina FPBI Kabupaten Klaten 2020 -2025	Mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan sebagai bagian penting dan kerukunan nasional meningkat persatuan dan kesatuan bangsa.
7.	Operasi dan Patroli Penerapan Disiplin Pemakaian Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Covid-19 yang dilaksanakan setiap dua kali sehari di seluruh wilayah Kabupaten Klaten	Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	Pengendalian pencegahan penyebaran virus Covid - 19 di wilayah Kabupaten Klaten



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
8.	Penahanan KTP bagi pelanggar yang tidak memakai masker selama 10 (sepuluh) hari	Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	Pelanggar menjadi jera dan akan selalu mematuhi pemakaian masker selama masa pandemi Covid-19
9.	Penguatan Tugas dan Fungsi Damkar dalam Pengawasan darurat Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/331 tahun 2020 tentang Komando Pengawasan darurat Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Memaksimalkan Tugas Damkar dalam melaksanakan Pertolongan dan Evakuasi Pengungsi Erupsi Gunung Merapi

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD  
terhadap pelaksanaan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,  
dan Pelindungan Masyarakat

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan wajib pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp. 6.630.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.031.623.898,- atau 90,97%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.7.008.427.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.027.078.681,- atau sebesar 85,9%. Realisasi anggaran baik belanja langsung (90,97%) maupun belanja tidak langsung (85,9%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang	Capaian serapan anggaran, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung Pada tahun 2020 meningkat jika dibandingkan tahun 2019. Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.6.743.978.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.364.852.426,- atau 94,38%. Adapun alokasi belanja tidak	Peningkatan serapan anggaran dan perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	langsung sebesar Rp.6.284.667.000,- Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.528.099.237,- atau sebesar 87,96%.	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat beserta upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.24  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Upaya tindak lanjut penanganan komprehensif terhadap permasalahan sosial pasca operasi penertiban, khususnya anak jalanan	- Peningkatan kapasitas dan penguatan fisik bangunan rumah singgah sebagai penampungan sementara - Mengusulkan Pendirian panti sosial khusus anak jalanan di wilayah eks. Karesidenan Surakarta
2.	IMB diluar zona/kawasan pemukiman	Sinkronisasi regulasi tentang tata ruang wilayah, persyaratan teknis IMB dan pemanfaatan ruang.
3.	Sulitnya mengontrol/mengamati kebenaran data yang disampaikan pelaku usaha melalui OSS	Perlu sinergitas antara lembaga perizinan dengan Satpol PP
4.	Adanya Pelanggaran Perda No. 9 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan reklame : Reklame tidak berizin, masa izin reklame sudah habis, pemasangan reklame tidak sesuai dengan ketentuan. Reklame dipasang dipohon, tiang listrik,/telepon	Berkoordinasi dengan OPD terkait, berkoordinasi dengan pihak pemasang reklame dan menertibkan reklame yang melanggar Perda No. 9 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan reklame.

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5.	Adanya Pelanggaran Perda No. 5 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) : Pelaku PKL berjualan di fasilitas umum (trotoar, obyek vital ), Pelaku PKL berjualan tidak sesuai dengan ketentuan ( Buka sebelum Pukul 15.00 WIB, dan lapak tidak dibongkar pasang )	Berkoordinasi dengan OPD terkait, melakukan penertiban PKL yang melakukan pelanggaran Perda dan melakukan pembinaan terhadap PKL yang melakukan pelanggaran Perda.
6.	Belum optimalnya peran aktif partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi	Koordinasi dan Pembinaan terhadap Partai Politik untuk menjalankan salah satu fungsinya sebagai lembaga yang berkewajiban melaksanakan pendidikan politik.
7.	Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik	Melaksanakan diskusi/forum politik di seluruh elemen masyarakat ( tokoh masyarakat, tokoh wanita, aparat, perangkat desa, pemilih pemula, pemuda ) Berkoordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat untuk mengalokasikan kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Klaten
8.	Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama dan penganut kepercayaan	Sosialisasi pencegahan dan penanganan konflik sosial
9.	Munculnya kesenjangan, kemajemukan masyarakat dan perubahan sosial	Melaksanakan diskusi/forum ketahanan masyarakat dengan seluruh elemen masyarakat guna memperkuat ketahanan sosial masyarakat
10.	Menurunnya ketahanan sosial dan ekonomi sehingga menimbulkan kerawanan sosial	Pemberdayaan deteksi dini masyarakat
11.	Belum optimalnya peran dan pemberdayaan ormas	Pembinaan , koordinasi dan pengawasan mengenai sinergitas pemberdayaan ormas
12.	Menurunnya pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Pembumih Pancasila bagi seluruh lapisan masyarakat
13.	Cakupan wilayah kabupaten Klaten yang berjumlah 26 kecamatan hanya dilayani dari 1 Pos Damkar sehingga semua layanan tidak terpenuhi SPM dalam wilayah manajemen.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten tidak tercapai dikarenakan dengan luas wilayah Kabupaten Klaten seluas 655 Km2 hanya terdapat 1 Pos Pemadam Kebakaran. Adapun WMK 7 Km /15 menit ( idialnya untuk Kabupaten

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Klaten 7 Pos (Pos bantu Delanggu, Pedan, Jogonalan, Jatinom, wedi, Kota 2 (selatan rel dan utara rel) berdasar dokumen rencana indek sistem proteksi kebakaran Tahun 2011. (RISPK)
14.	Jumlah personil dan sarana prasarana yang masih kurang layanan di Damkar masih kurang optimal personil 26 orang. sarana lainnya sangat jauh dari standar sarana prasarana di Damkar (Armada, alat pelindung diri : baju, sepatu, Helm, Jaket+Celana Tahan Panas, Sarung Tangan, Sepatu Boot dan Masker Full Face)	Pengadaan personil Damkar dan sarana prasarana
15.	Hidran yang ada di wilayah kabupaten klaten sebagian besar sudah tidak berfungsi dengan maksimal	

## 6. Urusan Sosial

Perangkat daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar di bidang sosial pada tahun 2020 adalah Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Bagian Kesra dan BPBD.

### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Bagian Kesra dan BPBD mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.12.389.325.774,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.373.422.517,- atau 75,65%. Adapun Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.266.448.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.724.464.232,- atau sebesar 87,30%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Indikator Kinerja Sasaran dan Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Sosial dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.25**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Sasaran dan Program Urusan Sosial Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	87	90,32	103,8
	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	99	96	96,96
	Prosentase penduduk miskin)	%	12,78 – 12,28	12,89	99,13 *)
	*) rumus = $(2 \times \text{target} - \text{realisasi}) / \text{target} \times 100\%$ untuk menghitung indikator kinerja dengan kondisi semakin rendah realisasi semakin baik				
Terwujudnya pengurangan kerentanan risiko bencana	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	Kelas Indeks	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53
<b>Nama Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
Pemberdayaan fakir Miskin. Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	%	99	90,32	91,2
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) anak terlantar. dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	30	27,15	90,5
Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase difabel. trauma. dan korban bencana yang telah mendapat bantuan	%	28	37	132
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan	%	100	100	100
	Prosentase Organisasi / lembaga yang terfasilitasi	%	100	100	100
Peningkatan Keagamaan	Prosentasi Kehadiran Masyarakat	%	90	90	100

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	2	2	100
	Jumlah relawan yang terlatih tanggap bencana	orang	225	225	100
	Sekolah Siaga Bencana	Sekolah	15	14	93,3
	Sekolah Sungai	Komunitas	3	3	100
Penanganan Darurat Bencana	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100
	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100
	Persentase tercukupinya kebutuhan logistik untuk korban bencana	%	100	100	100
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana	%	100	100	100
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Kawasan Bencana	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01\%$	Sangat Tinggi
2	$75,01\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01\% \leq 75\%$	Sedang
4	$50,01\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Sosial Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 4 indikator kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran kategori "sangat tinggi" sebanyak 4 indikator.
- Terdapat 15 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 15 Indikator.

Dalam pelaksanaan program urusan sosial, terdapat prestasi yang diperoleh pada tahun 2020. Prestasi tersebut adalah Penilaian KUBE Berprestasi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Penerima penghargaan adalah KUBE "Rizky Barokah" dan Pemberi Penghargaan adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan Program urusan Sosial terdapat inovasi yang dilakukan pada tahun 2020, inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.26  
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Sosial tahun 2020

NO	INOVASI TAHUN 2020	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	SIPAKDE DIFA	Keterbatasan informasi bencana dan ketidakmampuan untuk melakukan evakuasi mandiri bila terjadi bencana. Sehingga dengan adanya <b>e-Difa</b> diharapkan <b>pertama</b> , dapat meningkatkan pengetahuan bencana bagi difabel segala usia dan berbagai karakter sehingga bisa melakukan upaya mitigasi bagi dirinya baik di rumah, di sekolah maupun di tempat. <b>Kedua</b> , bermanfaat bagi keluarga difabel untuk melakukan upaya mitigasi di rumah atau di tempat umum. <b>Ketiga</b> , bermanfaat bagi relawan karena berisi konten informasi mitigasi bencana umum yang bisa digunakan untuk melakukan mitigasi bencana di masyarakat setempat. Inovasi ini masuk dalam 20 inovasi terbaik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Jawa Tengah 2020

#### B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27  
Kebijakan Strategis urusan Sosial Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menetapkan Komando penanganan darurat erupsi merapi gunung merapi	Keputusan Bupati Klaten No 360/331 Tahun 2020 tanggal 23 Nopember 2020 tentang Komando Penanganan Darurat Erupsi Merapi di Kabupaten Klaten	Terciptanya Koordinasi dan Komunikasi yang intensif dan efektif dalam rangka Penanganan Darurat Erupsi Merapi di Kabupaten Klaten
2.	Pembentukan gugus tugas pencegahan dan pengendalian penyakit yang disebabkan corona virus disease 2019 (Covid19) di Kabupaten Klaten	Keputusan Bupati Klaten No 360/156 tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Klaten No.360/115 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Disebabkan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Klaten	Pencegahan dan pengendalian penyakit yang disebabkan corona virus disease 2019 (Covid19) di Kabupaten Klaten
3	Penetapan Status siaga darurat bencana non alam corona virus disease 19 (covid19) di wilayah kab. Klaten	Keputusan Bupati Klaten No 360/106 tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam atas Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Klaten	Pencegahan dan pengendalian penyakit yang disebabkan corona virus disease 2019 (Covid19) di Kabupaten Klaten
4.	Penerapan tatanan normal baru produktif dan aman dari corona virus disease 19 (covid19) bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah desa di kabupaten klaten	Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 440/334/32/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Penerapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease (Covid-19) Bagi Pegawai di Lingkungan	sebagai pedoman tatanan normal baru dalam penerapan tata kelola kehidupan baru dalam keseharian guna meningkatkan peran dan kewaspadaan antisipasi penularan corona virus disease 19



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten .	
5	Menetapkan status tanggap darurat bencana letusan gunung merapi di kabupaten Klaten selama 7 hari s/d 16 Nopember 2020	Keputusan Bupati No 360/318 tahun 2020 tanggal 9 nopember 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Sebagai upaya untuk mitigasi bencana Gunung Merapi setelah status Gunung tersebut ditingkatkan dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III)
6.	Menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan gunung merapi di kabupaten selama 7 hari (17 -24 Nopember 2020)	Keputusan Bupati Klaten No 360/337 tahun 2020 tanggal 16 Nopember 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Sebagai upaya lanjutan untuk mitigasi bencana Gunung Merapi
7.	Menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan gunung merapi dikabupaten selama 16 hari (16-31 Desember 2020)	Keputusan Bupati Klaten No 360/343 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Sebagai upaya lanjutan untuk mitigasi bencana Gunung Merapi
8.	Menetapkan Penerima Bantuan Sembako bagi Kepala Keluarga Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten Tahun 2020 Tahap I	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 460/139 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sembako bagi Kepala Keluarga Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten Tahun 2020	Untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak adanya pandemi corona virus disease (Covid-19)
9.	Menetapkan Penerima Bantuan Sembako bagi Kepala Keluarga Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 460/175 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Bupati Klaten Nomor	Untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak adanya pandemi corona virus disease (Covid-19)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Tahun 2020 Tahap II	460/139 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sembako bagi Kepala Keluarga Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten Tahun 2020	
10.	Menetapkan Penerima Bantuan Sembako bagi Kepala Keluarga Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten Tahun 2020 Tahap III	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 460/220 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Klaten Nomor 460/139 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sembako bagi Kepala Keluarga Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten Tahun 2020	Untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak adanya pandemi corona virus disease (Covid-19)
11.	Pelaksanaan dan Distribusi Sembako dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	Surat Edaran Bupati Nomor 460/273/15/2020 tentang Pelaksanaan dan Distribusi Sembako dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	Dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta kelancaran pendistribusian bantuan sembako untuk masyarakat terdampak corona virus disease 2019 (Covid-19), serta untuk pemberdayaan ekonomi wilayah maka pelaksanaan pengadaan sembako agar dilaksanakan oleh Camat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten selaku pengampu data penerima bantuan sembako bagi Kepala Keluarga terdampak corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten tahun 2020.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
12.	Pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten	Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2020 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten	Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; Mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam pembangunan dan pelayanan publik; Mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas;

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Sosial pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD  
terhadap pelaksanaan urusan sosial

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Secara umum, Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 79,23% dengan Belanja Langsung sebesar 82,37% membuktikan realisasi Belanja masih belum optimal dari anggaran yang ditetapkan. Apalagi Belanja Tidak langsung dalam urusan Sosial lebih banyak berisi belanja pegawai seharusnya lebih mudah untuk direncanakan sehingga realisasinya dapat sesuai dengan targetnya. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Sosial sebaiknya memperbaiki penyusunan rencana, penyusunan program dan penganggaran sesuai dengan kebutuhannya.	- Pada Tahun Anggaran 2020 penyusunan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran telah disesuaikan dengan prioritas kebutuhannya. - Pada tahun 2020 alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.12.389.325.774 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.373.422.517 atau 75,65%. Adapun Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.4.266.448.000 ,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.724.464.232 atau sebesar 87,30%. Realisasi belanja langsung belum optimal	Meningkatkan realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan target pada tahun berkenaan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		dikarenakan terdapat 1 kegiatan di BPBD yaitu pembuatan talud penahan dinding dengan anggaran sebesar 2.146.688.813 terealisasi 6,9% hanya untuk jasa konsultasi perencanaan. untuk pembuatan talud dinding penahan tanah kali Dengkeng akan dilaksanakan tahun 2021 dan anggaran dimasukkan di DPA 2021	
2.	Beberapa pengukuran target indikator sepertinya tidak direncanakan dengan baik dan belum memperhatikan informasi baseline indicator dan/atau capaian indikator dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terlihat ada beberapa indikator kinerja baik sasaran maupun program yang masih kurang dari 100%. Penyusunan indikator kinerja pada urusan sosial mestinya juga sudah memperhatikan indikator capaian SPM berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM. Dalam hal ini beberapa pengukuran perlu direvisi atau ditinjau dari aspek penggunaan indikator kinerja sehingga dapat diukur dengan baik. Di beberapa indikator terdapat 2 indikator program yang memiliki kategori rendah, dan 2 kategori sangat rendah yang menjadi perhatian khusus. Bebebrapa solusi atas permasalahan lainnya yang ditemukan perlu dilaksanakan dan disinergikan dengan seluruh Stakeholder yang ada.	Capaian kinerja tahun 2020 terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2019, hal ini didorong oleh program kegiatan yang dievaluasi secara berkala agar dapat melakukan intervensi yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat dalam bidang sosial, terutama pelaksanaan SPM bidang Sosial. Sesuai dengan Perubahan RPJMD yang diikuti perubahan dokumen renstra OPD, untuk indikator kinerja program sudah dilakukan penyesuaian/revisi.	Meningkatkan capaian kinerja urusan sosial

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Sosial beserta upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.29  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan sosial tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Urusan sosial merupakan urusan wajib tetapi secara Kelembagaan urusan sosial hanya Bidang dengan 2 Seksi; kondisi ini menjadikan timpang antara tugas sosial yang amat luas dengan kelembagaan yang minim sehingga tidak mampu melaksanakan program secara maksimal	Usulan struktur organisasi Dinas Sosial menjadi Perangkat Daerah tersendiri
2	Bidang sosial tidak memiliki kendaraan operasional, terutama untuk urusan rujukan/penanganan PMKS sehingga ketika ada permasalahan PMKS kesulitan untuk penanganan	Pengadaan Mobil operasional PMKS
3	Sarana Prasarana Rumah singgah sangat memprihatinkan/minim	Mengusulkan anggaran untuk rehab gedung yang representatif
4	Masih banyak permasalahan di data basis DTKS/PMKS termasuk salah satunya penggunaan data DTKS dalam intervensi program	memberikan honor bagi operator desa untuk ditunjuk sebagai penanggung jawab data bidang sosial dalam pelaksanaan verval data DTKS di masing-masing desa
5	Belum Seluruh PPKS Mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Program	penguatan program dengan peningkatan dukungan penganggaran
6	Kaum Disabilitas banyak yang belum mendapatkan pelayanan yang baik	mendorong OPD agar melaksanakan program pelayanan disabilitas termasuk menyediakan Sarana prasarana kantor yang ramah disabilitas
7	Belum optimalnya penyediaan data PPKS dan lembaga Layanan	Belum semua TKSK menjalankan pendataan data PPKS
8	Belum Optimalnya verifikasi dan validasi data DTKS	a. Refresing ulang Bimtek Aplikasi SIK-NG, dikarenakan Operator yang ada di Desa banyak yang diganti (berganti-ganti Sumber Daya Manusianya). b. Mengundang Nara Sumber dari PUSDATIN KEMENTERIAN SOSIAL
9	Belum optimalnya data korban bencana dan sarpras pendukung	Perbaikan kendaraan operasional dan fasilitas pendukungnya
10	Sarana prasarana taman makam pahlawan belum memenuhi standar	Diusulkan Perlu Pemihakan Anggaran APBD Kabupaten di Tahun berikutnya.

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
11	Belum optimalnya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	Mengusulkan Anggaran untuk Bimtek dari APBD Kabupaten untuk pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial

### 3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Urusan Pangan, Urusan Pertanahan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan.

#### 1. Urusan Tenaga Kerja

Pelaksanaan Program urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Tenaga kerja pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

##### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 1.094.654.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 757.354.734 atau 69,19%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar tenaga Kerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.30  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya nilai tambah. Produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio	1,06	0,96	90,56
	Angka partisipasi Angkatan kerja	Angka	85	98,79	116,22
Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Besaran buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	75	43,12	57,49
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	60	50	83,33
Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	25,40	21,11	83,11
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	80,50	55,56	69,02
	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun	‰	6	11,98	0,0017 *)
*) rumus = $(2 \times target - realisasi) / target \times 100\%$ untuk menghitung indikator kinerja dengan kondisi semakin rendah realisasi semakin baik					

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01\%$	Sangat Tinggi
2	$75,01\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01\% \leq 75\%$	Sedang
4	$50,01\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Tenaga Kerja Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 3 Indikator Kinerja sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 2 Indikator dan kategori "sangat rendah" sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Tinggi" sebanyak 2 Indikator, kategori "sedang" sebanyak 1 indikator dan kategori "sangat rendah" sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 1 indikator kinerja sasaran dan 2 Indikator Program dengan capaian Kategori Sedang dan "sangat rendah". Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan 75% terealisasi 43,12 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 57,49%, dikarenakan kesadaran pemberi kerja dalam melaksanakan kewajiban mengikutsertakan pekerja dalam program bpjs masih rendah, kesadaran pekerja bukan penerima upah untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja hanya mengikutsertakan sebagian Program BPJS yang wajib diikutsertakan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah dengan membuat regulasi terkait dukungan keikutsertaan Program BPJS Ketenagakerjaan, melaksanakan pembinaan, pengawasan terkait pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan.
  2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) ditargetkan 80,5% dan terealisasi 55,56% sehingga capaian kinerjanya 69,02% dikarenakan belum harmonisnya hubungan perusahaan dengan serikat pekerja sehingga mengedepankan kepentingan masing-masing lembaga upaya untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah dengan perlunya fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  3. Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun ditargetkan 6‰ dan terealisasi 11,98‰ dikarenakan dampak pandemi covid 19 dan rendahnya perusahaan yang menerapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

## **B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja



secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan tenaga kerja yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31  
Kebijakan Strategis urusan Tenaga Kerja Tahun 2020

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) di Tempat Kerja di Kabupaten Klaten	Surat Edaran Bupati Nomor: 560 / 234 / 20 Tanggal 3 April 2020 Tentang Perlindungan pekerja/buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19)	Mengevaluasi peraturan perusahaan yang telah ditetapkan dengan merujuk pada pencegahandan pengendalian penyebaran dengan ini perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) dimana harus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja.  Memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja di Perusahaan untuk dapat merujuk atau mengimplementasikan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease (Covid 19) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Tenaga Kerjapada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan tenaga kerja

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pada tahun 2019 pelaksanaan program urusan wajib bukan pelayanan dasar yang	- Memperbaiki time schedule pelaksanaan kegiatan, menyusun	Dengan Memperbaiki time schedule maka dalam

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>berkaitan dengan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar tersebut mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp. 879.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.760.093.074,- atau sebesar 86,5%. Realisasi anggaran belanja langsung (86,5%) tersebut masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus pengabaian dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>anggaran sesuai kebutuhan dan melaksanakannya sesuai target</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi belanja Langsung pada tahun 2020 sebesar 69,19% menurun jika dibandingkan tahun 2019 dikarenakan pada tahun anggaran 2020 terjadi perubahan anggaran sebanyak 6 kali, ada beberapa anggaran yang tadinya dirasionalisasi tapi pada perubahan selanjutnya dikembalikan lagi sehingga melenceng dan time schedule akibatnya dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum bisa optimal.</li> </ul>	<p>pelaksanaan kegiatan tidak akan berbenturan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan bisa berjalan optimal</p>
2.	<p>Terdapat 8 indikator kinerja program dengan realisasi kinerja program sangat tinggi sebanyak 5 indikator, kategori tinggi sebanyak 1 indikator dan kategori sedang sebanyak 1 indikator dan kategori rendah sebanyak 1 indikator. adapun indikator program dengan kategori rendah tersebut adalah rasio daya serap tenaga kerja (54,1%) dan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (68,6%)</p>	<p>Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio daya serap tenaga kerja dan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kerjasama dengan perusahaan luar klaten melalui program AKAD (Antar Kerja Antar Daerah).</li> <li>- Peningkatan pengiriman PMI (Pekerja Migran</li> </ul>	<p>Untuk mengoptimalkan penempatan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Klaten</p>

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		Indonesia) sektor formal ke luar negeri - Optimalisasi program/kegiatan perluasan kesempatan kerja (job fair, sosialisasi kesempatan kerja.) - Peningkatan kesempatan kerja dari berbagai sector, seperti perluasan kesempatan kerja sektor pertanian/peternakan dan perkebunan - Peningkatan program tenaga kerja mandiri/padat karya.	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Tenaga Kerja serta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.33  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan tenaga kerja tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Masih Kurangnya Informasi Pekerjaan Kepada Pencari Kerja	Sosialisasi Lowongan Pekerjaan Ke Desa - Desa
2	Belum sesuai antara lowongan kerja yang ada dengan keahlian dan kelulusan pencari kerja yang ada.	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan program kegiatan pelatihan baik Institusional maupun Non Institusional dan Lembaga Latihan Kerja Swasta.
3	Permasalahan kegiatan Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja adalah susah nya mencari peserta untuk yang dilatih	Koordinasi dengan para kepala desa di desa daerah miskin untuk mengirimkan peserta
4	Masih Ada Perusahaan Yang Belum Melaksanakan UMK	Melakukan Pembinaan Dan Sosialisasi Kepada para pelaku usaha tentang peraturan perundang-undang ketenagakerjaan.

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5	Pada satu sisi terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang masih tinggi, di sisi lain perluasan konsep kerja yang kurang berakibat masih banyaknya jumlah penganggur setiap tahun.	Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan prioritas kegiatan Peningkatan Informasi Pasar Kerja melalui Bursa Kerja Online dan Penyaluran serta penempatan melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN, Padat Karya Produktif, diselenggarakan pelatihan .
6	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan 88,2% terealisasi 43,12 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 48,89% dikarenakan kurangnya kesadaran para pengguna tenaga kerja dalam memahami peraturan per-UU Ketenagakerjaan	Upaya yang dilakukan adalah dengan membuat regulasi terkait dukungan keikutsertaan Program BPJS Ketenagakerjaan, melaksanakan pembinaan, pengawasan terkait pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan.

## 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.207.079.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.201.847.396,00 atau sebesar 97,47%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja Sasaran dan Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.34**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kapasitas perempuan. perlindungan perempuan dan anak	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	indeks	60,3	72,35 (realisasi 2019)	119,9
	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	status	Nindya (750)	Madya (650)	86,6
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	%	70	70	100
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	rasio	4,80	5,68	81,67 *)
	Rasio perempuan korban kekerasan	rasio	1,35	3,52	<0 *)
*) rumus = $(2 \times \text{target} - \text{realisasi}) / \text{target} \times 100\%$ untuk menghitung indikator kinerja dengan kondisi semakin rendah realisasi semakin baik					
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Prosentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja kategori "sangat tinggi" sebanyak 1 indikator dan capaian kinerja sasaran kategori "tinggi" sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 4 indikator kinerja program dengan Capaian Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 2 Indikator, Kategori "Tinggi" sebanyak 1 indikator dan kategori "sangat rendah" sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 1 Indikator Program dengan capaian Kategori Sangat Rendah. Adapun indikator tersebut adalah Rasio perempuan korban kekerasan. Capaian tersebut rendah dikarenakan kondisi pandemi sangat berpengaruh pada ekonomi keluarga sehingga dimungkinkan menimbulkan masalah dalam rumah tangga yang menyebabkan adanya pertengkaran dan kekerasan terhadap perempuan, serta dengan adanya kemajuan perkembangan teknologi yang dapat dipakai oleh masyarakat sebagai media untuk mengungkap dan melaporkan kekerasan yang terjadi. Bahkan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimanapun termasuk di tempat umum. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan frekuensi untuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan peningkatan kualitas keluarga. Sosialisasi pada masyarakat akan adanya layanan perempuan dan anak korban kekerasan melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang menjadi tangan panjang layanan korban kekerasan pada perempuan dan anak di desa.

#### **B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35  
Kebijakan Strategis urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten	Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten	Memberikan pedoman kepada OPD, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Responsif Gender Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat agar dapat berjalan efektif dan efisien guna mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah yang Responsif Gender
2	Pembentukan Pengurus Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mutiara Kab. Klaten Masa bakti 2020-2023	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 463/210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mutiara Kab. Klaten Masa bakti 2020-2023	Memberikan pelayanan kepada korban kekerasan perempuan dan anak yang memadai dan optimal
3	Pembentukan Gugus Tugas KLA	Surat keputusan Bupati Klaten Nomor 463/167 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA	Mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Klaten sebagai Kabupaten Layak Anak

### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.36  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD  
terhadap pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Keuangan : Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. Besaran Realisasi Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 88,6% hal membuktikan realisasi Belanja masih belum optimal dari anggaran yang ditetapkan. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebaiknya memperbaiki penyusunan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran dengan kebutuhannya.	- Penyusunan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran Tahun 2020 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah disusun sesuai dengan kebutuhan prioritas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.  - Realisasi belanja langsung tahun 2020 sebesar 97,47% meningkat jika dibandingkan tahun 2019	Untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan
2.	Indikator kinerja : Di beberapa indikator kinerja masih terdapat capaian yang belum mencapai nilai 100%, bahkan ada 3 indikator program yang memiliki kategori sangat rendah yang menjadi perhatian khusus. Sebagai contoh indikator penyusunan dokumen PUG dan anak yang hanya mencapai 50% dari target 10 dokumen. Semestinya menjadi catatan bagi pemerintah dan OPD terkait untuk lebih berkomitmen dalam penyusunan dokumen	Tahun 2020 telah disusun Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten, sebagai pedoman bagi OPD, Kecamatan,	Untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam kegiatan pembangunan daerah



No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	PUG dan Anak. Di samping itu, meningkatnya rasio perempuan korban kekerasan perlu mendapat perhatian khusus apakah benar hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan atau sebab lainnya.	Kelurahan, dan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Responsif Gender.	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut

Tabel 3.37  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Kegiatan Kemampuan dan Akses Berusaha bagi Perempuan pada Sumber Daya Ekonomi belum optimal karena Refocussing anggaran di saat pandemi Covid-19.	Mengikutkan perempuan rentan pada bantuan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Tahap I maupun JPE Tahap II
2.	Belum memperoleh Anugerah Parahita Ekapraya (APE).	1. Optimalisasi kinerja Tim driver, POKJA PUG, dan Tim Teknis PUG 2. Penyusunan PERBUB PUG.
3.	KLA belum bisa meningkat peringkat menjadi NINDYA karena cakupan DLA masih kurang dan belum memiliki Perda Kawasan Tanpa Rokok dan larangan IPS rokok.	1. Menambah cakupan DLA dan koordinasi untuk perda KTR 2. Koordinasi intensif tentang Larangan Iklan Promosi Sponsor Rokok
4.	Pelaporan kekerasan pada perempuan dan anak belum optimal.	1. Sosialisasi pada masyarakat akan adanya layanan perempuan dan anak korban kekerasan melalui pembentukan PATBM yang menjadi tangan panjang layanan korban kekerasan pada perempuan dan anak di desa. 2. Pembentukan UPTD PPPA untuk meningkatkan layanan korban kekerasan pada perempuan dan anak

### 3. Urusan Pangan

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pangan pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

#### A. Capaian Kinerja Program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.1.818.275.103 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.683.279.371 atau realisasi keuangan sebesar 92,58%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Pangan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.38  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Program  
Urusan Pangan Tahun 2020

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	(Skor PPH)	93	84,80	91,18

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01\%$	Sangat Tinggi
2	$75,01\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01\% \leq 75\%$	Sedang
4	$50,01\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 1 Indikator.

Pada tahun 2020, dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan pangan mendapat penghargaan/prestasi Juara III Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal. Penghargaan tersebut diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pangan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.39  
Kebijakan Strategis urusan pangan Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020	Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/187 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Klaten TA 2020	Memberikan perlindungan terhadap kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari ancaman alih fungsi lahan

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi/catatan dari DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2019 terkait urusan Pangan.

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Pangan serta upaya mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.40  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan pangan tahun 2020

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Database terkait daerah rawan pangan dan gizi belum sampai pemetaan tingkat desa.	Membuat peta food security and vulnerability atlas (FSVA) tingkat Kabupaten Klaten dimana analisisnya sampai dengan desa.
2.	Masyarakat belum memanfaatkan secara maksimal lahan pekarangan.	Memberikan fasilitasi melalui kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan.
3.	Cadangan pangan belum semua terdistribusi.	Meningkatkan peran lembaga distribusi melalui kegiatan penguatan LDPM dengan mempertimbangkan kebijakan sasaran bukan hanya untuk daerah rawan pangan dan bencana alam, melainkan juga untuk masyarakat miskin.
4.	Database kelembagaan kelompok wanita tani (KWT) sampai sekarang belum terdata secara keseluruhan.	Melakukan pendataan KWT di Kabupaten Klaten dan dibuat minimal SK Kepala Dinas.

#### 4. Urusan Lingkungan Hidup

Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

##### A. Capaian Kinerja Program

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Lingkungan Hidup, mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.24.091.216.567,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.487.878.587,- atau 80,89%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.146.009.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.980.307.620 atau sebesar 92,28%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.41  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	38,02	36,15	95,08
	Indeks kualitas udara	Indeks	82,02	76,82	93,66
	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	53,71	42,54	79,2
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	%	83	83	100
	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. AMDAL. UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	88	88	100
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. Izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100
	Cakupan pemantauan terhadap kualitas lingkungan	%	100	100	100

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	36	36	100
	Prosentase turus jalan yang tertanami berbagai jenis tanaman bunga	%	80	80	100
Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	100	70	70
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat	%	100	50	50
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan	%	17,21	44	255
	Prosentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat	%	12,5	27,6	220,8
Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luasan RTH public sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	ha	0,125	0,125	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01$ %	Sangat Tinggi
2	$75,01$ % $\leq 90$ %	Tinggi
3	$65,01$ % $\leq 75$ %	Sedang
4	$50,01$ % $\leq 65$ %	Rendah
5	$\leq 50$ %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Lingkungan Hidup Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 3 indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran Kategori 'Sangat Tinggi' sebanyak 2 indikator dan Capaian Kinerja Kategori "Tinggi" sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 11 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 9 Indikator dan kategori "sedang" sebanyak 1 indikator dan kategori "sangat rendah" sebanyak 1 indikator.
- Adapun capaian kinerja kategori "sedang" dan "sangat rendah" dikarenakan terdapat Pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan terutama untuk kegiatan yang sifatnya di lapangan. Hal tersebut berpengaruh terhadap capaian kinerja program.

Selama tahun 2020, terdapat beberapa penghargaan / prestasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup. Penghargaan / prestasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.42  
Prestasi/Penghargaan dalam pelaksanaan  
urusan Lingkungan Hidup tahun 2020

No.	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	SMK Negeri 4 Klaten, Kecamatan Klaten Utara	Gubernur Jawa Tengah
2.	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	Smk Negeri 1 Rota Bayat, Kecamatan Bayat	Gubernur Jawa Tengah
3.	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	SMA Negeri 1 Cawas, Kecamatan Cawas	Gubernur Jawa Tengah
4.	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	SD Negeri 1 Kebondalem Lor, Kecamatan Prambanan	Gubernur Jawa Tengah

#### B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup dapat

dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban BupatiKlaten Tahun Anggaran 2020.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Lingkungan Hidup yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.43  
Kebijakan Strategis urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menetapkan Lokasi dan Alokasi kegiatan Pengolahan sampah	Keputusan Bupati Klaten nomor 660.1/198 tentang Lokasi dan Alokasi Kegiatan Pengelolaan Sampah 3R (Reuse, Reduce, Recycle) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten TA 2020R	Mengendalikan pencemaran dan merusak lingkungan hidup serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
2.	Penetapan Hari Peduli Sampah Nasional	SE Bupati Nomor : 660.1/143/2020 tentang Hari Peduli Sampah Nasional	Menjadikan Pengelolaan sampah semakin baik dalam upaya mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2025 dengan target pengurangan sebesar 30 % dan penanganan sebesar 70 %
3.	Aksi Cleanup dan Pilah Sampah dari Rumah	SE Bupati Nomor : 658.1/556/25 tentang Aksi Cleanup dan Pilah Sampah dari Rumah	Mewujudkan Klaten bersih sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu persampahan di klaten dengan tema "KLATEN KUDU RESIK'
4.	Pemberian Sanksi Administratif Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa Paksaan Pemerintah kepada penanggungjawab kegiatan PT. Indelko	SK Bupati Nomor 660/328 Tahun 2020 tentang Pemberian Sanksi Administratif Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa Paksaan Pemerintah kepada penanggungjawab kegiatan PT. Indelko	Penegakan Peraturan dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada penanggungjawab kegiatan PT Indelko



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
5.	Pemberian Sanksi Administratif Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa Paksaan Pemerintah kepada penanggungjawab kegiatan PT. Koesoema Nanda Putra	SK Bupati Nomor 660/328 Tahun 2020 Pemberian Sanksi Administratif Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa Paksaan Pemerintah kepada penanggungjawab kegiatan PT. Koesoema Nanda Putra	Penegakan Peraturan dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada penanggungjawab kegiatan PT Koesoema Nanda Putra

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.44  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD  
terhadap pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 85,8% dengan Belanja Langsung sebesar 82,9% walaupun secara trend meningkat dari tahun sebelumnya(2018) akan tetapi realisasi tersebut masih membuktikan realisasi Belanja masih belum optimal dan masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Apalagi khusus untuk belanja tidak langsung dalam urusan Lingkungan Hidup lebih banyak berisi belanja pegawai yang seharusnya lebih mudah untuk direncanakan sehingga semestinya realisasinya dapat sesuai dengan targetnya. realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan	- Pada tahun 2020 realisasi belanja langsung sebesar 80,89% dan belanja tidak langsung sebesar 92,28%. - Memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas	Peningkatan serapan anggaran

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Lingkungan Hidup sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>		
2.	<p>Beberapa pengukuran target indikator sepertinya tidak direncanakan dengan baik dan belum memperhatikan informasi baseline indikator dan/atau capaian indikator dari tahun-tahun sebelumnya (terlalu rendah/tidak berdasarkan data yang tersedia), sehingga terlihat ada beberapa indikator kinerja baik sasaran maupun program yang memiliki realisasi jauh diatas angka 100%. Hampir semua indikator kinerja memiliki capaian yang sangat tinggi dan tinggi. Akan tetapi bila dihubungkan dengan kondisi lapangan, masih banyak permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah ditemukan dan diinventarisir. Untuk itu, solusi atas permasalahan tersebut perlu dilaksanakan dan disinergikan dengan seluruh Stakeholder yang ada.</p>	<p>Melaksanakan koordinasi yang lebih intens lagi antar pemangku kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian alam</p>	<p>Membangun sinergi antar pelaku pemangku kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup</p>

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup beserta upaya mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

Tabel 3.45  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan lingkungan hidup tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Pemanfaatan SDA secara berlebihan	Perlu penegakan hukum berkaitan dengan Pelestarian Lingkungan Hidup
2.	Tingginya alih fungsi lahan untuk kegiatan pembangunan	Perlu koordinasi antar dinas terkait tentang perijinan mendirikan bangunan
3.	Ancaman bencana alam yang dapat merusak kualitas lingkungan	Meningkatkan penghijauan di daerah rawan longsor dan sekitar sumber mata air
4	Belum sinerginya antar pelaku pemangku kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup	Perlu koordinasi yang lebih intens lagi antar pemangku kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian alam
5	Tingginya tingkat pencemaran limbah domestik	Meningkatkan Sosialisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik
6	Masih rendahnya penanganan sampah	Terus meningkatkan kualitas dan Kuantitas kinerja TPS 3R

## 5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### A. Capaian Kinerja Program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 5.936.860.783,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.961.086.606,- atau realisasi keuangan sebesar 83,56%. adapun alokasi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.3.298.310.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.830.940.309,- atau sebesar 85,83%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.46**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Indeks	Sdh (92,7)	Sdh (81,6)	88,03
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Penataan administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	0,91	0,98	107,69
	Cakupan penerbitan KTP	%	90,58	98,05	108,25
	Cakupan penerbitan akte kelahiran Penduduk usia 1-18 tahun	%	92,18	91,87	99,66
	Keluarga mempunyai KK	%	98	97,68	99,67
	Penduduk berakte kelahiran	%	95,8	91,87	95,90
	Keluarga yang mempunyai akte nikah (yang non muslim)	%	265,850	253.821	95,48
	Penerbitan Akte kematian	akta kematian	2.950	2.922	99,05

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja sasaran kategori "sangat tinggi" sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 7 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 7 indikator .
- Keseluruhan Capaian Kinerja indikator Sasaran dan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Masuk Kategori "Sangat Tinggi".

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2020, terdapat inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.47  
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2020

NAMA INOVASI	DESKRIPSI SINGKAT INOVASI
SEROJA (Sekali Proses Semua Jadi)	Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dalam Kepengurusan administrasi kependudukan
SIPON KEDUTEN (Sistem Pelayanan Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten)	SIPON KEDUTEN adalah sistem resmi dari Dinas Dukcapil Klaten yang dapat diakses melalui website <a href="http://pelayanan.dukcapil.klatenkab.go.id/">http://pelayanan.dukcapil.klatenkab.go.id/</a> dan aplikasi yang dapat didownload di AppStore. SIPON KEDUTEN berfungsi sebagai media pengajuan layanan Adminduk secara online.

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada tahun 2020, tidak ada Kebijakan Strategis Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditetapkan Kepala Daerah.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.48  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD  
terhadap pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan  
dan Catatan Sipil

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp.7.164.896.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.502.483.827,- atau realisasi keuangan sebesar 90,8%. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.3.976.470.000,- dengan realisasi sebesar RP.3.381.460.207,- atau sebesar 85%. Realisasi anggaran baik belanja langsung (90,8%) maupun tidak langsung (85%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi anggaran yang masih jauh dari target bukan saja kurang memanfaatkan	Serapan Belanja Langsung Tahun 2020 adalah sebesar 83,56%. Jika dibandingkan Tahun 2019 yang mana realisasi serapan Belanja Langsung sebesar 90,8% sehingga mengalami penurunan sebesar 7,24%. Hal tersebut dikarenakan : 1) Efisiensi anggaran, adanya selisih harga yang besar antara harga penawaran dengan harga negosiasi di Paket Pengadaan Belanja Cetak Kegiatan	Peningkatan serapan anggaran dan perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus penyimpangan dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu (DAK Non Fisik) 2) Tidak dilaksanakannya Belanja Paket/Pengiriman Dokumen Adminduk, dikarenakan dari aspek pengadaan barang/jasa harus ada kantor perwakilan di wilayah Kabupaten Klaten. Sedangkan sampai saat ini belum ada penyedia jasa pengiriman yang mempunyai kantor di Klaten.	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil beserta upaya mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

Tabel 3.49  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Sarana Prasarana Perkantoran yang minim dan kurang memadai	Memaksimalkan Sarpras yang ada, walaupun pelayanan Adminduk tidak bisa maksimal
2	Animo SKPD yang rendah untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Disdukcapil dalam pemanfaatan Data Kependudukan	Melaksanakan Sosialisasi ke SKPD terkait Perjanjian Kerja Sama, Mengundang SKPD untuk memberikan penjelasan mengenai teknis pelaksanaan Perjanjian kerja Sama dalam pemanfaatan data kependudukan

## 6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### A. Capaian Kinerja program

Perangkat daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4.711.210.291 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.453.470.089 atau sebesar 94,53%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.098.067.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.876.819.266 atau sebesar 92,86%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.50**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	66	61	92,42
Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	87	88	101,1
Meningkatkan peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	42	42	100



Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	89	75	84
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan	%	87	88	101
Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna	%	82	64	78
Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes	%	64	91	142
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat	%	67	1337	1996
Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu periode RPJMD	%	78	78	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01$ %	Sangat Tinggi
2	$75,01$ % $\leq 90$ %	Tinggi
3	$65,01$ % $\leq 75$ %	Sedang
4	$50,01$ % $\leq 65$ %	Rendah
5	$\leq 50$ %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 3 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 3 Indikator.
- Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 4 Indikator dan capaian kinerja indikator program kategori "tinggi" sebanyak 2 Indikator.

Terdapat beberapa penghargaan yang diraih Dalam pelaksanaan program urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa tahun 2020. Penghargaan/Prestasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.51  
Prestasi Pelaksanaan Program  
Urusan pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2020

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Juara III Tingkat Provinsi Lomba B2SA (Beragam Bergisi seimbang dan Aman)	TP PKK Kabupaten Klaten	TP PKK Provinsi Jawa Tengah
2	Juara I Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK	TP PKK Desa Jonggrangan, Kec. Klaten Utara	TP PKK Provinsi Jawa Tengah
3	Juara II Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi UP2K - PKK	TP PKK Desa Bono, Kec. Tulung	TP PKK Provinsi Jawa Tengah
4	Juara III Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pelaksana Terbaik Evaluasi 10 Program Pokok PKK	TP PKK Kabupaten Klaten	TP PKK Provinsi Jawa Tengah
5	Juara Harapan I Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Lomba Satgas Jogo Tonggo Desa Dan Kelurahan	Desa Plawikan ( RW 10) Kec. Jogonalan	Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah

Selain penghargaan tersebut, terdapat inovasi dalam pelaksanaan Program urusan pemberdayaan masyarakat desa. Inovasi tersebut adalah Desk Pengelolaan keuangan Desa untuk Mempercepat terselesainya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa.

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.52  
Kebijakan Strategis urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pedoman pengelolaan Dana Desa	Perbup No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kab. Klaten	Memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa
2.	Pengelolaan asset desa	Perbup No. 56 Tahun 2020 tentang pengelolaan asset desa	Memberikan Pedoman penyelesaian masalah terkait asset/ Tanah kas desa

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.53  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD  
terhadap pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan wajib bukan pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp.4.981.029.299,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.611.096.607,- atau sebesar 92,6%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.411.576.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.009.535.411,- atau sebesar 88,2%. Realisasi anggaran baik belanja langsung (92,6%.) maupun tidak langsung (88,2%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi anggaran yang tidak sesuai target kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya</li> <li>- Realisasi anggaran belanja langsung sebesar 94,53%. Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 92,86%.</li> </ul>	Perbaikan penyusunan anggaran sesuai kebutuhan dan peningkatan serapan anggaran

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa beserta upaya mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

Tabel 3.54  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum optimalnya pengelolaan tata laksana administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa	Mengadakan Bimbingan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan desa kepada seluruh aparat desa
2.	Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan desa	Fasilitasi dan pembinaan secara intensif kepada pengurus lembaga desa
3.	Belum optimalnya pengelolaan aset desa	Pendataan dan fasilitasi masalah aset desa dengan sistem tematik
4.	Belum optimalnya kualitas kinerja perangkat desa	Mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada seluruh aparat desa
5.	Masih rendah desa yang memanfaatkan peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG;	Mendorong peran serta pengurus LEM /LED dalam mengembangkan potensi - potensi di desa
6.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna	Melaksanakan pendataan potensi TTG di desa dan memfasilitasi/ mengadakan pelatihan sesuai potensi tersebut.
7.	Belum optimalnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan.	Sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong partisipatif aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan
8.	Belum tercukupinya kebutuhan sarana prasarana perdesaan	Mendorong Desa untuk mengajukan proposal bantuan Sarpras Desa dengan APBD Provinsi

### 7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

#### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Bagian Kesra. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 8.686.974.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.122.536.431 atau sebesar 70,48%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.55  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate)	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) / TFR	Angka	2,12	2,1	100,9 *)
*) rumus = $(2 \times \text{target} - \text{realisasi}) / \text{target} \times 100\%$ untuk menghitung indikator kinerja dengan kondisi semakin rendah realisasi semakin baik					
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Keluarga berencana	Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	%	66,03	70,9	107,38
	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / Drop Out KB	%	4,98	9,7	5,22 *)
	Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)	%	8,94	16,95	10,40 *)
*) rumus = $(2 \times \text{target} - \text{realisasi}) / \text{target} \times 100\%$ untuk menghitung indikator kinerja dengan kondisi semakin rendah realisasi semakin baik					
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Kesehatan Reproduksi Remaja	Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun ( <i>age specific fertility Rate/ ASFR 15-29 years old</i> )	Per-1000 perempuan usia 15-19 tahun	33	0,42	198,73 *)
Peningkatan pemberdayaan keluarga sejahtera	Persentase keluarga Sejahtera I dan Prasejahtera	%	28	36,21	70,68 *)
*) rumus = $(2 \times \text{target} - \text{realisasi}) / \text{target} \times 100\%$ untuk menghitung indikator kinerja dengan kondisi semakin rendah realisasi semakin baik					

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan capaian kinerja “sangat tinggi”.
- Terdapat 5 indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori kinerja “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator, kategori “sedang” sebanyak 1 indikator dan kategori kinerja “sangat rendah” sebanyak 2 indikator.
- Indikator Kinerja Program “sedang” terdapat pada indikator persentase Keluarga Sejahtera I dan Prasejahtera. Target Persentase Keluarga Sejahtera I dan Prasejahtera Pada tahun 2020 sebesar 28% namun Pada tahun 2020, Keluarga Sejahtera I dan Prasejahtera sebesar 36,21%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan berbagai dampak kehidupan Perekonomian Masyarakat, terutama peningkatan jumlah keluarga pra sejahtera. Terjadi peningkatan keluarga pra sejahtera yang dipengaruhi oleh berbagai factor, dari kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan/penghasilan keluarga dan sebagainya.
- Indikator Kinerja Program “Sangat Rendah” terdapat pada program Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / Drop Out KB dan Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need). Kedua indikator Kinerja ini sangat berkaitan, kondisi pandemi saat ini merupakan Factor penghambat pencapaian indikator tersebut, dimana masyarakat enggan untuk mengikuti pelayanan KB di Fasilitas

Kesehatan dikarenakan ketakutan jika tertular virus covid-19. Kondisi pandemi juga membuat sebagian masyarakat harus melakukan pekerjaan dan aktivitas di rumah sehingga intensitas bertemu dengan pasangan lebih sering dibandingkan dengan kondisi normal. Langkah untuk mengatasi capaian kinerja yang kurang optimal di atas ditempuh dengan melakukan konseling dan edukasi secara maksimal dengan media KIE berupa cetak maupun elektronik dikarenakan untuk sosialisasi tatap muka harus diminimalisir dalam kondisi pandemi, dan memberikan alternatif bagi akseptor yang menggunakan metode MKJP mengalami kendala karena pandemi, sementara menggunakan metode KB jangka pendek.

Terdapat beberapa penghargaan / prestasi yang diperoleh dalam pelaksanaan program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2020. Prestasi dan penghargaan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.56  
Prestasi/Penghargaan pelaksanaan  
urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun 2020

<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
Manggala Karya Kencana (MKK)	Bupati Klaten (Hj.Sri Mulyani)	BKKBN Pusat
Juara 1 TNI Manunggal KB Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah	KODIM 0723 Klaten	BKKBN Provinsi Jawa Tengah
Juara 1 Pelayanan KB Rumah Sakit (PKBRS) Untuk RS Tipe C	RSUD Bagas Waras	BKKBN Provinsi Jawa Tengah

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban BupatiKlaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.57  
Kebijakan Strategis urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pencanangan dan pembentukan Kampung KB Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2020 Kabupaten Klaten	Surat Keputusan Bupati Nomor 463/289 Tahun 2020 tentang Kampung KB Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2020 di Kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara serta penanganan stunting melalui program Bangga Kencana serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.58  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
1.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (9 program) dan bagian Kesra (1 program). Besaran presentase realisasi anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 85,1% hal membuktikan realisasi Belanja masih belum optimal walaupun meningkat dari tahun anggaran sebelumnya (2018). Realisasi yang tidak sesuai target, karena kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan. sebagai	Penyusunan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran Tahun 2020 Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana telah disusun sesuai dengan kebutuhan prioritas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Realisasi keuangan tahun 2020 sebesar 70,48%, menurunnya realisasi keuangan ini bukan berarti	Untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan



No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	<p>catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Penduduk dan Keluarga Berencana sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>kinerja mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan yang bersumber dana dari DAK Non Fisik yang berupa pertemuan-pertemuan sosialisasi/ pembinaan/ pelatihan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi pandemi, sehingga realisasi keuangan tidak bisa maksimal.</p>	
2.	<p>Terdapat capaian yang kurang optimal pada urusan Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu, kategori sedang sebanyak 2 indikator (indikator yang sama dalam 2 program yang berbeda) dan kategori sangat rendah sebanyak 4 indikator (2 indikator yang sama dalam program yang berbeda). Di samping itu terdapat beberapa permasalahan yang masih muncul khususnya terkait dengan kebutuhan dukungan kebijakan daerah, kebutuhan SDM terlatih, dan kebutuhan KB bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam BPJS. Untuk itu solusi-solusi yang telah ditawarkan perlu dilaksanakan segera dan perlunya sistem pembinaan dan pengawasan yang memadai agar permasalahan serupa tidak terjadi pada waktu-waktu yang akan datang.</p>	<p>Indikator kinerja program Tahun Anggaran 2020 telah disesuaikan dengan dokumen Perubahan Renstra yang tercantum pada Perubahan RPJMD, sehingga sudah tidak terdapat indikator yang sama dalam 2 program yang berbeda. Kebijakan daerah berupa GDPK telah direncanakan melalui Bappeda Kab. Klaten, dan untuk kebutuhan KB bagi masyarakat miskin diupayakan mendapat dukungan dari APBN/Anggaran BKKBN Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan</p>

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana beserta upaya mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

Tabel 3.59  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan Pengendalian penduduk  
dan keluarga Berencana tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Penurunan angka partisipasi ber KB (CPR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengintensifkan KIE KB melalui Tenaga Lini Lapangan KB (PLKB/PPKBD/Sub PPKBD)</li> <li>- Mengadakan pelayanan KB Gratis untuk PUS Non BPJS menggunakan Dana APBD dan APBN</li> <li>- Meningkatkan Advokasi dan Kemitraan dalam kegiatan KIE dan Penggerakan Calon Akseptor</li> <li>- Memberikan reward kepada Peserta KB Baru MKJP berupa Uang Harian/Transport dan kompensasi</li> <li>- Meningkatkan Patient Safety Pelayanan KB dengan peningkatan kualitas sterilisasi alat dan ruang pelayanan termasuk pelayanan KB bergerak</li> </ul>
2	Penurunan angka partisipasi ber KB (CPR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Angka Putus Pakai Alokon (DO)</li> <li>- Mengintensifkan pencatatan dan pelaporan PUS tidak ber KB melalui tenaga Lini Lapangan</li> <li>- Mendekatkan jangkauan pelayanan KB dengan memperluas jaringan Faskes KB dengan dokter keluarga dan Praktek Mandiri Bidan</li> <li>- Menjaga ketersediaan stock alokon di faskes KB dengan meningkatkan kecepatan droping alokon menggunakan Jasa ojol</li> <li>'- Memberikan alternatif bagi akseptor yang menggunakan metode MKJP mengalami kendala karena pandemi, sementara menggunakan metode KB jangka pendek</li> </ul>
3	Kurangnya Pengetahuan Ibu Baduta tentang Pola Asuh Baduta Stunting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pengetahuan Ibu Baduta tentang Pola Asuh 100 HPK di desa Kampung KB Lokus stunting</li> <li>- Pengadaan Alat Peraga BKB Kit Stunting</li> <li>- Pengintegrasian Kegiatan BKB dengan mitra kerja PKK dan PAUD dan POSYANDU melalui Kegiatan BKB HI (Holistik Integratif)</li> <li>- Optimalisasi BKB dengan Pemantau Baduta dengan Kartu Kembang Anak (KKA)</li> </ul>

## 8. Urusan Perhubungan

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Perhubungan pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

### A. Capaian Kinerja Program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar pada tahun 2020 yang berkaitan dengan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 6.372.814.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.015.662.991 atau 94,4%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.082.295.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.762.451.203 atau sebesar 92,17%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan perhubungan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Perhubungan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.60  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Urusan Perhubungan Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan	Indeks	52,52	64,83	123,43
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Indeks kepuasan layanan perhubungan	indeks	80,917	81,351	100,53
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase perlengkapan jalan terpasang	%	40,03	61,06	153%
Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik	%	98,42	98,42	113%
Peningkatan pelayanan angkutan	Indeks kepuasan layanan angkutan umum	indeks	74,82	79,49	106%

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	87,86	78,06	89%

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan skala nilai kinerja tersebut capaian kinerja urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

- terdapat 2 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja sasaran "sangat tinggi" sebanyak 2 indikator.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program Urusan Perhubungan dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 3 Indikator dan kategori "Tinggi" sebanyak 1 indikator.

#### B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2020, tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Perhubungan yang ditetapkan Kepala Daerah.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perhubungan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.61  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD  
terhadap pelaksanaan urusan Perhubungan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 86,9% dengan Belanja Langsung sebesar 89,4% turun jauh dari anggaran sebelumnya (2018) membuktikan realisasi Belanja masih belum optimal dan masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Apalagi terkait dengan belanja tidak langsung dalam urusan perhubungan lebih banyak berisi belanja pegawai yang seharusnya lebih mudah untuk direncanakan sehingga semestinya realisasi atas anggaran tersebut dapat sesuai dengan targetnya. realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Perhubungan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Realisasi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 94,4% dan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 92,17%. Upaya yang dilakukan untuk optimalisasi realisasi anggaran adalah sebagai berikut : 1. Dilakukan review dan penelaahan akan penetapan anggaran belanja OPD yang sudah ada agar realisasi bisa lebih optimal 2. Dilakukan rapat internal OPD untuk pembahasan realisasi anggaran yang belum sesuai target dan langkah yang ditempuh untuk bisa mengatasi hal tersebut 3. Dilakukan pengawasan intensif akan solusi dan tindaklanjut permasalahan yang sudah dibahas pada rapat internal OPD	Tujuannya yaitu agar realisasi belanja OPD bisa dioptimalkan dan memenuhi target yang sudah ditentukan
2.	Beberapa pengukuran target indikator seperti tidak direncanakan dengan baik dan belum	1. Dilakukan perencanaan dan review akan penentuan target	Tujuannya yaitu agar realisasi capaian

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	memperhatikan informasi baseline indikator dan/atau capaian indikator dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terlihat ada beberapa indikator kinerja baik sasaran maupun program yang memiliki realisasi jauh diatas angka 100%. Penentuan atas target kinerja yang ada saat ini perlu direvisi atau ditinjau ulang sehingga dapat menampilkan ukuran kinerja dengan baik. Di beberapa indikator kinerja, masih terdapat capaian yang belum mencapai nilai 100%, yaitu 1 kategori sedang, dan 2 kategori sangat rendah yang perlu menjadi perhatian khusus. Uraian permasalahan dan solusinya perlu segera dilaksanakan agar tidak mengakibatkan kerugian atas aset tetap pada OPD pelaksana urusan perhubungan.	<p>indikator kerja</p> <p>2. Dilakukan kaji ulang akan informasi baseline indikator yang belum tercapai ataupun overload pada tahun sebelumnya.</p> <p>3. Dilakukan rapat internal OPD untuk pembahasan capaian kinerja yang belum tercapai dan langkah yang ditempuh untuk bisa memaksimalkan kinerja pada indikator tersebut.</p> <p>4. Dilakukan pengawasan intensif akan solusi dan tindak lanjut permasalahan yang sudah dibahas pada rapat internal OPD</p> <p>5. Capaian kinerja "sedang" tahun 2019 yaitu Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum, pada tahun 2020 capaian kinerjanya (realisasi/target) sudah masuk kategori "Tinggi yaitu (89%)</p>	kinerja bisa dimaksimalkan sehingga dapat memenuhi target kinerja yang sudah ada.

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Perhubungan beserta upaya mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

Tabel 3.62  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan perhubungan tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Pertumbuhan penduduk Kabupaten Klaten yang cukup tinggi yaitu sekitar 1,175 juta jiwa Perlunya pelaksanaan uji kir untuk memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan	Diselenggarakan uji KIR kendaraan selama pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan
2	Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di bidang angkutan (ijin trayek, laik jalan dan angkutan galian golongan C).	Diselenggarakan sosialisasi keamanan berlalu lintas dan penertiban laik jalan serta angkutan galian gol C

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	Masih minimnya jumlah Traffic light ATCS yang telah terkoneksi dengan CCRoom	Mengusulkan pengadaan traffic light ATCS yang telah terkoneksi dengan CCRoom
4	Menurunnya jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melakukan uji kelaikan kendaraan di Dinas Perhubungan Klaten	dibuat sistem pengiriman surat teguran bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak melakukan uji tepat waktu
5	Minimnya jumlah angkutan umum yang melayani trayek dalam kabupaten dan sudah menerapkan standar keselamatan	diselenggarakan kegiatan pengecekan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek secara teratur melalui operasi ram check dan laik jalan kendaraan
6	Minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan pendataan (uji petik) prasarana dan fasilitas perhubungan	diajukannya rancangan perda retribusi daerah terbaru pembahasan penarikan retribusi layanan pengujian berbasis SMARTCARD
7	Pegawai yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan masih minim jumlahnya.	pengajuan CPNS dengan latar belakang D3/D4/S1 LLAJ

## 9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas

### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 12.279.265.300 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.807.362.335,- atau 96,15%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.458.545.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.159.193.590 atau sebesar 87,82%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Wajib bukan

pelayanan Dasar di Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.63**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Program**  
**Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020**

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan layanan telekomunikasi	%	55,08	56,5	102,5
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	84,60	75	88,6
	Persentase pelayanan publik dan nonpublik berbasis e-government	%	80	69,5	86,8
Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase event kabupaten terpublikasi	%	92	92	100
	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik	skor	65	95	146,1
	Persentase Publikasi Kegiatan Kepala Daerah Melalui Media Massa	%	100	95	95
	Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah	%	100	95	95
	Persentase Publikasi Informasi Kepala Daerah Melalui Media Sosial	%	100	97	97
	Persentase publikasi Kepala Daerah melalui penyuluhan dan media papan ruang	%	100	90	90
	Persentase publikasi kegiatan pemerintah melalui radio	%	90	90	100
	Persentase publikasi kegiatan pemerintah melalui komunikasi budaya	%	95	60	63
	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase SDM bidang komunikasi dan informasi terlatih	%	96,67	5



Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 13 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 7 Indikator, kategori tinggi sebanyak 3 indikator, Kategori "sedang" 1 indikator dan kategori "sangat rendah" sebanyak 1 indikator.
- Indikator Kinerja dengan Capaian Kinerja Program Kategori "Sedang" dan "Rendah" adalah sebagai berikut :
  1. Persentase SDM bidang komunikasi dan informasi terlatih. Capaian masih belum optimal dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk kegiatan covid 19
  2. Persentase publikasi kegiatan pemerintah melalui komunikasi budaya. Capaian kinerja tidak bisa optimal dikarenakan mengalami refocussing anggaran. Adanya pandemi Covid-19 membuat kegiatan pentas budaya, baik pagelaran ketoprak dan pagelaran wayang tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan pagelaran ketoprak dan wayang secara virtual.

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan

Informatikadapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.64  
Kebijakan Strategis urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menetapkan Rencana Induk <i>Smart City</i> Kabupaten Klaten Tahun 2020-2025	Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Induk <i>Smart City</i> Kabupaten Klaten Tahun 2020-2025	Mengembangkan <i>Smart City</i> Kabupaten Klaten berdasarkan 6 dimensi <i>Smart city</i> ( <i>Smart Governance, Smart Branding, Smart Society, Smart Enviroment, Smart Living</i> dan <i>Smart Economy</i> )
2.	Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Pemkab Klaten	Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten	Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengelola media sosial Pemerintah agar dapat berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.65  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan wajib bukan pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp.12.279.037.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.397.880.114,-	- Berdasarkan hasil rekomendasi / catatan DPRD tahun 2019 maka Dinas Komunikasi Informatika akan mengevaluasi seluruh perencanaan	1. Alokasi anggaran perkegiatan disesuaikan dengan target dan indikator kegiatan sehingga pemanfaatan anggaran bisa

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>atau sebesar 92,8%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.218.217.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.006.916.350,- atau sebesar 90,5%. Realisasi anggaran baik belanja langsung (92,8%) maupun tidak langsung (90,5%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi anggaran yang tidak sesuai target kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>kegiatan dan alokasi sesuai dengan kebutuhan agar realisasi dapat tercapai optimal dan target kegiatan terpenuhi 100 %</p> <p>- Realisasi Belanja Langsung pada tahun 2020 sebesar 96,15% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 87,82%</p>	<p>tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>2. Membuat time schedule pelaksanaan kegiatan agar penyelesaian kegiatan sesuai dengan perencanaan.</p> <p>3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas budaya agar kegiatan bisa dilaksanakan secara sinergi sehingga capaian target kegiatan bisa terpenuhi tepat waktu.</p>
2.	<p>Pada tahun anggaran 2019, urusan Komunikasi dan Informatika hanya mempunyai 1 indikator-indikator sasaran yaitu presentase sistem berbasis informasi. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah indikator kinerja dengan kategori rendah (52,3%). Capaian indikator program dengan indikator</p>	<p>Berdasarkan hasil rekomendasi / catatan DPRD tahun 2019 maka Dinas Komunikasi Informatika telah menyesuaikan melalui perubahan renstra dan renja dengan indikator sasaran kinerja yang sinkron dengan penyusunan cascading dimulai dari visi misi tujuan</p>	<p>1. Membuat revisi dokumen perencanaan dari mulai visi misi tujuan sasaran program dan kegiatan sesuai urusan kominfo yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.</p>

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	sasaran kelihatan tidak sinkron. Untuk mencapai sasaran diperlukan sejumlah program. Ketika capaian program sudah tinggi semua memberikan indikasi bahwa capaian indikator sasaran akan tinggi. Namun demikian pada urusan komunikasi dan informatika capaian indikator program tidak sejalan dengan indikator sasaran. Perlu dipertimbangkan lagi penentuan indikator sasaran maupun indikator program agar capaiannya terdapat hubungan yang rasional.	sasaran program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Kepmendagri 50/2020	2. Menyusun cascading dari mulai visi misi tujuan sasaran program dan kegiatan.

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Komunikasi dan informatika beserta upaya mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

Tabel 3.66  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Pengembangan Smart City di Kabupaten Klaten mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Belum seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung proses integrasi data dari masing – masing aplikasi yang dimiliki oleh OPD. Selain itu penyediaan sarana dan prasarana pendukung belum optimal dan terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga teknis pendukung	Terbitnya Perda e-government dan Perbub terkait pelaksanaan e-Government di Kabupaten Klaten mendorong percepatan dalam pencapaian target kinerja dengan mengimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan melalui koordinasi dan sosialisasi secara terus menerus dengan pemangku kepentingan agar muncul komitmen yang kuat dalam mewujudkan integrasi data sebagai dasar pelaksanaan e-Government.
2.	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 tercapai lebih dari 146 % dari target , namun demikian masih ada permasalahan yang perlu menjadi bahan pertimbangan pemangku kepentingan yaitu	UU No 14 Tahun 2008 memaksa setiap badan publik untuk melaksanakan fungsi layanan informasi PPID sehingga perlu diadakan kegiatan pemeringkatan Badan Publik terhadap Badan Publik untuk mengelola informasi publik di

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	belum terhubungnya website PPID di semua OPD menyebabkan informasi publik tidak bisa diunggah dan diketahui masyarakat dan pergantian atau mutasi pejabat menyebabkan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik menjadi terbatas.	OPD masing-masing.
3.	Aplikasi pengaduan matur ibu belum bisa mendeteksi secara sistematis setiap kasus pengaduan yang telah tertangani atau belum tertangani	Menyempurnakan aplikasi pengaduan matur ibu dan penguatan SOP nya
4.	Informasi live streaming kegiatan pemeringkatan belum bisa dilakukan disebabkan keterbatasan prasarana alat dan SDM	Perlu penambahan alat pendukung kegiatan dan SDM

## 10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah pada tahun 2020 adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.1.132.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.917.170.799 atau sebesar 81,02%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.67**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Program**  
**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Persentase UMK yang memiliki daya saing	%	13	11,8	90,7
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan UMKM	%	0,40842	0,078	19
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Persentase promosi produk UKM	%	60	2,72	4,5
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	80,59	77,94	96,7
	Persentase pertumbuhan koperasi	%	0,37	0,45	121,1

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “sangat tinggi” sebanyak 1 indikator.

- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 2 Indikator, dan kategori sangat rendah sebanyak 2 indikator.

- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Rendah sebanyak 2 Indikator. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Prosentase pertumbuhan UMKM.

Jumlah UMKM Kabupaten Klaten pada tahun 2020 adalah 55.100, atau bertambah 43 UMKM dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 55.057 hal tersebut dikarenakan UMKM khususnya Usaha Mikro bersifat dinamis artinya saat ini mempunyai usaha belum tentu melanjutkan usahanya diwaktu berikutnya tergantung kondisi keluarga / lingkungan , juga banyak pelaku usaha mikro yang beralih profesi menjadi tenaga kerja sehingga pertumbuhan UMKM relative rendah . Pertumbuhan UMKM yang relative sangat rendah juga disebabkan oleh rumus prosentase pertumbuhan UMKM dengan pembagi yang besar. upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah dengan mendorong tumbuhnya wirausaha baru melalui pelatihan – pelatihan kewirausahaan .

- Persentase promosi produk UKM.

Prosentase promosi produk UKM realisasi kinerjanya 2,78% dari 11 klaster produk UKM dengan jumlah produk UKM yang mengikuti Pameran pada tahun 2020 adalah 1500 produk UKM, semua klaster produk UKM di Kabupaten Klaten difasilitasi dalam pameran. Namun di tahun 2020 ini di karenakan Pandemi COVID-19 menyebabkan fasilitasi UMKM dalam *event* pameran di luar daerah menjadi terhambat, selain itu penyelenggaraan Pameran Ekonomi Kreatif di dalam daerah untuk mengenalkan produk Kabupaten Klaten, baik kepada masyarakat Kabupaten Klaten maupun masyarakat di luar Kabupaten Klaten juga tidak dapat dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan program urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2020, terdapat prestasi / penghargaan yang diterima oleh Bupati Klaten yaitu penghargaan Natamukti Award 2020 dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Natamukti Award 2020 merupakan apresiasi bagi kepala daerah yang sukses dalam membangun tata kelola dan kemandirian UMKM di daerahnya, berhasil dalam mempromosikan UMKM lokal, mendorong peningkatan kualitas produk UMKM lokal, serta membangun ekosistem UMKM di daerahnya.

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.68  
Kebijakan Strategis urusan Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pembentukan Tim Monev Subsidi Bunga melibatkan personil kecamatan	Keputusan Bupati Klaten Nomor 500/319 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 500/644 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten	Efektifitas pelaksanaan monitoring subsidi bunga di masyarakat karena melibatkan tim dari wilayah (kecamatan)
2.	Perluasan Sasaran Subsidi Bunga untuk Debitur Terdampak Pandemi Covid-19	Perbup Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup Klaten No. 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten.	Lembaga jasa keuangan penyalur yang ditunjuk untuk menyalurkan program subsidi bunga kepada usaha mikro tahun 2020 adalah PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dan PT BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten. Alokasi dana untuk program ini di tahun 2020 sebesar Rp. 2 M (Dua milyar rupiah) dengan perincian Rp. 1,5 M melalui PT BPR Bank Klaten (Perseroda) dan Rp. 500 Juta melalui PT BPR BKK Tulung (Perseroda). Semula sasaran program



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
			adalah calon debitur di 2 bank penyalur namun akibat Pandemi Covid-19, sasaran program subsidi bunga ditambah debitur lama terdampak covid-19 sebanyak 1.997 debitur dengan perincian 1.631 debitur PT BPR Bank Klaten (Perseroda) mendapat manfaat subsidi 5 bulan dan 366 debitur PT BPR BKK Tulung (Perseroda) menerima manfaat subsidi selama 4 bulan.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.69  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar tersebut mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp. 2.489.991.436,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.134.900.011,- atau sebesar 85,7%. Realisasi anggaran belanja langsung (85,7%) tersebut masih jauh dari anggaran yang ditetapkan dan lebih kecil dibandingkan dengan persentase capaian realisasi anggaran tahun sebelumnya (87,27%). Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus pengabaian dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD Pelaksana Urusan	Memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya. Realisasi Belanja Langsung pada tahun 2020 sebesar 81,02% dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 yang menghambat beberapa pelaksanaan kegiatan urusan Koperasi dan UKM	Peningkatan serapan anggaran

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.		
2.	Terdapat 2 indikator dengan kategori sangat rendah, kedua indikator tersebut adalah persentase pertumbuhan UMKM (27,5%) dan pertumbuhan koperasi (12,3%). Kedua indikator tersebut masih membutuhkan perhatian pada tahun berikutnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase pertumbuhan UMKM yang masih dalam kategori sangat rendah dikarenakan UMKM khususnya Usaha Mikro bersifat dinamis. Upaya yang dilakukan adalah mengembangkan wawasan kewirausahaan melalui kegiatan pelatihan penumbuhan wirausaha baru</li> <li>- Jumlah koperasi di kabupaten klaten saat ini sejumlah 891 unit, Jika dihitung berdasarkan jumlah desa/kelurahan yang sejumlah 401 Desa/Kelurahan, maka rata-rata setiap Desa/Kelurahan sudah memiliki 2 - 3 koperasi. Mengingat koperasi banyak bergerak di usaha simpan pinjam baik konvensional maupun syariah, maka anggaran diperuntukkan untuk kegiatan pembinaan, Pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi, karena KSP maupun USP</li> </ul>	Tumbuhnya wirausaha baru diharapkan dapat meningkatkan prosentase pertumbuhan UMKM

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		ini menghimpun dana dari anggotanya, jika sampai terjadi gagal bayar, maka akan sangat beresiko bagi Pemerintah. Banyak personil Koperasi yang kurang berkompeten dibidangnya, sehingga focus Pemerintah mengutamakan kualitas koperasi bukan kuantitas. Jika pertumbuhan Koperasi bisa besar perlu didorong dengan kegiatan fasilitasi pendirian Badan Hukum Koperasi (setiap pendirian koperasi pemerintah memberikan bantuan sekitar 2 juta sampai dengan 3 juta)	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beserta upaya mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

Tabel 3.70  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi UKM RI selain membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro juga menimbulkan permasalahan yaitu :	
	- masyarakat pendaftar sangat banyak sehingga menimbulkan kerumunan di masa pandemi covid 19	pendaftaran secara online

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	- Kesulitan untuk pengecekan data apakah pendaftar benar-benar pelaku usaha mikro dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan	pendaftar membuat surat pernyataan, dan juga melampirkan surat keterangan usaha dari Lurah / Kepala Desa
	apabila terdapat permasalahan dalam pencairan BPUM, penerima BPUM mengadu ke dinas, sedangkan dalam pencairan BPUM menjadi kewenangan pihak bank penyalur BPUM	membuat buku pengaduan, koordinasi dengan bank penyalur, koordinasi dengan Dinas Koperasi UKM Prov Jateng
	- Pendaftar yang tidak/belum lolos pengajuan BPUM mengadu	Penentuan lolos / tidak menjadi kewenangan Kementerian Koperasi UKM
2	Dalam pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2020 karena adanya pandemi covid 19 maka survei/pengambilan data lapangan maupun pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan kegiatan pelatihan usaha mikro secara tatap muka menjadi terkendala	Penyesuaian / pengunduran jadwal pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
3	Permasalahan umum yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil antara lain :	
	- Adanya pandemi covid 19 dampak langsung terhadap pelaku usaha mikro kecil, jumlah pelaku usaha mikro bersifat dinamis	Perlu upaya secara terpadu dan komprehensif untuk membangkitkan pelaku usaha, perlu adanya update data
	- Masih terbatasnya ketrampilan SDM Usaha Mikro Kecil	diperlukan pelatihan guna peningkatan kualitas produksi
	- Masih terbatasnya kemampuan SDM Usaha Mikro Kecil dalam manajemen usaha/ pengelolaan usahanya	perlu pendampingan pelatihan dalam manajemen usaha
	- Masih terbatasnya pengetahuan/ketrampilan dalam pemasaran usaha	Pelatihan pemasaran online, perluasan akses pemasaran
	- Masih membutuhkan tambahan permodalan usaha	KUR, subsidi bunga
4	Koperasi sering terjadi gagal bayar	Penambahan personil ASN yang memenuhi persyaratan minimal D3 / Sarjana Muda untuk satgas pengawasan dan penilaian Kesehatan Koperasi
5	Kurang tertibnya administrasi di kelembagaan koperasi	Pelatihan administrasi kelembagaan koperasi dan manajemen koperasi
6	Pengelola koperasi kurang memahami regulasi tentang koperasi	Pelatihan BinteK perkoperasian

## 11. Urusan Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Penanaman Modal pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Penanaman Modal mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 1.130.589.360 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.068.701.074 atau sebesar 94,52%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.023.363.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.815.997.471 atau sebesar 89,75%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Penanaman Modal dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.71  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Urusan Penanaman Modal Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatkan nilai tambah . produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja PMDN		460	3	1
	Rasio daya serap tenaga kerja PMA		294	12	4
	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN	%	2,50	-64	< 0
	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA	%	2,55	-59	< 0
Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu. tepat mutu. tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan	Nilai	80	81,86	102,32

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)				
	PMDN (dlm ribu Rp)	Rp	97.025.624	698.896.464	720
	PMA ( dlm ribu US\$)	US\$	12.437.536	4.721	38
	Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)				
	PMDN	investor	16	4.743	29.664
	PMA	investor	5	5	100
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rasio daya serap tenaga kerja				
	PMDN	org	460	3	1
	PMA	org	294	12	4
	Prosentase kenaikan/penurunan realisasi investasi				
	PMDN	%	2,50	-64	< 0
	PMA	%	2,55	-59	< 0
	Lama Proses Perizinan	hari	10	10	100
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	80	81,86	102,3

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Penanaman Modal Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 5 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 1 indikator dan Kategori "sangat rendah" sebanyak 4 indikator.
- Terdapat 10 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 5 Indikator dan kategori "sangat rendah" sebanyak 5 indikator.

- Capaian Kinerja Sasaran dan Program dengan Kategori “Sangat Rendah” adalah sebagai berikut :

1. Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMA)

Target nilai investasi PMA sebesar US\$ 12,4 juta dan realisasi sebesar US\$ 4,7 juta, dengan prosentase capaian kinerja sebesar 38% (tidak tercapai). Hal tersebut disebabkan minat investasi PMA di Kabupaten Klaten yang terkendala oleh beberapa hal, antara lain:

- Adanya Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang menghambat pembangunan infrastruktur bangunan gedung.
- Kabupaten Klaten sebagai Lumbung Pangan Nasional, sehingga harus melindungi tanah sawah lestari sebesar 32.000 Ha.
- Ketersediaan lahan (beberapa investor PMA yang sudah menjalin kepeminatan investasi dengan Kabupaten Klaten, pada akhirnya gagal untuk berinvestasi di Kabupaten Klaten dikarenakan kesulitan dalam mencari lahan sehingga pada akhirnya mereka memutuskan pindah ke Kabupaten lain).
- Tidak ada Kawasan Industri sehingga kebutuhan lahan untuk berinvestasi tidak terpenuhi.
- Infrastruktur publik yang belum merata.
- Adanya pandemi covid 19 membuat iklim investasi di semua daerah kurang kondusif. Dengan adanya pembatasan / lockdown membuat aktivitas perdagangan berdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit.

2. Rasio daya serap tenaga kerja (baik PMA maupun PMDN)

Target rasio daya serap tenaga kerja PMDN sebesar 460 orang dan realisasi sebesar 3 orang, sehingga menghasilkan prosentase capaian kinerja sebesar 1%. Target rasio daya serap tenaga kerja PMA sebesar 294 orang dan realisasi sebesar 12 orang, sehingga menghasilkan prosentase capaian kinerja sebesar 4%. Capaian rasio daya serap tenaga kerja yang tergolong rendah dikarenakan PMDN/PMA yang masuk ke Kabupaten Klaten cenderung industri yang padat modal dan berbasis mesin / digital, serta tenaga kerja yang dibutuhkan harus memenuhi kualifikasi dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. Prosentase kenaikan/penurunan realisasi investasi (baik PMA maupun PMDN)

Target prosentase kenaikan/penurunan realisasi investasi PMDN sebesar 2,5% orang dan realisasi sebesar -64%, sehingga menghasilkan prosentase capaian kinerja sebesar -2560% (tidak tercapai). Target prosentase kenaikan/penurunan realisasi investasi PMA sebesar 2,55% orang dan realisasi sebesar -59%, dengan prosentase capaian kinerja sebesar -% (tidak tercapai). Penurunan prosentase realisasi investasi tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, disebabkan karena Secara umum, pandemi covid 19 memberi dampak yang serius terutama bagi aspek investasi. Dengan adanya pembatasan / lockdown sudah tentu berimbas pada aktivitas ekonomi, serta minimnya informasi terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Klaten.

Dalam pelaksanaan program urusan Penanaman Modal pada tahun 2020, terdapat beberapa inovasi dan terobosan yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.72  
Inovasi Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal Tahun 2020

NO.	INOVASI TAHUN 2020	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	JEMPOL MANIS (JEMput bola Pelayanan izin OnLine Aman dan gratis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelayanan perizinan menggunakan mobil pelayanan keliling dengan jadwal rutin di setiap Kecamatan di Kabupaten Klaten</li> <li>▪ Melayani : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultasi pengurusan perizinan usaha</li> <li>- Pelayanan pengaduan perizinan usaha</li> <li>- Pelayanan konsultasi LKPM</li> </ul> </li> </ul>
2.	ASIKIN LKPM (ASistensi dan Konsultasi INput Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kewajiban perusahaan PMA dan PMDN untuk melaporkan perkembangan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal, secara online melalui OSS versi 1.1 atau link : lkpm.bkpm.go.id atau oss.go.id</li> <li>▪ ASIKIN LKPM dilayani di Kantor DPMPTSP Kabupaten Klaten setiap hari kerja : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin – Kamis (07.30 – 14.15 WIB)</li> <li>- Jumat (07.30 – 11.00 WIB)</li> <li>- Sabtu (07.30 – 13.00 WIB)</li> </ul> </li> </ul>
3.	SAMA KITA (SAtu MASukan Kita TAnggapi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dasar Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keputusan Bupati Klaten Nomor 503/76 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Perizinan Kabupaten Klaten;</li> <li>b. Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 800/16 tahun 2018 tentang SOP DPMPTSP Kabupaten Klaten.</li> </ul> </li> <li>▪ Jenis Pelayanan Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaduan Pelayanan Perizinan &amp; Non Perizinan</li> <li>b. Pengaduan Perizinan (kegiatan usaha</li> </ul> </li> </ul>



NO.	INOVASI TAHUN 2020	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
		yang telah memperoleh izin dalam ruang lingkup kewenangan DPMPTSP Kab.Klaten)

Terdapat beberapa prestasi yang diraih dalam pelaksanaan Program urusan Penanaman modal pada tahun 2020. Prestasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.73  
Prestasi / Penghargaan Pelaksanaan Program  
Urusan Penanaman Modal tahun 2020

No	Prestasi/ Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Top BUMD Awards 2020	PT BPR Bank Klaten (Perseroda) sebagai Juara Kategori Top BUMD 2020 Star 4	TopBusiness
2.	Top BUMD Awards 2020	Tulus Yuniarto Dirut PT BPR Bank Klaten (Perseroda) sebagai Top CEO BUMD 2020	TopBusiness
3.	Top BUMD Awards 2020 (Top Pembina BUMD)	Hj. Sri Mulyani (Bupati Klaten)	Top Business
4.	BPR Awards	PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Atas Kinerja Keuangan Tahun 2015 – 2019 dengan Predikat “Sangat Bagus”	Infobank Golden Awards
5.	BPR Awards	PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Atas Kinerja Keuangan Selama Tahun 2019 dengan Predikat “Sangat Bagus”	Infobank
6.	Top BUMD	Top BUMD Predikat “Excellent” For Financial Performance During September 2018-2019	Infobank
7.	Top BUMD Awards 2020	TOP BUMD 2020 Star#3 perumda Air minum PDAM Tirta Merapi	Top Business

#### B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020

#### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal dapat

dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Penanaman Modal yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.74  
Kebijakan Strategis urusan Penanaman Modal Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten	Perbup Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten	- Memberikan landasan hukum bagi DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. - Memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban termasuk penandangannya.
2	Pemberian Keringanan Tagihan Rekening Air kepada Pelanggan Perumda Air Minum PDAM Tirta Merapi Akibat Dampak Covid-19 selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020.	Keputusan Bupati Klaten Nomor 539/136 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Tagihan Rekening Air bagi Pelanggan Perumda Air Minum PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten Akibat Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020	Salah satu upaya penanganan dampak ekonomi Covid-19.

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Penanaman Modal pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.75  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Penanaman Modal

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan wajib bukan pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp. 2.602.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.247.419.889,- atau sebesar	- Untuk Tahun 2020 sudah melakukan penyusunan anggaran sesuai	Peningkatan capaian serapan anggaran

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	86,4%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.2.641.408.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.304.595.466,- atau sebesar 87,2%. Realisasi anggaran baik belanja langsung (86,44%) maupun tidak langsung (87,2%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi anggaran yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Penanaman Modal sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	kebutuhan OPD - Pada tahun 2020, Realisasi belanja langsung sebesar 94,52% dan realisasi belanja tidak langsung sebesar 89,75% meningkat jika dibandingkan tahun 2019	
2.	Terdapat 11 indikator kinerja program dengan realisasi kinerja program kategori "sangat tinggi" sebanyak 9 indikator, kategori "Tinggi" sebanyak 1 indikator dan kategori "sangat rendah" sebanyak satu indikator. Adapun Indikator program dengan kategori sangat rendah adalah PMDN sebesar 5%. Terdapat beberapa nama indikator sasaran yang mempunyai kesamaan dengan indikator program. Perlu dipertimbangkan untuk menggunakan nama dan substansi indikator program yang berbeda dengan indikator sasarannya.	Indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD, perbaikan nama indikator kinerja akan dilakukan saat penyusunan RPJMD baru	Perbaikan indikator kinerja

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut

Tabel 3.76  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan Penanaman Modal tahun 2020

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Beberapa perusahaan berskala nasional yang sudah masuk ke Kabupaten Klaten	Pemerintah Kabupaten Klaten memaksimalkan kinerja Satgas Percepatan realisasi investasi dalam

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	mengalami kendala dalam merealisasikan proyeknya yang disebabkan oleh masalah internal perusahaan.	bentuk fasilitasi permasalahan dan kendala yang dialami perusahaan dalam proses realisasi investasi.
2.	Belum adanya jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi, yang berakibat investor akan mengalami resiko investasi biaya tinggi (high cost investation), ditunjang adanya konflik antar urusan terutama urusan penanaman modal dengan kebijakan sawah lestari.	Penyusunan kebijakan penanaman modal berupa insentif dan disinsentif penanaman modal (Perda Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi) Penguatan regulasi untuk menjamin kepastian dan kenyamanan berinvestasi.
3.	Belum memadainya infrastruktur yang mendukung untuk berinvestasi di Kabupaten Klaten.	Informasi kepastian tata ruang untuk para pelaku usaha industri besar. Penyusunan peta potensi dan peluang investasi di Kabupaten Klaten. Memaksimalkan strategi promosi dan kerjasama investasi. Mewujudkan pembentukan Mal Pelayanan Publik.

## 12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Bagian Kesra.

### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2020 mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.600.049.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.580.404.583 atau sebesar 96,72%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.77  
 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
 Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	1	55,71	5.571
	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	2	8,26	413
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan Peran Serta kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	69	76	110,14
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	%	20	0	0
Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase Wirausaha Muda yang Dibina (Keluarga Miskin)	%	25	0	0
Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase peningkatan peserta yang mengikuti penyuluhan narkoba	%	10	0	0
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase cabang olahraga yang rutin mengikuti kompetisi	%	83	61	73,49
Pembinaan pemuda dan olahraga	Persentase kenaikan pemuda yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Besar Nasional	%	20	0	0
	Persentase Kehadiran Peserta	%	90	90	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pemuda dan Olahraga Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori "sangat tinggi" sebanyak 2 indikator
- Terdapat 7 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 2 Indikator, Kategori "sedang" sebanyak 1 indikator, kategori "sangat rendah" sebanyak 4 indikator
- Adapun capaian kinerja kategori "sedang", "rendah" dan "sangat rendah" dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan di bidang Kepemudaan dan Olahraga tidak dapat berjalan optimal. Selain itu adanya refocussing dan penghapusan anggaran di beberapa kegiatan mengakibatkan tidak dapat terlaksanakannya beberapa program urusan Kepemudaan dan Olahraga sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 menjadi 0 (nol). Upaya yang dilaksanakan dan solusi dalam menghadapi capaian kinerja tersebut di atas adalah dengan Perencanaan Kegiatan dengan dengan Skala Prioritas Meningkatkan Kompetisi/kejuaraan/event, Pengembangan sarpras yang memadai dan yang utama pemihakan dana

#### **B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga

dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.78  
Kebijakan Strategis  
urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Protokol Pencegahan Penularan Corona virus Disease (Covid-19) Pada Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan	SE NO 426.7/485/13 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona virus Disease (Covid-19) Pada Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan dalam mendukung keberlangsungan pemulihan kegiatan melalui wabah adaptasi perubahan pola hidup dalam tatanan normal baru	Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkesinambungan dan Peningkatan pembinaan Pemberdayaan Pemuda pada masa pandemi covid 19.

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.79  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan  
urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh OPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Realisasi persentase belanja langsung untuk urusan ini adalah sebesar 92,5% meningkat sedikit dari realiasi tahun anggaran sebelumnya (2018), hal ini membuktikan realisasi belanja sudah meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu 90%. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebaiknya memperbaiki penyusunan	- Penyusunan Perencanaan, Penyusunan Program dan Penganggaran sudah dilaksanakan sesuai skala Prioritas. - Realisasi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 96,72% meningkat jika dibandingkan tahun 2019	Program kegiatan disesuaikan dengan skala prioritas anggaran yang tersedia.

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	perencanaan, penyusunan program dan penganggaran sesuai dengan kebutuhannya.		
2	Dari dua indikator sasaran dan tujuh indikator program, hanya satu indikator program yang tidak dapat dicapai, yaitu presentase cabang olahraga yang rutin mengikuti kompetisi dengan target capaian 96,5% sehingga perlu menjadi perhatian khusus. Akan tetapi beberapa permasalahan masih tetap muncul diantaranya bersumber dari kekurangan sarana dan prasarana olahraga serta keberadaan database untuk urusan kepemudaan dan olahraga. Sehingga perlu untuk menjadi perhatian untuk pelaksanaan solusi yang ditawarkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 maka kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan dan olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga tidak bisa optimal sehingga berdampak pada capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga</li> <li>- Update data kepemudaan dan keolahragaan.</li> </ul>	Peningkatan prestasi olahraga didukung dengan sarana dan prasarana dan anggaran yang memadai.

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut

Tabel 3.80  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2020

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Permasalahan yang dihadapi karena adanya pembatasan dan pembatalan kegiatan terkait pandemi COVID-19, sehingga kegiatan yang menimbulkan kerumunan tidak bisa dilaksanakan dan anggaran yang ada dialihkan untuk penanganan Covid-19	berkoordinasi untuk bisa melaksanakan kegiatan dengan dana yang minim tetapi tidak mengabaikan segala bentuk protokol kesehatan atau koordinasi melalui Daring
2.	Kurangnya koordinasi internal (Lingkup Dinas) dan Eksternal (dengan pihak terkait/stakeholder) karena adanya pandemi	Meningkatkan lagi koordinasi, memperkuat perencanaan dan disiplin waktu pelaksanaan kegiatan agar semua bisa dilaksanakan tepat waktu. Meningkatkan kerjasama yang lebih intensif dengan para olahragawan. kegiatan / wadah untuk Pelaksanaan Sosialisasi dan penyuluhan melalui Daring agar target bisa tercapai tanpa menimbulkan kerumunan.



### 13. Urusan Statistik

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Statistik pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Statistik mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 17.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.417.500 atau 99,53%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Statistik secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Statistik dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.81**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Statistik Tahun 2020**

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen data statistik yang tersedia	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut.

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 1 Indikator atau semua Capaian kinerja Program masuk kategori Sangat Tinggi.

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Statistik secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Statistik dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada tahun 2020 tidak ada Kebijakan Strategis Urusan Statistik yang ditetapkan Kepala Daerah.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Statistik pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.82  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Statistik

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan statistik mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.189.082.246,- atau sebesar 94,5%. Realisasi anggaran baik belanja langsung (94,5%) sudah mendekati anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran yang telah mendekati target memberikan gambaran bahwa urusan ini telah memanfaatkan dana yang dialokasikan untuk percepatan jalannya pembangunan, penyusunan perencanaan program dan penganggaran lebih sesuai, sekaligus berupaya mewujudkan kesepakatan yang telah	- Memenuhi target capaian dan biaya operasional - Realisasi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 99,53% meningkat jika dibandingkan tahun 2019	Memenuhi target yakni terwujudnya data statistik

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Statistik sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.		
2.	Pada tahun anggaran 2019, urusan statistik tidak menyajikan indikator sasaran. Pada tahun sebelumnya (2018) urusan statistik mempunyai satu indikator-indikator sasaran yaitu presentasi penggunaan data statistik. Terdapat 1 indikator kinerja program dengan realisasi kinerja program kategori "sangat tinggi" sebanyak 1 indikator atau semua capaian kinerja program masuk kategori sangat tinggi. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya (2018) urusan statistik menyajikan 3 indikator. Penting untuk memberikan penjelasan mengapa terdapat perubahan indikator dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik indikator sasaran maupun indikator programnya.	Untuk tahun 2020 indikator kinerja program masih sama yaitu persentase dokumen data statistik yang tersedia, hanya saja untuk profil daerah tidak ada. Perbedaan indikator kinerja pada tahun 2018, 2019 dan 2020 dikarenakan indikator kinerja pada tahun 2018 berdasarkan RPJMD sebelum perubahan sedangkan tahun 2019 dan 2020 berdasarkan RPJMD setelah perubahan	Penyajian dan pelaporan indikator kinerja dan realisasi kinerja
3.	Uraian masalah, solusi dan tindak lanjutnya belum memberikan secara rasional hubungannya. Sebagai contoh masalah kekurangan SDM tetapi tindak lanjutnya adalah menerima mahasiswa PKL	Menambah SDM yaitu tenaga harian lepas. Tetapi, di tahun 2020 anggaran terkena refocussing dari 200 juta menjadi 17,5 juta	Masih terdapat kekurangan SDM

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Statistik adalah sebagai berikut

Tabel 3.83  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan statistik tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Tidak dapat melakukan atau melaksanakan cetak buku statistik untuk dipublikasikan ke semua OPD karena anggaran terkena refocusing covid	Mempublikasikan dokumen atau buku statistik dalam bentuk digital (pdf)
2.	Belum terbentuknya Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten	Melakukan sosialisasi tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten
3.	Belum terbentuknya Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	Melakukan rapat koordinasi statistik
4.	Kurangnya Sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik	Mengikuti bimbingan teknis penyelenggaraan statistik sektoral

## 14. Urusan Persandian

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang persandian pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan persandian mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 31.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.703.550 atau sebesar 99,04%. Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Persandian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Persandian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.84  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Urusan Persandian Tahun 2020

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan persandian daerah	Persentase pengamanan informasi persandian yang terimplementasi	%	25	55	220

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 1 indikator atau semua Capaian kinerja program masuk kategori Sangat Tinggi.

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Persandian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Persandian dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada tahun 2020 tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Persandian yang ditetapkan Kepala Daerah.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tidak terdapat rekomendasi DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Persandian pada LKPJ Tahun Anggaran 2019.

**F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Persandian adalah sebagai berikut

Tabel 3.85  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan persandian tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum ada aparatur yang handal di bidang persandian	Pengajuan penambahan Aparatur/pegawai yang mempunyai kemampuan dibidang TI.
2.	Program penerapan TTE belum berjalan dikarenakan masih dalam proses pengintegrasian aplikasi yang ada di pusat sama yang di daerah.	Sudah ditangani oleh pihak developer(rekanan) dalam proses diuji coba.
3.	Belum optimalnya dalam memanfaatkan tenaga persandian yang ada beserta peralatannya.	Perlu mengadakan sosialisasi tentang manfaat persandian sebagai pengamanan secara masif.

## 15. Urusan Kebudayaan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Kebudayaan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.399.953.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.391.148.550 atau sebesar 97,8%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Kebudayaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.86  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Urusan Kebudayaan Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah. Kawasan Cagar Budaya. Situs dan Benda Cagar Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	4	-75	< 0
	Persentase Peningkatan Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	100	1000

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	-75	< 0
Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Benda. Situs. Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	12	100	833
Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kenaikan Organisasi Kebudayaan/ Kelompok Kesenian yang Difasilitasi	%	5	4	80
Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Persentase Fasilitas Pementasan Budaya Daerah	%	100	0	0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Kebudayaan Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 1 indikator dan kategori "Sangat Rendah" sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 1 Indikator, kategori "tinggi" sebanyak 1 indikator dan kategori "sangat rendah" sebanyak 2 indikator.
- Adapun capaian kinerja kategori "sangat rendah" dikarenakan Semua Event yang berkaitan dengan seni dan budaya ditiadakan, hal tersebut dikarenakan kondisi pandemi covid-19 dan adanya refocussing anggaran. Upaya untuk mengatasi capaian yang rendah

tersebut dapat dilakukan jika kegiatan seni dan budaya kembali dapat dilaksanakan disertai dukungan anggaran yang memadai. Pada tahun 2020, terdapat beberapa prestasi atau penghargaan dalam pelaksanaan program urusan kebudayaan. Prestasi tersebut sebagai berikut :

1. Juara I Lomba penulisan Karya tulis Ilmiah tentang Cagar Budaya (diterima oleh Ameliana Intan Artati, pemberi penghargaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah)
2. Juara II Lomba penulisan Karya tulis Ilmiah tentang Cagar Budaya (diterima oleh Fia Fauziah Rinda Putri, pemberi penghargaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah)

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Kebudayaan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.87  
Kebijakan Strategis urusan Kebudayaan Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pelarangan Penyelenggaraan pentas seni budaya/hiburan	SE Bupati No 431/484/2020 Tentang Penyelenggaraan pentas seni budaya/hiburan masyarakat hajatan dan pembukaan situs cagar budaya tertentu pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Klaten.	Penyelenggaraan pentas seni budaya/hiburan masyarakat hajatan dan pembukaan situs cagar budaya tertentu pada masa pandemi covid 19 untuk menghindari adanya kerumunan.



**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kebudayaan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.88  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Kebudayaan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh OPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga melalui 4 program. Realisasi persentase Belanja Langsung untuk urusan ini adalah sebesar 92,7% yang artinya telah terjadi peningkatan dari realisasi tahun anggaran sebelumnya (2018). Akan tetapi, walaupun realisasi tersebut sudah lebih dari 90%, hal ini membuktikan realisasi belanja masih belum optimal. Realisasi tidak sesuai target. Sebagai Catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebaiknya memperbaiki penyusunan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran sesuai dengan kebutuhannya.	- Realisasi Belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 97,8% - Memperbaiki penyusunan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas	Peningkatan realisasi anggaran sesuai target yang telah ditetapkan
2.	Dari dua indikator sasaran dan empat indikator program, semua telah mencapai target sehingga bisa dikatakan meningkat dari tahun sebelumnya (2018). Akan tetapi beberapa masalah masih muncul diantaranya bersumber dari permasalahan koordinasi antar instansi	- Sudah berkoordinasi dengan pelaku seni dan dinas-dinas terkait untuk berkoordinasi dan demi kelancaran kegiatan. - Pada tahun 2020, even kebudayaan	Penyelenggaraan event akan berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (Pelaku seni, sanggar, WO, EO,dll) dan mengkomunikasikan, mempublikasikan dengan dinas terkait (kominfo, humas) dan para wartawan untuk bisa meliput serta

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	dan publikasi atas penyelenggaraan event kebudayaan. Sehingga perlu untuk menjadi perhatian untuk pelaksanaan solusi yang ditawarkan.	tidak berjalan optimal karena pandemi Covid-19	mempublikasikan event kebudayaan sehingga akan lebih meriah dan bisa dikenal masyarakat agar bisa menjadi hiburan masyarakat.

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut

Tabel 3.89  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan kebudayaan tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Permasalahan yang dihadapi karena adanya pembatasan dan pembatalan kegiatan terkait pandemi COVID-19, sehingga kegiatan yang menimbulkan kerumunan tidak bisa dilaksanakan dan anggaran yang ada dialihkan untuk penanganan Covid-19	berkoordinasi untuk bisa melaksanakan kegiatan dengan dana yang minim tetapi tidak mengabaikan segala bentuk protokol kesehatan atau pelaksanaan kegiatan melalui Daring
2.	Kurangnya koordinasi internal (Lingkup Dinas) dan Eksternal (dengan pihak terkait/stakeholder) karena adanya pandemi	Meningkatkan lagi koordinasi, memperkuat perencanaan dan disiplin waktu pelaksanaan kegiatan agar semua bisa dilaksanakan tepat waktu. Meningkatkan kerjasama yang lebih intensif dengan Para pelaku Seni dan Budaya.kegiatan / wadah untuk Pelaksanaan Sosialisasi dan penyuluhan melalui Daring agar target bisa tercapai tanpa menimbulkan kerumunan.

### 16. Urusan Perpustakaan

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Perpustakaan pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.

#### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Perpustakaan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 215.618.750 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 194.783.400 atau sebesar 90,34% .

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Perpustakaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.90  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Urusan Perpustakaan Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	-15,1	Tidak tercapai (kurang dari 0%)
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Prosentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat	%	5	-15,1	Tidak tercapai (kurang dari 0%)

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01\%$	Sangat Tinggi
2	$75,01\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01\% \leq 75\%$	Sedang
4	$50,01\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Program Urusan Perpustakaan Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran masuk Kategori "Sangat rendah".
- Terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program masuk Kategori "Sangat rendah".
- Indikator Sasaran dan Program tersebut adalah Prosentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat. Target pengunjung tidak tercapai dikarenakan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah

dilaksanakan buka tutup. Hal ini dilakukan untuk keselamatan para pengunjung dan Pemustaka. Perpustakaan keliling dan *Car free day* juga terhenti dikarenakan anggaran terasionalisasi untuk penanganan Covid-19. Selain itu obyek lokasi kunjungan di sekolah juga berhenti dikarenakan Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan dengan sistem daring.

Dalam Pelaksanaan Program urusan Perpustakaan terdapat inovasi yang dibuat oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kinerja urusan Perpustakaan. Inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.91  
Inovasi Pelaksanaan Program  
urusan Perpustakaan tahun 2020

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi
1.	Diklat Untuk Latihan anak Kurang Mampu (ULAT KUPU)	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten memberikan layanan inovasi berupa pelatihan komputer bagi anak yang kurang mampu
2.	Bus Jemput Anak Untuk Membaca Buku (BEJANAKU)	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten memberikan layanan dengan menjemput Anak sekolah untuk membaca Buku perpustakaan dengan menggunakan Transportasi Bus

#### B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban BupatiKlaten Tahun Anggaran 2020.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Perpustakaan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.92  
Kebijakan Strategis urusan Perpustakaan Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan	Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 Tentang Petunjuk	Sebagai Petunjuk Pelaksanaan Perda No 22 th 2018 tentang

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Kabupaten Klaten	Pelaksanaan Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2018 Penyelenggaraan Perpustakaan.	Penyelenggaraan Perpustakaan
2.	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Program Inovasi Ulat Kupu	Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Program Inovasi Perpustakaan Pelatihan Komputer untuk Masyarakat Kurang mampu	Sebagai Petunjuk Pelaksanaan program inovasi ULAT KUPU
3.	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Program Inovasi Bejanaku	Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Program Inovasi Perpustakaan Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku.	Sebagai Petunjuk Pelaksanaan program inovasi BEJANAKU

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perpustakaan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.93  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Perpustakaan

No	Rekomendasi DPRD dalam LKPJ Tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh OPD Dinas Arsip dan Perpustakaan melalui satu program yaitu program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Realisasi presentase Belanja Langsung adalah sebesar 85,9% yang artinya meningkat dari tahun anggaran sebelumnya (2018). Hal ini membuktikan realisasi Belanja masih belum optimal. Realisasi tidak sesuai target. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Perpustakaan sebaiknya memperbaiki penyusunan	- Realisasi belanja langsung tahun 2020 sebesar 90,34%, meningkat jika dibandingkan tahun 2019  - Target Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. terpen uhi dan ada efisiensi anggaran sebesar 9,66%.	memperbaiki penyusunan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran sesuai dengan kebutuhannya

No	Rekomendasi DPRD dalam LKPJ Tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	perencanaan, penyusunan program dan penganggaran sesuai dengan kebutuhannya		
2.	Dari satu indikator sasaran dan tiga indikator program, semua telah mencapai target di atas 100% bahkan ada yang mencapai di atas 200%. Walaupun kinerja ini sangat mengesankan, hal ini juga membuktikan bahwa perencanaan pengukuran target kinerja terlalu rendah dan tidak berdasarkan pada potensi dan data baseline/kinerja tahun sebelumnya. Untuk itu, perlu bagi OPD terkait untuk memperbaiki pengukuran kinerja khususnya target yang digunakan. Di samping itu, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan, bahan pustaka dan SDM (atau dapat juga hal ini menjadi alat ukur kinerja untuk tahun selanjutnya).	Pengadaan bahan pustaka tidak dilaksanakan karena anggaran habis terasialisasi untuk penanganan Covid-19.	Memperbaiki pengukuran kinerja khususnya target yang digunakan yaitu pada perencanaan RPJMD yang akan datang. Di samping itu, menambah ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan, bahan pustaka dan SDM yang dapat dijadikan alat ukur kinerja untuk tahun selanjut

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut

Tabel 3.94  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan Perpustakaan tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang sesuai standar pelayanan Nasional	Pengadaan Sarana Prasarana sesuai standar Pelayanan Nasional yaitu rehabilitasi gedung pelayanan beseta perlengkapannya.
2.	Kurangnya Sumber Daya Manusia baik Kuantitas maupun kualitas	Dengan penambahan SDM Perpustakaan/pustakawan dan Mengikuti Diklat teknis pustakawan
3.	Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Penambahan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4.	Masih rendahnya minat baca masyarakat	Dengan mensosialisasikan perpustakaan secara One line/Iklaten maupun perpustakaan keliling.

## 17. Urusan Kearsipan

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kearsipan pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.

### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Kearsipan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.1.401.943.150 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.298.527.134 atau sebesar 92,62%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.587.173.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.149.676.401 atau sebesar 83,09%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Kearsipan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.95**  
**Indikator Kinerja Sasaran dan Capaian Kinerja**  
**Sasaran dan Program Urusan Kearsipan Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya tata kelola arsip Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	8,72	174
<b>Nama Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Prosentase Kenaikan Koleksi Arsip	%	5	8,72	174
Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Prosentase Peningkatan SKPD dan desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar	%	10	10	100
Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Prosentase peningkatan kelengkapan administrasi kearsipan	%	10	10	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 Indikator kinerja sasaran dengan kategori capaian kinerja “sangat tinggi” sebanyak 1 indikator dan 3 Indikator Kinerja Program dengan capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 Indikator atau semua Capaian kinerja Sasaran dan Program masuk kategori “Sangat Tinggi”.

Dalam Pelaksanaan Program urusan Kearsipan terdapat inovasi yang dibuat oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kinerja urusan kearsipan. Inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.96  
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan tahun 2020

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi
1	Penyelamatan Arsip daerah rawan bencana di Kabupaten Klaten Titip Berkas Arsip Digitalku (Titip Bandaku)	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten memberikan layanan inovasi berupa alih media arsip menjadi Digital disertai Berita acara dan diautentikan a. Penyelamatan Arsip Daerah rawan bencana baik perorangan maupun lembaga b. Layanan penitipan Arsip Perorangan c. Layanan Digitalisasi Arsip Perorangan

Selain inovasi tersebut, terdapat penghargaan / prestasi yang diterima Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam menjalankan program urusan kearsipan selama tahun 2020. Prestasi/penghargaan tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel 3.97  
Prestasi/Penghargaan dalam Pelaksanaan Program  
Urusan Kearsipan tahun 2020

NO.	NAMA PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
1.	Penganugerahan Pengawasan Kearsipan Tingkat Nasional 2019 yang penghargaananya diberikan pada tahun 2020	Pemerintah Kabupaten Klaten	Kemenpan RB dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2.	Piagam Penghargaan Juara Harapan I Lomba Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota.	Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Arsip dan Perpustakaan)	Gubernur Provinsi Jawa Tengah
3.	Piagam Penghargaan Juara Harapan II Pameran Virtual Jawa Tengah	Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Arsip dan Perpustakaan)	Gubernur Provinsi Jawa Tengah
4.	Piagam Penghargaan Inovasi Penyelamatan Arsip di daerah rawan Bencana di Kabupaten Klaten Titip Berkas Arsip Digitalku (TITIP BANDAKU)	Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Arsip dan Perpustakaan)	Gubernur Provinsi Jawa Tengah

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan kearsipan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.98  
Kebijakan Strategis urusan Kearsipan Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Progran Arsip Vital di	Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 tahun	Sebagai pedoman Pengecekan Arsip Vital

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	lingkungan Kabupaten Klaten	2018 tentang Pedoman Program Arsip Vital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.	
2.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip	Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip.	Sebagai Pedoman Pemberkasan Arsip
3.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Arsip	Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Arsip	Sebagai pedoman klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kearsipan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.99  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Kearsipan

No	Rekomendasi DPRD dalam LKPJ Tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung untuk urusan Kearsipan sebesar 28,8% dengan Belanja Langsung sebesar 86,1% membuktikan realisasi Belanja masih belum optimal dan masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Apalagi khusus untuk Belanja Tidak langsung dalam urusan ini lebih banyak berisi belanja pegawai seharusnya lebih mudah untuk direncanakan sehingga realisasinya dapat sesuai dengan targetnya akan tetapi ternyata memiliki realisasi yang sangat rendah. Realisasi tidak sesuai. Sebagai	Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung untuk urusan Kearsipan sebesar 83,09% meningkat dari tahun lalu, efisiensi Belanja Tidak Langsung sebesar 16,91%. Realisasi Belanja Langsung sebesar 92,62%, meningkat jika dibandingkan tahun lalu	Memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.

No	Rekomendasi DPRD dalam LKPJ Tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Kearsipan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.		
2.	Dari indikator kinerja, semua telah mencapai target di atas 100% bahkan ada yang mencapai di atas 200%. Walaupun capaian kinerja ini sangat mengesankan, hal ini juga membuktikan bahwa perencanaan pengukuran target kinerja terlalu rendah dan tidak berdasarkan pada potensi dan data baseline/kinerja tahun sebelumnya. Untuk itu, perlu bagi OPD terkait untuk memperbaiki pengukuran kinerja khususnya target yang digunakan. Di samping itu, perlu tetap ditingkatkan ketersediaan sarana prasarana kearsipan, rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengarsipan dan SDM yang menangani (atau dapat juga hal ini menjadi alat ukur kinerja untuk tahun selanjutnya).	Realisasi persentasi indikator kinerja Bidang kearsipan tercapai sesuai target 100 %	Memperbaiki pengukuran kinerja khususnya target yang digunakan yaitu pada perencanaan RPJMD yang akan datang. Di samping itu, menambah ketersediaan sarana dan prasarana Kearsipan dan SDM/Arsiparis yang menangani kearsipan dalam hal ini dapat dijadikan alat ukur kinerja untuk tahun selanjutnya.

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Kearsipan adalah sebagai berikut

Tabel 3.100  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan Kearsipan tahun 2020

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang sesuai standar kearsipan	Pengadaan Sarana Prasarana sesuai standar Pelayanan Nasional seperti pengadaan Mobile Manual/rool opec, rak-rak arsip dan lain-lain
2.	Kurangnya Sumber Daya Manusia baik Kuantitas maupun kualitas	Dengan penambahan SDM Arsiparis dan Mengikuti Diklat teknis kearsipan

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
3.	Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Penambahan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
4.	Kurangnya kesadaran masyarakat /ASN tentang Pengelolaan Arsip	Dengan melakukan sosialisasi dan Pembinaan Kearsipan

### 3.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian dan Urusan Transmigrasi.

#### 1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan urusan Pilihan di bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

##### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 1.767.935.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.168.326.159 atau sebesar 66,08%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan Pilihan di Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.101**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020**

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan budidaya	(ton)	31.467	27.604	87,72
Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan tangkap	(ton)	537	184	34,26
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Konsumsi Ikan	(kg/kapita/tahun)	20,41	20,28	99,36

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan Pada tahun 20209 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 3 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator, Kategori tinggi sebanyak 1 indikator dan kategori sangat rendah sebanyak 1 indikator.
- Adapun indikator yang capaiannya “sangat rendah” adalah Produksi Perikanan tangkap. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pengaruh cuaca/musim (kemarau terlalu panjang), restocking di perairan umum tidak merata dan belum mencukupi jumlahnya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain :
  - Menambah volume dan melaksanakan kembali kegiatan stocking dan restocking benih ikan di perairan umum pada tahun 2021
  - Upaya untuk penggunaan obat dan penyesuaian ukuran jaring supaya ikan yang belum memenuhi standar tetap aman
  - Sosialisasi untuk tidak melakukan penangkapan dengan setrum/dengan Perdes.

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**  
 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**  
 Pada tahun 2020, tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Kepala Daerah

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**  
 Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.102  
 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pada tahun 2019 pelaksanaan program urusan pilihan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Urusan pilihan tersebut mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp.2.143.576.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.926.100.552,- atau sebesar 89,85%. Realisasi anggaran belanja langsung 89,85% lebih kecil dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran tahun sebelumnya (2018) yaitu sebesar 93,87%. Realisasi anggaran sebesar 89,85% masih dibawah dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus pengabaian dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk	- Tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran dilakukan lebih teliti dan cermat. - Pada tahun 2020, realisasi belanja langsung sebesar 66,08% dikarenakan ada satu kegiatan DAK yang memiliki serapan anggaran 57,92% sehingga berpengaruh pada rendahnya realisasi belanja langsung urusan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Realisasi kegiatan DAK yang rendah disebabkan karena pembatalan rasionalisasi anggaran sehingga berakibat pada mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan yang secara teknis berpengaruh pada	Pelaksanaan program/kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	tahun-tahun mendatang, OPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	keberhasilan pelaksanaan kegiatan.	
2.	Pada tahun anggaran 2019, urusan kelautan dan perikanan tidak melaporkan capaian indikator sasarannya seperti tahun sebelumnya. Hal ini berbeda dibandingkan dengan tahun 2018, urusan kelautan dan perikanan mempunyai satu indikator sasaran yaitu tingkat konsumsi ikan. Terdapat 3 indikator kinerja program dengan realisasi kinerja program kategori "sangat tinggi" sebanyak 1 indikator, kategori tinggi sebanyak 1 indikator dan kategori rendah sebanyak 1 indikator. Adapun indikator program dengan kategori rendah tersebut adalah produksi perikanan tangkap sebesar 29% .	Indikator kinerja pada tahun 2018, 2019 dan 2020 berbeda dikarenakan pada tahun 2018 masih menggunakan indikator RPJMD sebelum perubahan sedangkan tahun 2019 dan 2020 menggunakan RPJMD setelah perubahan. Untuk laporan LKPJ tahun 2019, urusan kelautan dan perikanan juga melaporkan capaian indikator seperti tahun sebelumnya. Capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2019 yaitu : - Produksi perikanan target 31.302 ton, realisasi 28.123 ton (89,8%). - Konsumsi ikan target 19,91 kg/kapita/th realisasi 20,4 kg/kapita/th (102%). Mengusulkan kembali kegiatan stocking restocking di tahun 2021.	Peningkatan produksi perikanan tangkap sesuai dengan target.

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.103  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan Kelautan dan perikanan tahun 2020

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Capaian kinerja dari produksi perikanan tangkap rendah (34,26%) disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pengaruh cuaca/musim (kemarau terlalu panjang), restocking di perairan umum tidak merata dan belum mencukupi jumlahnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah volume dan melaksanakan kembali kegiatan stocking dan restocking benih ikan di perairan umum pada tahun 2021.</li> <li>- Upaya untuk penggunaan obat dan penyesuaian ukuran jaring supaya ikan yang belum memenuhi standar tetap aman.</li> <li>- Sosialisasi untuk tidak melakukan penangkapan dengan setrum/dengan Perdes.</li> </ul>

## 2. Urusan Pariwisata

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pilihan di bidang Pariwisata adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Pariwisata mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.5.303.691.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.813.706.470 atau sebesar 90,76%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.3.735.618.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.337.120.517 atau sebesar 89,33%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan pariwisata secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Pariwisata dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.104  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Urusan Pariwisata Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya produktifitas. nilai tambah dan daya saing kepariwisataaan	Persentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata	%	25	-55,8	<0



Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Pengembangan Kemitraan	Persentasi kenaikan lembaga pariwisata yang bermitra	%	12	0	0
Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentasi kenaikan kunjungan wisatawan	%	10	-65.05	< 0
	Rata-rata lama kunjungan wisatawan	hari	1	1	100
Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata andalan	%	28	28	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pariwisata Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran Kategori "Sangat rendah" sebanyak 1 indikator
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 2 Indikator dan kategori "sangat rendah" sebanyak 2 indikator.
- Adapun capaian kinerja kategori "sangat rendah" dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga pengunjung sangat berkurang karena Penutupan Obyek Wisata sehingga mempengaruhi Pendapatan PAD dan kunjungan wisata.

Pada tahun 2020, terdapat prestasi / penghargaan dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata. Prestasi/penghargaan tersebut adalah Penyaji Terbaik II event bersama Forum Solo Raya . Penghargaan diberikan

oleh Disporapar Provinsi Jawa tengah diberikan kepada Disparbudpora Kabupaten Klaten

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pariwisata yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.105  
Kebijakan Strategis urusan Pariwisata Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan Tatanan Normal Baru dalam penyelenggaraan Kepariwisata pada Masa Pandemi COVID-19	Surat Edaran Bupati Klaten No 443/447/13 Tanggal 6 Agustus 2020 tentang pelaksanaan tatanan normal baru dalam penyelenggaraan kepariwisataan pada masa pandemic	Sebagai dasar pelaksanaan Tatanan normal baru kehidupan masyarakat pada sector pariwisata yang merupakan sector unggulan dan berpengaruh secara signifikan pada kondisi perekonomian.
2.	Penutupan Kembali Obyek Wisata Tirta pada masa Pandemic Covid-19	Surat Edaran Bupati Klaten No : 443.1 /758/13 Tanggal 23 Desember 2020 Tentang pembukaan obyek wisata tirta pada masa pendemi covid-19 di kab.klaten	Untuk memutus mata rantai ( Pengendalian) penularan covid -19 pada destinasi wisata tirta.
3.	Pembentukan Tim Penataan dan Pengembangan Kawasan Rowo Jombor	SK Bupati Klaten No: 17/338 Th. 2020 tentang pembentukan tim penataan dan pengembangan kawasan rowo jombor	Dalam rangka perlindungan , pemanfaatan dan pengembangan potensi kawasan rowo jombor unit kepentingan pelestarian, pariwisata, irigasi, pertamanan dan perikanan.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
4.	Pembukaan Obyek Wisata Tirta pada masa pandemic covid-19 di Kab.Klaten	SE Bupati Klaten No: 443.1/62.9/13 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Pembukaan Objek Wisata Tirta pada Masa Pandemi Covid-19 di Klaten	Pemulihan ekonomi masyarakat pada sector pariwisata.
5.	Menetapkan Desa Wisata sejumlah 12 Desa (Desa Ngrundul Kecamatan Kebonarum, Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo, Desa Desa Tegalmulyo Kecamatan Kemalang, Desa Tlogo Kecamatan Kemalang, Desa Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan, Desa Melikan Kecamatan Wedi, Desa Ngerangan Kecamatan Bayat, Desa Pokak Kecamatan Ceper, Desa Bugisan Kecamatan Prambanan, Desa Jarum Kecamatan Bayat, Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum dan Desa Gununggajah Kecamatan Bayat	- SK Bupati Klaten Nomor 556/243 tahun 2020 tentang Desa Ngrundul Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/242 tahun 2020 tentang Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/245 tahun 2020 tentang Desa Tegalmulyo Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/246 tahun 2020 tentang Desa Tlogo Watu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/247 tahun 2020 tentang Desa Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/248 tahun 2020 tentang Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/249 tahun 2020 tentang Desa Ngerangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/252 tahun 2020 tentang Desa Pokak Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Sebagai Desa	Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan, kesempatan berusaha dan lapangan kerja dan optimalisasi potensi ekonomi desa.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/253 tahun 2020 tentang Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/254 tahun 2020 tentang Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/335 tahun 2020 tentang Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata - SK Bupati Klaten Nomor 556/336 tahun 2020 tentang Desa Gununggajah Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata Klaten Sebagai Desa Wisata	

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pariwisata pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.106  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pariwisata

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh OPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dan Kecamatan Bayat elalui 6 program. Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung untuk urusan ini sebesar 84,8% dengan Belanja Langsung sebesar 96,4% yang artinya meningkat dari tahun anggaran sebelumnya. Akan tetapi tingkat realisasi yang ada	- Pada tahun 2020 realisasi Belanja Langsung sebesar 90,76%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar 89,33%. Realisasi belanja langsung belum optimal dikarenakan banyak kegiatan terkait kepariwisataan yang tidak	Peningkatan serapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>masih membuktikan bahwa realisasi belanja Urusan Pariwisata khususnya belanja tidak langsung masih belum optimal dan masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tidak sesuai target. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Pariwisata sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>optimal dikarenakan kondisi pandemi Covid-19</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran BTL Khususnya unit gaji dan Tunjangan sudah menyesuaikan dengan alokasi dari dari BPKD yang telah berkoordinasi dengan BPKPPD Kab.Klaten</li> <li>- memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</li> </ul>	
2.	<p>Dari satu indikator sasaran dan empat indikator program, semua mencapai target dengan presentase sama dengan atau melebihi 100%. Akan tetapi, mengingat Kabupaten Klaten memiliki destinasi wisata yang banyak, maka perlu untuk diidentifikasi dan diinventarisir kembali destinasi wisata yang lain yang butuh dikembangkan dengan mengadopsi konsep-konsep wisata digital (<i>Instagramable</i>) yang sedang populer saat ini.</p>	<p>Destinasi Wisata Kabupaten Klaten mayoritas dikelola oleh Desa melalui BUMDESnya, Disparbudpora telah melakukan proses identifikasi dan inventarisir destinasi wisata Kabupaten Klaten Untuk memberikan motivasi dan pemberdayaan desa maka telah diterbitkan SK Desa Wisata untuk 12 Desa di Kabupaten Klaten. Dengan pengembangan Destinasi wisata digital masih terus dilaksanakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Destinasi wisata memerlukan SDM Pariwisata yang unggul dan berkompeten, untuk itu telah dilaksanakan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata untuk menciptakan pengelolaan destinasi wisata yang maju dan semakin populer di masyarakat.</li> <li>- Pembiayaan Pengembangan Desa Wisata melalui Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah (2020: 7 Desa, 2021: 16 Desa)</li> </ul>

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Pariwisata adalah sebagai berikut

Tabel 3.107  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan Pariwisata tahun 2020

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Permasalahan yang dihadapi karena adanya pembatasan dan pembatalan kegiatan terkait pandemi COVID-19, sehingga kegiatan yang menimbulkan kerumunan tidak bisa dilaksanakan dan anggaran yang ada dialihkan untuk penanganan Covid-19	Berkoordinasi untuk bisa melaksanakan kegiatan dengan dana yang minim tetapi tidak mengabaikan segala bentuk protokol kesehatan atau pelaksanaan kegiatan melalui Daring
2.	Kurangnya koordinasi internal (Lingkup Dinas) dan Eksternal (dengan pihak terkait/stakeholder) karena adanya pandemi	Meningkatkan lagi koordinasi dengan stakeholder para pelaku usaha kepariwisataan, lebih matang dan cermat dalam merencanakan kegiatan, lebih detil dalam mempelajari pekerjaan, melaksanakan kegiatan tepat pada jadwal yang telah ditentukan, kegiatan / wadah untuk Pelaksanaan Sosialisasi dan penyuluhan melalui Daring agar target bisa tercapai tanpa menimbulkan kerumunan.

### 3. Urusan Pertanian

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pilihan di bidang Pertanian pada tahun 2020 adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Bagian Perekonomian.

#### A. Capaian Kinerja Program

Pelaksanaan Program urusan pilihan yang berkaitan dengan pertanian mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.10.803.607.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.447.858.769 atau sebesar 87,45%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 27.998.636.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.445.680.314 atau sebesar 62,31%. Realisasi belanja tidak langsung rendah disebabkan karena belanja gaji dan tunjangan PPPK sebesar Rp. 8.482.388.000,- belum dapat direalisasikan karena belum ada SK pengangkatan PPPK dan penetapan NIP P3K masih dalam proses di BKN sampai sekarang.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Pilihan di bidang Pertanian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.108  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Program Urusan Pertanian Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,4	10,94 (PDRB 2020 Atas dasar Harga Berlaku)	88,22
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kelompok tani kelas utama	%	32,50	32,50	100
Peningkatan Ketahanan Pangan	Produktifitas Padi	(kwt/ha)	64,01	63,33	98,94
	Produktifitas Jagung		76,67	89,38	116,58
	Produktifitas Kedelai		12,8	19,12	149,38
	Alokasi pupuk bersubsidi	Ton	88.035	53.413	64,13
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	fasilitasi operasional Penyuluh	(orang)	209	190	90,91
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Tembakau Rajang	(ton)	1.092	1558,79	142,75
	Produksi Tembakau Asepan	(ton)	946	2308,72	244,05
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Populasi Sapi	(ekor)	117.492	111.119	94,58
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging Sapi	(ton)	3.001	1897,72	63,24
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Pembinaan usaha peternakan rakyat	(pengusaha)	235	200,00	85,11

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pertanian Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian kinerja indikator sasaran masuk kategori “tinggi”.
- Terdapat 11 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 8 Indikator, kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator, kategori “rendah” sebanyak 2 indikator.
- Capaian Kinerja Program urusan Pertanian kategori “rendah” adalah sebagai berikut :
  - Alokasi pupuk bersubsidi Capaian Kinerja kurang optimal dikarenakan penetapan target berdasar pada tingkat kebutuhan petani yang tercantum di e-RDKK (Elektronik - Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) berdasarkan usulan kebutuhan pupuk per kelompok tani sedangkan alokasi pupuk dari pusat berada di bawah e-RDKK (Elektronik - Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Upaya yang sudah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi ke Pemprov Jawa Tengah
  - Indikator Produksi daging sapi. Hal ini disebabkan produksi yang tercatat hanya pemotongan normatif di RPH dan selama pandemi penyembelihan di RPH menurun. Pencatatan produksi daging sapi seharusnya dilakukan semua tidak



hanya yang berasal dari RPH saja, terutama saat hari raya Idul Adha/Qurban juga ikut dilaporkan.

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pertanian yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.109  
Kebijakan Strategis urusan Pertanian Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020	Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/187 Tahun 2020 Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/187 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Klaten TA 2020	Memberikan perlindungan terhadap kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari ancaman alih fungsi lahan
2.	Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pola Tanam Serta Rencana Tata Tanam Untuk Masa Tanam Tahun 2020 – 2021	Peraturan Bupati Klaten No. 46 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pola Tanam Serta Rencana Tata Tanam Untuk Masa Tanam Tahun 2020 – 2021	Bahwa untuk memudahkan Pengelolaan Air Irigasi, diperlukan adanya pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Klaten untuk masa tanam tahun 2020-2021 di Kabupaten Klaten;

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pertanian pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.110  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pertanian

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pada tahun 2019 pelaksanaan program urusan pilihan yang berkaitan dengan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Urusan pilihan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.15.595.317.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.627.725.209,- atau sebesar 87,38%. Realisasi anggaran yang kurang maksimal dalam implementasinya berarti menemui kendala atau hambatan, sehingga apa yang menjadi target berupa alokasi dana bahkan tujuan program, tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran yang jauh dari target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus pengabaian dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD Pelaksana urusan pertanian sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran dilakukan lebih teliti dan cermat.</li> <li>- Pada tahun 2020 Realisasi Belanja Langsung sebesar 87,45% dan Belanja Tidak langsung sebesar 62,31%. Realisasi belanja tidak langsung rendah disebabkan karena belanja gaji dan tunjangan PPPK sebesar Rp. 8.482.388.000,- belum dapat direalisasikan karena belum ada SK pengangkatan PPPK dan penetapan NIP P3K masih dalam proses di BKN sampai sekarang.</li> </ul>	Pelaksanaan program/kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan
2.	Adapun 3 indikator yang mempunyai kategori sedang dan 1 indikator kategori rendah adalah : produktivitas kedelai dengan capaian	Pelaksanaan kegiatan mempedomani jadwal yang telah disusun dan	Produktivitas kedelai dan tembakau sangat dipengaruhi oleh

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	kinerja 73,5%. Produksi daging sapi dengan capaian kinerja (71,7%), produksi tembakau rajang dengan capaian kinerja (66,45%) dan alokasi pupuk bersubsidi (60,6%).	memperhitungkan masa tanam setiap komoditas agar diperoleh produktivitas sesuai target.	musim.
3.	Permasalahan, solusi yang diungkapkan dalam LKPJ masih terlalu umum belum secara spesifik mencerminkan permasalahan yang dihadapi OPD dalam mencapai sasaran pembangunan sesuai program dan kegiatannya. Sebagai contoh permasalahan "banyak usulan kegiatan dari kelompok tani yang tidak bisa tercover karena keterbatasan anggaran". Permasalahan yang dikemukakan tersebut kelihatan tidak spesifik berkaitan dengan program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerjanya. Indikator capaian kinerja yang masih dalam kategori sedang dan rendah sudah diberikan alasan penyebabnya tetapi belum dijelaskan tindak lanjut/solusinya.	Evaluasi terhadap permasalahan dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan dilakukan secara lebih cermat dan sesuai dengan kondisi teknis yang ada, serta dilengkapi dengan tindak lanjut/solusinya.	Meningkatkan capaian kinerja indikator kategori sedang dan rendah.

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Pertanian adalah sebagai berikut

Tabel 3.111  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan Pertanian tahun 2020

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Luas perubahan penggunaan tanah pertanian (dari sawah dan tegalan) ke non pertanian dari tahun ketahun semakin meningkat.	Dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/187 Tahun 2020 untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dari ancaman alih fungsi lahan.
2.	Kegiatan DAK pertanian terdapat beberapa kelompok tani yang mengalami keterlambatan dalam	Dilakukan pencermatan yang lebih teliti dalam penentuan lokasi kegiatan/CPCL oleh Dinas Pertanian.

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	pencairan karena lokasi kegiatan tidak sesuai standar teknis.	
3.	Kegiatan PLA dalam penyusunan peta lahan sawah/LP2B banyak yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.	Perlu dilakukan koordinasi dan verifikasi peta LP2B antara Kades, PPL dan bidang tata ruang DPUPR.
4.	Capaian kinerja dari produksi daging sapi 1897,72 ton (63,24%). Hal ini disebabkan produksi yang tercatat hanya pemotongan normatif di RPH dan selama pandemi penyembelihan di RPH menurun.	Pencatatan produksi daging sapi seharusnya dilakukan semua tidak hanya yang berasal dari RPH saja, terutama saat hari raya Idul Adha/Qurban juga ikut dilaporkan.
5.	Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya mencapai 64,13% dikarenakan penetapan target berdasar pada tingkat kebutuhan petani yang tercantum di e-RDKK, sedangkan alokasi pupuk dari pusat berada di bawah e-RDKK.	Mengusulkan tambahan alokasi pupuk ke Pemprov. Jateng

#### 4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program terkait urusan pilihan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bagian Perekonomian.

##### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bagian Perekonomian. Urusan pilihan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.30.038.935.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.251.447.089 atau sebesar 77,4%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Indikator Kinerja Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan program Urusan pilihan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.112**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020**

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang	unit	250	0	0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 indikator kinerja program urusan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Capaian Kinerja Program kategori "sangat rendah". Hal tersebut dikarenakan terjadi *refocusing* anggaran pada kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum sehingga tidak ada PJU yang terpasang di tahun anggaran 2020. Anggaran sebesar Rp.23.251.447.089 digunakan untuk kegiatan Pendataan dan Pembayaran Pajak Beban Listrik Penerangan Jalan Umum (PPJU).

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

- C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**  
 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.
- D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**  
 Pada tahun 2020, tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan Kepala Daerah.
- E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**  
 Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.113  
 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Realisasi Belanja Langsung sebesar 89,4% membuktikan realisasi Belanja masih belum optimal dan masi jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran dengan kebutuhannya.	- Memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas - Realisasi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 77,4%. Anggaran yang tidak terserap adalah sisa bayar Pembayaran Pajak Beban Listrik Penerangan Jalan Umum (PPJU).	- Peningkatan serapan anggaran
2.	Dari satu indikator program yaitu jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang dapat terlihat bahwa capaian indikator tersebut memiliki kategori yang sangat tinggi (360%). Artinya OPD terkait pada awal penyusunan	Tidak semua PJU di Kabupaten Klaten menggunakan sumber daya listrik. Terdapat beberapa PJU yang	Peningkatan capaian kinerja

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	target kinerja pada perencanaan dan penganggaran tidak mendasarkan pada data dan informasi yang tersedia serta koordinasi dengan OPD terkait, sehingga jumlah capaian menjadi sangat tinggi. Karena perlu juga diingat, bahwa peningkatan PJU akan berdampak pada peningkatan pembayaran biaya PJU kepada PLN.	sudah menggunakan panel surya.	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah *refocusing* anggaran pada kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum sehingga tidak ada PJU yang terpasang di tahun anggaran 2020. Upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan pemeliharaan dan rehabilitasi Penerangan Jalan Umum.

### 5. Urusan Perdagangan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan pilihan perdagangan adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Bagian Perekonomian.

#### A. Capaian Kinerja program

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan perdagangan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.10.767.185.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.493.807.124 atau sebesar 88,17% dan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.11.260.660.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.452.802.576 atau 92,83%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja Program dan Capaian kinerja Program Urusan Pilihan Perdagangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.114  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Program  
Urusan Perdagangan Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,37	15,38 (PDRB 2020 atas dasar harga berlaku)	79,4
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan halal	%	0,584	0,29	49,66
	Persentase cakupan pelayanan UTTP	%	50	5	10
	Inflasi tahunan	%	3 % (±1)	1,38	Tidak tercapai
	Persentase konsumen yang terlindungi	%	100	100	100
Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Persentase PKL dan asongan yang terdaftar	%	69,56	36,28	52,16

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Perdagangan Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori "Tinggi" sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 1 Indikator, kategori "rendah" sebanyak 1 indikator dan kategori "sangat rendah"



sebanyak 1 indikator dan 1 indikator tidak tercapai. (tidak dapat diprosentasekan dikarenakan menggunakan target jangkauan angka)

- Terdapat 3 Indikator Program dengan capaian Kategori Rendah dan Sangat Rendah. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :
- Terdapat 3 Indikator Program dengan capaian Kategori Rendah dan Sangat Rendah. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :
  - Prosentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan Halal tidak tercapai sesuai target , dari target 0,58% terealisasi 0,29% sehingga hanya tercapai 49,66% dikarenakan adanya biaya sertifikasi halal yang terlalu tinggi dan prosedur perijinan yang rumit untuk sekelas UKM sehingga menyebabkan rendahnya pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya.
  - Persentase Cakupan pelayanan UTTP yang realisasinya hanya 5% dari target tahun 2020 sebesar 50% , sedangkan capaian kinerjanya 10% . Permasalahannya adalah Disdagkop UKM kabupaten Klaten belum dapat melakukan pelayanan tera / tera ulang dikarenakan terkendala dengan permasalahan Praturan Bupati tentang pelaksanaan dan retribusi tera / tera ulang UTTP, sehingga pelaksanaan tera / tera ulang UTTP baru dapat dilaksanakan di tahun 2021.
  - Prosentase PKL dan Asongan yang terdaftar di tahun 2020 3997 , sedangkan realisasi kinerja 36,28 % dari target tahun 2020 sebesar 94,44 % , sedangkan capaian kinerjanya hanya tercapai 38,42%.. Hal ini disebabkan dari tahun 2018 – 2020 belum ada lagi pendataan pendaftaran kartu baru tanda anggota PKL dan asongan, karena terdapat perubahan Perbub di tahun 2018 dan sosialisasi Perbup di tahun 2019.
- Terdapat 1 indikator kinerja yang capainnya tidak tercapai yaitu inflasi tahunan. Dari target 3% ( $\pm 1$ ), realisasi inflasi tahunan sebesar 1,38% pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan Pandemi Covid-19 yang membuat kondisi perekonomian melemah sehingga membuat daya beli masyarakat menjadi menurun. Kondisi inflasi tahunan yang sebesar 1,38%, meskipun tidak sesuai target namun masih pada level terkendali. Pemerintah Kabupaten Klaten memantau perkembangan inflasi di Klaten berdasarkan kondisi inflasi kota Surakarta dikarenakan penghitungan inflasi hanya dilakukan di kota-kota yang

dilakukan SBH (survey biaya hidup), salah satunya adalah Kota Surakarta sehingga pada tahun 2020 tidak dilakukan penghitungan inflasi di BPS Klaten.

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Perdagangan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.115  
Kebijakan Strategis urusan Perdagangan Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang	Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa</li> <li>- terwujudnya tertib ukur alat UTPP yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen</li> <li>- terwujudnya pelaku usaha yang lebih professional dan terpercaya</li> <li>- terwujudnya pasar rakyat dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur</li> <li>- meningkatkan potensi pendapatan daerah dari retribusi tera / tera ulang secara mandiri.</li> </ul>

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perdagangan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.116  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan  
urusan Perdagangan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKJP tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Pada tahun 2019 pelaksanaan program urusan pilihan yang berkaitan dengan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Urusan tersebut mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp.14.097.321.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.500.379.411,- atau sebesar 88,7% dan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.12.679.146.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.943.130.833,- atau sebesar 86,3%. Reaslisasi anggaran baik belanja langsung (88,7%) dan belanja tidak langsung (86,3%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalanya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus pengabaian dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD Pelaksana urusan perdagangan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>- Memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya. - Realisasi Belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 88,17% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 92,83%.</p>	<p>Meningkatkan capaian realisasi anggaran</p>
2.	<p>Pada tahun anggaran 2019, urusan perdagangan memiliki 2 indikator dengan kategori "rendah" dan 1 indikator dengan kategori "sangat rendah". Indikator program dengan kategori "rendah" dan kategori "sangat rendah" membutuhkan perhatian dimasa mendatang. Adapun indikator program dengan</p>	<p>- Prosentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan Halal tidak tercapai sesuai target , dari target 0,58% tereleasisasi 0,29% sehingga hanya tercapai</p>	<p>Peningkatan capaian indikator kinerja</p>

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKJP tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>kategori “rendah” dan kategori “sangat rendah” adalah sebagai berikut: persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPPI-PIRT dan Halal (55,5%) persentase PKL dan asongan terdaftar (56,9%), persentase cakupan pelayanan UTTP (10,7%).</p>	<p>49,66% dikarenakan adanya biaya sertifikasi halal yang terlalu tinggi dan prosedur perijinan yang rumit untuk sekelas UKM sehingga menyebabkan rendahnya pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Cakupan pelayanan UTTP yang realisasinya hanya 5% dari target tahun 2020 sebesar 50% , sedangkan capaian kinerjanya 10% . Permasalahannya adalah Disdagkop UKM kabupaten Klaten belum dapat melakukan pelayanan tera / tera ulang dikarenakan terkendala dengan permasalahan Praturan Bupati tentang pelaksanaan dan retribusi tera / tera ulang UTTP, sehingga pelaksanaan tera / tera ulang UTTP baru dapat dilaksanakan di tahun 2021.</li> <li>- Prosentase PKL dan Asongan yang terdaftar di tahun 2020 3997 , sedangkan realisasi kinerja 36,28 % dari target tahun 2020 sebesar 94,44 % ,</li> </ul>	

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKJP tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		sedangkan capaian kinerjanya hanya tercapai 38,42%.. Hal ini disebabkan dari tahun 2018 – 2020 belum ada lagi pendataan pendaftaran kartu baru tanda anggota PKL dan asongan, karena terdapat perubahan Perbup di tahun 2018 dan sosialisasi Perbup di tahun 2019.	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut

Tabel 3.117  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan Perdagangan tahun 2020

NO	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Sulitnya mendapatkan data ekspor/impor	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait
2	Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang prosedur ekspor impor	Melakukan konsultasi / koordinasi kepada Dinas terkait
3	Minimnya data pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Melakukan pembinaan pelaku usaha kecil menengah yang berorientasi ekspor
4	Masih rendahnya kualitas produk UKM untuk di promosikan dalam kegiatan pameran - pameran	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk sebagai syarat promosi perdagangan
5	Masih rendahnya anggaran untuk promosi perdagangan	Melaksanakan / mengikuti promosi dalam bentuk pameran sesuai dengan anggaran yang ada
6	Instabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Monitoring harga</li> <li>b Koordinasi dan sinkronisasi tupoksi pengawasan stock dan harga dengan stake holder</li> <li>c Pembinaan ke pedagang, asosiasi untuk stabilisasi harga</li> <li>d Pembinaan ke konsumen/masyarakat Dengan memberi info tentang harga</li> </ul>

NO	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
7	Implementasi regulasi dan aturan tentang perdagangan pada pelaku usaha belum optimal sehingga menimbulkan iklim dunia usaha kurang kondusif	a Pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan stake holder berkaitan dengan UU dan regulasi Perdagangan b Pengawasan dan pengendalian agar distribusi dan usaha perdagangan sesuai UU
8	Illegalitas perijinan perdagangan masih tinggi	Optimalisasi pembinaan tentang pentingnya perijinan serta aturan perijinan dan prosedur tentang pengajuan perijinan baik secara online maupun manual
9	Sebelum adanya Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang, pelayanan ketrologian belum bisa dilakukan secara optimal dan mandiri.	- Sebelum adanya Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang, pelaksanaan tera/tera ulang bekerjasama dengan UPT Metrologi Kabupaten Boyolali sehingga UTTP yang digunakan pada pelaku usaha tetap terstandar dan terukur dalam rangka perlindungan konsumen - Setelah adanya Peraturan Bupati maka pelayanan tera/tera ulang dapat berjalan optimal mulai tahun 2021
10	Tidak terbangunnya Pasar Karangan, Kecamatan Karanganom karena adanya Refocusing	Diusulkan untuk dianggarkan kembali kegiatan yang dulu terkena Refocusing
11	Belum adanya Data PKL yang Valid	Pendataan PKL

## 6. Urusan Perindustrian

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan pilihan di bidang perindustrian adalah oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja dan Bagian Perekonomian.

### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan pilihan yang berkaitan dengan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjadan Bagian Perekonomian mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 1.703.675.897 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.504.338.526 atau sebesar 88,29%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.711.507.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.527.917.141 atau sebesar 93,23%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Pilihan di Bidang Perindustrian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.118  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Urusan Perindustrian Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	35,6	37,39 (PDRB 2020 Atas dasar Harga berlaku)	105,02
	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	8,123	3,54	43,5
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI	%	7	6,79	97,00
	Debitur penerima KUR	Orang	30.900	49.332	159,6
Peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	%	4	4,75	118,75
	Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK	%	12	7,39	61,58

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01\%$	Sangat Tinggi
2	$75,01\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01\% \leq 75\%$	Sedang
4	$50,01\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Perindustrian Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 1 indikator dan kategori "sangat rendah" sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 3 Indikator dan kategori "sedang" sebanyak 1 indikator.
- Capaian kinerja dengan kategori "sedang" dan "sangat rendah" adalah sebagai berikut :
  1. Capaian kinerja Persentase IKM yang memiliki daya saing belum optimal dikarenakan IKM untuk memiliki daya saing minimal IKM harus mempunyai sertifikasi khusus, sedangkan biaya untuk mengurus sertifikasi tersebut tidak murah dan perlu persyaratan administrasi dan keahlian khusus untuk memperoleh sertifikasi tersebut, contohnya SNI dan ISO. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Persentase IKM yang memiliki daya saing adalah dengan dengan memberikan bantuan biaya sertifikasi, dan pendampingan serta motivasi ke IKM untuk meraihnya dengan meningkatkan keahliannya.
  2. Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK. Capaian tersebut belum optimal dikarenakan Adanya Peraturan yang menghapus ketentuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan menghilangkan pemberlakuan V-Legal dalam perdagangan industri kayu.

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Perindustrian yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.119  
Kebijakan Strategis urusan Perindustrian Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pembentukan Tim Monev Subsidi Bunga melibatkan personil kecamatan	Keputusan Bupati Klaten Nomor 500/319 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 500/644 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten	Efektifitas pelaksanaan monitoring subsidi bunga di masyarakat karena melibatkan tim dari wilayah (kecamatan)
2.	Perluasan Sasaran Subsidi Bunga untuk Debitur Terdampak Pandemi Covid-19	Perbup Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup Klaten No. 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten.	Lembaga jasa keuangan penyalur yang ditunjuk untuk menyalurkan program subsidi bunga kepada usaha mikro tahun 2020 adalah PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dan PT BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten. Alokasi dana untuk program ini di tahun 2020 sebesar Rp. 2 M (Dua milyar rupiah) dengan perincian Rp. 1,5 M melalui PT BPR Bank Klaten (Perseroda) dan Rp. 500 Juta melalui PT BPR BKK Tulung (Perseroda). Semula sasaran program adalah calon debitur di 2 bank penyalur namun akibat Pandemi Covid-19, sasaran program subsidi bunga ditambah debitur lama terdampak covid-19 sebanyak 1.997 debitur dengan perincian 1.631 debitur PT BPR Bank Klaten (Perseroda) mendapat manfaat subsidi 5 bulan dan 366 debitur PT BPR BKK Tulung (Perseroda) menerima manfaat subsidi selama 4 bulan.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perindustrian pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.120  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan  
urusan Perindustrian

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Pada tahun 2019 pelaksanaan program urusan pilihan yang berkaitan dengan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan tenaga kerja, bagian perekonomian dan kecamatan. Urusan pilihan tersebut mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp.2.833.4689.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.527.124.101,- atau sebesar 89,2%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.3.033.432.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.506.672.444,- atau sebesar 82,6%. Reaslisasi anggaran baik belanja langsung (89,2%) maupun belanja tidak langsung (82,6%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalanya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus pengabaian dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD Pelaksana urusan perindustrian sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>- Memperbaiki time schedule pelaksanaan kegiatan, menyusun anggaran sesuai kebutuhan dan melaksanakannya a sesuai target</p> <p>- Pada tahun 2020 realisasi belanja langsung sebesar 88,29% dan belanja tidak langsung sebesar 93,23%. Realisasi belanja langsung sedikit turun jika dibandingkan tahun 2019 dikarenakan pada tahun anggaran 2020 terjadi perubahan anggaran sebanyak 6 kali, ada beberapa anggaran yang tadinya dirasionalisasi tapi pada perubahan selanjutnya dikembalikan lagi sehingga melenceng dan time schedule akibatnya dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum bisa optimal.</p>	<p>Dengan Memperbaiki time schedule maka dalam pelaksanaan kegiatan tidak akan berbenturan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan bisa berjalan optimal</p>

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Perindustrian adalah sebagai berikut

Tabel 3.121  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan perindustrian tahun 2020

NO	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Belum optimalnya jaringan kerjasama antar IKM dalam meningkatkan produktifitas IKM	Melakukan Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat Jaringan Klaster Industri
2	Masih banyaknya Industri Mikro yang belum berijin	Melakukan Kegiatan Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian
3	Masih rendahnya daya saing Industri Kecil dan Menengah serta belum berkembangnya produk unggulan daerah.	Peningkatan daya saing mutu dan kualitas produk unggulan daerah dengan melakukan Kegiatan Pelatihan Industri
4	Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM di Bidang IKM .	Bimtek dan pelatihan profesionalisme SDM di Bidang IKM dalam bidang industri.
5	Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan para pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.	Peningkatan dan pemberdayaan IKM melalui pola klaster.
6	Belum terwujudnya pola kemitraan antara industri besar dengan industri kecil.	Memperkuat jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan para pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.
7.	Kondisi perekonomian secara umum menurun karena dampak Covid-19 baik dari sisi produksi maupun konsumsi	Menggerakkan perekonomian melalui pemberian subsidi bunga kepada IKM

## 7. Urusan Transmigrasi

Pelaksanaan urusan Pilihan di bidang Transmigrasi pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.21.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.920.516 atau sebesar 94,86%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transmigrasi secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pilihan di Transmigrasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.122**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Transmigrasi Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	5,2	5,2 (data tahun 2019)	100
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	%	35	0	0
Transmigrasi lokal	Persentase calon transmigrasi yang sudah disosialisasi	%	4	0	0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Transmigrasi Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja "sangat tinggi" sebanyak 1 indikator. Indikator tersebut menggunakan data tahun 2019 dikarenakan berdasarkan surat Dirjen PKP2Trans Nomor: B656/PKT0401/IV/2020 Perihal

Perpindahan dan penempatan transmigrasi Tahun 2020 sehubungan dengan Corona Disease 2019 (Covid 19) Bahwa tahun 2020 tidak ada pemberangkatan transmigrasi. Berdasarkan hal tersebut maka realisasi kinerja menggunakan realisasi tahun 2019.

- Terdapat 2 indikator kinerja program dengan capaian kinerja program “sangat rendah” sebanyak 2 indikator.
- Capaian Kinerja Program yang termasuk kategori “Sangat Rendah” adalah sebagai berikut :
  1. Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan
  2. Persentase calon transmigrasi yang sudah disosialisasiCapaian kinerja indikator tersebut di atas “sangat rendah” dikarenakan pada tahun anggaran 2020 terjadi pandemi covid 19 sehingga tidak boleh ada pemberangkatan transmigrasi sehingga anggaran untuk program transmigrasi dirasionalisasi untuk penanganan covid 19 sehingga kegiatan transmigrasi tidak bisa dilaksanakan. Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah dengan mengalokasikan kembali anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan penempatan serta melaksanakan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait program transmigrasi agar bisa optimal.

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transmigrasi secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transmigrasi dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada tahun 2020, tidak terdapat kebijakan strategis Urusan Transmigrasi yang ditetapkan Kepala Daerah.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Transmigrasi pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.123  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Transmigrasi

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Pada tahun 2019 pelaksanaan program urusan pilihan yang berkaitan dengan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan tenaga kerja. Urusan pilihan tersebut mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp.250.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.203.848.600,- atau sebesar 81,5%. Realisasi anggaran belanja langsung (81,5%) masih lebih kecil dibanding realisasi tahun sebelumnya (2018) sebesar 86,6%. Realisasi anggaran belanja langsung (81,5%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalanya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus pengabaian dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD Pelaksana urusan transmigrasi sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperbaiki time schedule pelaksanaan kegiatan, menyusun anggaran sesuai kebutuhan dan melaksanakannya sesuai target</li> <li>- Realisasi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 94,86%, meningkat jika dibandingkan tahun 2020</li> </ul>	<p>Dengan Memperbaiki time schedule maka dalam pelaksanaan kegiatan tidak akan berbenturan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan bisa berjalan optimal</p>
2.	<p>Indikator program dengan kategori sangat rendah tersebut adalah transmigrasi suakarsa/umum (capaian kinerja 46,7%) oleh karena itu, indikator program yang mempunyai kategori sangat rendah tersebut masih</p>	<p>Dikarenakan kuota penempatan transmigrasi masih ditentukan oleh pemerintah Provinsi, maka</p>	<p>Untuk mengoptimalkan penempatan transmigrasi</p>

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	membutuhkan perhatian dimasa mendatang.	Pemerintah Kabupaten tidak bisa merealisasikan anggaran maupun mencapai target kinerja secara optimal. Tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait kuota calon transmigran yang dapat diberangkatkan pada tahun mendatang.	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Transmigrasi adalah sebagai berikut

Tabel 3.124  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan Transmigrasi tahun 2020

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Peminat Calon Transmigrasi Kurang	Pemberian Sosialisasi ke Desa - desa
2	Target alokasi calon Transmigrasi ditentukan oleh Provinsi, antara target Kabupaten dan Provinsi tidak sama.	Penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan melakukan fasilitasi dan mediasi ( MOU ) antara daerah asal dengan Provinsi/ Kabupaten daerah penempatan.
3	Calon Transmigrasi mundur pada saat-saat pengerahan.	Mengusahakan calon transmigrasi penerima bantuan sosial tidak mundur sehingga bantuan sosial dicairkan.
4	Pada tahun 2020 tidak ada pemberangkatan dikarenakan adanya pandemi Covid 19	Anggaran yang ada dirasionalisasi untuk penanganan Covid 19

### 3.4 Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi Urusan Administrasi Pemerintahan, Urusan Pengawasan, Urusan Perencanaan, Urusan Keuangan, Urusan Kepegawaian, Urusan Pendidikan Pelatihan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan.

#### 1. Administrasi Pemerintahan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang administrasi Pemerintahan adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Kelurahan dan Dinas Kominfo.

##### A. Capaian Kinerja program

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi pemerintahan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.76.444.141.855 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.65.196.776.021 atau sebesar 85,28%. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.94.778.407.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 86.337.038.329 atau sebesar Rp. 91,09%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Fungsi Penunjang di bidang administrasi Pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.125**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**  
**Administrasi pemerintahan Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan tepat waktu	%	90	83,33	92,59
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	68(B)	61,32 (B)	90,18



Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,05	3,21	105,25
Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90	90	100
	Indeks kabupaten peduli HAM	%	88	95,7	108,75
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	97	107,78
Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100
Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	98	99,42	101,45
	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	98	98,61	100,62
	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	98	98,89	100,91
Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95	95	100

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	1,38	Tidak tercapai
Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten	%	100	100	100
	Persentase Tersusun dan terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam RPJM maupun RKPD	%	100	100	100
Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Terintegrasinya program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	%	100	100	100
	Persentase produk Perda terbentuk	%	100	100	100
	Persentase produk pengawasan DPRD	%	100	100	100
	Persentase Produk Perda anggaran pemerintahan daerah tersusun	%	100	100	100

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase OPD yang menyusun LKjIP secara benar	%	92	96,08	104,44
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase jumlah kebijakan tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)	%	87	96,07	110,43
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100	100	100
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	99	99
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase Pendampingan Keprotokolan Kepala Daerah	%	100	99	99
Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	Persentase peningkatan kerjasama daerah	%	15	15,7	104,6
Pengembangan Wilayah Perbatasan	Kejelasan batas antar kabupaten	Pilar	27	32	118,51
	Jumlah obyek rupa bumi yang terbakukan	obyek	10	14	140
Peningkatan Koordinasi. Pembinaan. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Persentase kecamatan yang mampu melaksanakan tata kelola administrasi kecamatan secara baik	%	100	100	100

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Nilai penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai	80	57,55 (nilai tahun 2019)	71,93
	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	81,5	81,88	100,4
Penataan peraturan perundang undangan	Persentase raperda yang terselesaikan	%	12 (6 Raperda)	100 (6 Raperda)	100
	<i>Yang dimaksud adalah jumlah Raperda yang terselesaikan (6 Raperda)</i>				
	Persentase perda yang terselesaikan	%	2	83,3	83,3
	<i>Yang dimaksud adalah jumlah Perda yang terselesaikan sebanyak 5 dari target 6 Perda</i>				
	Persentase perkara yang terselesaikan	%	20 (55 perkara)	100 (55)	100
	<i>Yang dimaksud adalah Jumlah Perkada sebanyak 55 Perkada</i>				
	Persentase produk hukum yang terdigitalisasi	%	22 (61)	60	98,3
	<i>Yang dimaksud adalah jumlah produk hukum yang terdigitalisasi (target 61 realisasi 60)</i>				
Penyuluhan pelayanan bantuan hukum dan HAM	Persentase penanganan permasalahan / kasus hukum dan HAM	%	4 (10)	<b>10</b>	<b>100</b>
	<b>Yang dimaksud adalah Penanganan Perkara (10 Perkara)</b>				
Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu	%	68	64,48	94,8
	Persentase pengumpulan LPJ dana Desa yang tepat waktu	%	70	66,13	94,47
	Persentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu	%	90	71,16	79,06

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan koordinasi pembinaan fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi di dalam APBD	%	0,9	3,37	374
	Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu	%	80	78,92	98,65
	Persentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes	%	80	83,74	104,6
	Persentase kelembagaan (BPD, LPMD/LPMK, PKK, karang taruna dan kelompok tani) di desa/kelurahan yang aktif	%	80	84,2	105,25
Peningkatan koordinasi pembinaan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	80	87,65	109,5
Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan kelurahan	Persentase usulan kegiatan musrenbang kelurahan yang terealisasi di dalam APBD	%	80	84,10	105,12
koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi kemasyarakatan kelurahan	Persentase kelembagaaan kemasyarakatan kelurahan yang aktif	%	90	94,90	105,45
koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan kelurahan	Persentase kelembagaan pemerintahan kelurahan yang aktif	%	90	92,36	102,62

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase administrasi pelaksanaan kegiatan OPD yang dimonitor	%	100	100	100
	Kesesuaian pekerjaan fisik antara rencana (spesifikasi dan waktu pelaksanaan) dengan kondisi realita lapangan (capaian)	%	100	100	100
	Persentase OPD yang menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan yang lengkap dan tepat waktu	%	100	100	100
Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Persentase penyelesaian dokumen regulasi pengadaan barang dan jasa	%	100	100	100
Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diselesaikan	%	100	100	100
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah	Bahan pokok	9	9	100
	Kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Bulan	12	12	100
Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang tertangani	%	74	89	120,27

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi pemerintahan Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 12 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat tinggi” sebanyak 11 indikator dan 1 indikator kinerja yang tidak tercapai (capaian kinerjanya tidak dipersentasekan karena target merupakan jangkauan/interval angka)
- Terdapat 41 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 38 Indikator, kategori “tinggi” sebanyak 2 indikator dan 1 indikator merupakan kategori “sedang”.
- Realisasi Kinerja Program Kategori sedang sebanyak 1 Indikator. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :
  1. Indikator kinerja Nilai Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi setelah dilakukan Pelaksanaan Mandiri Penilaian Reformasi Birokrasi memperoleh Nilai 64,82, sedangkan hasil penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh nilai 57,55. Capaian belum optimal dikarenakan pada saat penilaian masih ada beberapa hal yang diperbaiki, diantaranya :
    - a. Pergerakan tim reformasi birokrasi internal serta komunikasi tentang reformasi birokrasi masih belum optimal di tingkat Pemda dan OPD

- b. Belum memformalkan kebijakan terkait Whistle-Blowing System dan benturan kepentingan
- c. Belum optimal dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada unit layanan sehingga belum terdapat unit kerja layanan yang memperoleh predikat WBK/WBBM.

Upaya untuk meningkatkan nilai penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan, diantaranya :

- a. Mengoptimalkan fungsi tim reformasi birokrasi internal melalui pertemuan secara berkala membahas kemajuan reformasi birokrasi, serta mengkomunikasikan dan memastikan penerapannya sampai ke OPD
  - b. Memformalkan kebijakan terkait Whistle-Blowing System dan benturan kepentingan dan meningkatkan implementasi atas penanganan gratifikasi, penerapan SPIP dan pengaduan masyarakat
  - c. Meningkatkan penerapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sehingga dapat semakin mempercepat implementasi Reformasi Birokrasi dan akan diimplementasikan di perangkat daerah yang mengadakan pelayanan publik misal : RSUD, DPMPSTP, DISDUKCPIL dan lain-lain
- Sedangkan pada tahun 2020 Nilai Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum rilis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terdapat beberapa prestasi / penghargaan yang diperoleh dalam pelaksanaan Program urusan penunjang Administrasi Pemerintahan.

Prestasi / penghargaan tersebut sebagai berikut :

1. Penghargaan Kabupaten/kota Peduli HAM dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia
2. Top 10 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kategori "sangat tinggi". Pemberi penghargaan dari Kemendagri.
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah sebesar 61,32 penilaian dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3.00 pada



Tahun 2019, penilaian dilakukan oleh OMBUDSMAN Republik Indonesia pada tahun 2020.

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan penunjang Administrasi Pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan urusan penunjang Administrasi Pemerintahan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis urusan penunjang Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.126  
Kebijakan Strategis urusan penunjang  
Administrasi Pemerintahan Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan di Kabupaten Klaten	Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan di Kabupaten Klaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewujudkan peningkatan kualitas dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Meningkatkan keserasian dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan</li> <li>- Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat</li> <li>- Mewujudkan kesatuan arah dan pola pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah agar sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional</li> </ul>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
2.	Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peraturan Bupati Klaten Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Pendanaannya Bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai langkah untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan</li> <li>- pedoman kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berjalan tertib administrasi, transparansi dan tepat sasaran.</li> </ul>
3.	Pengelolaan dan pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Klaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegritas antar anggota jaringan</li> <li>- menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah</li> <li>- mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum</li> <li>- meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.</li> </ul>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
4.	Menetapkan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten	Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten	Perubahan PermenPUPR nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia, Perlem nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaku Pengadaan Barang / Jasa dan Perlem nomor 5 Tahun 2020 tentang KSWP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disesuaikan dengan kebijakan daerah

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan urusan penunjang Administrasi Pemerintahan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.127  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan penunjang Administrasi Pemerintahan

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
1.	Urusan pemerintahan fungsi penunjang dibidang Administrasi Pemerintahan mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp.80.545.338.518,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.69.895.457.765,- atau sebesar 86,8% alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 105.432.902.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.783.972.712,- atau sebesar Rp. 86,1%. Realisasi anggaran baik belanja langsung (86,8%) maupun belanja tidak langsung (86,1%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD Pelaksana Administrasi Pemerintahan berusaha memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya</li> <li>- Realisasi belanja langsung tahun 2020 sebesar 85,28% dan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 91,09%.</li> <li>- Realisasi belum optimal, terutama untuk belanja langsung dikarenakan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan Pandemi Covid-19.</li> </ul>	Peningkatan capaian kinerja serapan anggaran

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD Pelaksana Administrasi Pemerintahan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.		
2.	Terdapat 31 indikator kinerja program dengan realisasi kinerja program kategori "sangat tinggi" sebanyak 27 indikator, kategori "tinggi" sebanyak 3 indikator dan 1 indikator merupakan kategori sangat rendah. Adapun kinerja program kategori sangat rendah sebanyak 1 indikator adalah presentase OPD yang menyusun LKJIP secara benar (32,68%).	capaian kinerja indikator presentase OPD yang menyusun LKJIP secara benar sebesar pada tahun 2020 sebesar 104,44% (target 92%, realisasi 96,08) meningkat jika dibandingkan tahun 2019	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan penunjang Administrasi Pemerintahan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.128  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan penunjang Administrasi Pemerintahan tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Produk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD belum sepenuhnya didukung dengan kemampuan manajemen dan sumber daya yang ada di jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten	Mengikutsertakan jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.	Rencana SPSE akan terpusat di LKPP sehingga perlu mempertimbangkan kemampuan sistem dalam mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam proses PBJ	Perlunya dibuat Pilot Project dalam pelaksanaan SPSE terpusat di LKPP sehingga permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan bisa dipetakan dan teratasi dengan cepat
3.	Rencana perubahan draft perpres nomor 16 tahun 2018 yang mempermudah persyaratan pelaku usaha dalam mengikuti proses PBJ	Perlu peningkatan kompetensi teknis dan kecermatan bagi Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan
4.	Tuntutan untuk memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Perlunya peningkatan <i>reward</i> sehingga pelaku Pengadaan Barang/Jasa tertarik mengikuti Uji Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa
5.	Masih adanya keterlambatan dari OPD dalam menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan ke Bagian Pembangunan	Melaksanakan permintaan Laporan secara intens kepada OPD
6.	Kesulitan mendapatkan data capaian fisik untuk paket pekerjaan konstruksi	Perlu adanya sistem manajemen pengendalian
7.	Peraturan/Regulasi terkait bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan yang selalu berubah-ubah (Bagian Kesra)	Mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri
8.	Ajuan lokasi dan alokasi Bantuan tidak sesuai dengan ajuan (Bagian Kesra)	Mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh tim TAPD terkait nama-nama yang tercantum di dalam SK yang terkadang tidak sesuai dengan ajuan kita
9.	Sering adanya keterlambatan Pelaporan Pertanggungjawaban/LPJ (Bagian Kesra)	Dengan membuat surat edaran Bupati tentang aturan-aturan LPJ Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan
10.	Di bidang Penyelenggaraan Haji kurangnya koordinasi antara Ormas Islam dan IPHI Daerah (Bagian Kesra)	Dengan melakukan koordinasi yang terus menerus dengan stakeholder yang tentang Penyelenggaraan Haji karena setiap saat ada perubahan peraturan dan jadwal Pemberangkatan dan Pemulangan Haji
11.	Pelaksanaan pembuatan produk hukum belum menggunakan aplikasi	Mulai dirintis dengan e-legal drafting pada tahun 2020
12.	Kuantitas dan kualitas SDM di Kecamatan dan Kelurahan kurang memadai sehingga sering menjadi kendala dalam menunjang pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan SDM yang ada</li> <li>- Mengusulkan penambahan aparatur di Kecamatan dan Kelurahan</li> <li>- Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan maupun melalui pengembangan kompetensi secara mandiri</li> </ul>

## 2. Pengawasan

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten.

### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten. Urusan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.6.439.275.250 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.890.135.727 atau sebesar 91,47%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.680.993.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.756.241.235 atau sebesar 86,16%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.129  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
di Bidang Pengawasan Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3	3	100
	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	3	100
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	peningkatan level maturitas SPIP	indek 1-5	3	3	100
Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	peningkatan level kapabilitas APIP	indek 1-5	3	3	100
Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	persentase pemeriksaan program tahunan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdapat 2 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja "sangat tinggi" sebanyak 2 indikator dan 3 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja "Sangat Tinggi" sebanyak 3 Indikator atau semua capaian kinerja sasaran dan Program urusan Pengawasan masuk kategori sangat tinggi.

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan penunjang Pengawasan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan urusan penunjang Pengawasan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada tahun 2020 tidak terdapat Kebijakan Strategis urusan penunjang Pengawasan yang ditetapkan Kepala Daerah.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan urusan penunjang Pengawasan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.130  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan  
urusan pemerintahan fungsi penunjang Pengawasan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Urusan Pengawasan mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp.7.455.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.211.234.968,- atau sebesar 83,3%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.7.227.824.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.995.454.893,- atau sebesar Rp. 82,9%. Realisasi anggaran baik belanja langsung (83,3%) maupun belanja tidak langsung (82,9%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD Pelaksana bidang Pengawasan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>- Realisasi belanja langsung sebesar 91,47% dan belanja tidak langsung sebesar 86,16%. Realisasi belanja langsung dan tidak langsung meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2019</p> <p>- Perbaikan penyusunan anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas</p>	Perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga penyerapan anggaran bisa lebih baik

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan penunjang pengawasan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.131  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan urusan penunjang pengawasan tahun 2020

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Belum optimalnya penerapan SPIP di Kabupaten Klaten	Melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan SPIP di tingkat OPD



NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
2	Akuntabilitas Keuangan di Pemerintah Kab Klaten yang masih belum baik	Melakukan pendampingan SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP serta meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah. Sinergitas anat aparat penagwasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal
3	Implementasi SAKIP yang belum optimal	Perlu dilakukan upaya untuk membangun komitmen seluruh jajaran mulai dari pejabat atas sampai dengan staf akan pentingnya penerapan SAKIP yang tertib dan berkualitas agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta berhasil guna
4	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemda Klaten yang belum optimal	Proses Perencanaan samapi pelaporan kinerja menggunakan aplikasi berbasis tehnologi informasi yang terintegrasi dan dihubungkan dengan kesejahteraan pegawai

### 3. Perencanaan

Perangkat daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan adalah Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten

#### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 6.303.540.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.892.009.014 atau sebesar 93,47%. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.851.352.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.525.715.076 atau sebesar 91,54%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.132  
 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
 di Bidang Perencanaan Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	100
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	ada	100
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	ada	100
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	100
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKP	%	100	100	100
	Penjabaran konsistensi program RKP ke dalam APBD	%	100	100	100

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Perencanaan pembangunan ekonomi	Prosentase konsistensi kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan bidang ekonomi	%	75	75	100
	Prosentase ketersediaan data dan informasi di bidang ekonomi	%	Ada	Ada	Ada/ 100
	Prosentase jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah	%	27,92	15	54
Perencanaan sosial dan budaya	Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	%	92	92	100
	Persentase Ketersediaan Data Dasar dan Informasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	%	100	100	100
Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Ketersediaan data dan informasi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada/ 100
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW	%	100	100	100
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Perencanaan Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 13 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 12 Indikator dan 1 indikator merupakan kategori “rendah”.
- Realisasi Kinerja Program Kategori “Rendah” sebanyak 1 Indikator. Adapun indikator tersebut adalah Prosentase jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Capaian belum optimal dikarenakan dampak wabah pandemi Covid 19 masih dirasakan oleh perusahaan sehingga pelaksanaan CSR perusahaan mengalami refocusing, selain itu pelaksanaan rakor CSR juga terkendala. Tindak lanjut kedepan akan dilakukan rakor forum CSR secara rutin dan anjungsana ke perusahaan.

Dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan, terdapat inovasi yang dikembangkan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan. Inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.133  
 Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan  
 Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan tahun 2020

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI SINGKAT INOVASI
1.	e-Planning e-Budgeting	<p>Perencanaan APBD dimulai dari perencanaan RKPD/Renja Perangkat Daerah yang sudah dilakukan melalui aplikasi yang berbasis web yang dapat diakses melalui alamat <a href="http://eplanning.klatenkab.go.id">http://eplanning.klatenkab.go.id</a>. Fokus aplikasi ini dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang dalam tahapan penyusunannya mengakomodir dan mendokumentasikan antara lain Musrenbang Kecamatan, E-Reses yang menghasilkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, serta penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya dibahas dalam Forum Perangkat Daerah</p> <p>Sistem aplikasi integrasi perencanaan dan penganggaran sudah dibangun di tahun 2018, dengan berbasis web yang dapat diakses di alamat <a href="http://ebudgeting.klatenkab.go.id/">http://ebudgeting.klatenkab.go.id/</a></p> <p>Sistem ini digunakan dalam penyusunan dokumen prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan rincian belanja yang disusun menjadi PRA-RKA yang kemudian dijadikan dasar penyusunan Raperda APBD yang diintegrasikan dalam sistem SIMDA.</p>

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.134  
Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan  
Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan Tahun 2020

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021	Perbup No. 28 tahun 2020 Tgl 14 Juli 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021	Panduan dalam melaksanakan Pembangunan Daerah
2.	Menetapkan pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2019 tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 No. 30 Tahun 2020 Tgl 17 Juli 2020	instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi
3.	Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020	Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 No 32 Tahun 2020 Tgl 27 Juli 2020	Panduan dalam melaksanakan Pembangunan Daerah
4.	Penetapan desa Lokus Penanganan Stunting Tahun 2020 Di Kabupaten Klaten	SK Bupati Nomor 441/023/31 Tgl 20 Juli 2020 tentang Penetapan desa Lokus Penanganan Stunting Tahun 2020 Di Kabupaten Klaten	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
5	Menetapkan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2020	SE Bupati Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2020 No. 050/372/31 tgl 23 Juni 2020	Panduan dalam melaksanakan Pembangunan Daerah
6	Menetapkan Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas	SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran	untuk menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020	Sementara Tahun 2020 No. 050/403/31 Tgl 6 juli 2020	pembangunan Daerah
7	Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 2021	SK Bupati Nomor 31 Tahun 2020 Tgl 20 Juli 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 2021	instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi
8	Menetapkan Pedoman Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 2021	SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 2021 No. 050/501/31 Tgl 14 Agustus 2020	untuk menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan Daerah

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.135  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan penunjang Perencanaan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pada tahun 2019 pelaksanaan program pemerintahan fungsi penunjang dibidang perencanaan mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp. 7.305.936.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.257.297.396,- atau sebesar 85,6%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.4.493.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.788.016.844,- atau sebesar Rp. 84,3%. Realisasi anggaran baik belanja langsung (85,6%) maupun belanja tidak langsung (84,3%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan.	Pada tahun 2020 realisasi Belanja Langsung sebesar 93,47% dan realisasi belanja tidak langsung sebesar 91,54%. Realisasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019	Peningkatan realisasi anggaran

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD Pelaksana bidang Pengawasan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>		
2.	<p>Terdapat 12 indikator kinerja program dengan realisasi kinerja program kategori "sangat tinggi" sebanyak 11 indikator dan 1 indikator merupakan kategori sangat rendah. Indikator program dengan kategori rendah tersebut adalah presentase jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah (11,75)</p>	<p>Capaian kinerja Prosentase jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah pada tahun 2020 belum optimal dikarenakan dampak wabah pandemi Covid 19 masih dirasakan oleh perusahaan sehingga pelaksanaan CSR perusahaan mengalami refocusing, selain itu pelaksanaan rakor CSR juga terkendala. Tindak lanjut kedepan akan dilakukan rakor forum CSR secara rutin dan anjongsana ke perusahaan.</p>	<p>Peningkatan capaian kinerja</p>

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.



Tabel 3.136  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
di bidang Perencanaan tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung tugas dan fungsi perencanaan	Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN perencanaan
2.	Tidak tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan yang mudah diakses sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi kinerja	Membangun basis data terpadu untuk mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja
3.	Penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi	Perencanaan pembangunan daerah harus didukung base line data dan informasi pembangunan yang akurat dan tepat manfaat, Dukungan semua pihak untuk mewujudkan perencanaan yang tepat waktu dan manfaat, serta untuk menjaga konsistensi antar dokumen rencana sangat dibutuhkan sekaligus sebagai upaya kita mendukung terwujudnya Masyarakat Klaten yang maju mandiri dan berdaya saing.
4.	Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat	

#### 4. Keuangan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan daerah.

##### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.15.089.727.472 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.837.955.007 atau 85,08%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.074.421.673.061 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 820.468.402.936 atau sebesar 76,36%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Fungsi Penunjang di bidang Keuangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.137  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
di Bidang Keuangan Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	opini	WDP	WTP	133,3
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	%	7,44	6	80,64
	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	bulan	2	2	100
	Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir	bulan	5	5	100
	Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan Dilaksanakan	tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100
	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	%	53,5	56,1	105
	Prosentase penyerapan belanja daerah	%	84	79	94

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Keuangan Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori "Sangat tinggi" sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 5 Indikator dan 1 indikator merupakan kategori "tinggi".

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Keuangan pada tahun 2020, terdapat Prestasi yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Prestasi tersebut adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan keuangan tahun 2019.

#### **B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban BupatiKlaten Tahun Anggaran 2020.

#### **D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.138  
Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan  
Fungsi Penunjang di bidang Keuangan Tahun 2020

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
1	Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	Memberikan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi kepada Masyarakat Warga Klaten
2	Pemberian Pembebasan Sanksi Denda Administratif dan Relaksasi Pembayaran Pajak Terdampak wabah Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19) Di Kabupaten Klaten	Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 tahun 2020 tentang Pemberian Pembebasan Sanksi Denda Administratif dan Relaksasi Pembayaran Pajak Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten	Meringankan beban masyarakat Kabupaten Klaten dengan memberikan pembebasan Sanksi denda Administratif dan Relaksasi Pembayaran Pajak Terdampak wabah Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19) Di Kabupaten Klaten
3	Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak BPHTB	Peraturan Bupati Klaten Nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak BPHTB	Memberikan pengurangan dan keringanan dan penghapusan pajak BPHTB kepada masyarakat Klaten
4	Menetapkan Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa TA 2020	Keputusan Bupati Klaten No. 900/71 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020	Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Klaten

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
5	Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/71 Tahun 2020 Tentang Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa TA 2020	Keputusan Bupati Klaten No. 900/178 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten No.900/71 tahun 2020 tentang Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa TA 2020	Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Klaten
6	Menetapkan Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/71 Tahun 2020 Tentang Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa TA 2020	Keputusan Bupati Klaten No. 900/188 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Bupati Klaten No.900/71 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa TA 2020	Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Klaten
7	Menetapkan Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/71 Tahun 2020 Tentang Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa TA 2020	Keputusan Bupati Klaten No. 900/251 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/71 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa TA 2020	Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Klaten
8	Menetapkan perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020</li> <li>- Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020</li> </ul>	Mengatur Kebijakan Perubahan APBD Kab Klaten TA 2 Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa di

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020</li> <li>- Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketempat Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020</li> <li>- Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020</li> <li>- Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020</li> <li>- Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020</li> <li>- Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten TA 2020</li> <li>- Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Perbup Klaten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten TA 2020</li> <li>- Peraturan Bupati</li> </ul>	Kabupaten Klaten 020

No.	Kebijakan Strategis Bupati	Dasar Hukum	Tujuan / masalah Yang Diselesaikan
		Klaten Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perbup Klaten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten TA 2020 - Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Perbup Klaten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten TA 2020	

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.139  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan

No	Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pada tahun 2019 pelaksanaan program pemerintahan fungsi penunjang dibidang keuangan mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp. 37.017.718.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.327.751.133,- atau sebesar 87,3%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 866.204.855.550,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.834.044.908.574,- atau sebesar Rp. 96,3%. Realisasi anggaran baik belanja langsung (87,3%) maupun belanja tidak langsung (96,3%) masih dibawah dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang	Pada Tahun 2020 telah memperbaiki penyusunan Anggaran sesuai dengan kebutuhan, Alokasi belanja Langsung Rp.15.089.727.472 dengan realisasi Anggaran 12.837.955.007 atau sebesar 85%. Adapun Alokasi Belanja Tidak Langsung Rp.1.074.421.673.061 dengan Realisasi Anggaran Rp.820.468.402.936 atau sebesar 76%	Belanja Pada tahun 2020 kurang maksimal karena terdampak wabah Corona Virus

No	Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus pengabaian dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD Pelaksana bidang keuangan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.		
2.	Ada satu indikator program dengan kategori rendah yaitu presentase keanikan PAD (target 7,34% realisasi - 21%) capaian kinerja = (-286%)	Penyebab presentase kenaikan PAD rendah karena BOS menjadi pendapatan hibah bukan lagi PAD; Langkah yg di tempuh untuk menaikkan PAD dengan Melakukan inovasi-inovasi dalam penarikan pajak dan retribusi daerah ; Peningkatan kualitas/kapasitas SDM bidang pengelolaan pendapatan asli daerah ; Melakukan studi potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya di sektor pajak daerah dan retribusi daerah	Pada tahun 2020 PAD sudah mengalami peningkatan sebesar 5,86 %

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.140  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan tahun 2020

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Klaten belum optimal	- Secara bertahap sesuai kemampuan keuangan dan Sumber Daya Manusia yang ada, melakukan sertifikasi tanah milik Pemkab Klaten



No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		- Melakukan pemasangan patok/papan informasi pada tanah milik Pemda yang sudah maupun yang belum bersertifikat
2	Belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah	- Melakukan studi potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya di sektor pajak daerah dan retribusi daerah - Peningkatan kualitas/kapasitas SDM bidang pengelolaan pendapatan asli daerah - Melakukan inovasi-inovasi dalam penarikan pajak dan retribusi daerah.

## 5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah.

### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah. Urusan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4.361.912.959,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.740.379.317,- atau 85,75%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.321.090.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.994.772.570,00,- atau sebesar 90,17%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.141  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	83	78,06	94,08

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat	%	100	42.93	42.93
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	persentase layanan sumber daya aparatur	%	95	104.47	104.47
	Prosentase Pembinaan Disiplin ASN	%	100	100	100
	Prosentase informasi kepegawaian yang akurat	%	100	98	98
	Prosentase Pengembangan Aparatur	%	100	77.74	77.74

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Kepegawaian Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran Kategori "tinggi" sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 3 indikator, kategori "tinggi" sebanyak 1 indikator dan kategori "Sangat Rendah" sebanyak 1 indikator
- Adapun indikator kinerja dengan capaian "sangat rendah" adalah Prosentase ASN yang mengikuti diklat. Rendahnya capaian indikator program tersebut dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang mengakibatkan tidak adanya penyelenggaraan Diklat apapun oleh Pihak Ketiga (PPSDM Jateng dan Yogya), sampai saat ini masih menunggu aturan penyelenggaraan Diklat di masa Pandemi.

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan selama tahun 2020, terdapat beberapa inovasi / terobosan yang dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten. Inovasi / terobosan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.142  
Inovasi pelaksanaan program urusan  
Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan tahun 2020

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Aplikasi SAPA (SMS layanan Kepegawaian)	1. Mengetahui Status usulan Karpeg, Karis , Karsu , Ijin belajar, Ijin Penggunaan gelar; 2. Pemberitahuan Kepada PNS yang akan memasuki BUP dan pemberitahuan usulan pensiun sudah dalam proses; 3. Pemberitahuan yang sifatnya segera yang berkaitan dengan kegiatan BKPPD
2.	Aplikasi SIAP (sistem informasi Anjungan Layanan Kepegawaian)	1. Meningkatkan kualitas layanan kepegawaian ; 2. Memenuhi kebutuhan informasi standar tentang kepegawaian tanpa harus bertatap muka langsung dengan petugas (cek layanan kepegawaian spt : Karis, Karsu, ijin gelar , ijin belajar, informasi kepegawaian, Statistik kepegawaian, Cek data PNS, Cek surat
3.	Mutasi masuk PNS dengan Tes CAT (Computer Assisted Test)	Untuk menghilangkan praktek pungutan dalam mutasi masuk
4.	Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS	Pemberitahuan dini PNS yang akan Pensiun dan penyampaian SK pensiun langsung ke alamat PNS yang pensiun

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan**

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2020, tidak terdapat Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan Kepala Daerah.

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.143  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2019	Tindak Lanjut tahun 2020	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pada tahun 2019 urusan Kepegawaian mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp.17.717.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.698.932.082,- atau sebesar 88,6%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.3.913.355.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.371.904.632,- atau sebesar Rp. 86,2%. Realisasi anggaran baik belanja langsung (88,6%) maupun belanja tidak langsung (86,2%) masih dibawah dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus pengabaian dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2019. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD Pelaksana bidang kepegawaian sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	- BKPPD sudah melakukan perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan, karena adanya pandemi Covid yang belum berakhir ada kebijakan dari pusat untuk menunda Pengadaan CASN Tahun 2020 - Pada tahun 2020, realisasi belanja Langsung sebesar 85,75% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 90,17%. Realisasi belanja langsung belum optimal dikarenakan adanya pandemi Covid-19, beberapa kegiatan tidak dapat berjalan optimal	Menekan angka silpa anggaran

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.144  
Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan tahun 2020

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Pemetaan PNS belum dapat dilakukan sehingga kebutuhan (kekurangan/ kelebihan) PNS belum dapat diketahui secara pasti	Merencanakan pemetaan PNS di semua SKPD pada tahun 2020
2.	Penanganan pelanggaran disiplin baru menyentuh pada pelanggaran disiplin yang dilaporkan ke BKPPD sedangkan pelanggaran disiplin yang sifatnya ringan seperti pelanggaran jam kerja, pakaian dinas dan lain-lain belum disentuh	Meningkatkan cakupan pembinaan disiplin
3.	Masih perlu evaluasi terkait sistem absensi elektronik	Mengalokasikan anggaran untuk melengkapi aplikasi pendukung absensi elektronik
4.	Masih banyak Pejabat administrator dan pengawas yang belum memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural dikarenakan keterbatasan anggaran	Mengusulkan alokasi anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
5.	Pengembangan kompetensi PNS berupa pelatihan selama 20 JP per tahun per PNS sesuai amanat PP 11 tahun 2017 belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran	Mengusulkan alokasi anggaran untuk kegiatan manajemen pendidikan dan pelatihan bagi PNS daerah

## 6. Penelitian dan Pengembangan.

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

### A. Capaian Kinerja program

Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Urusan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 500.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 447.791.185 atau 89,56%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.

Beberapa Indikator Kinerja Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.145  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
di Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	86,36	85	98,8
Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)
Penelitian dan pengembangan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova	peserta	30	5	17
	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	jenis inovasi	19	34	178

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Penelitian dan Pengembangan Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja sasaran Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 1 Indikator
- Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 1 Indikator dan Kategori "Sangat Rendah" sebanyak 1 indikator.
- Capaian Kinerja "sangat rendah" adalah Jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova. Capaian "sangat rendah" dikarenakan Lomba Krenova Tingkat Kabupaten dan tingkat Subosukawonosraten di tahun 2020 tidak dilaksanakan karena adanya penyebaran Covid-19, sehingga anggaran lomba krenova untuk tahun 2020 di hapus pada perubahan kelima, sedangkan 5 peserta yang terlaksana adalah pengiriman peserta ke Lomba Krenova tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan Program urusan Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2020, terdapat prestasi / Penghargaan sebagai berikut :

Tabel 3.146  
Prestasi/Penghargaan pelaksanaan program  
urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2020

NAMA PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
Pemenang Utama Lomba Krenova Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	Prasetyo Adi Nugroho	Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Penghargaan Peserta Penguatan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020	Bappeda Kabupaten Klaten	Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif Tingkat Nasional Tahun 2020	Bappeda Kabupaten Klaten	Kementerian Dalam Negeri

Selain prestasi dan penghargaan di atas, terdapat beberapa inovasi yang dikembangkan dalam pelaksanaan program Urusan Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2020. Inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.147  
Inovasi pelaksanaan program  
urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2020

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Roadmap Pengembangan Usaha RojoLele Srinar, Srinuk dan Sriten (Penguatan Lumbung Padi Kabupaten)	Sebagai bentuk upaya menindaklanjuti dimiliki aset khas Klaten yaitu Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar untuk perlu adanya pembuatan penyusunan Roadmap pengembangan usaha padi rojolele sebagai upaya langkah-langkah yang efektif berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Klaten.  Pengembangan usaha padi rojolele merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan Klaten sebagai Lumbung Padi Nasional dengan kualitas dan kuantitas produksi pangan yang meningkat pesat yang mana juga menjadi prioritas Smart City Klaten. Upaya dalam penguatan lumbung padi di Kabupaten Klaten juga bertujuan untuk mewujudkan swasembada beras secara berkelanjutan.
2.	Pelayanan izin Penelitian, Magang (PKL) dan KKN dengan Sistem Online	Pelayanan izin Penelitian, Magang (Praktek Kerja Lapangan) dan Kuliah Kerja Nyata dengan Sistem Online. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Pemohon izin dapat mengajukan izinnya dengan mengirim persyaratan ke email Bappeda. Kemudian pemohon izin akan mendapatkan konfirmasi dari Bappeda. Pertama apabila persyaratan sudah benar dan lengkap maka akan dilakukan proses pembuatan surat izin dan akan mengirimkan balik surat izin ke alamat email pemohon. Kedua, apabila persyaratannya ada yang salah atau masih kurang maka pemohon harus melengkapinya atau membenarkannya.

#### B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2020.



- C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**  
 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban BupatiKlaten Tahun Anggaran 2020.
- D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**  
 Pada tahun 2020 tidak terdapat Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan yang ditetapkan Kepala Daerah.
- E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**  
 Tidak terdapat rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap LKPJ Tahun 2019 dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan
- F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi permasalahan**  
 Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut

Tabel 3.148  
 Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan  
 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
 di bidang Penelitian dan Pengembangan tahun 2020

NO.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk inovasi serta berkembangnya kerjasama inovasi Daerah	Peningkatan akses dan perluasan pasar produk inovasi Daerah dengan membuka kerjasama dengan pihak ketiga
2.	Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan produk inovasi Daerah	Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan produk inovasi Daerah

**BAB IV**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

Sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa.

**4.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada kementerian/lembaga yang memberikan penugasan. Kementerian/Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 adalah:

- 1) Kementerian Ketenagakerjaan  
Tugas Pembantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten
- 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten

Program dan Kegiatan dalam Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam bentuk Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dengan Kegiatan Wirausaha melalui Tenaga Kerja Mandiri, Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Kegiatan Administrasi Kegiatan Tugas Pembantuan. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp.645.890.000,- dan terealisasi sebesar Rp.616.532.000,- sehingga realisasi anggaran tercapai sebesar 95,45% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- 2) Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk 2 (dua) program dan meliputi 9 (sembilan) kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida serta Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian. Adapun alokasi anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp1.708.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.648.535.000,- sehingga persentase capaian anggaran sebesar 96,48 % dan capaian serapan fisik sebesar 100%
- b) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal, Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan, Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Adapun alokasi anggaran Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp4.136.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.070.682.845,- sehingga persentase capaian anggaran sebesar 98,42 % dan capaian serapan fisik sebesar 100%

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas pembantuan Pusat yang diterima Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten selama tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel 4.1 dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas pembantuan Provinsi yang diterima Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten selama tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel 4.2.

**Tabel 4.1**  
**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat**  
**yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020**

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kementerian Ketenagakerjaan	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementrian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020	<b>Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja</b>		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				95,85		100
			<b>- Kegiatan Wirausaha melalui Tenaga Kerja Mandiri</b>								
			- Tenaga Kerja Mandiri I	Desa Tegalrejo Kec. Bayat		Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	60.000.000	59.780.000	99,63	Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	100
			- Tenaga Kerja Mandiri II	Desa Ngerangan Kec. Bayat		Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	60.000.000	59.764.000	99,61	Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	100

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Tenaga Kerja Mandiri III	Desa Sidowayah Kec. Polanharjo		Pelatihan Kerajinan tanah liat 20 orang	60.000.000	59.800.000	99,67	Pelatihan Kerajinan tanah liat 20 orang	100
			- Tenaga Kerja Mandiri IV	Bapas Kelas II Klaten		Pelatihan Las 20 orang	60.000.000	59.650.000	99,42	Pelatihan Las 20 orang	100
			- Tenaga Kerja Mandiri V	Desa Kiringan		Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	60.000.000	59.500.000	99,17	Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	100
			- Tenaga Kerja Mandiri VI	Desa Tulung		Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	60.000.000	59.700.000	99,50	Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	100
			- Tenaga Kerja Mandiri VII	Desa Padas		Pelatihan Pengolahan Kripik kulit ikan 20 orang	60.000.000	59.710.000	99,52	Pelatihan Pengolahan Kripik kulit ikan 20 orang	100
			- Tenaga Kerja Mandiri VIII	Desa Pondok		Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	60.000.000	59.690.000	99,48	Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	100

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>- Kegiatan Padat Karya Infrastruktur</b>								
			- Padat Karya Infrastruktur I	Desa Sudimoro		Pembuatan saluran air peserta 20 orang	50.500.000	50.388.000	99,78	Pembuatan saluran air peserta 20 orang	100
			- Padat Karya Infrastruktur II	Desa Ngerangan		Pembuatan rabat beton peserta 20 orang	50.500.000	50.260.000	99,52	Pembuatan rabat beton peserta 20 orang	100
			<b>- Administrasi Kegiatan Tugas Pembantuan</b>				64.890.000	38.290.000	59,01		

**Tabel 4.2**  
**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi**  
**yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020**

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab.	Target Capaian Kegiatan	SKPD pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Bidang Pertanian	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 911/050/2020 Ttg Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020	<p><b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian</b></p> <p><b>Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian</b></p> <p>Keluaran (output): Jaringan irigasi tersier, Irigasi perpompaan</p> <p>Rincian kegiatan:</p>	Klaten	Jaringan irigasi tersier 500 Ha, Irigasi perpompaan 3 unit, Layanan dukungan manajemen (12 bulan); Jumlah lokasi dalam rangka penyusunan e-RDCK mendukung penerapan Kartu Tani (26 kec), Jumlah lokasi pelaksanaan bimtek, monitoring dan evaluasi kegiatan	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.708.640.000	1.648.535.000	96,48	Jaringan irigasi tersier 500 Ha, Irigasi perpompaan 3 unit, Layanan dukungan manajemen (12 bulan); Jumlah lokasi dalam rangka penyusunan e-RDCK mendukung penerapan Kartu Tani (26 kec), Jumlah lokasi pelaksanaan bimtek, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pupuk	100

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab.	Target Capaian Kegiatan	SKPD pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier</li> <li>- Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat</li> <li><b>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian</b></li> <li>Keluaran (output): Layanan Dukungan Manajemen Satker</li> <li>Rincian kegiatan: Layanan manajemen dan perkantoran</li> <li><b>Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida</b></li> </ul>		lingkup pupuk dan pestisida (26 kec), Layanan dan pembinaan kegiatan pembiayaan pertanian (12 bulan)					dan pestisida (26 kec), Layanan dan pembinaan kegiatan pembiayaan pertanian (12 bulan)	



No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab.	Target Capaian Kegiatan	SKPD pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Keluaran (output): - e-RDCK Mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Penerapan Kartu Tani, - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup Pupuk dan Pestisida Rincian kegiatan: - Penyusunan dan penginputan e-RDCK mendukung kartu tani - Pelaksanaan KP3 mendukung pengawasan pupuk dan pestisida <b>Kegiatan Fasilitas Pembiayaan</b>								

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab.	Target Capaian Kegiatan	SKPD pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<p><b>Pertanian</b></p> <p>Keluaran (output): Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Pembiayaan Pertanian</p> <p>Rincian kegiatan:</p> <p>- Persiapan dan Pelaksanaan bimtek lingkup pembiayaan pertanian</p> <p>- Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pembiayaan pertanian</p>								
2.	Bidang Pertanian	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.	<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas</b>	Klaten	Identifikasi CPCL (26 kec), monev LTT (26 kec),	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan	4.136.000.000	4.070.682.845	98,42	Identifikasi CPCL (26 kec), monev LTT (26 kec), penyaluran	100

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab.	Target Capaian Kegiatan	SKPD pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		911/050/2020 Ttg Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020	<p><b>dan Mutu Hasil Tanaman Pangan</b></p> <p><b>Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi</b></p> <p>Rincian kegiatan:</p> <p>- Identifikasi CPCL dan operasional pelaksanaan</p> <p><b>Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia</b></p> <p>Rincian kegiatan:</p> <p>- Monitoring dan Evaluasi LTT</p> <p><b>Kegiatan Pengelolaan Sistem</b></p>		penyaluran bantuan benih Padi Inbrida (125000kg), penyaluran Bantuan Benih Jagung Hibrida Umum 3 (5000 ha), penyaluran perontok/pemipil (Power Thresher Multiguna Mobile 4 unit), penyaluran sarana UPH kedelai (UPH kedelai 1 unit, bangunan UPH kedelai 1 unit), Layanan dan pembinaan kegiatan (12	dan Perikanan				bantuan benih Padi Inbrida (125000kg), penyaluran Bantuan Benih Jagung Hibrida Umum 3 (5000 ha), penyaluran perontok/pemipil (Power Thresher Multiguna Mobile 4 unit), penyaluran sarana UPH kedelai (UPH kedelai 1 unit, bangunan UPH kedelai 1 unit), Layanan dan pembinaan kegiatan (12 bulan)	

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab.	Target Capaian Kegiatan	SKPD pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<p><b>Penyediaan Benih Tanaman Pangan</b></p> <p>Keluaran (output): Bantuan Benih Padi Inbrida, Bantuan Benih Jagung Hibrida Umum 3</p> <p>Rincian kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Penyaluran Benih Padi Bersertifikat (Benih padi inbrida)</li> <li>- Identifikasi CPCL dan Operasional Pelaksanaan</li> <li>- Melaksanakan Penyaluran Benih Jagung Bersertifikat (Benih Jagung Hibrida Umum 3)</li> </ul>		bulan)						

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab.	Target Capaian Kegiatan	SKPD pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<p><b>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan</b></p> <p>Keluaran (output): Layanan Dukungan Manajemen Satker</p> <p>Rincian kegiatan: Layanan manajemen dan perkantoran</p> <p><b>Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan</b></p> <p>Keluaran (output): Power Thresher Multiguna Mobile, sarana UPH kedelai (UPH</p>								

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab.	Target Capaian Kegiatan	SKPD pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kedelai, bangunan UPH kedelai)								
			Rincian kegiatan:								
			- Melaksanakan Penyaluran Perontok/Pemipill								
			- Penyaluran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan								

#### **4.2 Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.**

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan Kementerian Ketenagakerjaan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terdapat permasalahan dan kendala yang cukup signifikan baik dalam aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Tahun 2020 berjalan cukup baik walaupun muncul beberapa permasalahan dan kendala. Permasalahan yang muncul adalah kondisi pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan tidak terserap maksimal, terutama perjalanan dinas luar daerah.

Tindaklanjut atas kendala dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten yaitu dilakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sehingga ada kesesuaian dengan kondisi di lapangan.

## BAB V

### PENUTUP

Capaian Program dan Kegiatan serta Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua *stakeholders* pembangunan mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing, yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2020 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa sejak awal tahun 2020 hingga kini, seluruh dunia termasuk Indonesia terjadi penyebaran pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Dampak yang paling dirasakan yaitu perlambatan kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri, perdagangan dan pariwisata serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Mendasarkan pada hal tersebut, pengalokasian anggaran pada belanja pada masing-masing urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan masing-masing Perangkat Daerah cenderung mengalami penurunan karena dampak wabah pandemi Covid-19 yang kemudian juga berakibat terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kebutuhan belanja daerah yang meningkat dalam mengatasi penanganan pandemi Covid-19, penggunaan belanja daerah diarahkan secara efektif sebagai upaya akselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten termasuk jajaran pemerintahan Desa dan masyarakat Kabupaten Klaten secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan program pembangunan daerah terutama dalam penanganan Pandemi covid-19. Penghargaan setinggi-tingginya kami ucapkan kepada segenap tenaga kesehatan, relawan dan setiap pihak yang berjuang di garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. Kita semua berharap bahwa Pandemi ini segera berakhir sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten dapat berjalan lancar sehingga Tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dapat tercapai.



Sebagai penutup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Tahun 2020 ini, Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Klaten sehingga mampu **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**. Amin ya robbal alamin.

Klaten, Februari 2021

**BUPATI KLATEN**

**Hj. SRI MULYANI**

**DAFTAR ISI**  
**BUKU LAMPIRAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KLATEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

	<b>Halaman</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	i
<b>Lampiran Pelaksanaan Program Dan Kegiatan</b>	
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
1. Urusan Pendidikan.....	1
2. Urusan Kesehatan.....	10
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	19
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	28
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	31
6. Urusan Sosial.....	37
<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>	
7. Urusan Tenaga Kerja .....	44
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	46
9. Urusan Pangan .....	48
10. Urusan Lingkungan Hidup .....	49
11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil . .....	54
12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	57
13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	61
14. Urusan perhubungan .....	64
15. Urusan Komunikasi dan Informatika .....	67
16. Urusan Koperasi dan UKM .....	70
17. Urusan Penanaman Modal.....	71
18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....	73

19. Urusan Statistik .....	75
20. Urusan Persandian.....	76
21. Urusan Kebudayaan.....	77
22. Urusan Perpustakaan.....	78
23. Urusan Kearsipan .....	79
<b>Urusan Pilihan</b>	
24. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	81
25. Urusan Pariwisata.....	82
26. Urusan Pertanian .....	85
27. Urusan ESDM .....	91
28. Urusan Perdagangan.....	92
29. Urusan Perindustrian .....	96
30. Urusan Transmigrasi.....	98
<b>Urusan Penunjang</b>	
31. Urusan Pengawasan .....	99
32. Urusan Perencanaan .....	102
33. Urusan Keuangan .....	107
34. Urusan Kepegawaian.....	112
35. Urusan Litbang .....	116
36. Urusan Administrasi Pemerintahan .....	117
<b>Lampiran Tingkat Kesesuaian Indikator Kegiatan Terhadap Indikator Program.....</b>	<b>246</b>

**URUSAN : PENDIDIKAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS PENDIDIKAN</b>											
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis rekening terbayar	5	5	100	359.970.000	184.362.502	51	100		
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah THL Adminstrasi Keuangan	63	63	100	821.600.000	817.095.760	99	100		
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL kebersihan kantor	3	3	100	68.500.000	65.955.120	96	100		
4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK tersedia	44	44	100	40.000.000	39.999.550	100	100		
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	8	8	100	15.000.000	14.998.800	100	100		
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan	11	11	100	10.000.000	9.486.000	95	100		
7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tersedia	1140	1140	100	28.500.000	28.477.500	100	100		
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	200	200	100	42.188.000	42.008.835	100	100		
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	160	160	100	56.000.000	55.990.000	100	100		
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL pengamanan kantor	4	4	100	58.500.000	56.676.544	97	100		
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
11	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan kantor terbeli	2	2	100	573.750.000	554.249.900	97	100		
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	32	32	100	21.000.000	20.018.500	95	100		
13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	25	25	100	7.500.000	7.450.000	99	100		
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
14	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	Jumlah ASN kapasitas pengelola keuangan	108	108	100	30.000.000	29.874.500	100	100		
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>										
15	Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah	Jumlah pengurus barang Dinas, Korwil dan Sekolah	797	797	100	200.000.000	191.228.000	96	100		
<b>V</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>										
16	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta mengikuti pelatihan pengembangan kurikulum PAUD	100	100	100	80.000.000	79.197.450	99	100		
17	Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini	Jumlah anak yang mengikuti festival ajang kreatifitas paud/gebyar paud	0	0		15.000.000	14.564.850	97	100	Kegiatan tidak dilanjutkan karena pagu anggaran direfocusing	
18	Fasilitasi kegiatan PAUD	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi PAUD	0	0		5.000.000	3.345.000	67	100	Kegiatan tidak dilanjutkan karena pagu anggaran direfocusing	
19	Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD	Jumlah lembaga penerima BOP PAUD	2	2	100	58.800.000	58.620.590	100	100		
20	Fasilitasi penyampaian BOP PAUD	Jumlah lembaga penerima BOP PAUD	1150	1150	100	70.000.000	64.675.000	92	100		
21	Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah toilet direhab	2	2	100	42.592.000	42.553.750	100	100		
22	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah pengadaan APE	1	1	100	20.000.000	5.322.750	27	50	Jenis barang yang di DPA tidak semuanya sesuai dengan Juknis DAK 2020	
23	Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah ruang kelas direhab	3	3	100	229.101.000	229.095.750	100	100		
<b>VI</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>										

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
24	Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pagar)	Jumlah lingkungan sekolah yang direhab	6	6	100	900.000.000	647.685.200	72	100		
25	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan terbangun	0	0		15.000.000	12.582.350	84	100	Kegiatan baru pada proses perencanaan (Gambar dan RAB) krn pagu untuk fisiknya direfocusing	
26	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sarana sanitasi terbangun	0	0		16.899.800	16.406.900	97	100	Kegiatan baru pada proses perencanaan (Gambar dan RAB) krn pagu untuk fisiknya direfocusing	
27	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair sekolah	10	10	100	700.000.000	689.583.750	99	100		
28	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah rehab ruang kelas	0	0		20.000.000	18.082.925	90	100	Kegiatan baru pada proses perencanaan (Gambar dan RAB) krn pagu untuk fisiknya direfocusing	
29	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Jumlah ruang lab yang direhab	0	0		20.950.000	20.326.200	97	100	Kegiatan baru pada proses perencanaan (Gambar dan RAB) krn pagu untuk fisiknya direfocusing	
30	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang direhab	7	7	100	455.000.000	380.961.400	84	100		
31	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Jumlah rehab sarana air bersih	0	0		17.950.000	17.401.500	97	100	Kegiatan baru pada proses perencanaan (Gambar dan RAB) krn pagu untuk fisiknya direfocusing	
32	Pelatihan Penyusunan kurikulum	jumlah guru smp yang mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum	440	440	100	155.000.000	140.750.700	91	100		
33	Penggabungan SD Negeri	Jumlah Penggabungan SDN	20	20	100	25.000.000	24.775.825	99	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
34	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP	Jumlah guru mengikuti bintek MBS	110	110	100	105.000.000	94.656.000	90	100		
35	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD	Jumlah jenis lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD	2	2	100	75.000.000	69.103.000	92	100		
36	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP	jumlah peserta pembinaan minat,bakat,dan kreativitas siswa smp	1000	1000	100	750.000.000	114.952.000	15	40	Kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional ditiadakan karena Covid-19	
37	Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD	Jumlah kegiatan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD	1	1	100	40.000.000	38.097.550	95	100		
38	Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP	jumlah peserta pendamping program bantuan siswa miskin (BSM) tingkat smp	110	110	100	25.000.000	11.044.900	44	100		
39	Pembangunan Sanitasi/MCK SD	Jumlah sarana sanitasi/MCK terbangun	0	0		60.000.000	54.789.500	91	100	Kegiatan baru pada proses perencanaan (Gambar dan RAB) krn pagu untuk fisiknya direfocusing	
40	Penyelenggaraan Ujian SD	Jumlah siswa calon peserta Ujian Sekolah	18700	18700	100	290.000.000	289.139.034	100	100		
41	Penyelenggaraan Ujian SMP	jumlah peserta penyelenggaraan ujian smp	1	1	100	50.000.000	36.599.100	73	100		
42	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan SD	3	0	0	157.500.000	-	-	-		
43	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah ruang pusat belajar inklusif terbangun	2	2	100	199.500.000	199.275.750	100	100		
44	Operasional Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan	Jumlah korwil pendidikan kecamatan	26	26	100	322.452.000	301.204.000	93	100		
45	Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan SD	Jumlah SD di wilayah perbatasan	50	50	100	1.000.000.000	841.563.900	84	100		
46	Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan SMP	Jumlah SMP di wilayah perbatasan	9	9	100	2.000.000.000	725.831.700	36	40	Pengadaan seragam utk siswa baru SMP gagal lelang	
47	Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah ruang kelas direhab	29	29	100	1.884.550.500	1.863.574.775	99	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
48	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah ruang perpustakaan direhab	6	6	100	385.875.000	384.888.450	100	100		
49	Rehabilitasi Ruang Guru (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah ruang guru terehab	1	1	100	100.485.000	99.457.900	99	100		
50	Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah jamban terehab	3	3	100	29.925.000	29.838.400	100	100		
51	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah ruang kelas baru terbangun	2	2	100	379.050.000	377.995.650	100	100		
52	Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah jamban terbangun	7	7	100	624.750.000	618.991.125	99	100		
53	Pembangunan Ruang Perpustakaan (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah ruang perpustakaan dibangun	6	4	67	945.000.000	641.794.750	68	100		
54	Pembangunan Ruang UKS (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah ruang UKS terbangun	1	1	100	73.500.000	73.497.500	100	100		
55	Pengadaan Peralatan PJOK (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah pengadaan peralatan PJOK	9	9	100	226.800.000	200.733.600	89	100		
56	Pengadaan Peralatan Seni Budaya (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah pengadaan peralatan Seni budaya	4	4	100	176.400.000	170.995.325	97	100		
57	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah pengadaan Alat Kesenian Tradisional	10	10	100	945.000.000	740.040.525	78	100		
58	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah pengadaan Alat IPA	9	9	100	141.750.000	135.605.200	96	100		
59	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah pengadaan peralatan IPS	9	9	100	94.500.000	90.352.325	96	100		
60	Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah pengadaan alat B. Indonesia	7	7	100	73.500.000	69.895.950	95	100		
61	Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah pengadaan peralatan Matematika	8	8	100	42.000.000	39.771.500	95	100		
62	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah pengadaan peralatan TIK SD	7	7	100	1.601.284.500	1.586.366.225	99	100		
63	Pengadaan Media Pendidikan (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah pengadaan media pendidikan	2	2	100	126.000.000	124.203.875	99	100		
64	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah ruang kelas direhab	11	11	100	902.000.000	898.560.000	100	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
65	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah pengadaan peralatan Lab. komputer	4	4	100	1.150.960.000	1.142.209.360	99	100		
66	Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD Negeri (Bankeu Provinsi)	Jumlah pengadaan Alat TIK SDN	46	0	0	1.387.500.000	-	-	-	Pemenang lelang/penyedia tidak menandatangani kontrak sampai dengan batas waktu utk pelaksanaan pengadaan	
67	Rehab Ruang Kelas Rusak SD Negeri (Bankeu Provinsi)	Jumlah ruang kelas direhab	9	9	100	407.500.000	384.320.100	94	100		
<b>VII</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>										
68	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Jumlah LKP dan PKBM yang difasilitasi	35	35	100	10.000.000	10.000.000	100	100		
69	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan update dapodik paud-dikmas	900	900	100	30.000.000	29.839.275	99	100		
70	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Jumlah instruktur/tutor yang mengikuti pelatihan pengembangan kurikulum kursus dan kesetaraan	50	50	100	41.000.000	40.626.500	99	100		
71	Penyelenggaraan UNPP Paket A,B,C	Jumlah siswa mengikuti ujian Paket A, B, C	0	0	#DIV/0!	5.000.000	3.522.750	70	100	Kegiatan tidak dilanjutkan karena pagu anggaran direfocusing	
72	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah TBM dibangun	1	1	100	286.243.000	286.071.250	100	100		
73	Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah pengadaan peralatan TIK SKB	1	1	100	300.000.000	256.523.575	86	100		
<b>VIII</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>										
74	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah Peserta Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	5700	570	10	94.080.000	92.966.968	99	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
75	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	Jumlah peserta penilaian dan penetapan angka kredit	4000	4000	100	30.000.000	29.638.700	99	100		
76	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas	Jumlah seleksi calon kepala sekolah dan pengawas	100	100	100	435.000.000	425.962.600	98	100		
77	Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru	Jumlah guru mengikuti lomba	300	300	100	86.570.000	86.282.000	100	100		
78	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas	0	0	#DIV/0!	2.000.000	1.350.000	68	100	Kegiatan tidak dilanjutkan karena pagu anggaran direfocusing	
79	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru penerima bantuan kesejahteraan	4387	4387	100	32.146.000.000	31.888.240.000	99	100		
<b>X</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>										
80	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah orang mengikuti rakor evaluasi dan pelaporan	120	120	100	31.259.176	30.475.350	97	100		
81	Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah	Jumlah peserta bintek UKS	280	280	100	70.000.000	64.622.200	92	100		
82	Penyusunan Data Pokok Pendidikan	Jumlah admin dapodik sekolah	916	916	100	100.000.000	96.237.450	96	100		
83	Penerimaan Siswa Baru SMP Online	Jumlah SMP Negeri yang menerapkan PPDB online	65	65	100	329.992.000	318.781.500	97	100		
84	Operasional BOS Tingkat SD	Jumlah Peserta Operasional BOS Tingkat SD	100	100	100	973.000.000	963.865.350	99	100		
85	Operasional BOS Tingkat SMP	jumlah peserta operasional bos tingkat smp	110	110	100	116.000.000	100.693.850	87	100		
<b>TK NEGERI</b>											
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis rekening terbayar	2	2	100	5.000.000	3.821.434	76	100		
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor	8	8	100	1.914.413	1.892.800	99	100		
3	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK tersedia	23	23	100	5.000.000	4.937.200	99	100		
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	4	4	100	5.000.000	5.000.000	100	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan	5	5	100	1.500.000	1.490.500	99	100		

**SKB CAWAS**

<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa	12	12	100	18.000.000	18.000.000	100	100		
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor	3	3	100	43.262.630	43.261.360	100	100		
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis ATK tersedia	12	12	100	5.700.000	5.700.000	100	100		
4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	6	6	100	8.025.000	8.000.000	100	100		
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan	2	2	100	2.575.000	2.575.000	100	100		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan kantor terbeli	3	3	100	2.186.250	2.185.800	100	100		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket pengadaan peralatan rumah tangga terbeli	8	8	100	3.996.800	3.990.000	100	100		
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tersedia	144	144	100	2.901.000	2.873.000	99	100		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	40	40	100	250.000	250.000	100	100		
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL pengamanan kantor	24	24	100	26.274.240	26.274.240	100	100		
									100		
<b>II</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>										
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik mengikuti pelatihan	25	25	100	1.633.500	1.631.000	100	100		
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penyelenggaraan pendidikan usia dini	25	25	100	11.012.000	11.012.000	100	100		
									100		
<b>III</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>										
	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah pendidikan kecakapan	10	10	100	8.983.600	8.923.100	99	100		
	Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP	Jumlah kelompok pendidikan paket B	3	3	100	4.738.000	4.737.500	100	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU	Jumlah kelompok pendidikan paket C	3	3	100	12.653.852	12.652.700	100	100		
	Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan	Jumlah kegiatan pembelajaran keliling	1	1	100	1.535.000	1.535.000	100	100		
<b>SD NEGERI</b>											
<b>I</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>										
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah SD Negeri penerima BOS	660	660	100	81.798.446.352	76.712.461.181	94	100		
<b>I</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>										
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah SMP Negeri penerima BOS	65	65	100	47.219.414.263	42.829.651.091	91	100		
	<b>JUMLAH</b>					<b>186.227.728.876</b>	<b>171.471.706.594</b>	<b>92</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

**URUSAN : KESEHATAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS KESEHATAN</b>											
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran</b>									
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat	5000	10491	209,82	8.510.000	8.510.000	100,00	100		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan kebutuhan kantor	4	4	100,00	410.000.000	327.997.850	80,00	96		
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga kontrak pembantu TU	71	71	100,00	972.875.000	951.804.083	97,83	100		
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kontrak kebersihan	37	37	100,00	515.000.000	496.073.846	96,33	100		
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	2	3	150,00	37.500.000	37.485.000	99,96	100		
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	15	15	100,00	63.780.625	63.779.800	100,00	100		
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3	3	100,00	70.000.000	69.991.000	99,99	100		
8	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik (kabel, lampu dan kelengkapan kelistrikan lain)	10	10	100,00	12.940.345	12.934.000	99,95	100		
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pertemuan/rapat selama satu tahun	600	1526	254,33	110.000.000	103.968.990	94,52	99		
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	100	96	96,00	115.000.000	113.170.250	98,41	100		
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	70	313	447,14	120.000.000	119.981.500	99,98	100		
12	Penyedia jasa pengamanan kantor	Jumlah tenaga kontrak penjaga malam terbayar upah/gaji	47	47	100,00	649.425.000	628.395.335	96,76	100		
13	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Jumlah tenaga pengemudi	8	8	100,00	112.000.000	109.156.480	97,46	100		
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>									
1	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung PSC 119 yang terbangun	1	0	0,00	57.950.500	55.652.000	96,03	100		
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis pengadaan alat kantor	15	1	6,67	9.500.000	9.500.000	100,00	100	Refocussing anggaran	dianggarkan tahun 2022
3	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubelair yang tersedia	0	0		0	0		0	Refocussing anggaran	dianggarkan tahun 2022

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	3	3	100,00	200.000.000	198.179.000	99,09	100		
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	47	47	100,00	100.000.000	93.483.825	93,48	97		
6	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah Lingkungan Kantor tertata	0	0		0	0		0	Refocussing anggaran	dianggarkan tahun 2022
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase kehadiran aparatur</b>									
1	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis kualitas SDM	100	200	200,00	12.150.000	11.850.000	97,53	100		
<b>4</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>% obat generik berlogo dalam persediaan obat</b>									
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Bid. Kesehatan)	Jumlah jenis obat dan BMHP	2	2	100,00	3.167.817.000	2.954.751.110	93,27	100		
2	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Jenis obat dan perbekalan kesehatan	100	100	100,00	213.909.000	211.157.078	98,71	100		
3	Pengelola Manajemen Obat	Jumlah manajemen pengelolaan obat	100	100	100,00	32.000.000	32.000.000	100,00	100		
4	Distribusi Obat dan E Logistik (DAK Non Fisik)	Jumlah prosentase puskesmas yang mendapat distribusi obat	35	35	100,00	169.529.000	169.458.500	99,96	100		
5	Pengelolaan Manajemen Obat (DBHCHT)	Jumlah Puskesmas terlaksana pengelolaan obat yang paripurna	34	34	100,00	107.657.000	87.956.400	81,70	100		
<b>5</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Cakupan kunjungan ibu hamil K4</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100,76</b>						
1	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Pendampingan Polindes	Jumlah kasus kematian ibu dan bayi yang dilakukan pengkajian dan pembahasan dan kegiatan penurunan AKI dan AKB	150	153	102,00	200.000.000	176.676.900	88,34	97		
2	Bintek Balai Pengobatan / RB dan Lab. Swasta	Jumlah klinik yang terbina	40	47	117,50	5.000.000	4.999.800	100,00	100		
3	Penunjang Operasional PPPK	Jumlah kegiatan PPPK	50	8	16,00	6.100.900	6.090.900	99,84	100		
4	Penunjang Operasional Pelayanan Ijin di Bidang Kesehatan	Jumlah perijinan dan aplikasi perijinan	100	963	963,00	67.925.000	67.674.500	99,63	100		
5	Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas terdampingi setelah akreditasi	16	15	93,75	55.900.000	55.888.000	99,98	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6	Pemilihan Paramedis, Medis Teladan dan Puskesmas Berprestasi	Jumlah kategori tenaga kesehatan terseleksi	9	0	0,00	20.000.000	16.363.700	81,82	85		
7	Pembuatan Buku Profil Kesehatan	Jumlah buku profil Dinas Kesehatan	80	20	25,00	15.000.000	14.596.700	97,31	100		
8	Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan	Jumlah jenis reagensia laboratorium kesehatan dan alat laboratorium	3375	2662	78,87	589.011.500	567.277.052	96,31	100		
9	Peningkatan Manajemen Puskesmas	Jumlah peningkatan manajemen Puskesmas	34	34	100,00	430.458.750	397.245.000	92,28	97		
10	Peningkatan Kinerja Klinik	Jumlah Puskesmas yang meningkat kinerjanya	34	0	0,00	18.550.000	18.548.700	99,99	100		
11	Pembuatan Buku KIA	Jumlah Pembuatan Buku KIA	0	0		0	0	#DIV/0!	0	Refocussing anggaran	dianggarkan tahun 2022
12	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Jumlah kegiatan promotif preventif sebagai upaya kesehatan sekunder	531	725	136,53	14.778.173.679	14.177.941.029	95,94	96		
13	Peningkatan Layanan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Jumlah ibu hamil miskin non PBI	400	327	81,75	2.358.944.000	1.977.244.469	83,82	100		
14	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah puskesmas yang terakreditasi ulang	16	0	0,00	1.056.640.000	175.113.000	16,57	60	Akreditasi tidak dilaksanakan di masa pandemi	dianggarkan tahun 2022
15	Peningkatan Manajemen Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)		47	47	100,00	93.341.000	74.741.300	80,07	100		
16	Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting (DAK Non Fisik)	Jumlah kegiatan penanggulangan stunting yang komprehensif, terpadu dan konvergen (20 kegiatan)	9	6	66,67	750.000.000	502.353.200	66,98	80		
17	Sistim Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (DBHCHT)	Jumlah masyarakat yang tidak mampu menjangkau pelayanan kesehatan (bedrest, lansia, pasca op, pasca kemoterapi dan ibu bersalin)	400	93	23,25	1.700.000.000	1.347.449.062	79,26	95		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
18	Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) (DAK Non Fisik)	Jumlah kegiatan pembinaan gizi masyarakat pembinaan kesehatan keluarga pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta penyehatan lingkungan dalam peningkatan kesehatan masyarakat	5	5	100,00	995.000.000	791.985.866	79,60	90		
19	Peningkatan Manajemen Khusus Penurunan AKI/AKN (DAK Non Fisik)	Jumlah kegiatan penurunan AKI AKB	20	19	95,00	750.000.000	566.475.300	75,53	90		
20	Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan penyakit (P2P) (DAK Non Fisik)	Jumlah kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit	24	25	104,17	650.000.000	275.109.200	42,32	80		
<b>6</b>	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>% apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>109,98</b>						
1	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	Jumlah Puskesmas yang terbina asuhan mandiri pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresure	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	Refocussing anggaran	dianggarkan tahun 2022
2	Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah prosentase apotik dan toko makanan yang diawasi	110	101	91,82	29.150.000	26.691.500	91,57	100		
3	Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Jumlah sekolah yang terawasi keamanan pangan jajanan sekolahnya	68	0	0,00	32.187.500	30.000.400	93,21	100		
4	Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Industri Rumah Tangga Pangan (DAK Non Fisik)	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian dan industri rumah tangga pangan di kabupaten klaten yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	115	0	0,00	231.391.000	156.685.000	67,71	90		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>7</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>#DIV/0!</b>			
1	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan bagi masyarakat	167	142	85,03	100.000.000	92.399.700	92,40	92		
2	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan di bidang kesehatan di pondok pesantren, kader posyandu dan anggota SBH	51	51	100,00	30.882.800	30.878.800	99,99	100		
3	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya pengetahuan tentang PHBS	106	70	66,04	12.140.000	12.140.000	100,00	100		
<b>8</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Keluarga</b>	<b>Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>			<b>#DIV/0!</b>			
1	Upaya Perbaikan Gizi Keluarga	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tentang gizi keluarga dan masyarakat, menurunkan angka gizi buruk dan stunting	16	16	100,00	590.000.000	525.638.598	89,09	95		
2	Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah petugas Puskesmas, Konselor ASI dan Fasilitator PMBA terbina	90	10	11,11	78.381.500	78.376.000	99,99	100		
<b>9</b>	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>			<b>#DIV/0!</b>			
1	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Jumlah Puskesmas dengan RW sehat percontohan	10	0	0,00	5.000.000	4.975.000	99,50	100		
2	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Jumlah jenis kegiatan stop EABS	100	211	211,00	500.000.000	390.625.100	78,13	95		
<b>10</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA</b>	<b>45</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>			<b>#DIV/0!</b>			
1	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang tertangani	380	355	93,42	230.000.000	187.136.300	81,36	85		
2	Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular	Jumlah jenis pengendalian penyakit	36	15	41,69	9.594.021.000	8.992.637.020	93,73	98		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Jumlah penyakit menular yang bersumber dari binatang	120	141	117,50	240.000.000	185.010.450	77,09	77		
4	Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular (DBHCHT)	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih IVA	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	5	Anggaran dialihkan untuk kegiatanlain karena pelatihan tidak jadi dilaksanakan di masa pandemi	
5	Pengadaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (DAK Bid. Kesehatan)	Jumlah Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2	2	100,00	747.000.000	655.779.944	87,79	95		
6	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (DAK Bid. Kesehatan)	Jumlah Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	3	3	100,00	2.483.575.000	2.332.918.500	93,93	100		
<b>11</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Angka kesakitan</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>53,85</b>			<b>#DIV/0!</b>			
1	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina	11	12	109,09	5.400.000	5.400.000	100,00	100		
2	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM	10	0	0,00	38.007.000	37.098.802	97,61	99		
3	Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah pendampingan pembinaan puskesmas	35	35	100,00	46.700.000	40.912.700	87,61	90		
<b>12</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>123,80</b>			<b>#DIV/0!</b>			
1	Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)	Jumlah masyarakat miskin non PBI Pusat termasuk difabel yang mendapat jaminan kesehatan	76750	75825	98,79	33.318.684.000	22.169.077.330	66,54	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Rentan	Cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi PGOT, Penghuni Lapas/Rutan, Penghuni Panti Sosial, KLB/Wabah, Krisis Kesehatan, KIPI dan Gizi Buruk	100	110	110,00	1.000.000.000	705.846.295	70,58	100		
<b>13</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</b>	<b>% penduduk yang memanfaatkan Puskesmas</b>	<b>88</b>	<b>44</b>	<b>49,81</b>			<b>#DIV/0!</b>			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah prasarana dan alat kesehatan yang tersedia	10	0	0,00	1.878.442.000	1.689.643.040	89,95	100		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah ambulans double gardan dan ambulans gawat darurat	1	1	100,00	600.000.000	519.090.000	86,52	100		
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	Jumlah gedung puskesmas pembantu yang direhab	5	5	100,00	900.000.000	886.492.050	98,50	100		
5	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah unit sistem informasi kesehatan (SIK) yang terbina dan dikembangkan	35	35	100,00	60.000.000	59.681.000	99,47	100		
6	Penyediaan Alat Antropometri (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah alat Antropometri yang tersedia	193	170	88,08	1.530.016.000	1.528.703.410	99,91	100		
7	Pembangunan Puskesmas (DBHCHT)	Jumlah Gedung Puskesmas terbangun	3	0	0,00	5.200.000.000	4.272.920.400	82,17	100		
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DBHCHT)	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	68	6	8,82	300.000.000	288.668.720	96,22	100		
9	Pengadaan Peralatan Gawat Darurat Maternal Neonatal Puskesmas (PONED) (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah peralatan kesehatan untuk pelayanan emergensi dasar pada pasien maternal dan neonatal yang disediakan	12	12	100,00	1.123.961.000	1.035.948.980	92,17	100		
10	Pembangunan Therapeutic Feeding Center (TFC) (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah serangkaian kegiatan dalam membentuk Therapeutic Feeding Centre Atau Pusat Pemulihan Perbaikan Gizi Balita	1	1	100,00	65.000.000	37.735.870	58,06	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
11	Bantuan Operasional Kesehatan Kalibrasi Alat Kesehatan (DAK Non Fisik)	Jumlah peralatan medis yang dikalibrasi	10	10	100,00	128.687.000	112.800.000	87,65	100		
12	Pengadaan sarana Prasarana Puskesmas Keliling (DBHCHT)	Jumlah ambulans terbeli	7	7	100,00	2.555.000.000	2.285.796.500	89,46	100		
13	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (DAU)	Jumlah dokumen perencanaan Rehabilitas 7 pustu tersusun	1	1	100,00	100.000.000	96.546.900	96,55	100		

<b>RSD BAGAS WARAS</b>											
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran									
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan RSUD selama 1 tahun	35 petugas keamanan (L= 31, P= 4)	35 petugas keamanan (L= 31, P= 4)	100	1.100.000.000	1.092.194.047	99,04	100	-	-
2	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa Pengamanan RSUD selama 1 tahun	32 petugas kebersihan ( L= 29, P = 3)	32 petugas kebersihan ( L= 29, P = 3)	100	1.000.000.000	988.326.000	99,29	100	-	-
3	Penyusunan perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan	7 dokumen	7 dokumen	100	25.000.000	24.155.750	96,62	100	-	-
<b>2</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	<b>Terlaksananya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS</b>									
1	Pengadaan ala-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya alat-alat kesehatan RS	12 Jenis (78 alkes)	12 Jenis (78 alkes)	100	2.759.462.000	2.492.414.899	90,32	100	-	-
2	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Tersedianya obat-obat yang dibutuhkan oleh pasien	250 jenis	250 jenis	100	1.850.000.000	1.843.243.159	99,63	100	-	-
<b>3</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan</b>	<b>% Pelayanan Kesehatan</b>									
1	Pelayanan Kesehatan RSUD	% Pelayanan kesehatan thd pasien yang datang ke RS	% Pelayanan kesehatan thd pasien yang datang ke RS	% Pelayanan kesehatan thd pasien yang datang ke RS	100	53.674.822.025	50.311.520.846	93,73	100	1. Beban kerja kegiatan Pelayanan Kesehatan RSUD yang hanya diampu oleh 1 orang	1. Membuat tim teknis pembantu

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
										2. Belum optimalnya penggunaan aplikasi yang mendukung terlaksananya sistem pelayanan kesehatan	1. Mengoptimalkan kemampuan SDM yang ada.
<b>BAGIAN KESRA</b>											
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Kesehatan Lansia</b>										
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Peserta Sarasehan dan Senam Lansia	350	350	100	39.855.000	29.079.750	73,0	100		
<b>PUSKESMAS</b>											
<b>1</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>										
1	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas mendapat BOK	34	34	100	22.323.758.000	16.856.214.913	75,5	87		
<b>2</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>										
1	Penunjang kegiatan Puskesmas	Jumlah Puskesmas	34	34	100	70.691.290.782	60.277.283.432	85,3	93		
	<b>TOTAL</b>					<b>249.025.401.906</b>	<b>211.469.696.830</b>	<b>84,91892603</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

**URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
<b>DPU PR</b>												
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>											
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	300	Surat	300	Surat	100	10.000.000	9.398.500	93,985	100	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis rekening terbayar DPU PR Kabupaten Klaten	4	Rekening	4	Rekening	100	515.000.000	325.773.654	63,257	100	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	84	Unit	84	Unit	100	100.000.000	99.020.000	99,02	100	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jenis operasional, pemeliharaan (servis dan suku cadang) dan perijinan (pajak dan KIR) kendaraan dinas dilingkungan dpu pr	78	Unit	78	Unit	100	250.000.000	227.161.750	90,86	100	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dan jenis pembayaran jasa administrasi keuangan	2	Jenis	2	Jenis	100	693.000.000	398.094.841	57,45	100	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah dan jenis pembayaran jasa kebersihan kantor	3	Jenis	3	Jenis	100	265.000.000	167.515.548	63,21	100	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia di DPU PR Kabupaten Klaten	15	Unit	15	Unit	100	100.000.000	99.870.200	99,87	100	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia DPU PR Kab, Klaten	2	Jenis	2	Jenis	100	100.000.000	79.404.700	79,40	100	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia DPU PR Kabupaten Klaten	7	Jenis	7	Jenis	100	20.000.000	17.690.000	88,45	100	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan, surat kabar dan buku peraturan perundang undangan yang tersedia DPU PR Kab. Klaten	3	Jenis	3	Jenis	100	15.000.000	8.814.000	58,76	100	

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan		
11	Penyediaan makanan dan minuman	Pelaksanaan rakor dan konsultasi di internal dinas maupun dengan dinas/instansi lain yang terkait DPUPR Klaten	144	Kegiatan	144	Kegiatan	100	85.000.000	59.541.500	70,05	100		
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah DPU PR Kabupaten Klaten	73	Orang / Keg	73	Orang / Keg	100	390.000.000	174.777.157	44,81	100		
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pelaksanaan rakor dan konsultasi di lingk.kab klaten DPUPR Kab.Klaten	400	Orang / Keg	400	Orang / Keg	100	160.000.000	140.540.000	87,84	100		
14	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah dan jenis pembayaran jasa pengamanan kantor	2	Jenis	2	Jenis	100	447.000.000	300.531.337	67,23	100		
15	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Jumlah dan jenis pembayaran jasa pengemudi kantor	2	Orang	2	Orang	100	16.000.000	13.449.120	84,06	100		
16	Penyediaan Operasional UPTD	Jumlah dan jenis sarpras pendukung operasional UPTD PUPR yang tersedia DPU PR Kabupaten Klaten	45	Ruas	45	Ruas	100	600.000.000	499.970.421	83,33	100		
17	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan DPUPR Kabupaten Klaten	12	Dokumen	12	Dokumen	100	150.000.000	120.123.500	80,08	100		
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>												
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan roda 2 yang dibeli DPU PR	1	Jenis	1	Jenis	100	395.000.000	368.845.500	93,38	100		
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia DPU PR Klaten	10	Jenis	10	Jenis	100	655.000.000	594.970.500	90,84	100		
3	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang terbeli	6	Jenis	6	Jenis	100	250.275.000	234.229.600	93,59	100		
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan bangunan gedung kantor tempat kerja	1	Jenis	1	Jenis	100	1.071.623.000	844.468.900	78,80	100		
5	Pemeliharaan Alat Berat	Jumlah alat berat yang dipelihara DPU PR	31	Unit	31	Unit	100	500.000.000	425.742.500	85,15	85,15		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>											
1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan DPU PR	1	Paket	1	Paket	100	50.000.000	43.017.000	86,03	100	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>											
1	Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah ASN terfasilitasi peningkatan kapasitas SDM kantor DPU PR	30	Orang / Keg	30	Orang / Keg	100	90.000.000	55.374.900	61,53	100	
2	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	Jumlah dan jenis kegiatan peng spj an dan pembuatan laporan keuangan terlaksana DPU dan PR Kab. Klaten	2	Jenis	2	Jenis	100	70.000.000	61.930.500	88,47	100	
3	Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah pelatihan SDM di DPU PR Kabupaten Klaten	1	Keg	1	Keg	100	100.000.000	92.306.000	92,306	100	
	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>											
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Jumlah Jaringan Irigasi yang direhab	558	Ha	558	Ha	100	2.933.600.000	2.187.733.800	74,58	100	
2	Pendampingan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Jumlah kegiatan yang ditunjang	5	Paket	5	Paket	100	300.000.000	107.440.749	35,81	91,67	
3	Operasi Irigasi	Jumlah DI yang dikelola	5000	Ha	5000	Ha	100	2.575.944.785	1.788.793.157	69,44	100	
4	Perencanaan jaringan irigasi/bendung	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	10	Dokumen	10	Dokumen	100	405.603.670	390.687.000	96,32	100	
5	Pengadaan Pesawat Ukur	Jumlah alat ukur yang dibeli	1	Unit	0	Unit	0	31.000.000	30.230.000	97,52	100	
6	Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A	Jumlah P3A/GP3A yang diberi penyuluhan	40	GP3A / P3A	0	GP3A / P3A	0	-	-	0	0	rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid - 19
7	Pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi	Jumlah alat berat yang dibeli	1	Unit	0	Unit	0	-	-	0	0	rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid - 19
8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK Bid. Prasarana Irigasi)	Jumlah DI yang direhab	826,20	Ha	826	Ha	100	4.902.954.000	1.267.457.000	25,85	100	

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saluran Pembuang DI Jetisbolo (nomor 151) (Bankeu Provinsi)		800	m	0	m	0	800.000.000	-	0	0	Proses pengadaan barang jasa dilaksanakan di tahun 2020, sedangkan konstruksi pekerjaan dilaksanakan di tahun 2021 (dikarenakan keterbatasan waktu)	
	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</b>												
1	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Embung yang dibangun	1	Unit	1	Unit	100	13.970.000	13.144.500	94,09	94,09		
2	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Embung yang direhab	1	Unit	1	Unit	100	16.700.000	12.338.000	73,88	83,33		
3	Pemeliharaan dan penataan kawasan Waduk	Jumlah waduk yang dipelihara	189	Ha	189	Ha	100	102.396.330	49.598.504	48,44	91,67		
4	Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai	Jumlah sungai yang ditangani	30	Bendung	30	Bendung	100	187.931.545	88.655.000	47,17	100		
5	Pengadaan bahan penanganan banjir	Jumlah bahan yang dibeli	15400	Bh	15400	Bh	100	100.000.000	95.715.900	95,72	100		
6	Rehabilitasi kawasan sumber air	Jumlah sumber air yang direhab	5	Unit	5	Unit	100	7.022.000	6.964.150	99,18	100		
7	Penunjang Operasional Pelaksanaan Bantuan Provinsi Bidang Sumber Daya Air	Jumlah kegiatan yang ditunjang	3	Keg	3	Keg	100	125.000.000	8.521.000	6,82	6,82		
	<b>BIDANG BINA MARGA</b>												
	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>												
1	Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang di bangun	1	Paket	1	Paket	100	33.100.000	3.268.000	9,87	75		
2	Peningkatan Jalan Nangstri-Tanjungsari	Panjang jalan yang di tingkatkan	1	Paket	1	Paket	100	23.250.000	12.056.500	51,86	75		
3	Peningkatan Jalan Prawatan-Margorejo	Panjang jalan yang di tingkatkan	1.20	Km	1.20	Km	100	3.000.000.000	2.768.763.000	92,29	100		
4	Peningkatan Jalan Pasar Kembang-Kadilajo	Panjang jalan yang di tingkatkan	1	Paket	1	Paket	100	26.450.000	11.170.500	42,23	75		
5	Peningkatan Jalan Ngimbar-Kayumas	Panjang jalan yang di tingkatkan	1	Paket	1	Paket	100	57.500.000	23.331.250	40,58	75		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6	Peningkatan Jalan Perempatan Jetis-Polanharjo	Panjang jalan yang di tingkatkan	1.09	Km	1.09	Km	100	3.500.000.000	3.182.807.500	90,94	100		
7	Peningkatan Jalan Tegalgondo-Sidoharjo	Panjang jalan yang di tingkatkan	2.57	Km	2.57	Km	100	4.700.000.000	4.180.223.500	88,94	100		
8	Peningkatan Jalan Sidoharjo-Janti	Panjang jalan yang di tingkatkan	1	Paket	1	Paket	100	36.000.000	15.888.000	44,13	44,13		
9	Peningkatan Jalan Wonosari-Bolali	Panjang jalan yang di tingkatkan	1	Paket	1	Paket	100	31.000.000	15.001.500	48,39	48,39		
10	Peningkatan Jalan Pakis-Wonosari	Panjang jalan yang di tingkatkan	1.52	Km	1.52	Km	100	6.500.000.000	5.937.558.000	91,35	100		
11	Peningkatan Jalan Padangan-Jelobo	Panjang jalan yang di tingkatkan	2.68	Km	2.68	Km	100	5.000.000.000	4.601.132.000	92,02	100		
12	Peningkatan Jalan Samben-Sidowarno	Panjang jalan yang di tingkatkan	1	Paket	1	Paket	100	29.450.000	11.865.000	40,29	40,29		
13	Peningkatan Jalan Ngaran-Telukon	Panjang jalan yang di tingkatkan	1,30	Km	0	Km	0	-	-	0,00	0	rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid - 19	
14	Peningkatan Jalan Trucuk-Sajen	Panjang jalan yang di tingkatkan	4,15	Km	0	Km	0	-	-	0,00	0	rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid - 19	
15	Peningkatan Jalan Cawas-Kalisogo	Panjang jalan yang di tingkatkan	0,80	Km	0	Km	0	-	-	0,00	0	rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid - 19	
16	Peningkatan Jalan Empu Sedah	Panjang jalan yang di tingkatkan	1	Paket	1	Paket	100	36.000.000	15.615.000	43,38	43,38		
17	Peningkatan Jalan Ki Ageng Penjawi	Panjang jalan yang di tingkatkan	1	Paket	1	Paket	100	29.750.000	11.936.500	40,12	40,12		
18	Peningkatan Jalan Ki Ageng Pemanahan	Panjang jalan yang di tingkatkan	1	Paket	1	Paket	100	10.800.000	5.099.200	47,21	47,21		
19	Peningkatan Jalan Jodipati	Panjang jalan yang di tingkatkan	1	Paket	1	Paket	100	29.450.000	12.682.000	43,06	43,06		
20	Penunjang Operasional Pelaksanaan Bantuan Provinsi Bidang Bina Marga	Jumlah kegiatan yang di tunjang operasionalnya	1	Keg	1	Keg	100	306.425.000	31.590.250	10,31	10,31		
21	Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan DAK	Jumlah kegiatan yang di tunjang operasionalnya	3	Keg	3	Keg	100	107.475.000	59.064.825	54,96	54,96		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
22	Peningkatan Jalan Tegalmulyo - Surowono (no ruas 42) (Bankeu Provinsi)	Panjang jalan yang di tingkatkan	3	Km	0	Km	0	14.000.000.000	-	0,00	0	Proses pengadaan barang jasa dilaksanakan di tahun 2020, sedangkan konstruksi pekerjaan dilaksanakan di tahun 2021 (dikarenakan keterbatasan waktu)	
	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>												
1	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten	Volume jalan yang di pelihara	42000	m2	42000	m2	100	19.246.761.900	14.378.132.557	74,70	100		
	<b>BIDANG TATA RUANG</b>												
	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>												
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Klaten	1	Paket	0	Paket	0	-	-	0,00	0	rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid - 19	
2	Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang	Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang	60	%	60	%	100	400.000.000	237.516.348	59,38	100		
3	Survey dan pemetaan	Terwujudnya jumlah peta tematik	1	Sistem	0	Sistem	0	-	-	0,00	0	rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid - 19	
4	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang	Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Klaten	1	Paket	0	Paket	0	-	-	0,00	0	rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid - 19	
	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>												
1	Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang	peningkatan pelayanan ketataruangan Kabupaten Klaten	3	Dokumen	3	Dokumen	100	90.000.000	30.198.250	33,55	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Peningkatan pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat	0	orang	0	orang	0	-	-	0,00	0	rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid - 19	
	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>												
1	Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah frekuensi pengawasan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Klaten	60	Kali	60	Kali	100	70.000.000	67.835.950	96,91	100		
2	Pembuatan Billboard/Papan Reklame dan sejenisnya	Terwujudnya Pembuatan Billboard/Papan Informasi Tata Ruang	19	titik lokasi	19	titik lokasi	100	50.000.000	46.001.850	92,00	100		
	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>												
1	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT)	Jumlah lokasi IPLT yang dipelihara	1	lokasi	1	lokasi	100	200.000.000	195.094.250	97,55	100		
	<b>DINAS PERWASKIM</b>												
	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG - GORONG</b>												
1	Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong - gorong	Dokumen DED drainase	1	dok	1	dok	100	110.000.000	106.805.000	97	100	-	-
2	Pembangunan saluran drainase/ gorong - gorong	Panjang saluran drainase terbangun	300	m	300	m	100	800.000.000	789.097.150	99	100	-	-
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MINUM LIMBAH</b>												



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terwujudnya penyediaan air bersih	6 loka si	0	0	2.586.005.000	0	-	0	Berdasarkan time schedule yang telah disusun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, pelaksanaan 6 (enam) lokasi tersebut harus dilakukan melalui mekanisme lelang tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada akhir tahun anggaran 2020 dikarenakan kepastian adanya DAK tersebut baru di Bulan Juli	-
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)	Terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi yang memadai	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3	Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Terwujudnya penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai	25 desa	25 desa	100	506.000.000	362.036.166	72	100	-	-
4	Pendampingan dana alokasi khusus bidang infrastruktur air minum	Tersedianya operasional kegiatan DAK bidang air minum	6 desa	6 desa	100	120.000.000	7.642.500	6	100	-	-
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN/PERKOTAAN</b>											
1	Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan/Perkotaan	Tertatanya kawasan kumuh	9 desa	9 desa	100	100.000.000	53.044.250	53	0	-	-
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG</b>											
1	Pembangunan gedung milik daerah	Bangunan gedung milik daerah yang terbangun	1 gedu ng	1 gedu ng	100	37.644.000.000	35.639.755.071	95	98	1. adanya staf dari pihak kontraktor yang terkena covid sehingga menghambat pekerjaan kontruksi	memaksimalkan pekerja yang ada untuk pekerjaan kontruksi dan administrasi dengan mematuhi protokol kesehatan covid - 19

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												2. adanya keterlambatan import barang material	menghubungi pihak terkait supaya pengiriman barang dipercepat
2	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah	Bangunan gedung milik daerah yang terehabilitasi	3	bangunan	3	bangunan	100	3.920.000.000	3.329.396.900	85	100	-	-
3	Penyusunan dokumen bangunan gedung/kantor	Dokumen bangunan gedung kantor yang tersusun	7	dok	7	dok	100	739.305.000	705.484.350	95	100	-	-
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>												
1	Monitoring dan pengendalian bangunan	Terkendalinya penataan bangunan di kab.klaten	26	Kec	26	Kec	100	499.000.000	255.531.425	51	100	-	-
2	Penunjang Operasional Tim SIUJK Kabupaten	Jumlah frekuensi rekomendasi SIUJK	90	rekomendasi	90	rekomendasi	100	53.965.000	29.462.900	55	100	-	-
	<b>TOTAL</b>							<b>124.191.707.230</b>	<b>88.641.927.830</b>	<b>71</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

**URUSAN : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
<b>DINAS PERWASKIM</b>												
<b>PROGRAM PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>												
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	3000	3000	surat	100	15.000.000	14.997.300	99,98	100	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet untuk kelancaran operasional kantor Disperwaskim	4	4	jenis	100	640.000.000	358.296.746	55,98	100	-	-
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan kantor Disperwaskim	11	11	unit	100	100.000.000	77.450.500	77,45	100	-	-
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Disperwaskim	25	25	org	100	410.000.000	359.022.490	87,57	100	-	-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Pembersih Disperwaskim	9	9	org	100	174.000.000	154.140.520	88,59	100	-	-
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Disperwaskim	60	60	jenis	100	50.000.000	49.832.000	99,66	100	-	-
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan Disperwaskim	10	10	jenis	100	35.000.000	34.971.000	99,92	100	-	-
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lampu dan peralatan listrik Disperwaskim	14	14	jenis	100	20.000.000	19.996.070	99,98	100	-	-
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan Disperwaskim	720	720	jenis	100	2.915.000	2.910.750	99,85	100	-	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan makan dan minum Disperwaskim	50	50	kali	100	30.000.000	29.816.500	99,39	100	-	-
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah Disperwaskim	150	150	kali	100	150.000.000	140.821.285	93,88	100	-	-
12	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah Disperwaskim	400	400	kali	100	80.000.000	79.100.000	98,88	100	-	-
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Pengaman Kantor Disperwaskim	14	14	org	100	234.000.000	214.472.680	91,65	100	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
14	Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor	Jumlah Pengemudi Kantor Disperwaskim	2	2 org	100	33.000.000	27.898.240	84,54	100	-	-
15	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan Disperwaskim	5	5 jenis	100	48.000.000	46.865.750	97,64	100	-	-
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>											
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Disperwaskim	40	40 jenis	100	250.000.000	241.976.400	97	100	-	-
2	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pemeliharaan Gedung Disperwaskim	0	0	0	0	0		0	-	-
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Disperwaskim	1	1 gedung	100	210.000.000	208.800.000	99	100	-	-
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan gedung kantor Disperwaskim	35	35 unit	100	95.000.000	94.997.000	99	100	-	-
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah meubelair terpelihara disperwaskim	20	20 unit	100	10.000.000	9.735.000	97	100	-	-
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Non Kantor	Pemeliharaan sarpras gedung rusunawa kec.klaten utara	2	2 gedung	100	219.400.000	216.090.900	98	100	-	-
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>											
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Fasilitasi SDM	6	6 org	100	18.200.000	16.418.850	90	100	-	-
2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan	Jumlah Kapasitas Pengelolaan Keuangan	3	3 jenis	100	10.000.000	9.872.000	99	100	-	-
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>											
1	Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha	Terselenggarakan penyerahan PSU oleh pengembangan kepada pemerintah kabupaten kab.klaten	5	5 dokumen	100	200.000.000	81.603.700	41	100	-	-
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan monitoring dan evaluasi pemb.perumahan dan pelanggran pemb. Perumahan oleh pengembang	1	1 dokumen	100	100.000.000	30.722.400	31	100	-	-
<b>PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL</b>											

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial	Terselenggaranya operasional rehab rumah tidak layak huni	2500	2500	rumah	100	2.256.000.000	1.686.452.850	75	100	-	-
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan monitoring dan evaluasi pemb.perumahan dan pelanggran pemb. Perumahan oleh pengembang	1	1	dok	100	100.000.000	32.718.700	33	100	-	-
3	Biaya Operasional Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya ( DAK Bidang Perumahan dan Permukiman )	Terselenggaranya rehab rumah tidak layak huni ( DAK ) kab.klaten	71	71	rumah	100	60.849.000	33.250.000	55	100	-	-
<b>TOTAL</b>							<b>5.551.364.000</b>	<b>4.273.229.631</b>	<b>76,98</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

**URUSAN : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>KESBANGPOL</b>											
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	350	350	100	1.300.000	1.300.000	100	100		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening Terbayar	4	4	100	20.000.000	16.288.401	81	100		
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan	55	55	100	50.350.000	50.350.000	100	100		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah THL Kebersihan Kantor	1	1	100	25.785.000	25.593.920	99	100		
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Jenis ATK Tersedia	70	70	100	14.250.000	13.741.100	96	100		
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	7	7	100	11.000.000	10.873.750	99	100		
7	Penyediaan Komponen Ins. Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	9	9	100	2.500.000	2.457.500	98	100		
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan tersedia	750	750	100	5.750.000	5.750.000	100	100		
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman tersedia	300	300	100	5.565.000	5.508.000	99	100		
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	100	100	100	23.492.000	23.492.000	100	100		
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	500	500	100	30.000.000	30.000.000	100	100		
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL Pengamanan Kantor	3	3	100	38.520.000	38.511.360	100	100		
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
1	Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor terbeli	0	0	0	-	-	0	100		
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor terbeli	3	3	100	12.450.000	11.850.000	95	100		
3	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor terpelihara	2	2	100	7.600.000	7.586.000	100	100		
4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	7	7	100	16.700.000	16.134.750	97	100		
5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	0	0	0	-	-	0	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	4	4	100	4.000.000	3.120.000	78	100		
7	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur kantor	Jumlah Mebeleur Kantor Terpelihara	5	5	100	1.155.000	1.155.000	100	100		
III	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>										
1	Cipta Kondisi Bidang Politik Ekonomi Sosial dan Budaya	Jumlah kegiatan	10	10	100	1.170.750.000	1.149.239.350	98	100		
2	Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah peserta	0	0	0	-	-	0	100		
IV	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>										
1	Peningkatan Koordinasi Tim kewaspadaan Dini Daerah	Jumlah kegiatan	10	9	90	200.050.000	84.954.300	42	90	Terkendala teknis	Bantuan Hibah membutuhkan waktu pelaksanaan yang cukup
2	Pencegahan dan Pembrantasan Narkoba	Jumlah peserta	150	150	100	30.000.000	29.169.800	97	100		
V	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>										
2	Peningkatan Pembinaan Pemantapan Kesadaran Bela Negara	Jumlah kegiatan	1	1	100	6.884.000	6.516.750	95	100		
3	Dialog / Forum Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta	0	0	0	-	-	0	100		
4	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta	0	0	0	-	-	0	100		
VI	<b>Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik</b>										
1	Fasilitasi dan Koordinasi Forum-forum, Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan Kebangsaan	Jumlah Kegiatan	1	1	100	11.000.000	10.867.500	99	100		
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Ormas/ LSM/ Lembaga Nirlaba Lainnya	Jumlah Kegiatan	1	1	100	6.000.000	5.030.400	84	100		
3	Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik	Jumlah Kegiatan	1	1	100	6.500.000	5.455.150	84	100		
4	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Ormas/LSM/Lembaga nirlaba Lainnya / Organisasi Politik	Jumlah Kegiatan	0	0	0	-	-	0	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5	Desk Pemilihan Presiden / Legislatif / Gubernur / Bupati / Kepala Desa	Jumlah Kegiatan	1	1	,	200.000.000	192.128.250	96	100		
<b>SATPOL PP</b>											
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Presentase pelayanan administrasi perkantoran</b>									
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	2000	2.000	100	3.000.000	2.892.000	96	100		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis rekening terbayar	4	4	100	47.000.000	39.621.285	84	100		
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyedia jasa administrasi keuangan	7	7	100	25.000.000	24.705.800	99	100		
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL kebersihan kantor	2	2	100	36.000.000	34.553.360	96	100		
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK tersedia	40	40	100	21.450.000	21.435.650	100	100		
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	15	15	100	40.000.000	38.406.100	96	100		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	15	15	100	7.000.000	6.816.500	97	100		
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	5	5	100	5.000.000	4.760.400	95	100		
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tersedia	1.000	1.000	100	21.000.000	20.725.500	99	100		
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	25	25	100	96.000.000	95.535.515	100	100		
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	60	60	100	59.972.500	57.464.500	96	100		
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Presentase sarana prasarana aparatur dalam keadaan baik</b>									
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	30	30	100	96.550.000	77.394.500	80	100		
2	Pengadaan mebel	Jumlah mebel terbeli	0	0	0	0	-	-	-		
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	2	2	100	30.000.000	29.847.000	99	100		
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	30	30	100	150.000.000	149.497.200	100	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	26	26	100	7.000.000	6.326.000	90	100		
6	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran terpelihara	12	12	100	30.000.000	24.978.400	83	100		
<b>III</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase kehadiran aparatur</b>									
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedia	225	225	100	200.000.000	190.813.500	95	100		
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase capaian aparatur berkompeteren</b>									
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN, THL dan Linmas terfasilitasi kapasitas SDM	20	20	100	13.000.000	5.562.300	43	100	Karena di masa Pandemi untuk kegiatan Pelatihan di kurangi	
<b>V</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Prosentase peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman</b>									
1	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah personil Satpol PP dan Linmas yang profesional	0	0	0	0	-		0		
2	Penertiban pedagang kaki lima	Jumlah pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) Kabupaten Klaten.	62	62	100	35.000.000	35.000.000	100	100		
3	Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten	Jumlah pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kabupaten klaten	255	255	100	397.150.000	397.080.800	100	100		
4	Penertiban reklame, sepanduk dan baliho	Jumlah pelaksanaan penertiban dalam pemasangan reklame, sepanduk dan baliho Kabupaten Klaten	50	50	100	30.000.000	30.000.000	100	100		
5	Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional siaga tugas satuan polisi pamong praja	373	373	100	255.100.000	227.129.700	89	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6	Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa	Jumlah anggota pengamanan dalam pelaksanaan pemilihan legeslatif / presiden / gubernur/bupati/kepala desa	5020	5020	100	500.000.000	469.324.500	94	100		
7	Pemetaan kawasan rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah wilayah dalam pendataan kerawanan trantibum dan tranmas	0	0	0	0	-	-	0		
8	Pelatihan Dasar Kesamaptaan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan dasar kesamaptaan	115	115	100	20.000.000	20.000.000	100	100		
<b>V1</b>	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>prosentase keamanan, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal yang terpelihara</b>									
1	Peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah koordinasi keamanan dan trantibmas	7	7	100	5.000.000	4.767.900	95	100		
<b>VII</b>	<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Prosentase Anggota korsik yang terlatih</b>									
1	Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Frekuensi pelaksanaan korsik Kabupaten Klaten, perawatan dan pengadaan alat korsik	25	25	100	75.340.500	72.425.800	96	100		
<b>VIII</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan</b>									
1	Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan pengamanan di wilayah kabupaten klaten dan terfasilitasinya THL Satpol pp	250	250	100	1.208.550.000	1.122.283.730	93	100		
2	Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat	Jumlah anggota linmas yang terlatih kemampuan dan ketrampilannya dalam mewujudkan keamanan wilayah	250	250	100	138.400.000	133.261.700	96	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>IX</b>	<b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>	<b>Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten</b>									
1	Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda	Jumlah operasi penertiban dan penindakan pelanggaran perda	40	40	100	78.200.000	77.585.140	99	100		
2	Pembinaan penegakan Perda/Perbub	Jumlah kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub.	21	21	100	18.800.000	18.800.000	100	100		
3	Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS	Jumlah kegiatan operasi untuk menciptakan situasi kondusif di kabupaten klaten.	25	25	100	50.500.000	49.804.450	99	100		
<b>X</b>	<b>Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran</b>	<b>Prosentase anggota pemadam kebakaran yang terlatih</b>									
1	Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran	Jumlah petugas pemadam kebakaran yang profesional	6	6	100	9.692.000	9.685.000	100	100		
<b>XI</b>	<b>Program Penanganan Darurat Bencana</b>	<b>Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten</b>									
1	Operasional Pemadam Kebakaran	Jumlah anggota Pemadam kebakaran , THL yang terfasilitasi dan operasional	30	30	100	932.672.000	920.582.615	99	100		
<b>XII</b>	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>Persentase konsumen yang terlindungi</b>									
1	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah barang kena cukai ilegal	40	40	100	200.000.000	198.712.300	99	100		
<b>TOTAL</b>						<b>6.743.978.000</b>	<b>6.364.852.426</b>				

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

**URUSAN : SOSIAL**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINSOS P3AKB</b>											
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	300	294	98	2.000.000	1.751.800	87,59	98		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis rekening terbayar	3	3	100	80.000.000	69.945.750	87,43	100		
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan ajuan dokumen administrasi keuangan	12	12	100	30.000.000	29.947.836	99,83	100		
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga pembersih kantor	2	2	100	31.500.000	30.301.532	96,20	100		
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ketersediaan alat tulis kantor	60	60	100	17.500.000	17.499.940	100,00	100		
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	5	5	100	13.674.461	13.673.250	99,99	100		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis peralatan penerangan gedung kantor	13	13	100	2.000.000	2.000.000	100,00	100		
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar dan buku peraturan	4	4	100	2.000.000	1.440.000	72,00	100		
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tersedia	780	780	100	23.500.000	23.489.000	99,95	100		
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	20	20	100	40.000.000	39.800.245	99,50	100		
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	35	35	100	33.000.000	32.975.000	99,92	100		
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	3	3	100	39.761.000	39.760.998	100,00	100		
13	Penyediaan jasa pengemudi kantor	jumlah tenaga pengemudi	1	1	100	13.000.000	12.952.714	99,64	100		
14	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	7	7	100	47.500.000	47.191.561	99,35	100		
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor terbeli (kursi susun)	4	4	100	41.500.000	38.573.000	92,95	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor terbeli (Personal Komputer 9 unit, Laptop 2 unit, Printer 2 unit)	3	3	100	92.700.000	90.924.400	98,08	100		
3	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis meubelair yang terbeli (meja rapat 20 set, meja kursi tamu 1 set, rak arsip 4 buah)	6	6	100	80.000.000	79.181.000	98,98	100		
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor terpelihara	1	1	100	185.000.000	183.355.500	99,11	100		
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	94	83	88	130.000.000	99.746.871	76,73	88		
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	15	15	100	30.000.000	29.979.544	99,93	100		
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan</b>	<b>99</b>	<b>90,32</b>	<b>91,23</b>						
1	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah keluarga miskin dan penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	-	0	0,00	-	-	0,00	0		
2	Pemutakhiran Data Keluarga Miskin	Jumlah data keluarga miskin yang dimutakhirkan	1	1	100,00	205.000.000	204.886.300	99,94	100		
3	Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah penerima manfaat, jumlah e-warung	111,375	111,375	100,00	200.000.000	190.217.600	95,11	100		
4	Pemutakhiran Data Keluarga Miskin (DAK Bidang Sosial)	Jumlah sarana pendukung pusat layanan data	0	0	0,00	-	-	0,00	0		
<b>4</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial</b>	<b>30</b>	<b>27,15</b>	<b>90,50</b>						
1	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	30	30	100,00	407.200.000	384.980.185	94,54	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Penanganan mayat terlantar	Jumlah mayat terlantar yang ditangani	15	7	46,67	22.070.000	10.656.300	48,28	60		
3	Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan	JUmlah kegiatan apel kehormatan dan renungan suci	0	0	0,00	-	-	0,00	0		
4	Rehabilitasi dan pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar Panti	Jumlah jenis PMKS yang ditangani	100	100	100,00	59.238.000	54.963.623	92,78	100		
5	Fasilitas rehabilitasi bersumber daya masyarakat	Jumlah kecamatan/desa yang difasilitasi	2	2	100,00	15.100.000	15.074.900	99,83	100		
6	Penunjang operasional penyaluran bantuan	Jumlah kegiatan verifikasi penerima manfaat bantuan sosial	2	2	100,00	100.000.000	77.552.100	77,55	100		
7	Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah keluarga dengan anak berhadapan dengan hukum yang ditangani	50	50	100,00	53.632.000	53.114.522	99,04	100		
<b>5</b>	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	<b>Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah mendapat bantuan</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>132,14</b>						
1	Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	3	3	100,00	4.975.000	4.975.000	100,00	100		
2	Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Jumlah tagana yang diberdayakan	45	45	100,00	18.214.000	18.213.400	100,00	100		
<b>6</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>						
1	Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah TKSK yang diberdayakan	26	26	100,00	556.308.000	556.223.884	99,98	100		
2	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Pendamping PKH yang diberdayakan	240	240	100,00	841.615.000	838.891.600	99,68	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial	Jumlah karang taruna aktif, Jumlah CSR yang disalurkan untuk PMKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	2	2	100,00	2.700.000	2.699.800	99,99	100		
	<b>BPBD</b>										
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi perkantoran</b>	<b>peningkatan pelayanan publik</b>	70%	70%	100%						
1	penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat terkirim	500 surat	500 surat	100%	7.500.000	6.360.000	84,8	100		
2	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah jenis rekenign terbayar	3 rekening	3 rekening	100%	200.000.000	122.811.313	61,41	100		
3	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah THL kebersihan kantor dan selter	6 orang THL	6 orang THL	100%	145.000.000	140.071.703	96,60	100		
4	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	jumlah THL tenaga administrasi/teknis kantor	7 org THL	7 org THL	100%	120.000.000	117.464.679	97,89	100		
5	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis ATK tersedia	30 jenis	30 jenis	100%	25.000.000	21.929.000	87,72	100		
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis cetak penggandaan	6 jenis	6 jenis	100%	36.250.000	30.057.500	82,92	100		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen listrik dan penerangan bangunan	30j3nis	30j3nis	100%	30.000.000	26.388.000	87,96	100		
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	100%	5.000.000	4.436.300	88,73	100		
9	penyediaan bahan logistik	jumlah bahan lohistik tersedia	13 jenis	13 jenis	100%	843.254.000	738.564.100	87,59	100		
10	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman tersedia	30 kegiatan	30 kegiatan	100%	46.000.000	44.242.500	96,18	100		
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah	20 kali	20 kali	100%	80.000.000	79.978.683	99,97	100		
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	70 kali	70 kali	100%	70.000.000	69.986.500	99,98	100		
13	Penyediaan jasa pengamanan kantor	jumlah THL keamanan kantor	10 org THL	10 org THL	100%	146.810.000	143.907.522	98,02	100		
14	Penyediaan jasa pengemudi kantor	jumlah THL pengemudi kantor	3 org THL	3 org THL	100%	67.000.000	66.206.229	98,82	100		
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>peningkatan pelayanan publik</b>									

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan operasional dinas yg terbeli	1 unit	1 unit	100%	181.950.000	174.650.000	95,99	100		
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan gedung dan selter	5 lokasi	5 lokasi	100%	-	-	0	0	tidak dilaksanakan krn refokusing anggaran	dianggarkan kembali di 2021
3	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah peralatan kantor terpelihara	7 jenis	7 jenis	100%	30.000.000	29.546.000	98,49	100		
4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/Operasional	jumlah unit kendaraan operasional dinas terpelihara	3 jenis	3 jenis	100%	250.000.000	225.811.822	90,32	100		
5	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	jumlah mebelair terpelihara	1 jenis	1 jenis	100%	4.200.000	3.350.000	79,76	100		
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebakaran	jumlah peralatan kebakaran terpihara	5 jenis	5 jenis	100%	50.000.000	44.972.400	89,94	100		
7	fasilitasi pindah kantor	frekuensi pindah kantor	1 kali	1 kali	100%	70.000.000	65.372.000	93,39	100		
<b>3</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b>	<b>- jumlah desa tangguh jumlah relawan terlatih tanggap bencana, jmlh sekolah siaga bencana, komunitas sekolah sungai</b>	<b>- 2 desa, 225 org, 15 sekolah, 1 komunitas</b>	<b>- 2 desa, 225 org, 15 sekolah, 1 komunitas</b>							
1	Pelatihan dan simulasi pengurangan resiko bencana	jumlah peserta pelatihan & simulasi pengurangan resiko bencana	500 org	500 org	100%	232.000.000	214.812.700	92,59	100		
2	Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	jumlah sekolah siaga bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100.000.000	74.199.550	74,20	100		
3	peningkatan koordinasi forum penanggulangan bencana	jumlah forum penanggulangan	-	-	0	-	-	-	0	tdk dilaksanakan krn refokusing	dianggarkan kembali di 2021
4	Penyelenggaraan Sekolah Sungai	jumlah komunitas sekolah sungai	1 komunitas	1 komunitas	100%	45.000.000	32.455.750	72,12	100		
6	pembentukan desa tangguh bencana	jumlah desa tangguh bencana	2 desa	2 desa	100%	100.000.000	89.002.651	89,00	100		
7	penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana	jumlah dokumen penanggulangan bencana tersusun	-	-	0	7.550.000	5.200.000	68,87	0	tdk dilaksanakan krn refokusing anggaran	dianggarkan kembali di 2021
<b>4</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>	<b>cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>						

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	jumlah frekuensi koordinasi & rehabilitasi pasca bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	50%	2.146.688.813	149.067.470	6,94	6	untuk pembuatan talud penahan didinding hanya jasa konsultansi perencanaan yg dilaksanakan	untuk pembuatan talud dinding penahan tanah kali dengkek akan dilaksanakan tahun 2021 dan anggaran dimasukkan di DPA 2021
2	penyelenggaraan pelatihan penanganan pasca bencana	jumlah pelatihan penanganan pasca bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	72.130.500	68.930.500	95,56	100		
5	<b>Program Penanganan Darurat Bencana</b>	<b>prosentase korban bencana skala kabupatenyg dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat,prosentase korban bencana skala kab/kota yg menerima bantuan sosial selama tanggap darurat, prosentase tercukupinya logistik untuk korban bencana</b>	98%	98%	100%						
1	Koordinasi, Pemantauan dan Operasional penanganan Darurat Bencana	jumlah kordinasi pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	311.914.000	239.263.800	76,71	100		
2	Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	jumlah koordinasi pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	354.232.000	321.103.364	90,65	100		
3	Droping Air Bersih	jumlah droping air bersih wilayah kabupaten	25 desa	25 desa	100%	242.132.000	200.860.900	82,96	100		
4	Penyediaan Dana Siap Pakai	jumlah dana siap pakai untuk penanganan darurat bencana	26 kecamatan	26 kecamatan	100%	500.000.000	487.857.420	97,57	100		
5	pengadaan sarana prasarana penanganan bencana	jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana	3 jenis	3 jenis	100%	495.000.000	402.439.237	81,30	100		
	<b>BAGIAN KESRA</b>										
1	<b>Program Peningkatan Keagamaan</b>										

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Peningkatan program pelayanan jamaah haji	Jumlah Jamaah Haji yang Berangkat	0	0	0	-	-	0	0	Karena Pandemi Covid-19 maka kegiatan tersebut di rasionalisasi	Kegiatan tidak dilaksanakan di rasionalisasi karena pandemi covid-19
2	Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan	Jumlah Juara Qori/Qoriah dan Hafid/Hafidoh tingkat pelajar	0	0	0	-	-	0	0	Karena Pandemi Covid-19 maka kegiatan tersebut di rasionalisasi	Kegiatan tidak dilaksanakan di rasionalisasi karena pandemi covid-19
3	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah Hari-hari Besar Keagamaan di Kabupaten Klaten	3	3	100	324.660.000	138.990.773	42,81117877	100		
4	Penunjang operasional pengelolaan masjid pemerintah daerah	Jumlah Masjid Pemda yang Terfasilitasi	2	2	100	1.614.192.000	1.481.017.996	91,74980399	100		
<b>2</b>	<b>Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>										
1	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kejuangan	Terselenggaranya Ziarah ke Makam Kyai Mlati dan Makam Bupati Klaten Pertama	2	2	100	13.210.000	13.210.000	100	100		
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>										
1	Penunjang operasional bantuan	Jumlah Pemohon/Organisasi yang di Fasilitasi	23	23	100	1.965.000	1.965.000	100	100		
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk HIV/AIDS</b>										
1	Sosialisasi HIV/AIDS dan penyakit menular seksual	Jumlah Peserta Sarasehan	0	0	0	-	-	0	0	Karena Pandemi Covid-19 maka kegiatan tersebut di rasionalisasi	Kegiatan tidak dilaksanakan di rasionalisasi karena pandemi covid-19
	<b>TOTAL</b>					<b>12.389.325.774</b>	<b>9.373.422.517</b>				



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

URUSAN : TENAGA KERJA

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DISPERINAKEK</b>											
1	<b>Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan	60	50	83,33						
1	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Jumlah lokasi pendataan ketenagakerjaan	26	26	100	400.000.000	167.928.400	41,98	50		
2	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari kerja yang dilatih	40	40	100	350.000.000	336.227.300	96,06	100		
3	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah LPKS yang dibina	15	15	100	30.000.000	22.851.500	76,17	100		
4	Pembinaan Tenaga Kerja AKAD	Jumlah Tenaga Kerja AKAD yang dibina	200	200	100	27.800.000	24.184.500	86,99	100		
2	<b>Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>Partisipasi angkatan kerja Perempuan</b>									
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	25,40	17,24	67,87			#DIV/0!			
1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah kegiatan Informasi Pasar Kerja (IPK) Online	2	2	100	102.200.000	55.916.284	54,71	100		
2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Pencari kerja yang disosialisasi	150	150	100	25.000.000	24.256.800	97,03	100		
3	Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang ikut Job Market Fair									
4	Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK	Jumlah Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK									
3	<b>Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	80,50	55,56	69,02						
		Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun	0,66	11,98	1815,15						
1	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah pengusaha dan pekerja yang ikut sosialisasi pprosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	60	60	100	19.000.000	16.058.550	84,52	100		
2	Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja	Jumlah serikat pekerja yang disosialisasi agar lebih meningkat SDM-nya	60	60	100	16.000.000	15.178.400	94,87	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	Jumlah Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha yang disosialisasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan jumlah pengiriman Tim Porseni LKS Tripartit	60	60	100	40.000.000	30.869.500	77,17	100		
4	Operasional Dewan Pengupahan	Jumlah perusahaan yang dipantau UMK dan struktur skala upah	25	25	100	27.000.000	18.817.000	69,69	100		
5	Sosialisasi Upah Minimum	Jumlah Pengusaha dan Pekerja yang disosialisasi Upah Minimum	0	0		-	-				
6	Penyelesaian Kasus PHI/PHK	Jumlah kasus PHI/PHK antara pengusaha dan Pekerja	20	12	60	40.000.000	29.352.000	73,38	100		
7	Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan	Jumlah pengusaha dan pekeja yang dilatih cara membuat Peraturan Perusahaan dan Struktur Skala Upah	60	60	100	17.654.000	15.714.500	89,01	100		
	<b>TOTAL</b>					<b>1.094.654.000</b>	<b>757.354.734</b>	<b>69,19</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------



**URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINSOS P3AKB</b>											
<b>1</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Persentase OPD yang menerapkan PPRG</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100,00</b>	<b>70.057.600</b>	<b>68.113.350</b>	<b>97,22</b>	<b>100</b>		
1	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A)	Jumlah peserta peningkatan kapasitas bagi SDM di P2TP2A Kabupaten dan PPT Kecamatan	60	60	100,00	8.433.000	8.407.800	<b>99,70</b>	100		
2	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak	80	80	100,00	14.469.000	13.968.900	96,54	97		
3	Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG	Jumlah peserta advokasi PUG dan PPRG	3	3	100,00	18.490.600	18.100.550	97,89	98		
4	Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah peserta sosialisasi, advokasi dan pengembangan sistem data gender dan anak	0	0	0,00	0	-	0,00	0		
5	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah kegiatan pembinaan perlindungan anak bagi dinas/instansi terkait, penyuluh KB dan puskesmas, jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bagi kecamatan, TP PKK kecamatan dan dharmawanita serta kegiatan PATBM	2	2	100,00	28.665.000	27.636.100	96,41	96		
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	<b>Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<b>4,8</b>	<b>5,68</b>	<b>118,33</b>	<b>47.964.800</b>	<b>47.771.650</b>	<b>99,60</b>	<b>118</b>		
		<b>Rasio perempuan korban kekerasan</b>	<b>1,35</b>	<b>3,52</b>	<b>260,74</b>				<b>261</b>	bahwa semakin tinggi kesadaran perempuan untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga	

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking	Jumlah kasus/data korban kekerasan yang ditangani	0	42		0	-	0,00	0		
2	Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi deteksi dini kekerasan terhadap anak di sekolah terutama pencegahan bullying di sekolah	40	40	100,00	31.912.800	31.720.150	99,40	99		
3	Advokasi Keadilan Restoratif	Jumlah aparat penegak hukum yang mendapat sosialisasi advokasi keadilan restoratif	106	106	100,00	16.052.000	16.051.500	100,00	100		
<b>3</b>	<b>Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>	<b>Prosentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>89.057.100</b>	<b>85.962.396</b>	<b>96,53</b>			
1	Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak	Jumlah pertemuan forum anak desa dan kecamatan aktif	2	2	100,00	5.650.000	5.348.000	94,65	95		
2	Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)	jumlah desa peserta dari Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak	15	15	100,00	22.087.100	22.002.650	99,62	100		
3	Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi	jumlah peserta pelatihan ketrampilan	0			0	-		0		
4	Peningkatan peran serta Organisasi Wanita	frekuensi kegiatan organisasi dharmawanita persatuan meningkat	1	1	100,00	61.320.000	58.611.746	95,58	96		
	<b>TOTAL</b>					<b>207.079.500</b>	<b>201.847.396</b>	<b>97,47</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

URUSAN : PANGAN

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>											
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>Ketersediaan energi</b>	<b>2967 kkal/kapita/hari</b>	<b>3003 kkal/kapita/hari</b>	<b>101,21</b>	<b>1.818.275.103</b>	<b>1.683.279.371</b>	<b>92,58</b>	<b>100,00</b>		
1	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah beras IR 64 untuk gudang cadangan pangan	36000 kg	36000 kg	100,00	462.942.000	400.303.900	86,47	100,00		
2	Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan	Jumlah kelompok afinitas di desa mandiri pangan/replikasi yang dibina	5 kelompok	5 kelompok	100,00	10.000.000	9.999.900	100,00	100,00		
3	Pengembangan diversifikasi pangan	Jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal	100 orang	100 orang	100,00	18.605.000	18.605.000	100,00	100,00		
4	Pembinaan dan pengembangan Lumbung pangan	Jumlah peserta pelatihan kelompok lumbung pangan	5 kelompok	5 kelompok	100,00	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00		
5	Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah produsen pangan segar dan produsen pangan olahan yang dibina	50 orang	50 orang	100,00	11.457.000	11.457.000	100,00	100,00		
6	Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah peserta lokakarya Dewan Ketahanan Pangan Kab. Klaten	0 orang	0 orang	0	1.000.000	947.700	94,77	100,00	Rasionalisasi anggaran (ATK untuk awal kegiatan)	
7	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah penerima bantuan pemanfaatan lahan pekarangan	16 desa	16 desa	100,00	208.405.000	196.988.100	94,52	100,00		
8	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Jumlah gapoktan yang mengikuti pelatihan administrasi	15 poktan	15 poktan	100,00	24.385.000	24.383.500	99,99	100,00		
9	Fasilitasi distribusi dan akses pangan	Jumlah pemantauan harga pangan dan bazar pasar murah	3 kali	3 kali	100,00	26.800.000	26.651.271	99,45	100,00		
10	Pengembangan Rumah Pangan Lestari	Jumlah kelompok wanita tani (KWT) yang menerima bantuan pengembangan rumah pangan lestari	33 kelompok	33 kelompok	100,00	1.044.681.103	983.943.000	94,19	100,00		
<b>JUMLAH</b>						<b>1.818.275.103</b>	<b>1.683.279.371</b>	<b>92,58</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

**URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DLHK</b>											
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD</b>									
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	1050 surat	778 surat	74	5.500.000	5.420.000	99	100,0	Adanya pandemi Covid	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor yang terbayarkan	4 jenis	4 jenis	100	61.000.000	53.885.915	88	100,0		
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran/keuangan	4 orang	4 orang	100	58.000.000	45.394.340	78	100,0		
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	2 orang	2 orang	100	67.165.000	58.234.240	87	100,0		
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	55 jenis	55 jenis	100	40.000.000	39.173.600	98	100,0		
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan dokumen kantor	11 jenis	11 jenis	100	26.800.000	25.637.500	96	100,0		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 jenis	12 jenis	100	13.500.000	13.450.000	100	100,0		
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku/dokumen pendukung tugas kantor serta bahan bacaan	8 jenis	8 jenis	100	10.000.000	9.790.000	98	100,0		
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat, rakor dan pertemuan pada Dinas LHK	30 kali	30 kali	100	30.000.000	29.875.000	100	100,0		
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	50 kali	50 kali	100	81.150.000	81.049.948	100	100,0		
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	45 kali	45 kali	100	30.000.000	29.352.000	98	100,0		
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	3 orang	3 orang	100	45.000.000	43.977.360	98	100,0		
13	Penyediaan jasa pengemudi	Jumlah jasa pengemudi kontrak DLHK	1 orang	1 orang	100	18.000.000	17.319.120	96	100,0		
14	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan	23 buah	23 buah	100	11.500.000	11.097.500	97	100,0		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran yang layak dan memadai</b>											
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah sarpras perlengkapan gedung kantor	4	jenis	4	jenis	100	133.775.000	128.251.000	96	100,0		
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah sarpras kantor/aparatur pemerintah yang memadai (pengisian peralatan kantor ruang arsip/peralatan kerja, penataan sarpras kerja)	3	jenis	3	jenis	100	50.850.000	49.225.000	97	100,0		
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jangka waktu pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala	12	bulan	12	bulan	100	73.000.000	71.863.000	98	100,0		
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara	50	unit	50	unit	100	90.000.000	84.135.051	93	100,0		
19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan/servis peralatan kantor selama 1 tahun	22	kali	22	kali	100	25.000.000	24.975.000	100	100,0		
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Tersedianya aparatur yang berkualitas dan profesional</b>											
20	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan	Jumlah aparatur/pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan dan kursus/pembelajaran singkat	2	orang	2	orang	100	25.000.000	24.750.000	99	100,00		
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Jumlah bank sampah aktif dan 3R</b>											
21	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarpras pengelolaan persampahan untuk fasum/fasos	150	unit	150	unit	100	1.079.608.800	1.061.933.500	98	100		
22	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok 3R yang mendapat pendampingan	27	desa/lo kasi	27	desa/lo kasi	100	1.671.335.000	1.522.116.584	91	100		
23	Pembinaan Bank Sampah	Jumlah bank sampah aktif dan 3R	11	kelompo k	11	kelompo k	100	272.800.000	248.693.166	91	100		
24	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah	jumlah pembangunan bank sampah	0	unit	0	unit		56.700.000	23.887.600	42	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
25	Pengolahan Sampah 3R	Jumlah kelompok 3R beserta fasilitasnya	2 lokasi	2 lokasi	100	1.053.600.000	866.080.685	82	100		
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Pengkajian pencemaran status mutu air</b>									
26	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Nilai capaian Adipura	75 point		0	167.720.000	59.038.900	35	100		
27	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah sampling titik pantau kualitas udara dan air	26 titik	26 titik	100	75.000.000	49.730.650	66	100		
28	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pengawasan pelaku usaha/kegiatan	50 perusahaan	50 perusahaan	100	24.000.000	17.079.990	71	100		
29	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang terlaksana di Kabupaten Klaten	3 kegiatan	3 kegiatan	100	32.730.000	25.087.564	77	100		
30	Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan	jumlah pemantauan dokumen lingkungan dan pembinaan bagi pelaku usaha/kegiatan	30 pelaku usaha	30 pelaku usaha	100	20.890.000	8.493.000	41	100		
31	Operasional Laboratorium Lingkungan	Pengujian analisa kualitas air sungai/limbah	40 titik sampling	40 titik sampling	100	75.009.200	63.667.100	85	100		
32	Operasional perijinan	jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai ijin lingkungan	500 pelaku usaha	586 pelaku usaha	117	130.000.000	109.174.822	84	100		
33	Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah	jumlah pengelolaan air limbah yang terbangun	3 unit	3 unit	100	160.075.000	146.223.450	91	100		
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>										
34	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air	Cakupan luasan area penghijauan sekitar mata air	3 ha	3 ha	100	3.870.000	3.866.500	100	100		
35	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	2 kegiatan	2 kegiatan	100	150.000.000	137.383.000	92	100		
36	Penghijauan Jalan Dalam Kota	Panjang ruas jalan yang ditanami turus jalan kota	5 km	5 km	100	200.000.000	186.895.750	93	100		
37	Pengadaan bibit tanaman penghijauan	Jumlah bibit tanaman penghijauan yang terbeli	3500 batang	3500 batang	100	150.000.000	136.164.500	91	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>										
38	Pengembangan data dan Informasi lingkungan	Jumlah Pelayanan informasi yang dapat diakses masyarakat tentang kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Klaten	12 bulan	12 bulan	100	170.000.000	165.427.500	97	100		
39	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah				0	75.000.000	59.927.000	80	100		
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)</b>	<b>Jumlah penataan taman kota</b>									
40	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	jumlah penataan taman kota/RTH	1 lokasi	1 lokasi	100	500.000.000	479.279.300	96	100		
41	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah pemeliharaan RTH Kab. Klaten	3 lokasi	3 lokasi	100	481.866.367	455.434.163	95	100		
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Jumlah kelompok yang peduli terhadap lingkungan hidup</b>									
42	Peningkatan Sekolah Adiwiyata	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti lomba desa ramah lingkungan	45 sekolah	45 sekolah	100	400.000.000	362.361.350	91	100		
43	Pembinaan Saka Kalpataru	Jumlah siswa dan sekolah peduli dan berwawasan lingkungan	300 siswa	300 siswa	100	24.325.000	11.688.000	48	100		

<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>										
1	Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana pengelolaan prasarana persampahan	Jumlah bulan operasioanl TPA	29 Unit	29 Unit	100	8.850.000.000	6.583.845.681	74,39	100		
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah	Jumlah Lokasi TPS yang dipelihara	2 Lokasi	2 Lokasi	100	100.000.000	96.415.250	96,42	100		
3	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Jenis sarana prasarana yang di bangun	1 Paket	1 Paket	100	18.000.000	4.005.950	22,26	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	Pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Jenis sarpras pengelolaan persampahan yang dibeli	1	Paket	1	Paket	100	1.485.666.000	1.329.025.500	89,46	100		
<b>2</b>	<b>Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>												
1	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah dokumen DED dan Masterplan tersusun, Jumlah RTH terbangun	2	Dokumen	2	Dokumen	100	745.750.000	711.373.400	95,39	100		
2	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah bulan pemeliharaan RTH	67	orang	67	orang	100	3.775.000.000	2.669.976.058	70,73	100		
3	Pengadaan sarana prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah jenis sarana prasarana pelayanan pertamanan yang di adakan	8	Jenis	8	Jenis	100	1.247.031.200	1.046.747.100	83,94	100		
	<b>TOTAL</b>							<b>24.091.216.567</b>	<b>19.487.878.587</b>	<b>80,89</b>			



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

**URUSAN : Administrasi Kependudukan dan Capil**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DISDUKCAPIL</b>											
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah dokumen surat masuk dan keluar kependudukan dan surat menurut lainnya	1500 surat	1500 surat	100	61.000.000	52.188.300	86	100	1. Adanya dokumen kependudukan yang tidak sampai pada tujuan yang dikirim oleh PT.Pos Klaten 2. Adanya keterlambatan pengiriman dari PT.Pos	1. Koordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan PT Pos
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	jumlah jenis rekening terbayar (langganan bandwidth selama 12	2 jenis	2 jenis	100	206.000.000	197.350.000	96	100	NIHIL	NIHIL
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah tenaga kontrak dan THL administrasi keuangan, perencanaan,	9 orang	9 orang	100	125.200.000	115.709.943	92	100	NIHIL	NIHIL
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah dan jenis peralatan kebersihan kantor yang tersedia	26 jenis	26 jenis	100	58.563.875	51.964.100	89	100	NIHIL	NIHIL
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah jenis atk tersedia disdukcapil	40 jenis	40 jenis	100	30.000.000	28.761.500	96	100	NIHIL	NIHIL
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	2 jenis	100	15.000.000	14.136.250	94	100	NIHIL	NIHIL
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	15 jenis	15 jenis	100	9.000.000	8.885.000	99	100	NIHIL	NIHIL
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	3 jenis	3 jenis	100	4.000.000	3.084.000	77	100	NIHIL	NIHIL
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Bahan Logistik	jumlah bahan logistik tersedia	500 liter	500 liter	100	6.000.000	2.100.000	35	100	1. Digunakan untuk memanaskan mesin genset, dan tidak adanya pemadaman listrik	1. Optimalisasi perencanaan kegiatan penyediaan bahan logistik

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah lembur,rapat koordinasi dan tamu	75 kali	75 kali	100	48.718.125	36.917.000	76	100	1. Karena pekerjaan bisa diselesaikan dengan tepat waktu, sehingga untuk kegiatan lembur ada pengurangan	1. Optimalisasi perencanaan kegiatan lembur
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	20 kali	20 kali	100	40.000.000	37.355.560	93	100	NIHIL	NIHIL
12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	50 kali	50 kali	100	20.000.000	19.976.500	100	100	NIHIL	NIHIL
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	23 unit	23 unit	100	397.698.000	355.716.500	89	100	NIHIL	NIHIL
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	31 unit	31 unit	100	66.000.000	59.568.000	90	100	NIHIL	NIHIL
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	61 unit	61 unit	100	38.000.000	34.574.445	91	100	NIHIL	NIHIL
16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	jumlah peserta pelatihan tingkat desa dan kecamatan	0 orang	0 orang	-	-	-	-	-	NIHIL	NIHIL
17	Program Penataan Administrasi Kependudukan / Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun,	jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pelayanan pendaftaran	125000 dokumen	125000 dokumen	100	440.600.000	421.566.620	96	100	NIHIL	NIHIL
18	Program Penataan Administrasi Kependudukan / Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	jumlah perjalanan dinas dan honor tim untuk verifikasi KTP-el calon jamaah haji dan	2 jenis	2 jenis	100	35.000.000	33.222.559	95	100	NIHIL	NIHIL
19	Program Penataan Administrasi Kependudukan / Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan	jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil	25000 dokumen	25000 dokumen	100	163.042.783	140.251.206	86	100	NIHIL	NIHIL
20	Program Penataan Administrasi Kependudukan / Penataan Arsip Kependudukan	jumlah dokumen arsip akte pencatatan sipil	30000 berkas	30000 berkas	100	54.799.000	52.278.131	95	100	NIHIL	NIHIL
21	Program Penataan Administrasi Kependudukan / Penyusunan Laporan Informasi	jumlah buku dan cd laporan profil kependudukan	2 jenis	2 jenis	100	14.000.000	10.372.800	74	100	NIHIL	NIHIL

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Laporan Informasi Kependudukan	kependudukan									
22	Program Penataan Administrasi Kependudukan / Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan	jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pelayanan pendaftaran	125000 dokumen	125000 dokumen	100	4.104.239.000	3.285.108.192	80	100	NIHIL	NIHIL
	<b>TOTAL</b>					<b>5.936.860.783</b>	<b>4.961.086.606</b>	<b>84</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

**URUSAN : Pemberdayaan Masyarakat Desa**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DISPERMASDES</b>											
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>85</b>	<b>75</b>	<b>88</b>	<b>445.137.100</b>	<b>415.278.256</b>	<b>93</b>	<b>100</b>		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim	700	800	114	7.000.000	5.100.000	73	100		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional	4	4	100	50.000.000	39.945.333	80	100		
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL Kebersihan	3	3	100	90.000.000	81.502.716	91	100		
4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor	61	61	100	40.000.000	36.310.000	91	100		
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis cetak dan penggandaan pendukung adminitrasi kantor	2	2	100	40.000.000	39.690.000	99	100		
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah perlengkapan alat listrik	13	13	100	10.000.000	6.477.000	65	100		
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6	6	100	10.000.000	9.970.800	100	100		
8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Koordinasi dan Penerimaan Tamu	75	46	61	50.000.000	49.931.375	100	100		
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	35	40	114	50.000.000	49.943.192	100	100		
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dalam daerah	150	169	113	28.137.100	28.100.000	100	100		
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga pengamanan kantor	5	5	100	70.000.000	68.307.840	98	100		
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100	<b>306.976.400</b>	<b>290.601.749</b>	<b>95</b>	<b>100</b>		
12	Pengadaan perlengkapan	Jumlah pengadaan	3	2	67	20.362.900	12.980.000	64	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	gedung kantor	perlengkapan kantor									
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah rehab gedung kantor	1	1	100	198.373.500	195.838.000	99	100		
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	22	22	100	70.240.000	63.918.749	91	100		
15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	15	15	100	3.000.000	2.970.000	99	100		
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	30	30	100	15.000.000	14.895.000	99	100		
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna</b>	<b>82</b>	<b>64</b>	78	<b>2.659.238.800</b>	<b>2.511.989.427</b>	<b>94</b>	<b>100</b>		
17	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD )	Jumlah desa yang terfasilitasi DD dan ADD	391	391	100	2.524.602.800	2.394.474.846	95	100		
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Jumlah kegiatan pencanangan BBGRM	2	2	100	9.000.000	8.491.500	94	100		
18	Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang terlatih	3	3	100	62.636.000	61.744.500	99	100		
19	Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyusunan profil desa dan kelurahan	401	401	100	20.000.000	9.803.537	49	100		
20	Fasilitasi sistem informasi desa/SID	Jumlah Desa yang mendapat pelatihan pemanfaatn aplikasi Sistem Informasi Desa	391	391	100	43.000.000	37.475.044	87	100		
<b>IV</b>	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>	<b>Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes</b>	<b>64</b>	<b>91</b>	142	<b>112.903.375</b>	<b>99.493.186</b>	<b>88</b>	<b>100</b>		
21	Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat (BUMDes) yang terbina dan terlatih untuk	25	57	228	83.423.375	73.521.186	88	100		
22	Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)	Jumlah lembaga yang terbina	143	143	100	4.480.000	4.480.000	100	100		
23	Peningkatan pembangunan	Jumlah kawasan ..	2	2	100	25.000.000	21.492.000	86	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	kawasan pedesaan	pedesaan yang di fasilitasi									
<b>V</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat</b>	<b>67</b>	1337	1996	<b>279.266.600</b>	<b>267.217.750</b>	<b>96</b>	<b>100</b>		
24	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMMD)	Jumlah desa lokasi TMMMD	6	6	100	63.600.000	54.038.300	85	100		
25	Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu	Jumlah pokjanel posyandu yang dibina	2272	2272	100	135.666.600	134.194.700	99	100		
26	Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa	Jumlah fasilitasi pembekalan perencanaan pembangunan Desa	26	26	100	80.000.000	78.984.750	99	100		
<b>VI</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Prosentase jumlah desa binaan PKK dalam satu tahun RPJMD</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	100	<b>673.813.016</b>	<b>665.259.270</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
27	Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelembagaan kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang terfasilitasi di	52	52	100	583.898.716	576.555.470	99	100		
28	Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong	Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi dengan Pokja I	52	52	100	17.297.100	16.975.200	98	100		
29	Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi	Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi dengan Pokja II	52	52	100	20.223.100	19.864.500	98	100		
30	Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga	Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi dengan Pokja III	52	52	100	9.836.100	9.761.100	99	100		
31	Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup	Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi dengan Pokja IV	52	52	100	42.558.000	42.103.000	99	100		
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	<b>Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	<b>89</b>	<b>75</b>	84	-	-	0	<b>0</b>		
<b>VIII</b>	<b>Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa</b>	<b>Prosentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	101	<b>233.875.000</b>	<b>203.630.451</b>	<b>87</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
32	Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Desa	Jumlah peraturan yang disosialisasikan kepada pemerintah desa	3	3	100	85.897.500	79.515.250	93	100		
33	Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa	Jumlah regulasi tentang desa yang tersusun	3	3	100	105.000.000	98.298.725	94	100		
34	Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa	391	391	100	18.527.500	12.547.500	68	100		
35	Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa	Jumlah fasilitasi inventarisasi aset desa yang bermasalah	11	11	100	10.000.000	4.303.531	43	100		
36	Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan desa/kelurahan	Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa	26	26	100	14.450.000	8.965.445	62	100		
	<b>TOTAL</b>					<b>4.711.210.291</b>	<b>4.453.470.089</b>	<b>94,53</b>			

**URUSAN : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINSOS P3AKB</b>											
1	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)</b>	<b>65,03</b>	<b>70,9</b>	<b>109,03</b>	<b>8.347.386.000</b>	<b>5.871.199.832</b>	<b>70,34</b>	<b>91,07</b>		
		Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / Drop Out KB	4,98	9,7	194,78						
		Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)	8,94	16,95	189,60						
	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB	jumlah sepeda motor bagi petugas lapangan KB	28	28	100,00	476.904.700	460.590.750	96,58	100		
	Pembangunan Gedung/Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	jumlah balai KB yang dibangun	1	1	100,00	358.495.300	321.956.000	89,81	100		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah jenis sarana dan prasarana klinik pelayanan KB	6	6	100,00	25.200.000	24.300.000	96,43	100		
	Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	jumlah balai KB yang mendapatkan dana operasional	20	20	100,00	1.965.208.000	1.171.427.789	59,61	60	frekuensi pertemuan/rapat teknis tidak dapat dilaksanakan sesuai target karena kondisi pandemi.	
	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasyankes yang mendapatkan alokasi distribusi alokon	85	85	100,00	193.192.000	30.944.000	16,02	90	Sevcara target fisik tercapai, akan tetapi dilaksanakan dengan ekspedisi.	
	Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kecamatan yang mendapatkan operasional penggerakan kampung KB	26	26	100,00	2.084.264.000	819.350.000	39,31	40	frekuensi pertemuan tidak dapat dilaksanakan sesuai target karena kondisi pandemi.	

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD)	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan operasional masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD	401	401	100,00	2.406.000.000	2.272.791.715	94,46	90	Lokasi pembinaan untuk wilayah/desa zona merah tidak dapat dilaksanakan, sehingga tidak bisa sesuai target 100%.	
	Dukungan Media KIE dan Manajemen	jumlah kegiatan pendukung pengelolaan operasional keluarga berencana	1	1	100,00	234.020.000	184.378.700	78,79	95	frekuensi pertemuan/rakor tidak dapat dilaksanakan sesuai target karena kondisi pandemi	
	Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan	jumlah jenis sarana KIE kit	5	5	100,00	32.400.000	30.656.800	94,62	100		
	Pengadaan Sarana Pendataan	jumlah jenis sarana pendataan	3	3	100,00	85.300.000	84.800.000	99,41	100		
	Pelayanan Kontrasepsi	Jumlah Jenis Pelayanan Kontrasepsi	1	1	100,00	103.517.000	98.356.228	95,01	100		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan	Jumlah sarana dan prasarana rumah data kependudukan di kampung KB	5	5	100,00	32.510.000	32.386.950	99,62	100		
	Peningkatan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah kegiatan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi	1	1		310.000.000	301.885.900	97,38	100		
	Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah BKB Kit yang terbeli	5	5	100,00	40.375.000	37.375.000	92,57	100		
<b>2</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (age specific fertility Rate/ ASFR 15-29 years old)</b>	<b>33</b>	<b>0,42</b>	<b>1,27</b>	<b>34.175.500</b>	<b>33.500.190</b>	<b>98,02</b>	100		
	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi kesehatan reproduksi remaja (termasuk lomba genre)	2	2	100,00	34.175.500	33.500.190	98,02	100		
	Peningkatan kapasitas Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	Jumlah pengelola, konselor dan pendidik sebaya aktif	0			-	-				

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>3</b>	<b>Pembinaan Keluarga Sejahtera</b>		<b>28</b>	<b>36,21</b>	<b>129,32</b>	<b>305.413.000</b>	<b>217.836.409</b>	<b>71,33</b>			
	Peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja	Jumlah koordinasi terkait program kependudukan dan pembangunan keluarga dengan mitra kerja	1	1	100,00	11.000.000	10.306.000	93,69	100		
	Pengembangan dan pembinaan ketahanan keluarga	Jumlah Jenis Pengembangan dan pembinaan ketahanan keluarga	1	1	100,00	30.267.000	29.153.437	96,32	100		
	Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah Jenis Penyediaan data dan informasi keluarga	1	1	100,00	56.586.000	47.547.072	84,03	100		
	Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA)	Jumlah desa yang dibina dalam rangka penanganan dan pencegahan stunting	10	10	100,00	207.560.000	130.829.900	63,03	100		
	<b>TOTAL</b>					<b>8.686.974.500</b>	<b>6.122.536.431</b>	<b>70,48</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

**URUSAN : PERHUBUNGAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>											
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	3.500	8.120	232%	3.000.000	3.000.000	100%	100%		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis rekening terbayar	11	11	100%	275.622.000	229.189.067	83%	100%		
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah THL administrasi perkantoran	7	7	100%	102.154.000	100.330.073	98%	100%		
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL kebersihan kantor	4	4	100%	194.157.000	186.466.200	96%	100%		
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	64	64	100%	75.000.000	72.057.245	96%	100%		
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	19	19	100%	124.823.000	117.387.350	94%	100%		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	14	14	100%	5.000.000	4.963.500	99%	100%		
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	5	5	100%	5.916.000	5.916.000	100%	100%		
9	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makan dan minum tersedia	72	72	100%	20.000.000	19.916.500	100%	100%		
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah frekuensi perjalanan ke luar daerah	30	30	100%	83.860.000	83.783.567	100%	100%		
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	100	100	100%	80.000.000	79.975.000	100%	100%		
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah THL pengamanan kantor	6	6	100%	83.734.000	81.578.280	97%	100%		
13	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	8	8	100%	8.175.000	8.050.000	98%	100%		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas / operasional terbeli	0	0	0%	-	-	0%	0%		
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor terbeli	29	29	100%	124.700.000	118.250.700	95%	100%		
3	Pengadaan mebeleur	jumlah mebelair terbeli	12	12	100%	56.253.000	41.328.000	73%	100%		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor terpelihara	1	1	100%	170.000.000	167.816.800	99%	100%		
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional terpelihara	30	30	100%	120.000.000	92.803.763	77%	100%		
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	21	21	100%	55.000.000	41.901.500	76%	100%		
7	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebelair terpelihara	0	0	0%	-	-	0%	0%		
8	Pengadaan Papan Informasi	jumlah papan informasi terbeli	0	0	0%	-	-	0%	0%		
<b>V</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ</b>										
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	jumlah alat uji terpelihara	13	13	100%	86.875.000	84.921.500	98%	100%		
2	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	jumlah terminal	2	2	100%	75.000.000	71.992.700	96%	100%		
3	Rehabilitasi dan pemeliharaan traffic light	jumlah traffic light terpelihara	31	31	100%	140.380.000	138.622.040	99%	100%		
4	Rehabilitasi/pemeliharaan Marka Jalan	jumlah marka jalan terpelihara	5.715	5.715	100%	872.700.000	787.047.150	90%	100%		
5	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	jumlah rambu lalu lintas terpelihara	48	48	100%	30.000.000	27.297.500	91%	100%		
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>										
1	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	jumlah penguji terfasilitasi	12	12	100%	247.800.000	244.453.734	99%	100%		
2	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	jumlah aplikasi SIM angkutan/dokumen tersusun	0	0	0%	-	-	0%	0%		
3	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	jumlah posko terpasang	7	7	100%	124.000.000	120.064.750	97%	100%		
4	Fasilitasi mudik lebaran	jumlah bus untuk menjemput pemudik dari Jakarta	0	0	0%	-	-	0%	0%		
5	Pemilihan awak kendaraan umum teladan	jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan	0	0	0%	-	-	0%	0%		
6	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan	jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	0	0	0%	-	-	0%	0%		
7	Penertiban dan pengawasan terminal	Jumlah terminal tertib dan terawasi	7	7	100%	4.000.000	3.883.150	97%	100%		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS</b>										
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	jumlah rambu lalu lintas terpasang	227	227	100%	200.000.000	197.836.500	99%	100%		
2	Pengamanan lalu lintas jalan	jumlah THL pengamanan perlintasan sebidang terbayar	6	6	100%	129.831.000	126.589.998	98%	100%		
3	Operasional penertiban angkutan galian golongan C	Jumlah operasi penertiban angkutan galian golongan C	65	65	100%	85.000.000	84.996.550	100%	100%		
4	Loma tertib lalu lintas / wahana tata nugraha	jumlah keikutsertaan dalam lomba WTN	0	0	0%	-	-	0%	100%		
5	Car Free Day Kabupaten	jumlah CFD terlaksana	11	11	100%	64.336.000	64.200.500	100%	100%		
6	Koordinasi forum LLAJ	Jumlah Koordinasi terlaksana	5	5	100%	10.000.000	10.000.000	100%	100%		
7	Pengadaan dan pemasangan guardrail	Jumlah guardrail terpasang	26	26	100%	200.000.000	164.206.067	82%	100%		
8	Pengadaan dan pemasangan traffic light	jumlah traffic light terpasang	1	1	100%	996.605.000	955.763.300	96%	100%		
9	Pengendalian operasional lalu lintas	jumlah THL Pengendalian Operasional LL	33	33	100%	724.339.000	717.999.177	99%	100%		
10	Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan	Jumlah cermin tikungan terpasang	22	22	100%	110.000.000	108.708.000	99%	100%		
11	Pengadaan dan pemasangan Lampu Kedip	jumlah lampu kedip terpasang	0	0	0%	-	-	0%	0%		
12	Pengelolaan tempat parkir	jumlah kapling terkelola	31	31	100%	538.050.000	509.356.100	95%	100%		
13	Pengadaan dan pemasangan guardrail (DAK Bidang Jalan)		0	0	0%	-	-	0%	0%		
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KELOMPOK PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>										
1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor tersedia	0	0	0%	-	-	0%	0%		
2	Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya	Jumlah buku uji dan tanda uji tersedia	3.000	3.000	100%	77.950.000	77.161.400	99%	100%		
3	Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah THL pengecatan	5	5	100%	68.554.000	65.849.330	96%	100%		
4	Pendataan bengkel, karoseri dan jasa pengiriman barang	jumlah pendataan bengkel, karoseri dan jasa pengiriman barang	0	0	0%	-	-	0%	0%		
		<b>TOTAL</b>				<b>6.372.814.000</b>	<b>6.015.662.991</b>	<b>94%</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

**URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS KOMINFO</b>											
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Kantor Yang Baik</b>	<b>100</b>							Mengalami refocusing anggaran	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	2700	2225	82,40740741	2.050.000	2.040.000	99,51	100		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	Jumlah THL	4	4	100	60.000.000	58.900.599	98,17	100		
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK Tersedia	32	32	100	36.000.000	35.999.000	100,00	100		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak Penggandaan	4	4	100	10.000.000	10.000.000	100,00	100		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	31	31	100	5.000.000	5.000.000	100,00	100		
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Tersedia	1000	1000	100	25.000.000	24.991.625	99,97	100		
7	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Frekuensi Perjalanan Luar Daerah	50	50	100	90.000.000	88.444.996	98,27	100		
8	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dalam Daerah	100	100	100	32.000.000	31.975.000	99,92	100		
9	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12	12	100	7.250.000	7.250.000	100,00	100		
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Dengan</b>	<b>94</b>							Refocusing Anggaran	
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terbeli	34	34	100	2.053.000.000	1.713.031.000	83,44	85		
2	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur Terbeli	63	63	100	100.000.000	97.260.000	97,26	100		
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1	1	100	72.750.000	72.525.165	99,69	100		
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Terpelihara	18	18	100	55.000.000	47.662.540	86,66	88		
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	19	19	100	55.000.000	54.945.000	99,90	100		
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Peralatan Komunikasi dan Informasi Terpelihara	60	60	100	425.000.000	409.651.500	96,39	98		
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Persentase Informasi Sampai Ke Masyarakat</b>	<b>55,08</b>							Karena adanya refocusing anggaran	



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Titik Lokasi Terakses Internet	160	160	100	5.312.000.000	5.285.545.617	99,50	100		
2	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi	50	50	100	904.050.000	895.291.822	99,03	100		
3	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	3	3	100	2.580.000	2.578.875	99,96	100		
4	Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Jumlah Menara Telekomunikasi Yang Terdata	232	203	87,5	13.000.000	12.037.360	92,60	95		
5	Penataan, Pembinaan Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet	Jumlah Warnet Yang Terdata	105	90	85,71428571	4.000.000	3.763.500	94,09	98		
6	Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)	Jumlah KIM di Tingkat Kecamatan Yang Terdata	22	22	100	3.000.000	2.483.000	82,77	96		
7	Penyusunan Dokumen Mikrocell Menara Telekomunikasi	Jumlah Dokumen Mikrocell	1	0	0	0	0		0		
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Persentase SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Terlatih</b>	<b>66,67</b>							Mengalami refocusing anggaran	
1	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Terlatih	10	100	100	13.480.000	13.479.800	99,999	100		
<b>V</b>	<b>Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media</b>	<b>Persentase Event Kabupaten Terpublikasi</b>	<b>92</b>								
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Informasi Yang Disebarluaskan	90	90	100	405.000.000	398.142.000	98,3	99	1. Keterbatasan lokasi informasi	1. Membangun titik - titik lokasi informasi
2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Permintaan Informasi Publik Terlayani / Terjawab	65	65	100	111.840.000	111.321.000	99,5	100	1. Belum adanya website PPID yang terintegrasi	1. Membangun website di semua OPD / Desa secara terintegrasi
<b>BAGIAN HUMAS</b>											
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100</b>						

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah Alat Studio Komunikasi Tersedia	1 Unit	1 Unit	100	196.500.000	194.150.000	99%	100%		
b	Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	Jumlah Tenaga Teknis LPPL RSPD Klaten	9 Orang	9 Orang	100	171.311.300	171.152.386	100%	100%		
<b>2</b>	<b>Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media</b>	<b>2207</b>	<b>2192</b>	<b>99,32%</b>						
a	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Publikasi yang Disampaikan Melalui Media Massa, Radio dan Komunikasi	120 Kegiatan	120 Kegiatan	100%	935.250.000	934.960.000	100%	100%		
b	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah	360 Kegiatan	355 Keegiatn	98,61%	845.247.000	798.766.050	100%	100%		
c	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah Publikasi Melalui Spanduk, Baliho, Penyuluhan, Publikasi Keliling, Sambutan Bupati dan Media Sosial	1720 Kegiatan	1710 Kegiatan	99,41%	276.574.000	266.632.000	97%	100%		
d	Peningkatan Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Mass Media	Jumlah Jumpa Pers, Kegiatan Hari Pers Nasional dan HUT RSPD	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	57.383.000	57.382.500	100%	100%		
	<b>TOTAL</b>					<b>12.279.265.300</b>	<b>11.807.362.335</b>	<b>96%</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

URUSAN : KOPERASI DAN UKM

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM</b>											
	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	Prosentase pertumbuhan UMKM									
	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	Jumlah orang yang dilatih	7 kali	7 org	100	350.000.000	303.851.500	86,8	100		
	Pembinaan dan pemberdayaan UMKM	jumlah pelaku klaster UMKM yang dibina	270 org	270 org	100	500.000.000	366.634.482	73,3	91		
	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	Prosentase promosi produk unggulan									
	Penyelenggaraan pameran bagi usaha mikro kecil menengah	Jumlah event pameran terfasilitasi di Jawa dan luar Jawa	3 event	3 event	100	182.000.000	162.684.917	89,4	100		
					#DIV/0!						
	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	Prosentase koperasi aktif, Prosentase pertumbuhan koperasi, Prosentase manager koperasi yang bersertifikasi									
	Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan koperasi	Jumlah pengurus koperasi terbina dan terawasi Kabupaten Klaten	130 org	100 org	76,92307692	100.000.000	83.999.900	84,0	100		
	Penyelenggaraan pelatihan manajemen koperasi	Jumlah manajer koperasi terlatih dan mendapat sertifikat Kabupaten Klaten			0	-	-	-	-		
	<b>JUMLAH</b>					<b>1.132.000.000</b>	<b>917.170.799</b>	<b>81,0</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

**URUSAN : PENANAMAN MODAL**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/</b>										
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	2460 lembar	2288 lembar	100%	6.000.000	5.980.000	100%	100		
2	Penyediaan SDA	Jumlah jenis rekening	3 jenis	3 jenis	100%	94.500.000	73.484.124	78	95	Langganan internet diambil alih oleh kominfo	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL kebersihan kantor	2 orang	2 orang	100%	44.500.000	42.874.478	96	100		
4	Penyediaan jasa ATK	Jumlah jenis ATK	65 jenis	65 jenis	100%	57.883.182	53.713.500	93	100		
5	Penyediaan jasa barang cetakan dan pengadaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan	3 jenis	3 jenis	100%	77.695.000	73.119.000	94	100		
6	Penyediaan jasa komponen instalansi listrik	Jumlah jenis komponen instalansi listrik	23 jenis	23 jenis	100%	6.000.000	5.941.000	99	100		
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	3 jenis	3 jenis	100%	7.500.000	7.436.000	99	100		
8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yg tersedia	55 kali	55 kali	100%	33.250.000	33.214.500	100	100		
9	Rakor dan konsultasi keluar daerah	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	130 kali	130 kali	100%	60.000.000	59.852.573	100	100		
10	Rakor dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	100 kali	100 kali	100%	24.000.000	22.430.000	93	100		
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah THL keamanan kantor	3 orang	3 orang	100%	44.736.228	41.989.092	94	100		
12	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Jumlah THL pengemudi kantor	1 orang	1 orang	100%	14.916.656	14.486.364	97	100		
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ penyediaan jasa tenaga administrasi kantor	Jumlah THL Administrasi kantor	9 orang	9 orang	100%	131.508.684	126.669.276	96	100		
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/</b>										
1	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah jenis kendaraan dinas yang terpelihara	20 unit	20 unit	100%	51.277.250	43.630.705	85	100		
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang	60 unit	60 unit	100%	52.250.000	52.212.000	100	100		
3	Penataan lingkungan kantor	Jumlah jenis lingkungan kantor yang tertata	3 jenis	3 jenis	100%	14.150.000	13.480.000	95	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi/</b>										
1	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	Jumlah event yang terlaksana	2 jenis	2 jenis	100%	53.975.000	53.519.000	99	100		
2	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Jumlah peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	68.430.000	66.854.060	98	100		
3	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah event yang terlaksana	1 jenis	1 jenis	100%	7.000.000	6.975.000	100	100	Terkena refocusing anggaran	dimasukkan ke perencanaan 2021
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi</b>										
1	/Peningkatan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Jumlah jenis kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	59.821.000	58.622.000	98	100	Terkena refocusing anggaran	dimasukkan ke perencanaan 2021
2	Peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu	Jumlah jenis pelayanan peninjauan	4 jenis	4 jenis	100%	105.774.000	99.269.476	94	100	Terkena refocusing anggaran	dimasukkan ke perencanaan 2021
3	Pengendalian perizinan dan non perizinan perizinan PM	Jumlah izin yang dikendalikan	165 izin	165 izin	100%	26.022.360	25.702.600	99	100	Terkena refocusing anggaran	dimasukkan ke perencanaan 2021
<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>											
<b>I</b>	<b>Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Prosentase Peningkatan Pendapatan BUMD</b>	<b>4</b>	<b>9,78</b>	<b>245</b>						
1	Koordinasi antar Lembaga dalam Pelaksanaan Pengendalian Investasi PMDN/PMA	Jumlah frekuensi koordinasi PMA/PMDN, pemantauan investasi	10	10	100	9.300.000	8.398.500	90	100		
2	Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah frekuensi pembinaan BUMD, Koord direksi-karyawan BUMD, Koord intensifikasi PAD, Sosialisasi Penerapan GCG	50	50	100	80.100.000	78.847.826	98	100		
	<b>TOTAL</b>					<b>1.130.589.360</b>	<b>1.068.701.074</b>	<b>95</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

**URUSAN : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>											
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>										
	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan yang Diselenggarakan	1	1	100,00	45.000.000	43.808.200	97,35	100		
2	<b>PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN NARKOBA</b>										
	Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyuluhan									
3	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA</b>										
	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah Insan Olahraga yang diberi penghargaan Tk Kabupaten dan Provinsi	1	1	100,00	4.200.000	3.288.850	78,31	100		
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Olahraga	Jumlah SDM Olahraga yang diberi pembinaan	1 keg (4 orang)	2 keg (4 orang)	100,00	9.600.000	7.669.150	79,89	100		
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Peserta yang mengikuti Kompetisi Olahraga	1	1	100,00	15.350.000	14.243.583	92,79	100		
	Pengiriman Kontingen Olahraga	Jumlah Kontingen yang dikirim	1	1	100,00	225.957.000	219.978.200	97,35	100		
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>										
	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Regu Paskibraka yang Terpilih	80	80	100,00	63.200.000	61.947.100	98,02	100		
	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten	Jumlah Kegiatan Olahraga Tk. Kabupaten yang Diselenggarakan	6	3	50,00	215.442.000	210.389.500	97,65	100	Keterbatasan anggaran (dikarenakan rasionalisasi)	
<b>BAGIAN KESRA</b>											
1	<b>Program Pembinaan Pemuda Dan Olahraga</b>										

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat kabupaten	Jumlah Kegiatan Kegiatan Senam Jumat Sehat di Lingkungan Pemda Klaten	26	26	100	21.300.000	19.080.000	89,58	97		
	<b>TOTAL</b>					<b>600.049.000</b>	<b>580.404.583</b>	<b>96,73</b>			

**URUSAN : STATISTIK**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS KOMINFO</b>											
1	<b>Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Statistik Daerah Yang Tersedia</b>	<b>100</b>							1. Kurangnya SDM Dalam Bidang Statistik	1. Menambah SDM Di Bidang Statistik
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Data dan Statistik Daerah	6	6	100	17.500.000	17.417.500	99,53	100		
	<b>TOTAL</b>					<b>17.500.000</b>	<b>17.417.500</b>	<b>99,53</b>			

**URUSAN : PERSANDIAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS KOMINFO</b>											
1	<b>Program Peningkatan Persandian Daerah</b>	<b>Persentase Pengamanan Informasi Persandian Yang Terimplementasi</b>	25							Mengalami refocusing anggaran	
1	Identifikasi Jenis Informasi dan Persandian	Jumlah Dokumen Yang Berisi Informasi Berkualitas Sandi	1	1	100	16.000.000	15.719.200	98	99		
2	Implementasi Operasional Persandian oleh Perangkat Daerah	Jumlah Sosialisasi Informasi Berkualitas Sandi	2	2	100	15.000.000	14.984.350	100	100		
<b>TOTAL</b>						<b>31.000.000</b>	<b>30.703.550</b>				

**URUSAN : KEBUDAYAAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>											
1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>										
	Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya	Jumlah situs cagar budaya yang diinventarisir	2	2	100,00	67.200.000	65.695.232	97,76	100		
	Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional	Jumlah peserta pelatihan dan lomba karya ilmiah				4.100.000	4.099.550	99,99	100	rasionalisasi anggaran	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah peserta rakor kebudayaan	100	91	91,00	25.000.000	24.439.800	97,76	100		
	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah tim kesenian yang dikirimkan mengikuti event	1	1	100,00	142.100.000	138.998.950	97,82	100		
	Kirab Budaya dan Pentas Seni	Jumlah kegiatan kirab budaya dan pentas seni yang diselenggarakan	6	6	100,00	122.200.000	119.370.715	97,68	100		
	Pagelaran Wayang Kulit	Jumlah pagelaran wayang kulit yang diselenggarakan				653.000	652.400	99,91	100	rasionalisasi anggaran	
	Penyebarluasan Informasi Kekayaan Budaya Daerah	Jumlah kegiatan penayangan melalui bioskop keliling	3	3	100,00	33.000.000	32.191.903	97,55	100		
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>										
	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	Jumlah fasilitasi kegiatan yang diselenggarakan	1	1	100,00	5.700.000	5.700.000	100,00	100		
	<b>TOTAL</b>					<b>399.953.000</b>	<b>391.148.550</b>	<b>97,80</b>			

**URUSAN : PERPUSTAKAAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN</b>											
<b>I</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>										
1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah Lokasi kunjungan kendaraan keliling	200	199	100%	191.826.750	173.613.400	90,51	100%		
2	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Perpustakaan Desa/sekolah dibina	33	33	100%	23.792.000	21.170.000	88,98	100%		
3	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah bahan pustaka	0	0	0	0	0		0	Rasionalisasi anggaran akibat Pandemi Covid-19	Tidak menambah bahan pustakan akan tetapi mengoptimalkan koleksi bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan
	<b>TOTAL</b>					<b>215.618.750</b>	<b>194.783.400</b>	<b>90,34</b>			



**URUSAN : KEARSIPAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN</b>											
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	1.200	1.200	100%	5.000.000	4.284.000	85,68	100%		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening terbayar	5	5	100%	96.676.000	88.250.861	91,29	100%		
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah THL administrasi Keuangan	3	3	100%	33.460.620	33.460.620	100,00	100%		
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL Keuangan Jasa Kebersihan	4	4	100%	66.617.287	64.183.208	96,35	100%		
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	60	60	100%	9.870.178	9.424.450	95,48	100%		
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah blangko cetakan dan pengadaan	10	10	100%	4.251.000	4.250.500	99,99	100%		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penerangan kantor dan pemasangan instalisasi listrik	2	2	100%	858.180	850.000	99,05	100%		
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	80	80	100%	4.763.000	4.202.000	88,22	100%		
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tersedia	175	175	100%	8.264.500	8.187.500	99,07	100%		
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	30	30	100%	51.000.000	50.999.114	100,00	100%		
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	70	70	100%	10.000.000	9.990.400	99,90	100%		
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL Keamanan	6	6	100%	84.368.926	84.299.426	99,92	100%		
13	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Jumlah THL Pengemudi kantor	8	8	100%	99.210.798	99.210.798	100,00	100%		
14	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	7	7	100%	5.000.000	4.904.300	98,09	100%		
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
15	Pengadaan mebeleur	Jumlah mabeluar terbeli	12	12	100%	350.000.000	312.515.250	89,29	100%		
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	27	27	100%	60.000.000	57.811.390	96,35	100%		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara	45	45	100%	91.013.500	78.645.500	86,41	100%		
18	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor terehabilitasi	1	1	100%	200.000.000	194.202.000	97,10	100%		
<b>III</b>	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>										
19	Audit dan Pengawasan Kearsipan	Jumlah OPD diaudit	5	5	100%	16.040.000	10.791.000	67,28	100%		
<b>IV</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>										
20	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah Arsip terakuisisi	50	50	100%	176.620.475	152.963.231	86,61	100%		
21	Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klten	Jumlah Hasil Penilaian Arsip Inaktif	0	0	0	0	0	0	0	Rasionalisasi Anggaran akibat Pandemi Covid-19	Kegiatan dianggarkan di Tahun 2021
22	Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten	Jumlah Pameran diikuti	0	0	0	0	0	0	0	Rasionalisasi Anggaran akibat Pandemi Covid-19	Kegiatan Pameran diikuti melalui Zoom meeting
<b>V</b>	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>										
23	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah OPD dibina	5	5	100%	28.928.686	25.101.586	86,77	100%		
	<b>TOTAL</b>					<b>1.401.943.150</b>	<b>1.298.527.134</b>	<b>92,62</b>			

**URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>											
<b>I</b>	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>	<b>Produksi perikanan budidaya</b>	<b>27048 ton</b>	<b>27603,83 ton</b>	<b>102,05</b>	<b>1.690.061.000</b>	<b>1.098.501.275</b>	<b>65,00</b>	<b>88,33</b>		
1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah penyediaan pakan untuk indukan dan operasional UBI	2 lokasi	2 lokasi	100,00	116.561.000	116.560.850	100,00	100,00		
2	Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Jumlah peserta pelatihan teknis budidaya ikan	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00	Refokusing untuk penanggulangan dampak covid 19	
3	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah pokdakan yang menerima bantuan benih ikan nila dan ikan lele	25 kelompok	25 kelompok	100,00	200.000.000	186.402.075	93,20	100,00		
4	Rehabilitasi/Pengembangan Sarana Prasarana Fisik Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK bidang Kelautan dan Perikanan)	Jumlah percontohan budidaya ikan air tawar (ikan nila, ikan hias, ikan gurameh)	73 paket	47 paket	65,00	1.373.500.000	795.538.350	57,92	65,00	Rasionalisasi anggaran menyebabkan ada paket pekerjaan yang tdk bisa dilaksanakan (14 paket budidaya lele)	
<b>II</b>	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>	<b>Produksi perikanan tangkap</b>	<b>537 ton</b>	<b>184 ton</b>	<b>34,26</b>	<b>50.000.000</b>	<b>45.101.584</b>	<b>90,20</b>	<b>100,00</b>	Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh cuaca/musim dan kondisi ekosistem perairan tangkap yang semakin menurun kualitasnya	Pelaksanaan kegiatan stocking restocking kembali dilakukan di tahun 2021
1	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok nelayan perikanan tangkap yang dibina	6 poknel	6 poknel	100,00	50.000.000	45.101.584	90,20	100,00		
<b>III</b>	<b>Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>	<b>Konsumsi ikan</b>	<b>20,41 kg/kapita/tahun</b>	<b>20,28 kg/kapita/tahun</b>	<b>99,36</b>	<b>27.874.000</b>	<b>24.723.300</b>	<b>88,70</b>	<b>91,00</b>		
1	Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dapat terlaksana	1 kegiatan/kali	1 kegiatan/kali	91,00	27.874.000	24.723.300	88,70	91,00	Rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan dampak covid 19	
<b>TOTAL</b>						<b>1.767.935.000</b>	<b>1.168.326.159</b>	<b>66,08</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

**URUSAN : PARIWISATA**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>											
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>795.656.000</b>	<b>761.416.645</b>	95,70			
	Penyediaan jasa Surat menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1000	1000	100,00	2.600.000	2.165.000	83,27	100		
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya Air & Listrik	Jumlah Jenis Rekening Terbayar	4	4	100,00	183.200.000	163.726.614	89,37	100		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah THL Kebersihan Kantor	5	5	100,00	136.356.000	131.732.615	96,61	100		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang tersedia	66	66	100,00	40.000.000	39.998.800	100,00	100		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	11	11	100,00	50.000.000	49.994.800	99,99	100		
	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	4	4	100,00	6.500.000	4.464.000	68,68	100		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Tersedia	25	25	100,00	28.500.000	28.488.000	99,96	100		
	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Frekuensi Perjalanan Luar Daerah	40	40	100,00	131.500.000	131.370.418	99,90	100		
	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam daerah	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dalam Daerah	50	50	100,00	50.000.000	48.335.500	96,67	100		
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL Pengamanan Kantor	5	5	100,00	119.000.000	114.599.815	96,30	100		
	Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor	Jumlah THL Pengemudi Kantor	1	1	100,00	17.000.000	16.198.583	95,29	100		
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	15	15	100,00	31.000.000	30.342.500	97,88	100		
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>394.838.000</b>	<b>381.663.465</b>	96,66			
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor terbeli	24	24	100,00	175.988.000	169.347.500	96,23	100		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	9	9	100,00	56.750.000	54.944.500	96,82	100		
	Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	1	1	100,00	25.000.000	24.865.000	99,46	100		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional terpelihara	22	22	100,00	80.200.000	76.656.465	95,58	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga	Jumlah peralatan kantor dan rumah tangga terpelihara	43	43	100,00	56.900.000	55.850.000	98,15	100		
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>					798.880.000	<b>793.898.741</b>	99,38			
	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Jumlah dan Jenis Teknologi Informasi yang Digunakan sebagai Bahan Promosi	9	9	100,00	200.000.000	197.993.866	99,00	100		
	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah Kegiatan Kerjasama	1	1	100,00	47.000.000	46.977.020	99,95	100		
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah Kegiatan Pameran	2	2	100,00	11.687.000	11.683.500	99,97	100		
	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang Dibina	22	22	100,00	45.000.000	44.893.955	99,76	100		
	Penyelenggaraan Event Pariwisata	Jumlah Event Pariwisata yang Dilaksanakan	2	2	100,00	151.143.000	151.092.000	99,97	100		
	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK Non Fisik)	Jumlah SDM Pariwisata yang mengikuti pelatihan (Pemandu Wisata dan Pengelola)	160	160	100,00	344.050.000	341.258.400	99,19	100		
4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>					3.181.907.000	<b>2.745.771.892</b>	86,29			
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah Desa Wisata yang Dibina	34	34	100,00	288.520.000	278.288.305	96,45	100		
	Pemeliharaan Obyek Wisata	Jumlah Obyek Wisata dan Fasilitas Pariwisata yang Dilakukan Pemeliharaan	6	6	100,00	300.000.000	296.024.000	98,67	100		
	Operasional Pengelolaan Obyek Wisata	Jumlah Obyek Wisata yang Dikelola	11	11	100,00	811.059.000	771.381.387	95,11	100		
	Penataan Obyek Wisata	Jumlah Obyek Wisata yang Dilakukan Penataan	1	1	100,00	25.550.000	24.980.000	97,77	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengelolaan Obyek Wisata	Jumlah Obyek Wisata yang Dikerjasamakan Pengelolaannya	1	1	100,00	35.000.000	16.017.750	45,77	100	Adanya pandemi covid-19 sejak tanggal 13 Maret 2020 obyek wisata Jolotundo ditutup	Disparbudpora menindaklanjuti Intruksi Gubernur Jawa Tengah No. 2 tahun 2020 tentang pedoman bagi masyarakat dalam rangka persiapan pemulihan bencana covid-19
	Penataan Obyek Wisata (DAK Pariwisata)	Jumlah Dokumen DED yang Disusun	1	1	100,00	1.721.778.000	1.359.080.450	78,93	100		
5	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN</b>					132.410.000	<b>130.955.727</b>	98,90			
	Fasilitasi Pembentukan Forum Komonikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya	Jumlah Kegiatan Rakor yang Dilaksanakan	1	1	100,00	71.410.000	71.280.477	99,82	100		
	Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO	Jumlah Anggota ADWINDO yang Aktif dalam Kegiatan Kepariwisata	50	50	100,00	28.536.000	27.211.250	95,36	100		
	Pemilihan Mas dan Mbak Klaten	Jumlah Peserta Pemilihan Mas dan Mbak Klaten	90	90	100,00	32.464.000	32.464.000	100,00	100		
	<b>TOTAL</b>					<b>5.303.691.000</b>	<b>4.813.706.470</b>	<b>90,76</b>			



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

**URUSAN : PERTANIAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>											
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi perkantoran dan operasional dinas, upt, upt wilayah/BPP</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100</b>	<b>1.181.396.000</b>	<b>995.437.293</b>	<b>84,26</b>	<b>99,62</b>		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	5000 surat	5000 surat	100,00	9.000.000	8.350.000	92,78	100,00		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	41 jenis	41 jenis	100,00	200.000.000	148.193.296	74,10	100,00		
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah jaminan barang milik daerah tersedia	12 kali	12 kali	100,00	24.000.000	23.730.638	98,88	100,00		
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah THL administrasi keuangan	4 orang	4 orang	100,00	78.333.000	57.231.477	73,06	100,00		
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah THL kebersihan kantor	12 orang	12 orang	100,00	350.000.000	280.405.539	80,12	100,00		
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK tersedia	56 jenis	56 jenis	100,00	60.000.000	56.336.400	93,89	100,00		
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	3 jenis	3 jenis	100,00	28.150.000	25.609.800	90,98	100,00		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	16 jenis	16 jenis	100,00	25.000.000	24.974.900	99,90	100,00		
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman tersedia	1400 paket	1400 paket	100,00	36.563.000	36.534.000	99,92	100,00		
10	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	35 kali	35 kali	100,00	75.000.000	69.744.170	92,99	100,00		
11	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	300 kali	285 kali	95,00	65.000.000	60.490.000	93,06	95,00		
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL pengamanan kantor	12 orang	12 orang	100,00	191.350.000	165.350.073	86,41	100,00		
13	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen pelaporan dan perencanaan	14 dokumen	14 dokumen	100,00	39.000.000	38.487.000	98,68	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan (peralatan, perlengkapan, perawatan gedung, perawatan lingkungan kantor dan operasional kendaraan dinas)</b>	<b>90%</b>	<b>82%</b>	<b>91%</b>	<b>1.103.490.000</b>	<b>1.011.284.175</b>	<b>91,64</b>	<b>91,38</b>		
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor terbeli	29 unit	29 unit	100,00	127.340.000	126.275.500	99,16	100,00		
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	8 unit	8 unit	100,00	195.150.000	180.905.000	92,70	100,00		
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	1 lokasi/unit	1 lokasi/unit	100,00	200.000.000	196.453.000	98,23	100,00		
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	293 unit	223 unit	76,11	106.000.000	64.831.075	61,16	76,00		
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara	87 unit	69 unit	79,31	70.000.000	47.703.500	68,15	79,00		
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor terrehabilitasi	2 unit	2 unit	100,00	195.000.000	192.724.600	98,83	100,00		
7	Pengadaan Papan Informasi	Jumlah papan informasi terbeli	21 unit	16 unit	76,19	10.000.000	5.294.000	52,94	76,00		
8	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah lingkungan kantor tertata	1 lokasi	1 lokasi	100,00	200.000.000	197.097.500	98,55	100,00		
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Persentase kelompok tani madya dan utama</b>	<b>32,50%</b>	<b>32,50%</b>	<b>100,00</b>	<b>1.170.190.000</b>	<b>1.045.520.900</b>	<b>89,35</b>	<b>96,43</b>		
1	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan dan temu karya pelaku agribisnis	50 orang	45 orang	90,00	23.000.000	20.256.000	88,07	90,00		
2	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah penilaian kelas kelompok tani	25 poktan	25 poktan	100,00	25.000.000	24.519.500	98,08	100,00		
3	Fasilitasi Kelompok Tani Berbasis Gender	Jumlah kelompok tani berbasis gender yang difasilitasi	1 kelompok/desa	1 kelompok/desa	100,00	75.000.000	65.942.500	87,92	100,00		
4	Pengadaan Alsintan	Jumlah kelompok petani yang menerima bantuan alsintan (pompa)	22 poktan	21 poktan	95,45	174.000.000	144.300.000	82,93	95,00		
5	Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)	Jumlah kelompok Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) yang dibina	5 kelompok/UPJA	5 kelompok/UPJA	100,00	2.675.000	2.675.000	100,00	100,00		
6	Pelatihan Manajemen Agribisnis Tembakau (DBHCHT)	Jumlah peserta pelatihan, sosialisasi dan kunjungan lapang petani tembakau	100 orang	90 orang	90,00	166.715.000	143.358.300	85,99	90,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
7	Penerapan pengendalian hama terpadu	Jumlah petani yang mengikuti SLPHT	125 orang	125 orang	100,00	703.800.000	644.469.600	91,57	100,00		
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	<b>Luas panen padi, jagung, kedelai</b>	<b>66765 ha, 11090 ha, 2726 ha</b>	<b>70916 ha, 11086,5 ha, 543,9 ha</b>		<b>4.267.451.000</b>	<b>4.078.017.872</b>	<b>95,56</b>	<b>97,5</b>		
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	Jumlah lokasi penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi	26 kecamatan	26 kecamatan	100,00	21.790.000	21.339.000	97,93	100,00		
2	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Jumlah luasan fasilitasi sarana produksi padi	29 ha	25 ha	85,00	462.500.000	348.278.375	75,30	85,00		
3	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Jumlah luasan penanaman dan pengembangan benih padi varietas unggul/rojolele	8 ha	8 ha	100,00	956.000.000	938.013.500	98,12	100,00		
4	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan benih/bibit lada, kopi dan kelapa kopyor	8 kelompok/lokasi	8 kelompok/lokasi	100,00	225.000.000	208.161.400	92,52	100,00		
5	Pengembangan Sumber-sumber Air Untuk Irigasi (DAK bid.Pertanian)	Jumlah jaringan irigasi air tanah dangkal, dam parit, dan embung yang dibangun	16 unit	16 unit	100,00	2.246.620.000	2.218.454.500	98,75	100,00		
6	Peningkatan Sarana/Prasarana Penyuluhan Pertanian (DAK Bidang Pertanian)	Jumlah sarana prasarana balai penyuluhan pertanian yang dibangun	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	Refokusing	
7	Pengelolaan Lahan Sawah dan Air	Jumlah lokasi pendataan lahan LP2B dan pengelolaan kesuburan lahan sawah	26 kecamatan	26 kecamatan	100,00	355.541.000	343.771.097	96,69	100,00		
<b>V</b>	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>Keikutsertaan ajang promosi</b>	-	-	-	-	-				
1	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah promosi hasil produksi pertanian unggulan yang terselenggara	-	-	-	-	-			Refokusing	
<b>VI</b>	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>Produksi tembakau rajang, tembakau asepian</b>	<b>1092 ton, 946 ton</b>	<b>1558,79 ton; 2308,72 ton</b>		<b>2.068.305.000</b>	<b>1.416.445.100</b>	<b>68,48</b>	<b>90,6</b>		
1	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DBHCHT)	Jumlah kelompok penerima bantuan alsin pengolah lahan	22 kelompok	20 kelompok	90,91	400.000.000	319.004.250	79,75	90,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Jumlah penerima bantuan benih tembakau dan saprodi	2 poktan	2 poktan	100,00	200.000.000	189.983.200	94,99	100,00		
3	Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah poktan hortikultura yang difasilitasi dan dibina	10 lokasi	10 lokasi	100,00	18.305.000	15.612.750	85,29	95,00		
4	Pembangunan Sarana Infrastruktur Pertanian (DBHCHT)	Jumlah jaringan irigasi tersier yang dibangun/direhabilitasi di kawasan penghasil tembakau	12 lokasi	9 lokasi	75,00	1.150.000.000	616.668.500	53,62	75,00		
5	Penanganan Pasca Panen Tembakau (DBHCHT)	Jumlah kelompok penerima bantuan peralatan pasca panen tembakau	15 kelompok	14 kelompok	93,33	300.000.000	275.176.400	91,73	93,00		
<b>VII</b>	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>	<b>Jumlah penyuluh yang meningkat kompetensinya</b>	<b>190 orang</b>	<b>162 orang</b>	<b>85,26</b>	<b>40.500.000</b>	<b>33.389.300</b>	<b>82,44</b>	<b>85,00</b>		
1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian /Perkebunan	Jumlah peserta pelatihan dan rapat teknis penyuluhan	190 orang	162 orang	85,26	40.500.000	33.389.300	82,44	85,00		
<b>VIII</b>	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	<b>Rasio pelayanan keswan terhadap jumlah ternak</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>	<b>100,00</b>	<b>175.275.000</b>	<b>156.642.050</b>	<b>89,37</b>	<b>100,00</b>		
1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah ternak yang mendapat vaksinasi antraks, pengawasan zoonosis dan hewan qurban	8000 ekor	8000 ekor	100,00	123.650.000	111.031.850	89,80	100,00		
2	Penanggulangan Wabah Penyakit AI	Jumlah lokasi identifikasi dan pemeriksaan penyakit AI	26 lokasi	26 lokasi	100,00	51.625.000	45.610.200	88,35	100,00		
<b>IX</b>	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>	<b>Populasi sapi</b>	<b>112973 ekor</b>	<b>111119 ekor</b>	<b>98,36</b>	<b>431.000.000</b>	<b>409.359.670</b>	<b>94,98</b>	<b>100,00</b>		
1	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan IB	10000 ekor	10000 ekor	100,00	176.000.000	160.333.520	91,10	100,00		
2	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Jumlah bantuan bibit ternak ruminansia kecil yang diterima kelompok tani	126 ekor	126 ekor	100,00	225.000.000	219.112.500	97,38	100,00		
3	Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat	Jumlah peternak sapi potong yang dibina	50 peternak	50 peternak	100,00	30.000.000	29.913.650	99,71	100,00		
<b>X</b>	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b>	<b>Usaha peternakan rakyat yang dibina</b>	<b>100 kelompok</b>	<b>85 kelompok</b>	<b>85,00</b>	<b>295.000.000</b>	<b>234.530.000</b>	<b>79,50</b>	<b>81,25</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Penyuluhan Distribusi Pemasaran Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat	Jumlah lokasi yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan peredaran produk pangan/bahan asal ternak	10 lokasi	8 lokasi	80,00	19.000.000	14.770.000	77,74	80,00		
2	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah usaha peternakan rakyat yang dibina (memiliki Tanda Pendaftaran Peternak Rakyat/TPPR)	100 usaha/UPR	85 usaha/UPR	85,00	125.000.000	105.487.000	84,39	85,00		
3	Pengembangan Aneka Pengolahan Produk Asal Ternak	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang dibina	180 pengusaha	135 pengusaha	75,00	90.000.000	65.311.500	72,57	75,00		
4	Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)	Jumlah fasilitasi rumah potong hewan ruminansia (RPH-R)	2 RPH	2 RPH	85,00	61.000.000	48.961.500	80,26	85,00		

<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>											
<b>I</b>	<b>Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	<b>Alokasi Pupuk Bersubsidi</b>	<b>83.283</b>	<b>53.413</b>	<b>64,13</b>	<b>71.000.000</b>	<b>67.232.409</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya mencapai 64,13% dikarenakan penetapan target berdasar pada tingkat kebutuhan petani yang tercantum di e-RDCK, sedangkan alokasi pupuk dari pusat berada di bawah e-RDCK.	Mengusulkan tambahan alokasi pupuk ke Pemprov. Jateng
		<b>Penerimaan Pendapatan DBHCHT</b>	<b>14.587.000.000</b>	<b>13.423.000.000</b>	<b>92,02</b>						
1	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pertanian	Jumlah frekuensi koord, monitoring dan evaluasi pendistribusian pupuk bersubsidi	15	15	100	34.000.000	32.215.000	95	100		
2	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau	Jumlah frekuensi koord, monitoring dan evaluasi keg DBHCHT	17	17	100	37.000.000	35.017.409	95	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	<b>TOTAL</b>					<b>10.803.607.000</b>	<b>9.447.858.769</b>	<b>87,45</b>			

**URUSAN : Energi dan Sumberdaya Mineral**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>											
<b>I</b>	<b>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>					<b>30.009.935.500</b>	<b>23.232.913.089</b>				
1	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah dokumen DED PJU yang disusun, Jumlah lokasi pemasangan lampu taman	1 dokumen	1 dokumen	100	907.682.700	853.004.450	93,98	100		
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah petugas pemeliharaan PJU	20 org	20 org	100	2.102.252.800	1.387.281.047	65,99	100		
3	Pendataan dan pembayaran pajak beban listrik penerangan jalan umum (PJU)	Jumlah bulan pembayaran pajak penerangan jalan umum	12 bln	12 bln	100	27.000.000.000	20.992.627.592	77,75	100		
<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>											
<b>II</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>Prosentase Laporan Penggunaan Energi Listrik dan Air</b>	<b>61</b>	<b>58,63</b>	<b>96,11</b>	<b>29.000.000</b>	<b>18.534.000</b>	<b>64</b>	<b>100</b>		
1	Peningkatan Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi	Jumlah frekuensi koordinasi dan monev	17	17	100	29.000.000	18.534.000	64	100		
<b>TOTAL</b>						<b>30.038.935.500</b>	<b>23.251.447.089</b>	<b>77,40</b>			



**URUSAN : PERDAGANGAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM</b>											
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Prosentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran									
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia	527 embar	527 lembar	100	3.000.000	2.571.000	85,7	100		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis rekening yang terbayar	4 jenis	4 jenis	100	416.800.000	322.146.476	77,3	100		
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah THL Administrasi Keuangan di Disdagkop	139 org	139 org	100	1.924.500.000	1.914.942.164	99,5	100		
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah THL Pemungut Retribusi dan kebersihan kantor di Disdagkop	43 org	43 org	100	676.500.000	628.186.518	92,9	100		
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	59 jenis	59 jenis	100	70.000.000	48.194.150	68,8	100		
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan Disdagkop UKM	10 jenis	10 jenis	100	218.557.000	217.099.900	99,3	100		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis instalasi listrik yang disediakan	18 jenis	27 jenis	150	35.000.000	30.773.000	87,9	100		
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia di Disdagkop	8 jenis	8 jenis	100	10.600.000	6.900.000	65,1	100		
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah frekuensi rapat koordinasi Disdagkop UKM	1620 org	1620 org	100	60.000.000	50.363.425	83,9	100		
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah disdagkop	150 kali	128 kali	85,33333333	150.000.000	137.472.738	91,6	100		
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah frekuensi koordinasi ke dalam daerah	412 kali	470 kali	114,1	75.000.000	58.600.000	78,1	100		
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah tenaga harian lepas (THL) pengamanan kantor disdagkop UKM	14 org	14 org	100	206.500.000	201.944.820	97,8	100		
13	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Jumlah tenaga harian lepas (THL) pengemudi kantor	4 org	4 org	100	62.500.000	60.724.116	97,2	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik									
14	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor tersedia dan peralatan penanganan tanggap darurat penanggulangan Covid-19 di Kab. Klaten	208 jenis	208 jenis	100	397.250.000	350.027.300	88,1	100		
15	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebelair yang tersedia	- unit	- unit		-	-	-	-		
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah perlegkapan gedung kantor yang tersedia	1 jenis	1 jenis	100	400.000.000	397.497.500	99,4	100		
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara disdagkop UKM	56 unit	56 unit	100	100.000.000	49.860.177	49,9	100		
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara disdagkop UKM	46 unit	46 unit	100	75.000.000	19.295.000	25,7	90		
19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur (meja dan kursi) terpelihara disdagkop UKM	5 jenis	5 jenis	100	20.000.000	19.713.900	98,6	100		
20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	- unit	- unit	0	27.983.250	27.832.250	99,5	100		
<b>IV</b>	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Perdagangan</b>	Prosentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan halal Persentase cakupan pelayanan UTPP									
21	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT kemetrologian daerah	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pengajuan hak merk	50 org	50 org	100	44.000.000	40.203.190	91,4	100		
22	Pensertifikasian hak merk	Peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang merek	- org	- org	0	5.000.000	4.242.000	84,8	100		
23	Sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (P-IRT)	Jumlah UKM yang terfasilitasi pengajuan ijin PIRT	85 org	85 org	100	150.000.000	131.101.750	87,4	100		
24	Pengawasan, pemantauan dan penyampaian informasi tembakau yang dilekati pita cukai palsu	Jumlah orang yang mendapat peahaman tetang pita cukai palsu	250 jenis	220 jenis	88	150.000.000	122.516.900	81,7	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	Persentase pasar pemda yang di revitalisasi , Rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang , Persentase pendapatan pasar terhadap PAD									
26	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha perdagangan kab. klaten	100 org	100 org	100	274.918.000	239.719.250	87,2	100		
27	Penyelenggaraan pasar murah	Frekuensi pasar murah Kabupaten Klaten	5 kali	1 kali	20	25.000.000	6.631.875	26,5	45		
28	Pembangunan pasar	Jumlah pasar yang dibangun Kabupaten Klaten	16 Dokum	14 Dokume	87,5	862.281.000	697.892.425	80,9	100		
29	Revitalisasi/pemeliharaan bangunan pasar	Jumlah Pasar yang direhabilitasi	12 Pasar	12 Pasar	100	1.250.000.000	1.244.020.500	99,5	100		
30	Pembangunan pasar darurat	Jumlah pasar darurat yang dibangun Kabupaten Klaten	1 unit	1 unit	100	2.539.150.000	2.015.091.700	79,4	100		
31	Penyusunan profil pasar	Jumlah pasar yang diprofilkan	- pasar	- pasar	0	5.000.000	1.883.000	37,7	100		
32	Revitalisasi pasar	Jumlah yang direvitalisasi Pasar Karanganyu	1 pasar	1 pasar	100	2.000.000	1.722.500	86,1	100		
33	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar	Jumlah pasar yang dipantau	49 pasar	49 pasar	100	150.235.750	106.886.800	71,1	100		
<b>IX</b>	<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</b>	Prosentase PKL dan Asongan yang terdaftar									
34	Pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima	Jumlah PKL yang dibina dan diberdayakan Kabupaten Klaten	900 org	790 org	87,8	350.000.000	323.924.300	92,5	100		
<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>											
<b>I</b>	<b>Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>Tingkat Inflasi Tahunan</b>	<b>2,5 %</b>	<b>1,38 %</b>	<b>55,2</b>			<b>45</b>	<b>100</b>	Kondisi perekonomian secara umum menurun karena dampak Covid-19 baik dari sisi produksi maupun konsumsi	Menggerakkan perekonomian melalui pemberian subsidi bunga kepada UKM

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Peningkatan Koordinasi dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Pokok	Jumlah frekuensi koord di Prov. Jateng dan Pusat, koord TPID dan pemantauan distribusi LPG 3 kg	20 kali	20 kali	100	30.410.000	13.826.500	45	100		
	<b>TOTAL</b>					<b>10.767.185.000</b>	<b>9.493.807.124</b>	<b>88,17</b>			

**URUSAN : PERINDUSTRIAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>											
<b>I</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>369.050.897</b>	<b>349.247.606</b>	<b>94,63</b>			
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi dan listrik	24	24	100	9.600.000	8.805.000	91,72	100		
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan tertib administrasi keuangan yang optimal	12	12	100	4.846.000	4.838.600	99,85	100		
3	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL jasa pengamanan kantor	2	2	100	27.000.000	26.949.840	99,81	100		
4	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah THL tenaga administrasi/teknis kantor	10	10	100	122.000.000	121.816.260	99,85	100		
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK tersedia	48	48	100	21.000.000	20.094.900	95,69	100		
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	8	8	100	14.000.000	12.020.500	85,86	100		
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia	8	8	100	15.000.000	10.551.540	70,34	100		
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	4	4	100	5.200.000	3.694.000	71,04	100		
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tersedia	60	48	80	35.000.000	27.600.000	78,86	100		
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekwensi perjalanan luar daerah	100	100	100	68.000.000	67.962.690	99,95	100		
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah frekwensi perjalanan dalam daerah	80	76	95	33.404.897	31.683.926	94,85	100		
12	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	10	10	100	14.000.000	13.230.350	94,50	100		
<b>II</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>232.100.000</b>	<b>197.977.950</b>	<b>85,30</b>			
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	7	7	100	32.100.000	23.790.000	74,11	100		
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	1	1	100	95.000.000	92.850.000	97,74	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara	19	19	100	75.000.000	58.090.950	77,45	100		
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis peralatan gedung kantor terpelihara	10	10	100	30.000.000	23.247.000	77,49	100		
<b>III</b>	<b>Pengembangan industri kecil dan menengah</b>	Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI	7		0	<b>539.525.000</b>	<b>459.388.750</b>	<b>85,15</b>			
1	Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah pembinaan IKM Klaster Industri	400	400	100	150.000.000	130.795.750	87,20	100		
2	Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif	Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam Meningkatkan ketrampilan dan kompetensi industri kreatif	90	90	100	300.000.000	254.182.500	84,73	100		
3	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Usaha Industri	Jumlah lokasi usaha industri di Kab. Klaten yang dipantau	150	150	100	89.525.000	74.410.500	83,12	100		
<b>IV</b>	<b>Peningkatan kemampuan teknologi industri</b>	Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	4		0	<b>300.000.000</b>	<b>250.206.500</b>	<b>83,40</b>			
		Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK									
1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang dibina untuk meningkatkan kualitas produk	180	180	100	200.000.000	177.348.000	88,67	100		
2	Temu Kemitraan Usaha IKM Kabupaten Klaten	Jumlah IKM yang diundang dalam temu kemitraan usaha IKM dan industri besar di Kab. Klaten	200	200	100	100.000.000	72.858.500	72,86	100		
<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>											
<b>I</b>	<b>Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>Jumlah Debitur Penerima KUR</b>	<b>30.700</b>	<b>49.332</b>	<b>161</b>	<b>263.000.000</b>	<b>247.517.720</b>	<b>94</b>	<b>100</b>		
1	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian	Jumlah frekuensi koord perindustrian, dekranasda, KUR dan TPAKD, keg. Dekranas	40	40	100	263.000.000	247.517.720	94	100		
	<b>TOTAL</b>					<b>1.703.675.897</b>	<b>1.504.338.526</b>	<b>88,3</b>			

**URUSAN : TRANSMIGRASI**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>											
<b>I</b>	<b>Pengembangan wilayah transmigrasi</b>	<b>Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan</b>				<b>21.000.000</b>	<b>19.920.516</b>	<b>94,86</b>			
1	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka	Jumlah MoU/ Kerjasama antara Kab/Prov yang dituju dengan	2	2	100	21.000.000	19.920.516	94,86	100		
	<b>TOTAL</b>					<b>21.000.000</b>	<b>19.920.516</b>	<b>94,86</b>			

**URUSAN : PENUNJANG PEMERINTAHAN URUSAN PENGAWASAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>INSPEKTORAT KABUPATEN</b>											
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>prosentase pelayanan Administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>711.520.050</b>	<b>642.124.580</b>	<b>90,25</b>	<b>100</b>	<b>tidak ada</b>	
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	1.200	2.555	212,92	4.500.000	4.497.800	99,95	100	tidak ada	
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis rekening terbayar	4	4	100,00	221.070.200	167.024.157	75,55	100	tidak ada	
1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) untuk kebersihan	2	2	100,00	49.524.400	48.949.104	98,84	100	tidak ada	
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK tersedia	57	57	100,00	110.000.000	102.328.900	93,03	100	tidak ada	
1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen tergandakan	40.400	40.400	100,00	40.000.000	38.938.250	97,35	100	tidak ada	
1.6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7	7	100,00	5.407.650	4.990.900	92,29	100	tidak ada	
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	3.080	3.080	100,00	7.638.300	7.610.000	99,63	100	tidak ada	
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan minuman tersedia	70	70	100,00	90.924.000	88.868.875	97,74	100	tidak ada	
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah	25	27	108,00	90.000.000	89.990.895	99,99	100	tidak ada	
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	50	50	100,00	8.000.000	7.975.000	99,69	100	tidak ada	
1.11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas (keamanan)	6	6	100,00	84.455.500	80.950.699	95,85	100	tidak ada	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>prosentase sarana &amp; prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>1.805.488.500</b>	<b>1.766.087.749</b>	<b>97,82</b>	<b>100</b>	<b>tidak ada</b>	
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor terbeli	14	14	100,00	521.761.000	516.123.600	98,92	100	tidak ada	
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung dan peralatan kantor tersedia	25	25	100,00	359.434.000	357.052.720	99,34	100	tidak ada	
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara	52	52	100,00	360.000.000	351.859.500	97,74	100	tidak ada	
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perawatan kendaraan dinas	26	26	100,00	62.000.000	57.573.429	92,86	100	tidak ada	



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor terpelihara	100	100	100,00	28.100.000	22.935.000	81,62	100	tidak ada	
2.6	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah lingkungan kantor yang tertata	1	1	100,00	300.000.000	286.350.000	95,45	100	tidak ada	
2.7	Fasilitasi Pindahan Kantor	Jumlah fasilitasi pindahan kantor	1	1	100,00	174.193.500	174.193.500	100,00	100	tidak ada	
<b>3</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>Peningkatan level maturitas SPIP</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>	<b>3.865.543.200</b>	<b>3.426.581.198</b>	<b>88,64</b>	<b>100</b>	<b>tidak ada</b>	
3.1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah pemeriksaan obyek pemeriksaan dan laporan terselesaikan	38	54	142,11	427.864.500	382.733.710	89,45	100	tidak ada	
3.2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah kasus/pengaduan	90	147	163,33	1.141.392.000	926.859.575	81,20	100	tidak ada	
3.3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah laporan terselesaikan	11	18	163,64	390.000.000	294.608.150	75,54	100	tidak ada	
3.4	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah temuan pengawasan ditindaklanjuti	196	320	163,27	655.583.000	628.233.000	95,83	100	tidak ada	
3.5	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah rakorwas terlaksana	5	5	100,00	40.800.000	40.798.942	100,00	100	tidak ada	
3.6	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah peserta rapat dinas	1	1	100,00	2.500.000	2.500.000	100,00	100	tidak ada	
3.7	Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah	jumlah OPD yang didampingi dlm penyelenggaraan SPIP	26	26	100,00	82.000.000	79.200.000	96,59	100	tidak ada	
3.8	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Jumlah LHKASN guru terselesaikan	300	300	100,00	16.000.000	15.324.357	95,78	100	tidak ada	
3.9	Pengendalian Gratifikasi	jumlah laporan gratifikasi terselesaikan	2	13	650,00	45.650.000	33.886.357	74,23	100	tidak ada	
3.10	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar	12	12	100,00	200.000.000	199.635.357	99,82	100	tidak ada	
3.11	Penegakan Integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	jumlah SKPD yang didampingi dalam upaya penegakan integritas	3	4	133,33	764.953.700	753.169.100	98,46	100	tidak ada	
3.12	Pembinaan reformasi birokrasi	jumlah SKPD yang didampingi dalam upaya peningkatan indeks reformasi birokrasi	12	12	100,00	34.185.000	32.533.350	95,17	100	tidak ada	

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.13	Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Jumlah Koordinasi dengan TP4D	0	0	-	-	-	-	0	tidak ada	
3.14	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah Bimtek peningkatan kapabilitas APIP	3	3	100,00	26.100.000	26.100.000	100,00	100	tidak ada	
3.15	Layanan Konsultasi	Jumlah Pelayanan terhadap Obrik	12	14	116,67	38.515.000	10.999.300	28,56	100	tidak ada	
<b>4</b>	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>peningkatan level kapabilitas APIP</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>	<b>53.753.500</b>	<b>52.376.200</b>	<b>97,44</b>	<b>100</b>	<b>tidak ada</b>	
4.1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat, PKS/workshop	5	5	100,00	22.172.500	20.795.200	93,79	100	tidak ada	
4.2	Peningkatan pembinaan administrasi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparatur pengawaas yang dinilai Angka Kreditnya	33	33	100,00	31.581.000	31.581.000	100,00	100	tidak ada	
<b>5</b>	<b>Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>	<b>persentase pemeriksaan program tahunan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.966.000</b>	<b>99,87</b>	<b>100</b>	<b>tidak ada</b>	
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1	1	100,00	2.970.000	2.966.000	99,87	100	tidak ada	
	<b>TOTAL</b>					<b>6.439.275.250</b>	<b>5.890.135.727</b>				

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

**URUSAN : PENUNJANG PEMERINTAHAN URUSAN PERENCANAAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>BAPPEDA</b>											
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	100	100	100	701.272.000	650.684.630	93	100	-	-
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	1600	1600	100	10.000.000	9.935.000	99	100	-	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah dan jenis serta jasa komunikasi, sda dan listrik	3	3	100	140.000.000	133.617.737	95	100	-	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	10	10	100	10.000.000	9.730.000	97	100	-	-
	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis dan jumlah ATK yang tersedia	65	65	100	40.000.000	39.860.350	100	100	-	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan	3	3	100	20.000.000	19.999.800	100	100	-	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen listrik yang tersedia	15	15	100	15.000.000	14.994.900	100	100	-	-
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	21	21	100	10.000.000	9.935.000	99	100	-	-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis dan jumlah bacaan perundang-undangan dan surat kabar	8	8	100	5.249.000	4.906.800	93	100	-	-
	Penyediaan makanan dan minuman	Frekwensi rapat dan tamu	1380	1380	100	53.525.000	35.336.500	66	100	-	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi	65	65	100	340.000.000	317.997.019	94	100	-	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100	100	100	15.000.000	11.962.500	80	100	-	-
	Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis perkantoran	2	2	100	42.498.000	42.409.024	100	100	-	-
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase sarana prasarana aparatur dalam keadaan baik</b>	100	0	0	200.250.000	174.810.200	87	100	-	-
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor	3	0	0	95.250.000	93.530.000	98	100	-	-
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1	0	0			-		-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	34	35	103	80.000.000	56.380.200	70	100	-	-
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	5	3	60	25.000.000	24.900.000		100	-	-
	Pemeliharaan rutin/ berkala meubeler	Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin/ berkala meubeler	0	0	0			-		-	-
	Fasilitasi pindah kantor	Frekuensi pindahan kantor	0	0	0			-		-	-
	Pengadaan meubeler		0	0	0			-		-	-
<b>III</b>	<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya</b>	92	92	100	490.000.000	429.260.487	88	<b>100</b>	-	-
		<b>Persentase Ketersediaan Data Dasar dan Informasi Perencanaan Bidang Sosial</b>	100	100	100			-		-	-
	Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	60	60	100	490.000.000	429.260.487	88	100	kurangnya ketepatan waktu perangkat daerah dalam menyelesaikan pekerjaan terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan	Menyusun agenda perencanaan lebih maju dari target deadline yg ditentukan



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
										Masih belum fahamnya beberapa perencana Perangkat Daerah terkait alur penyusunan dokumen perencanaan maupun substansi dokumen perencanaan meskipun itu menjadi tugas rutin setiap tahunnya	Melakukan pendampingan dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
	<b>Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>- Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Dokumen RTRW</b>	Ada	Ada	ada	516.625.000	488.098.606	94	<b>100</b>	-	-
		<b>1- Ketersediaan data dan informasi dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	100	100	100			-		-	-
	Koordinasi dan fasilitasi bidang fisik dan prasarana	jumlah dokumen rencana bidang fispras	3	3	100	516.625.000	488.098.606	94	100	-	-
		jumlah OPD yang dikoordinasikan	7	7	100					-	-
<b>IV</b>	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah</b>	<b>Prosentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah</b>	100	100	100	235.000.000	217.285.511	92	<b>100</b>	-	-
	Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah/jenis dokumen pelaporan pembangunan daerah	4	4	100	115.000.000	101.238.311	88	<b>100</b>	-	-
	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	4	4		120.000.000	116.047.200	97	<b>100</b>	-	-
<b>V</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Prosentase konsistensi kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi</b>	75	75	100	568.000.000	519.383.270	91	<b>100</b>	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		<b>Prosentase ketersediaan data dan informasi di bidang ekonomi</b>	ada	Ada	Ada					-	-
		<b>Prosentase jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah</b>	27,92	15	54					-	-
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dok. Rencana bidang ekonomi;	3	3	100	568.000.000	519.383.270	91	<b>100</b>	-	-
		Jumlah OPD yang dikoordinasikan	7	7	100					-	-
<b>VI</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang diteapkan PERDA	Ada	0	0	3.544.368.000	3.369.841.310	95	<b>0</b>	-	-
		Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA	Ada	0	0				<b>0</b>	-	-
		Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA	Ada	100	0				<b>100</b>	-	-
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	1	100	100				<b>100</b>	-	-
		Penjabran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	1	100	100				<b>100</b>	-	-
	Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Jumlah dokumen RPJMD tersusun tepat waktu	-	1	100	830.000.000	768.121.910	93	<b>100</b>	-	-
	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	jumlah musrenbang RKPD terlaksana	1	1	100	443.250.000	430.691.475	97	<b>100</b>	-	-
	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah dokumen RKPD tersusun tepat waktu	1	1	100	487.350.000	484.652.800	99	<b>100</b>	-	-
	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)	Jumlah dokumen KUA PPAS tersusun tepat waktu	2	2	100	540.000.000	514.578.925	95	<b>100</b>	-	-
	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA & PPAS-P)	Jumlah dokumen KUPA PPAS-P tersusun tepat waktu	2	2	100	467.900.000	459.010.950	98	<b>100</b>	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah dokumen perubahan RKPD tersusun tepat waktu	1	1	100	484.000.000	478.234.250	99	100	-	-
	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bankeu Prov)	Jumlah kegiatan perencanaan daerah yang tersinkronisasi	0	0	0					-	-
	Updating sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Jumlah sisten aplikasi terupdate	1	1	100	95.000.000	84.218.000	89	100	-	-
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	125	125	100	196.868.000	150.333.000	76	100	-	-
<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>											
<b>I</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	Kejelasan batas antar kabupaten	27	32	118,5	<b>48.025.000</b>	<b>42.645.000</b>				
		Jumlah obyek rupa bumi yang terbakukan	10	14	140,0						
	Koordinasi Penyelesaian Masalah perbatasan antar Daerah	Jumlah pilar batas daerah yang terpelihara/terpasang/te rmonitor	27	32	118,5	45.700.000	40.420.000	88	100		
	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah obyek rupa bumi yang teridentifikasi dan terbakukan	10	14	140,0	2.325.000	2.225.000	96	100		
	<b>TOTAL</b>					<b>6.303.540.000</b>	<b>5.892.009.014</b>	<b>93</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

**URUSAN : PENUNJANG PEMERINTAHAN URUSAN KEUANGAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>BPKD</b>											
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.</b>	<b>Prosentase Pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.469.240.432</b>	<b>1.358.882.369</b>	<b>92</b>	<b>100</b>		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	900	900	100	5.000.000	4.998.500	100	100		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jenis rekening terbayar	3	3	100	240.000.000	206.137.040	86	100		
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah THL Jasa Administrasi keuangan	4	4	100	58.860.288	55.893.480	95	100		
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah jenis ATK BPKD Kab. Klaten	49	49	100	80.000.000	77.420.900	97	100		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah Jenis Cetak, penggandaan dan penjilidan	11	11	100	100.000.000	99.850.000	100	100		
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Jenis Komponen alat listrik	7	7	100	20.000.000	19.634.500	98	100		
7	Penyediaan Makanan dan Minuman.	Frekuensi rapat jumlah jam lembur banyaknya tamu yang datang	100	100	100	200.000.000	162.670.600	81	100		
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	Frekuensi perjalanan dinas seluruh indonesia	55	55	100	190.000.000	189.595.647	100	100		
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.	Frekuensi perjalanan dinas kabupaten klaten	100	100	100	40.000.000	32.850.000	82	100		
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL Pengamanan kantor GOR Gelarsena sebanyak 2 Orang	2	2	100	28.230.144	26.634.240	94	100		
11	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	sebanyak 23 Jenis	23	23	100	82.150.000	80.192.250	98	100		
12	Asuransi Gdg Kantor & Rumah Dinas.	Jumlah gedung/Rumah dinas yang di asuransikan	21	21	100	200.000.000	195.485.317	98	100		
13	Asuransi Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang di asuransikan	63	63	100	225.000.000	207.519.895	92	100		
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai yang di anggarkan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.339.974.190</b>	<b>2.188.415.698</b>	<b>94</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yg dibeli	68	68	100	900.000.000	847.600.000	94	100		
2	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler yg dibeli	55	55	100	100.000.000	95.223.800	95	100		
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Jumlah unit gedung yang dipelihara	3	3	100	200.000.000	199.560.000	100	100		
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	90	90	100	610.000.000	571.625.218	94	100		
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	100	100	100	70.000.000	69.844.000	100	100		
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	jumlah jenis mebeleur yang dipelihara				-	-	-	-	Recofusing Anggaran di alihkan untuk penanganan Covid	Di anggarkan kembali tahun selanjutnya
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan gedung Non kantor	Jumlah Bangunan gedung kantor terpelihara	12	12	100	233.300.000	182.554.080	78	100		
8	Penataan Arsip	Jumlah ruang arsip yang di tata	3	3	100	41.410.190	40.035.200	97	100		
9	Pemeliharaan panggung Baliho dan Spanduk	Jumlah titik panggung baliho/spanduk yang dipelihara	28	28	100	185.264.000	181.973.400	98	100		
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.</b>	<b>Persentase kenaikan PAD</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.280.512.850</b>	<b>9.290.656.940</b>	<b>82</b>	<b>100</b>	Terdampak Covid ( Hotel, rumah makan, retribusi, BLUD)	
		<b>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di susun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran</b>	<b>2</b>								
		<b>Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di sampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir</b>	<b>5</b>								
		<b>Raperda APBD disetujui paling lama 1 ( satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan di laksanakan</b>	<b>Tepat Waktu</b>								
		<b>Prosentase tanah pemkab yang bersertifikat</b>	<b>54</b>								



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		<b>Prosentase penyerapan belanja daerah</b>	<b>84</b>	74	88					Beberapa kegiatan terdampak covid	
1	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah jenis dokumen standarisasi harga	2	2	100	545.000.000	490.337.250	90	100		
2	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sisdur/SIM keuangan daerah	1	1	100	576.650.000	539.445.344	94	100		
3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah jenis dokumen APBD	2	2	100	613.270.000	510.547.850	83	100		
4	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah jenis dokumen APBD	2	2	100	84.629.000	82.727.075	98	100		
5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah jenis dokumen perubahan APBD	2	2	100	580.769.000	483.942.377	83	100		
6	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumla jenis dokumen perubahan APBD	2	2	100	137.250.000	133.064.620	97	100		
7	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	banyaknya jenis dokumen pertanggungjawaban APBD	2	2	100	354.575.500	313.990.200	89	100		
8	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah jenis dokumen pertanggungjawaban APBD	2	2	100	58.614.000	52.685.000	90	100		
9	Penelitian DPA-SKPD	Jumlah DPA yang diteliti	171	171	100	75.100.000	72.875.300	97	100		
10	Penelitian DPA-SKPD Perubahan	Jumlah DPA Perubahan yang diteliti	171	171	100	67.600.000	67.277.000	100	100		
11	Penyusunan Surat Penyediaan Dana.	Jumlah bendel SPD	156	156	100	35.000.000	33.678.150	96	100		
12	Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen anggaran kas	61	61	100	24.849.400	24.669.325	99	100		
13	Penerbitan SP2D	Jumlah lembar SP2D Non gaji	12.000	12.000	100	185.000.000	178.365.697	96	100		
14	Pengelolaan Administrasi Kasda	frekuensi pengelolaan kasda	12	12	100	66.600.800	41.932.800	63	100		
15	Pengelolaan Administrasi Gaji	Jumlah daftar gaji yang tercetak	60.200	60.200	100	94.012.000	71.152.750	76	100		
16	Pendataan Pajak Daerah	frekuensi pendataan	15	15	100	94.700.000	81.563.000	86	100		
17	Penyempurnaan Data Pajak Daerah	frekuensi update data	12	12	100	226.500.000	218.735.144	97	100		
18	Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah SPPT dan SKPD	655.945	655.945	100	351.250.000	341.458.125	97	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
19	Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)	frekuensi penyuluhan pajak daerah	12	12	100	112.000.000	81.302.200	73	100		
20	Pemeriksaan Pajak Daerah	frekuensi pemeriksaan pajak daerah	2	2	100	20.000.000	18.432.700	92	100		
21	Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah	frekuensi penyampaian ketetapan pajak daerah	8	8	100	260.000.000	184.703.150	71	100	Karena pandemi Covid sehingga tidak bisa mendatangi WP secara langsung	Ketetapan pajak disampaikan secara online
22	Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Frekuensi intensifikasi	12	12	100	673.800.000	523.259.434	78	100	Tidak bisa maksimal terkendala pandemi covid mengurangi kegiatan kerumunan	Kegiatan Intensifikasi di Pantau secara online
23	Pemberian Penghargaan Pajak Daerah	Jumlah jenis hadiah pajak daerah	110	110	100	850.000.000	469.456.875	55	100	Penyediaan reward desa lunas sehingga kegiatan ini bersifat penjagaan/penyediaan	Menggalakkan desa lunas pajak, Agar masyarakat antusias membayar pajak
24	Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD	frekuensi pembinaan	2	2	100	200.000.000	181.250.575	91	100		
25	Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame	frekuensi penertiban	12	12	100	40.000.000	24.093.750	60	100		
26	Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	banyaknya peraturan bupati yang tersusun	2	2	100	33.500.000	28.332.475	85	100		
27	Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	frekuensi rapat/sosialisasi	1	1	100	25.000.000	23.050.300	92	100		
28	Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	frekuensi rapat koordinasi	12	12	100	323.900.000	272.164.175	84	100		
29	Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten	frekuensi pengelolaan	12	12	100	87.956.600	76.831.700	87	100		
30	Rekonsiliasi Aset Daerah	Jumlah unit pengelola barang (UPB) yang direkonsiliasi	101	101	100	280.000.000	225.417.750	81	100		
31	Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Unit Pengelola Barang	930	930	100	1.746.000.000	1.662.745.699	95	100		
32	Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten	Jumlah sertifikat tanah	15	15	100	606.500.000	409.377.320	67	100		
33	Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dibayar	244	244	100	35.000.000	34.970.475	100	100		
34	Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah pengurus barang yg terbina	930	930	100	750.000.000	575.666.450	77	100		
35	Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah	Jumlah jenis dokumen/laporan	12	12	100	78.678.750	74.419.000	95	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
36	Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	frekuensi koordinasi pengelolaan keuda	1	1	100	120.427.800	103.288.605	86	100		
37	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)	Jumlah jenis dokumen	2	2	100	150.000.000	120.245.000	80	100		
38	Pengelolaan Data Keuangan Daerah	frekuensi pengelolaan pembiayaan daerah	12	12	100	121.000.000	113.080.350	93	100		
39	Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah aplikasi (SIM)	5	5	100	595.380.000	350.121.950	59	100	Sehubungan dengan adanya perubahan sistem baru	Penyesuaian Sistem di tahun 2021
	<b>TOTAL</b>					<b>15.089.727.472</b>	<b>12.837.955.007</b>				

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

**URUSAN : PENUNJANG PEMERINTAHAN URUSAN KEPEGAWAIAN DAN URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>BKPPD</b>											
<b>I</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>329.912.959</b>	<b>322.541.060</b>	<b>97,77</b>	<b>97</b>		
1	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	8350	8350	100	24.000.000	24.000.000	100,00	94		
2	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang tersedia	71	71	100	48.000.000	45.388.900	94,56	98		
3	Penyediaan Brg cetakan & Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	10	10	100	57.000.000	54.465.000	95,55	95		
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	2200	1500	68	65.000.000	64.559.000	99,32	99		
5	Rapat Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	222	130	59	95.912.959	94.528.160	98,56	99		
6	Rapat Rapat Koordinasi & Konsultasi dalam Daerah	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	300	200	67	35.000.000	34.650.000	99,00	99		
7	Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan	Jumlah Dokumen yang disusun	2	2	100	5.000.000	4.950.000	99,00	95		
<b>II</b>	<b>Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik</b>	<b>94</b>	<b>89</b>	<b>95</b>	<b>515.000.000</b>	<b>477.375.696</b>	<b>92,69</b>	<b>100</b>		
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	4	3	75	68.000.000	58.355.500	85,82	100		
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	40	29	73	250.000.000	239.124.000	95,65	100		
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	19	19	100	75.000.000	59.506.196	79,34	99		
4	Pemelhn Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Ktr	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	17	17	100	22.000.000	21.215.000	96,43	99		
5	Pemelhn Rtn / Berkala Peralatan Gedung Ktr	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	97	97	100	100.000.000	99.175.000	99,18	100		
<b>III</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Prosentase informasi kepegawaian yang akurat Prosentase Pengembangan Aparatur Prosentase Pelanggaran Disiplin</b>	<b>31,06</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>2.467.000.000</b>	<b>2.045.598.331</b>	<b>82,92</b>	<b>89</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah Calon ASN	879	728	83	1.500.000.000	1.190.871.582	79,39	99		
2	Penempatan PNS	Jumlah ASN yang ditempatkan (mutasi)	50	50	100	215.000.000	204.223.250	94,99	95	Pemetaan PNS belum dapat dilakukan sehingga kebutuhan (kekurangan/ kelebihan ) PNS belum dapat diketahui secara pasti	Merencanakan pemetaan PNS di semua SKPD pada tahun 2020
3	Pengembangan Simpeg Daerah	Jumlah aplikasi yang dibuat	1	1	100	52.520.000	51.756.432	98,55	95		
4	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencana	20	20	100	14.000.000	12.985.700	92,76	100		
5	Proses Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah Kasus yang ditangani	10	10	100	70.000.000	68.775.750	98,25	80	Penanganan pelanggaran disiplin baru menyentuh pada pelanggaran disiplin yang dilaporkan ke BKPPD sedangkan pelanggaran disiplin yang sifatnya ringan seperti pelanggaran jam kerja, pakaian dinas dan lain-lain belum disentuh	Meningkatkan cakupan pembinaan disiplin
6	Monitoring dan inspeksi Mendadak PNS	Jumlah monitoring dan sidak yang dilaksanakan	55	55	100	50.000.000	35.301.538	70,60	90		
7	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Jumlah Arsip yang dikelola	500	470	94	29.940.000	26.860.226	89,71	95		
8	Penyelesaian Administrasi Tugas Belajar, ijin Belajar dan Ijin Gelar	Jumlah PNS yang menyelesaikan tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar	280	178	64	50.000.000	38.083.020	76,17	80		
9	Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas kenaikan pangkat	25	9	36	30.000.000	15.195.000	50,65	98		
10	Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang mengikuti ujian KP penyesuaian ijazah	20	0	0	20.000.000	12.737.000	63,69	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
11	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap	Jumlah SK Kenaikan Pangkat	1300	1294	100	70.000.000	67.796.750	96,85	100		
12	Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS Kab Klaten	Jumlah PNS yang pensiun	841	920	109	40.000.000	37.850.250	94,63	90		
13	Pengangkatan CPNS ke PNS dan penjarangan gaji	Jumlah CPNS yang diangkat PNS, Penjarangan gaji, sumpah janji, SK Kenaikan Gaji Berkala	2200	1600	73	65.000.000	59.328.000	91,27	95		
14	Penyelaian LKHPN bagi Pejabat Struktural	Jumlah penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaan	750	284	38	15.000.000	13.295.980	88,64	100		
15	Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian	Jumlah kartu identitas kepegawaian yang diterbitkan	260	260	100	40.000.000	38.853.040	97,13	90		
16	Evaluasi Kinerja	Jumlah OPD yang di evaluasi	5	5	100	5.000.000	4.617.500	92,35	100	Masih perlu evaluasi terkait sistem absensi elektronik	Mengalokasikan anggaran untuk melengkapi aplikasi pendukung absensi elektronik
17	Pemutakhiran Data Kepegawaian	Jumlah data PNS yang dimutakhirkan	5500	5500	100	104.540.000	99.757.193	95,42	96		
18	Penyusunan Formasi Kepegawaian	Jumlah Formasi ASN	879	879	100	40.000.000	39.305.620	98,26	100		
19	Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah Laporan	1	1	100	56.000.000	28.004.500	50,01	77		
20	Pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)	Jumlah pegawai yang dikelola	0	0	0	-	-	0,00	0		
<b>IV</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Prosentase ASN yang mengikuti/ Lulus uji kompetensi</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>894.864.230</b>	<b>85,23</b>	<b>74</b>		
1	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah CPNSD yang mengikuti diklat prajabatan	41	41	100	170.000.000	127.300.100	74,88	95		



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Pendidikan & Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklatpim	0	0	0	50.000.000	48.957.800	97,92	90	Masih banyak Pejabat administrator dan pengawas yang belum memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural dikarenakan keterbatasan anggaran	Mengusulkan alokasi anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
3	Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan Pelatihan teknis tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20	20	100	370.000.000	351.806.400	95,08	90	Pengembangan kompetensi PNS berupa pelatihan selama 20 JP per tahun per PNS sesuai amanat PP 11 tahun 2017 belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran	Mengusulkan alokasi anggaran untuk kegiatan manajemen pendidikan dan pelatihan bagi PNS daerah
4	Pendidikan & Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	50	50	100	50.000.000	44.932.950	89,87	55		
5	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	0	0	0	-	-	0,00	0		
6	Uji Kompetensi Jabatan	Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi jabatan	100	72	72	400.000.000	312.506.980	78,13	90		
7	Pembekalan PNS yang akan memasuki Purna Tugas	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	40	0	0	10.000.000	9.360.000	93,60	100		
<b>TOTAL</b>						<b>4.361.912.959</b>	<b>3.740.379.317</b>	<b>85,75</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

---

**URUSAN : PENUNJANG PEMERINTAHAN URUSAN PERENCANAAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>BAPPEDA</b>											
I	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>1.Jumlah Peserta yang mengikuti lomba krenova</b>	30	5	17	500.000.000	447.791.185	90	17	-	-
		<b>2.Jumlah kebijakan inovasi yang ditetapkan Daerah</b>	19	34	100				100	-	-
	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah lembaga koordinasi, volume koordinasi forum litbang	8	8	100	80.000.000	74.996.999	94	100	-	-
	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah kegiatan kelitbangan	10	10	100	150.000.000	137.162.686	91	100	-	-
	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah pengembangan SIDa	3	3	100	80.000.000	78.374.000	98	100	-	-
	Penelitian Perspektif Masyarakat terhadap Kualitas Pembangunan	Jumlah penelitian	1	1	100	190.000.000	157.257.500	83	100	-	-
	<b>TOTAL</b>					<b>500.000.000</b>	<b>447.791.185</b>	<b>90</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------

No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------



No	Uraian Prog/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
----	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------------------